

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2019**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar Tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKjIP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen laporan yang menggambarkan capaian yang diperoleh dalam menjalankan program kegiatan pokok sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan melalui dokumen RPJMD 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian program dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat regional dan nasional secara keseluruhan.

LKjIP Kabupaten Banjar Tahun 2018 ini merupakan laporan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Terdapat berbagai kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan, namun juga tidak seluruh harapan yang diinginkan melalui target pembangunan daerah dapat dicapai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar agar lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan Kabupaten Banjar bagi Pemerintah di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Martapura, Maret 2019

Bupati Banjar,



H. KHALILURRAHMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Prioritas Daerah Kabupaten Banjar	3
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah.....	3
1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar.....	9
1.4.3. Rencana Strategis.....	13
1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar	18
1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar.....	26
1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2018	35
1.5. Sistematisasi Penyusunan LkjIP Kabupaten Banjar	38
BAB 2	40
PERENCANAAN KINERJA	40
2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2018.....	40
2.2. Rencana Anggaran Masing-masing Sasaran Tahun 2018.....	46
BAB 3	52
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.....	52
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2018.....	53
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	59
3.2.1. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama	59
3.2.2. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al- Quran Peserta Didik	74
3.2.3. Berkurangnya Pelanggaran Perda Kearifan Lokal	78
3.2.4. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah.....	83

3.2.5. Meningkatnya Budaya Baca Pelajar Dan Masyarakat	116
3.2.6. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni Dan Budaya.....	119
3.2.7. Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan Dan Kematian Bayi	124
3.2.8. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk Dan Gizi Kurang	137
3.2.9. Terkendalinya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	142
3.2.10. Meningkatnya Mutu Pelayanan Di RSUD.....	146
3.2.11. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	149
3.2.12. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial.....	158
3.2.13. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	165
3.2.14. Meningkatnya Mitigasi Bencana	171
3.2.15. Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan Dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda.....	183
3.2.16. Meningkatnya Perilaku Berolah Raga Di Masyarakat.....	187
3.2.17. Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan.....	190
3.2.18. Meningkatnya Kualitas Hasil Industri Pengolahan Perkebunan Dan Perikanan	216
3.2.19. Meningkatnya Ketersediaan Dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.....	220
3.2.20. Meningkatnya Investasi Daerah.....	234
3.2.21. Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah	237
3.2.22. Meningkatnya Kualitas Lingkungan.....	242
3.2.23. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat.....	268
3.2.24. Mengembangkan Kepariwisata Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	282
3.2.25. Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	291
3.2.26. Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas Dan Terintegrasi.....	294
3.2.27. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika	305



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

3.2.28. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan	307
3.2.29. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Permukiman Dan Perumahan Yang Layak	316
3.2.30. Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal.....	322
3.2.31. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal	328
3.2.32. Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas.....	345
3.2.33. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efesien Dan Efektif.....	427
3.2.34. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	436
3.3. Realisasi Anggaran	443
BAB 4	452
PENUTUP	452
LAMPIRAN	457

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan	4
Tabel 1. 2.	Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun 2012-2017	6
Tabel 1. 3.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2017	7
Tabel 1. 4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 1. 5.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dan Jenis Jabatan.....	13
Tabel 1. 6.	Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 1. 7.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar.....	18
Tabel 1. 8.	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2018	35
Tabel 2. 1.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	40
Tabel 2. 2.	Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2018.....	46
Tabel 3. 1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	53
Tabel 3. 2.	Pencapaian IKU Bupati Tahun 2018	53
Tabel 3. 3.	Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengamalan Nilai Nilai Agama	60
Tabel 3. 4.	Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kawasan Santri yang Diberdayakan.....	61
Tabel 3. 5.	Capaian Indikator Penurunan Jumlah Kasus Kriminal Tahun 2018.....	66
Tabel 3. 6.	Perkembangan Kasus Narkoba di Kabupaten Banjar Tahun 2015 s/d 2018.....	66
Tabel 3. 7.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dana BAZ yang Tersalurkan Tahun 2018.....	70
Tabel 3. 8.	Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2018	71
Tabel 3. 9.	Realisasi dan Capaian Sasaran Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an Peserta Didik.....	74
Tabel 3. 10.	Realisasi dan Capaian Sasaran Berkurangnya Pelanggaran PERDA Kearifan Lokal.....	79
Tabel 3. 11.	Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda Berkearifan Lokal.....	79
Tabel 3. 12.	Capaian Program / Kegiatan Pendukung Sasaran.....	81
Tabel 3. 13.	Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Patisipasi Sekolah Tahun 2018	84
Tabel 3. 14.	Perbandingan Realisasi APM SD/MI/SDLB.....	86

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Tabel 3. 15. Perbandingan Realisasi APM SMP/MTs/SMPLB	88
Tabel 3. 16. Perbandingan Realisasi APK SD/MI/SDLB	90
Tabel 3. 17. Perbandingan Realisasi APK SMP/MTs/SMPLB	92
Tabel 3. 18. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar	96
Tabel 3. 19. Perbandingan Realisasi APK PAUD antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2018	110
Tabel 3. 20. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat Kab. Banjar Tahun 2018	116
Tabel 3. 21. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni dan Budaya	120
Tabel 3. 22. Tugas dan Jenis Layanan Satgas Desa	124
Tabel 3. 23. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi	126
Tabel 3. 24. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2012-2018	128
Tabel 3. 25. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Bayi.....	130
Tabel 3. 26. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	138
Tabel 3. 27. Perbandingan Realisasi Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Terhadap Provinsi dan Nasional	138
Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Terkendalinya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular.....	143
Tabel 3. 29. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan di RSUD	146
Tabel 3. 30. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	149
Tabel 3. 31. Program / kegiatan DISNAKERTRANS Tahun 2018 per sasaran	149
Tabel 3. 32. Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021 (Orang)	153
Tabel 3. 33. Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan dan Penempatan Tahun 2018.....	154
Tabel 3. 34. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial.....	158
Tabel 3. 35. Capain Program dan Kegiatan Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	162
Tabel 3. 36. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	166
Tabel 3. 37. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana	171
Tabel 3. 38. Capaian Program dan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	176

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Tabel 3. 39. Capaian Program Dan Kegiatan Tanggap Darurat.....	181
Tabel 3. 40. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda	184
Tabel 3. 41. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda	187
Tabel 3. 42. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan	190
Tabel 3. 43. Data Realisasi Produksi Komoditas Prioritas Padi Sawah Tahun 2018.....	191
Tabel 3. 44. Realisasi Indikator Produksi Padi Sawah Tahun 2013 s/d 2018	192
Tabel 3. 45. Realisasi Produksi Komoditas Prioritas Padi Ladang Tahun 2018	193
Tabel 3. 46. Realisasi Produksi Komoditas Prioritas Padi Ladang Tahun 2018	193
Tabel 3. 47. Indikator Kinerja Persentase Luasan Pertanian Yang Terlayani Air Irigasi	202
Tabel 3. 48. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan Kab. Banjar Tahun 2018.....	217
Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan pola Konsumsi Pangan Masyarakat	221
Tabel 3. 50. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	224
Tabel 3. 51. Target dan realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Urusan Wajib Urusan	232
Tabel 3. 52. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Insvestasi Daerah	234
Tabel 3. 53. Daftar Perusahaan Daerah di Kabupaten Banjar	238
Tabel 3. 54. Realisasi Dan Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah Tahun 2018	239
Tabel 3. 55. Capaian Program / Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 Sasaran Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah.....	240
Tabel 3. 56. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	242
Tabel 3. 57. Perbandingan Capaian Kinerja Sampah Terolah Dengan Target RPJMD	245
Tabel 3. 58. Perbandingan Target Kabupaten 3ang Lebih Tinggi Dibanding Dengan Target Provinsi	245

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Tabel 3. 59. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan	248
Tabel 3. 60. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan	252
Tabel 3. 61. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air.....	254
Tabel 3. 62. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan	261
Tabel 3. 63. Hasil pengujian kualitas udara tahun 2016-2018	264
Tabel 3. 64. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan	265
Tabel 3. 65. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat Tahun 2018.....	268
Tabel 3. 67. Ekspor Karet Kabupaten Banjar Tahun 2012 – 2016	278
Tabel 3. 68. Realisasi dan Capaian Sasaran Mengembangkan Kepariwisata Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2018.....	283
Tabel 3. 69. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	292
Tabel 3. 70. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	295
Tabel 3. 71. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	307
Tabel 3. 72. Realisasi Kegiatan Pengawasan Dan Pemantauan Terhadap Kondisi Dermaga Tahun 2018.....	309
Tabel 3. 73. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	314
Tabel 3. 74. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan yang layak Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	316
Tabel 3. 75. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal Kabupaten Banjar Tahun 2018	322
Tabel 3. 76. Rencana dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal Tahun 2018	329
Tabel 3. 77. Kinerja Kegiatan Berdasarkan Kelompok	331

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Tabel 3. 78. Lima Kinerja Kegiatan Terendah Pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/RSUD Ratu Zaleha	332
Tabel 3. 79. Lima Kinerja Terendah Pada Kecamatan	332
Tabel 3. 80. Jenis Hukuman dan Jumlah Pns Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Tahun 2018	333
Tabel 3. 81. Jumlah Jabatan berdasarkan kompetensi Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	335
Tabel 3. 82. Realisasi dan Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2018	345
Tabel 3. 83. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (Fisik dan Keuangan) SKPD Kab. Banjar Tahun 2018.....	349
Tabel 3. 84. Capaian Program dan Kegiatan Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten dan SKPD.....	356
Tabel 3. 85. Capaian program dan kegiatan Persentase Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang Diakomodir dalam RKPD...	357
Tabel 3. 86. Capaian Program dan kegiatan Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD.....	360
Tabel 3. 87. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2018.....	369
Tabel 3. 88. Capaian indikator Tingkat Muturitas SPIP.....	372
Tabel 3. 89. Capaian Indikator Tingkat Kapabilitas APIP	374
Tabel 3. 90. Capaian Indikator Prosentasi Temuan yang Ditindaklanjuti	375
Tabel 3. 91. Capaian indikator Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2018.....	377
Tabel 3. 92. Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kab. Banjar Tahun 2018.....	380
Tabel 3. 93. Indikator Pendukung Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kab. Banjar Tahun 2018.....	382
Tabel 3. 94. Indikator Kinerja Nilai Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah	386
Tabel 3. 95. Capaian Kinerja Pendukung Pendapatan Daerah.....	390
Tabel 3. 96. Data Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari Pajak Air Tanah	393
Tabel 3. 97. Data Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dll.....	395
Tabel 3. 98. Daftar Perda Yang Memiliki Sangsi di Kab. Banjar	398
Tabel 3. 99. Realisasi dan capaian Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tahun 2018.....	401

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Tabel 3.100. Angka Pelanggaran Perda per Jenis Kasus Pelanggaran Tahun 2018.....	402
Tabel 3.101. Program dan Kegiatan Pendukung Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tahun 2018.....	404
Tabel 3.102. Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Yang Ditangani Tahun 2018.....	406
Tabel 3.103. Jumlah kasus dan penyelesaian kejadian gangguan trantibum tahun 2018	407
Tabel 3.104. Persentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang Ditangani Tahun 2018.....	409
Tabel 3.105. Indikator Kinerja Persentase Produk Hukum yang Dibahas dan Mendapat Persetujuan	413
Tabel 3.106. Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Rapat Dewan Tepat Waktu.....	416
Tabel 3.107. Indikator Kinerja Jumlah Linmas Desa/kelurahan Per Jumlah Desa/kelurahan	418
Tabel 3.108. Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Berbanding Jumlah Desa/Kelurahan Pada Tahun 2018	419
Tabel 3.109. Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2018.	420
Tabel 3.110. Indikator Kinerja Persentase FKDM, FKUB, FK, dan PPWK tingkat Kab/Kec/Desa dan kelurahan yang Aktif	424
Tabel 3.111. Indikator dan Sasaran Terwujudnya kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif.....	428
Tabel 3.112. SKPD Yang Melaksanakan dan Melaporan SPM Kab.Banjar Tahun 2018.....	429
Tabel 3.113. Indikator Laporan SPM Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	430
Tabel 3.114. Perangkat Daerah berdasarkan Analisis Beban Kerja	431
Tabel 3.115. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kab. Banjar Tahun 2018.....	436
Tabel 3.116. Rekapitulasi Presentase Kenaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 dan 2018.....	440
Tabel 3.117. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	444
Tabel 3.118. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	450

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2017	8
Gambar 3. 1.	Tingkat Capaian IKU Tahun 2018	59
Gambar 3. 2.	Grafik Perkembangan Kasus Kriminal di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018.....	67
Gambar 3. 3.	Prosentase Peserta Didik SD dan SMP yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Baca Tulis Al Quran Tahun 2016 - 2018	76
Gambar 3. 4.	Kasus Pelanggaran Perda Berkearifan Lokal Periode Tahun 2015 s/d 2018	80
Gambar 3. 5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018	86
Gambar 3. 6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018	88
Gambar 3. 7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018	90
Gambar 3. 8.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018	92
Gambar 3. 9.	Perbandingan Realisasi APK SMP/MTs/SMPLB	93
Gambar 3. 10.	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs/SMPLB di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018	94
Gambar 3. 11.	Angka Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018	96
Gambar 3. 12.	Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah SDN Pasar Kamis 1, Kertak Hanyar	97
Gambar 3. 13.	Pembangunan ruang kelas baru SDN Pulau Nyiur 2, Karang Intan.....	98
Gambar 3. 14.	Pembangunan Ruang Guru SDN Paau, Aranio	98
Gambar 3. 15.	Pembangunan Pagar Halaman SDN Danau Salak 1, Astambul	99
Gambar 3. 16.	Pengurungan Halaman SDN Keliling Benteng Tengah, Martapura Barat	99
Gambar 3. 17.	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary WC Guru dan Siswa SDN Sungai Uyak, Sambung Makmur	100
Gambar 3. 18.	Pengadaan Meubeler SD Tahun 2018	101
Gambar 3. 19.	Rehabilitasi Berat SDN Tatah Pemangkih Baru, Tatah Makmur.....	102

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Gambar 3. 20.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Tahun 2018	102
Gambar 3. 21.	Sosialisasi Ujian Nasional Paket B dan C se Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	105
Gambar 3. 22.	Sosialisasi Ujian Nasional Paket B dan C se Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	106
Gambar 3. 23.	Sosialisasi Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2018.....	108
Gambar 3. 24.	Kegiatan Validasi Data Kecamatan Dinas Pendidikan Kab. Banjar Tahun 2018	108
Gambar 3. 25.	Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018.....	109
Gambar 3. 26.	Sosialisasi BOP PAUD.....	112
Gambar 3. 27.	Meningkatnya Mitigasi Bencana	112
Gambar 3. 28.	Kegiatan Festival Kreativitas Anak.....	113
Gambar 3. 29.	Kegiatan Hari Aksara Internasional Tahun 2018.....	113
Gambar 3. 30.	Workshop Penilik, Pengawas, Petugas Lapangan PAUDNI dan Pamong Belajar Tahun 2018.....	114
Gambar 3. 31.	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Kab. Banjar tahun 2018	114
Gambar 3. 32.	AKI Kabupaten Banjar Tahun 2012-2017	127
Gambar 3. 33.	Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR) Tahun 2016 - 2018	132
Gambar 3. 34.	Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan.....	134
Gambar 3. 35.	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Sekolah..	134
Gambar 3. 36.	Promosi dan Informasi berupa Pamphlet KB	135
Gambar 3. 37.	Acara Sosialisasi Satgas Desa oleh Kepala Dinas Kesehatan	139
Gambar 3. 38.	Pelayanan di Posbindu PTM.....	143
Gambar 3. 39.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilayani Tahun 2016 – 2018	160
Gambar 3. 40.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilayani Tahun 2016 – 2018	161
Gambar 3. 41.	Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	167
Gambar 3. 42.	Persentase Kelurahan Layak Anak Tahun 2016-2018....	169
Gambar 3. 43.	Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana.....	173
Gambar 3. 44.	Sosialisasi PRB di Desa Tanah Habang Kecamatan Mataraman.....	173

Gambar 3. 45.	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan FPBBM Kec. Martapura Barat, Kec. Martapura Timur dan Kec. Astambul	174
Gambar 3. 46.	Sosialisasi Pengembangan Desa Tangguh Bencana ...	174
Gambar 3. 47.	Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla	175
Gambar 3. 48.	Apel Siaga B Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabut Asap akibat Karhutla.....	175
Gambar 3. 49.	Gladi Penanggulangan Bencana Bertempat di Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk	176
Gambar 3. 50.	In House Training Dapur Umum Lapangan.....	178
Gambar 3. 51.	In House Training Scuba Diving	179
Gambar 3. 52.	In House Training Tim Reaksi Cepat	179
Gambar 3. 53.	In House Training Tim Reaksi Cepat	180
Gambar 3. 54.	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Olahraga Tahun 2016-2018.....	188
Gambar 3. 55.	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani berupa kegiatan olahraga sepak bola dan Volly	189
Gambar 3. 56.	Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Antasan	205
Gambar 3. 57.	Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap	205
Gambar 3. 58.	Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Handil Jawa	206
Gambar 3. 59.	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Perusahaan Daerah Selama Kurun Waktu 2016-2018.....	239
Gambar 3. 60.	Perbandingan Pendanaan RPJMD 2016-2021 Dan Realisasinya Pada Tahun 2018	244
Gambar 3. 61.	Grafik Perbandingan Pendanaan RPJMD 2016-2021 Dan Realisasinya Pada Tahun 2018	244
Gambar 3. 62.	Persentase Sampah yang Terolah di TPA (%)	245
Gambar 3. 63.	Grafik Indikator Sampah Terolah di TPA	246
Gambar 3. 64.	Realisasi Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.....	250
Gambar 3. 65.	Grafik Realisasi Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	250
Gambar 3. 66.	Diagram Komparatif Target 2018, 2021 dan Target Nasional Terhadap Realisasi 2016,2017 dan 2018.....	251
Gambar 3. 67.	Diagram Komparatif Target 2018, 2021 dan Target Nasional Terhadap Realisasi 2016,2017 dan 2018 diperbandingkan dengan target RPJMD 2016-2021	251

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Gambar 3. 68.	Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018	253
Gambar 3. 69.	Grafik Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018.....	253
Gambar 3. 70.	Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Pada Tahun 2018	254
Gambar 3. 71.	Pengukuran Kualitas Air Pengukuran Pada 12 Titik Samping Sungai Tahun 2016 s.d. 2018	255
Gambar 3. 72.	Hasil Pengujian Kualitas Air.....	256
Gambar 3. 73.	Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018	262
Gambar 3. 74.	Diagram Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018	262
Gambar 3. 75.	Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2018.....	263
Gambar 3. 76.	Diagram Realisasi Capaian Kualitas Udara Tahun 2018	264
Gambar 3. 77.	Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 dengan Anggaran 2018	266
Gambar 3. 78.	Diagram Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 dengan Anggaran 2018	267
Gambar 3. 79.	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyedia Permodalan.	271
Gambar 3. 80.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	273
Gambar 3. 81.	Rapat Tim Monitoring, Evaluasi dan Kredit Program	274
Gambar 3. 82.	Rapat Tim Monitoring, Evaluasi dan Kredit Program	275
Gambar 3. 83.	Ekspor Produk Karet Kabupaten Banjar	277
Gambar 3. 88.	Pemasangan Baliho Promosi Wisata.....	286
Gambar 3. 89.	Sosialisasi Sadar Wisata Kepada Masyarakat	287
Gambar 3. 90.	Pendataan Pariwisata di Kabupaten Banjar.....	288
Gambar 3. 91.	Pameran Batam Investment, Tourism and Trade Expo 2017	290
Gambar 3. 92.	Pameran Festival Budaya pasar Terapung.....	290
Gambar 3. 93.	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Danau Salak – Pematang Danau (R.014)	299
Gambar 3. 94.	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Keliling Benteng – Antasan Sutun (R.047)	300
Gambar 3. 95.	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Keliling Benteng – Lok Buntar (R.092)	300
Gambar 3. 96.	Rekonstruksi Jembatan Sungai Jati Kecamatan Mataraman.....	304
Gambar 3. 98.	Tambat Kapal Kec. Aranio Desa Tiwingan Lama.....	311
Gambar 3. 99.	Tambat Kapal Kecamatan Sungai Tabuk.....	311

Gambar 3. 100. Tambat Kapal Depan Kantor Camat Aluh-Aluh.....	312
Gambar 3. 101. Tangga pada Tambat Kapal Depan Kantor Camat Aluh-Aluh	312
Gambar 3. 102. Tambat Kapal Kecamatan Astambul.....	313
Gambar 3. 103. Tambat Kapal Kecamatan Martapura Barat Desa Keliling Benteng Ulu.....	313
Gambar 3. 104. Realisasi Pekerjaan BPS dengan Progress 0 %, 30 % dan 100 % Ta. 2018 di Kabupaten Banjar	319
Gambar 3. 105. Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Simpang Empat.....	325
Gambar 3. 106. Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Pengaron	325
Gambar 3. 107. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan	327
Gambar 3. 108. Peningkatan SPAM Desa Paku Kecamatan Simpang Empat.....	327
Gambar 3. 109. Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan	327
Gambar 3. 110. Pengembangan Jaringan Perpipaan Handil Kabua Kelurahan Gambut	328
Gambar 3. 111. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	334
Gambar 3. 112. Kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis	339
Gambar 3. 113. Kegiatan Pengembangan Kompetensi	340
Gambar 3. 114. Kegiatan Penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional	342
Gambar 3. 115. Jilid Permohonan Akta Kelahiran dan Jilid Permohonan Akta Kematian Tahun 2018.....	362
Gambar 3. 116. Salah Satu Pelayanan Akta Kelahiran Keliling di Desa Pemangkih Darat.....	363
Gambar 3. 117. Salah satu pelayanan akta kelahiran keliling di Desa Pemangkih Darat.....	364
Gambar 3. 118. Sosialisasi Mengenai Penerbitan Kartu Keluarga Format Baru di Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan tgl 19-20 Oktober 2018.....	365
Gambar 3. 119. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengembangan Wawasan tentang Pelaksanaan Pelayanan KIA ke Disdukcapil Kab. Kapuas, Prov. Kalteng tgl 16 Nop 2018	366
Gambar 3. 120. Salah Satu Baliho yang Dibuat Untuk Menggantikan Baliho yang Ada di Kecamatan.....	367
Gambar 3. 121. Cover Profil Perkembangan Kependudukan Kecamatan	367

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Gambar 3. 122. Foto-foto Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Tahun 2018	369
Gambar 3. 123. Bupati Banjar H Khalilurrahman Menerima Penghargaan Dari Bpk RI	381
Gambar 3. 124. Grafik Pendapatan Daerah Kab. Banjar Tahun 2016 - 2018	387
Gambar 3. 125. Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Penanganannya di Kab. Banjar Tahun 2016 -2018	401

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Teknis penyusunan pelaporan kinerja diatur lebih lanjut melalui permenpan nomor 53 tahun 2014.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran yang juga merupakan indikator kinerja utama kabupaten, dalam tataran pelaksanaannya indikator tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing SKPD sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi yang diemban.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Laporan LKjIP tahun 2018 yang disusun saat ini merupakan laporan pelaksanaan tahun ke dua dari periode RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, nantinya akan digambarkan sejauh mana pencapaian indikator-indikator dari sasaran srategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar, dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja bupaten Banjar dalam mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
 5. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 05);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Prioritas Daerah Kabupaten Banjar

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak Wilayah

Secara astronomi, Kabupaten Banjar terletak antara $2^{\circ} 49' 55''$ - $3^{\circ} 43' 38''$ pada garis Lintang Selatan dan $114^{\circ} 30' 20''$ hingga $115^{\circ} 35' 37''$ pada Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Banjar berada pada posisi yang strategis, yaitu berada di perlintasan antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

- a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara,
- b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur,
- c. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan;
- d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

1.4.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Banjar memiliki luas sebesar 4.668,50 Km² yang merupakan daerah dengan wilayah terluas ke empat setelah Kabupaten Kotabaru, Banjar dan Tabalong dan dengan jumlah

kecamatan (19 kecamatan) serta desa/kelurahan terbanyak (277 desa dan 13 kelurahan). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Lebih rinci luas kecamatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Aluh-Aluh	82,48	1,77
2.	Beruntung Baru	61,42	1,32
3.	Gambut	129,30	2,77
4.	Kertak Hanyar	45,83	0,98
5.	Sungai Tabuk	147,30	3,16
6.	Martapura	42,03	0,90
7.	Martapura Timur	29,99	0,64
8.	Martapura Barat	149,38	3,20
9.	Astambul	216,50	4,64
10.	Karang Intan	215,35	4,61
11.	Aranio	1.166,35	24,98
12.	Sungai Pinang	458,65	9,82
13.	Paramasan	560,85	12,01
14.	Pengaron	433,25	9,28
15.	Sambung Makmur	134,65	2,88
16.	Mataraman	148,40	3,18
17.	Simpang Empat	243,34	5,21
18.	Telaga Bauntung	158,00	3,38
19.	Aluh-Aluh	82,48	1,77
J u m l a h		4.668,50	100,00

Sumber : Statistik Pembangunan kabupaten Banjar 2015

1.4.1.3. Topografi

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 persen bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. Sisanya 5,39 persen bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 persen, dan 30-60 hanya 14,83 persen.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai tanah; Tanah organosol, glei humus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57 persen dari luas wilayah. Tanah Aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 persen. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 persen. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84 persen. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 persen.

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka di Kabupaten Banjar juga hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober - November.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Banjar tahun 2016 berkisar antara 22,60C – 34,90C, dengan suhu tertinggi 35,80C terjadi di bulan Januari 2016 dan suhu terendah 21,80C terjadi pada bulan Juli 2016. Sebagai daerah tropis, kelembaban udara di Kabupaten Banjar relatif tinggi dengan rata-rata 86 persen (berkisar 79% sampai 92%). Kelembaban maksimum terjadi pada Bulan Februari, sedangkan kelembaban minimum terjadi di Bulan Agustus.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2016 tercatat mencapai 228,10 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Agustus (94,8 mm) dan tertinggi pada bulan Neovember (458,6 mm). Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu sebanyak 23 hari.

1.4.1.4. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil sensus penduduk SP2010 pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Banjar mencapai 506.839 jiwa, meningkat sebanyak 94.901 jiwa atau 23,04 persen dibanding tahun 2000 yang hanya 411.938 jiwa. Jumlah tersebut akan terus meningkat berdasarkan penghitungan angka proyeksi periode tahun 2010-2017, jumlah penduduk Kabupaten Banjar akan meningkat sebesar 56.223 jiwa atau 11,09 persen menjadi 571.573 jiwa di tahun 2017.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar selama dua periode Sensus Penduduk tahun 2000-2010 adalah mencapai 2,11 persen per tahun, namun kemudian pada periode tahun 2010-2017 laju pertumbuhan penduduknya diperkirakan hanya tumbuh 1,51 persen per tahun.

Pada tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk periode sensus penduduk tahun 2013-2017 sangat bervariasi dimana enam kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi melebihi pertumbuhan Kabupaten adalah Kecamatan Paramasan, Sambung Makmur, Aranio, Martapura, Kertak Hanyar, Gambut, Tatah Makmur, Sungai Pinang, Simpang Empat yang masing-masing mencapai 2,80 Persen, 1,94 Persen, 1,83 persen, 1,82 persen, 1,69 persen, 1,65 persen, 1,58 persen, 1,58 persen, 1,58 Persen per tahun. Sedangkan kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Martapura Barat yang mencapai 1,07 Persen per tahun.

Tabel 1. 2. Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun 2012-2017

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aluh-Aluh	28.507,00	28.984,00	29.464,00	29.917,00	30.370,00
Beruntung Baru	13.782,00	13.985,00	14.185,00	14.375,00	14.559,00
Gambut	38.054,00	38.731,00	39.414,00	40.076,00	40.736,00
Kertak Hanyar	41.447,00	42.237,00	43.022,00	43.770,00	44.509,00
Tatah Makmur	11.646,00	11.847,00	12.052,00	12.248,00	12.442,00
Sungai Tabuk	59.540,00	60.455,00	61.358,00	62.208,00	63.041,00
Martapura	107.480,00	109.565,00	111.692,00	113.762,00	115.828,00
Martapura Timur	30.449,00	30.879,00	31.307,00	31.713,00	32.115,00
Martapura Barat	17.732,00	17.952,00	18.170,00	18.373,00	18.570,00
Astambul	34.618,00	35.088,00	35.534,00	35.940,00	36.334,00
Karang Intan	32.530,00	33.028,00	33.516,00	33.972,00	34.415,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aranio	8.727,00	8.899,00	9.074,00	9.241,00	9.410,00
Sungai Pinang	15.638,00	15.923,00	16.206,00	16.473,00	16.734,00
Paramasan	4.722,00	4.859,00	5.001,00	5.145,00	5.289,00
Pengaron	16.788,00	17.023,00	17.251,00	17.463,00	17.668,00
Sambung Makmur	12.048,00	12.308,00	12.567,00	12.819,00	13.068,00
Mataraman	24.739,00	25.071,00	25.397,00	25.700,00	25.994,00
Simpang Empat	34.596,00	35.221,00	35.839,00	36.424,00	37.000,00
Telaga Bauntung	3.289,00	3.342,00	3.394,00	3.443,00	3.91,00
JUMLAH	536.330,00	545.397,00	554.443,00	563.062,00	571.573,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2017 mencapai 122 jiwa per Km², sedangkan di tingkat kecamatan, yang paling tinggi ada di Kecamatan Martapura sebesar 2.756 jiwa per Km², disusul Martapura Timur 1071 jiwa per Km² dan Kertak Hanyar yang mencapai 971 jiwa per Km². Tingginya tingkat area pusat ibu kota dan menjadi bisnis roda perekonomian. Adapun wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Aranio yang mencapai 8 jiwa per Km², Kecamatan Paramasan 9 jiwa per Km² dan Kecamatan Telaga Bauntung yang hanya 22 orang per Km²

Tabel 1. 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar, Tahun 2017

Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Aluh-Aluh	82,48	30.370	368
Beruntung Baru	61,42	14.559	237
Gambut	129,3	40.736	315
Kertak Hanyar	45,83	44.509	971
Tatah Makmur	35,47	12.442	351
Sungai Tabuk	147,3	63.041	428
Martapura	42,03	115.828	2756
Martapura Timur	29,99	32.115	1071
Martapura Barat	149,38	18.570	124
Astambul	216,5	36.334	168
Karang Intan	215,35	34.415	160

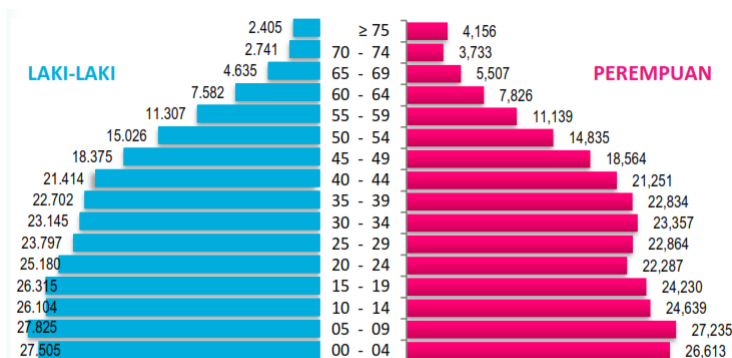
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Aranio	1.166,35	9.410	8
Sungai Pinang	458,65	16.734	36
Paramasan	560,85	5.289	9
Pengaron	433,25	17.668	41
Sambung Makmur	134,65	13.068	97
Mataraman	148,4	25.994	175
Simpang Empat	453,3	37.000	82
Telaga Bauntung	158	3.91	22
JUMLAH	4668,5	571.573	122

Salah satu penyebab belum meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Banjar dilatarbelakangi oleh letak geografis yang cukup sulit di beberapa daerah, misalnya di kecamatan aranio, kecamatan telaga bauntung dan kecamatan paramasan, dengan medan yang cukup sulit, transportasi yang sulit dan fasilitas yang kurang memadai menyebabkan penduduk sulit berkembang dan sebagian memilih migrasi keluar untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Berdasarkan hasil proyeksi SP2010, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2017 berbentuk piramida yang mengecil ke atas, artinya secara struktur umur penduduk di Kabupaten Banjar sudah cukup baik karena jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan non produktif, hal ini merupakan aset besar dalam pembangunan jika mampu dibina dengan baik.

Gambar 1. 1. Piramida Penduduk Kabupaten Banjar, Tahun 2017



Sumber : BPS Kab Banjar, Proyeksi SP2010

Hal yang cukup menarik dari komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tabel diatas adalah di rentang usia 0-64 tahun

yang merupakan usia muda sampai dengan usia produktif nampak bahwa penduduk laki-laki mempunyai jumlah yang lebih besar dibanding perempuan (kecuali pada kelompok umur 30-34 tahun). Namun pada kelompok umur tua 64 tahun ke atas terlihat bahwa semakin bertambahnya umur semakin didominasi oleh penduduk perempuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan lebih dapat bertahan hidup hingga usia tua dibanding laki-laki.

1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banjar

1.4.2.1. Kewenangan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan Kabupaten Banjar sebagai daerah otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, system administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan tersebut terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 7 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib pelayanan dasar terdiri :
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 6. Sosial

- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
 1. Tenaga Kerja
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 3. Pangan
 4. Pertanian

5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Kebudayaan
16. Perpustakaan
17. Kearsipan

c. Urusan Pilihan terdiri dari :

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Energi dan Sumberdaya Mineral
5. Perdagangan
6. Perindustrian
7. Transmigrasi

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari :

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan;
5. Kepegawaian

1.4.2.2. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Banjar yang lebih sejahtera. Visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 adalah Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025. Sedangkan visi Bupati Banjar Tahun 2016 -2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah.

1.4.2.3. Struktur Organisasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekterariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Pemukiman
8. Dinas Pertanahan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Pemuda dan Olah Raga
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Perikanan

25. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
26. Dinas Peternakan dan Perkebunan
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan sumber Daya Manusia
29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Kecamatan Sebanyak 20 Buah
33. Staf Ahli Sebanyak 3 Bidang
34. Tugas pembantuan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang menjadi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.2.4. Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Banjar merupakan satu dari tiga belas kabupaten/kota di provinsi Kalimantan selatan, dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 1959, pada periode 2016-2021 ini kabupaten Banjar di pimpin oleh Bupati KH. Khalilurrahman didampingi wakil bupati H. Saidi Mansyur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati tersebut, pemerintah kabupaten banjar didukung oleh aparaturnya pemerintah dengan jumlah 6899 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 2996 dan perempuan sebanyak 3903 orang Pegawai tersebut tersebar di perangkat daerah, dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Tabel 1. 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi dan Jenis Kelamin

Dinas/Instansi Pemerintah		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat Daerah	72	64	136
2.	Sekretariat DPRD Kab. Banjar	25	17	42
3.	Dinas-Dinas Daerah	568	433	1001
4.	Lembaga Teknis Daerah	386	420	806
5.	Pemerintah Kecamatan	268	54	322
6.	Pemerintah Kelurahan	56	64	120
7.	UPT Pendidikan/ Cabang Dinas Pendidikan	96	86	182

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Dinas/Instansi Pemerintah		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
8.	UPT Dinas Kesehatan	192	519	711
9.	Puskesmas Desa/ Pembantu	2	82	84
10.	Pendidikan TK/SD/MI	1030	1626	2656
11.	SMP/SLTP/MTS	294	526	820
12.	Perbantuan Daerah	4	2	6
13.	Unit Kerja Lain*	3	10	13
Jumlah		2996	3903	6899

Keterangan: * termasuk yang belum dialokasikan ke dinas/instansi

** tidak termasuk PNS pada SMA sederajat

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar

Dari Jumlah pegawai tersebut bila dilihat dari golongan kepangkatan, maka dapat diketahui jumlah terbanyak ada pada golongan III disusul golongan IV khususnya golongan IVa yang berasal dari fungsional tertentu, sebagaimana berikut :

Tabel 1. 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Jabatan

Golongan Kepangkatan	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
I/A (Juru Muda)	-	-	5	5
I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	16	16
I/C (Juru)	-	1	55	56
I/D (Juru Tingkat I)	-	-	21	21
Golongan I/ Range I	-	1	97	98
II/A (Pengatur Muda)	-	144	109	253
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	113	135	248
II/C (Pengatur)	-	212	281	493
II/D (Pengatur Tingkat I)	-	258	82	340
Golongan II/ Range II	-	727	607	1.334
III/A (Penata Muda)	8	879	179	1.068
III/B (Penata Muda Tingkat I)	57	548	319	924
III/C (Penata)	169	399	111	679
III/D (Penata Tingkat I)	394	490	90	974
Golongan III/ Range III	628	2.316	699	3.645
IV/A (Pembina)	158	1.426	21	1.605
IV /B (Pembina Tingkat I)	67	108	5	180
IV /C (Pembina Utama Muda)	32	3	1	36
IV /D (Pembina Utama Madya)	1	-	-	1
Golongan IV/ Range IV	258	1.537	27	1.882
Jumlah/ Total	886	4.581	1.430	6.899

1.4.3. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa unsur yang dilakukan penilaian diantaranya adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Unsur perencanaan pada LKjIP Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. RPJMD dokumen merupakan perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sekali yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran

1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Banjar

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ditetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah".

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Banjar, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021 yaitu adalah :

Misi 1 "Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama". Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Misi 2 "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial". Misi ini tentang Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap

siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3 “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan”. Misi ini tentang Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sector perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industry hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik

Misi 4 “Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah”. Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”. Misi ini tentang bagaimana upaya pemerintah dalam Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dimana setiap tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan misi tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada. Tujuan dan sasaran strategis dari kelima misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama
		Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik
		Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan social	Meningkatkan angka partisipasi sekolah	Meningkatnya angka partisipasi sekolah
	Meningkatkan budaya baca dan apresiasi terhadap seni dan budaya	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat
		Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi
		Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang
		Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular
		Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya mitigasi bencana
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda
		Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan
	Meningkatkan kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat
	Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah.	Meningkatnya investasi daerah
		Meningkatkan kinerja perusahaan daerah
	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan
Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat
		Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
		Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi
	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya infrastuktur perhubungan
		Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;
		Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal
		Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas
		Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah, Secara khusus IKU ditetapkan dengan SK Bupati Banjar Nomor 188.45/359/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. 7. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	Persen
		Penurunan Jumlah kasus criminal	Kasus
		Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	Rp

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al- Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	Persen
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	Kasus
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	
		APM SD / MI / SDLB	Persen
		APM SMP / MTs / SMPLB	Persen
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		APK SD / MI / SDLB	Persen
		APK SMP / MTs / SMPLB	Persen
		Angka Putus Sekolah (APtS)	
		APtS SD / MI / SDLB	Persen
		APtS SMP / MTs / SMPLB	Persen
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen
	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	Persen
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	Keg
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 kh
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen
		Persentase Kelurahan Layak anak	Persen
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Persen
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	Persen
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah	Ton
		Produksi komoditas prioritas padi lading	Ton
		Produksi karet	ton
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	Kw/Ha
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	Kw/ha
		Produktifitas karet	Kg/Ha
		Persentase Kelompok tani madya	persen
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	persen
		Populasi sapi	(ekor)
		Jumlah produksi ikan budidaya	ton
		Jumlah produksi ikan tangkap	ton
		Jumlah konsumsi ikan	kg/kapita
		18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan
Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton		
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/kap/hr
		Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor
20	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	persen
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	Opini

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentasi sampah yang terolah di TPA	persen
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20 persen dari luas kawasan perkotaan	persen
		Kualitas air	Tercemar/tidak tercemar
		Kualitas udara	Tercemar/tidak tercemar
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentasi koperasi aktif.	persen
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	persen
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	Persen
		Jumlah nilai ekspor karet.	USD
		Persentase Desa Berkembang	Persen
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan local	orang
		Peningkatan wisatawan mancanegara	orang
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	persen
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	persen
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur	Persentase pengujian kendaraan bermotor	persen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
	komunikasi dan informatika;		
28	Meningkatnya infrastruktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	persen
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	persen
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	persen
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	persen
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	persen
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	persen
		Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	persen
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	persen
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	persen
		Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	persen
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	persen
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	persen
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan,	persen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	persen
		Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	persen
		Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	persen
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	persen
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	persen
		Tingkat Maturitas SPIP	Level
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	persen
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	persen
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	persen
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	persen
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	persen
		Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	persen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	persen
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demontrasi/ jumlah gejolak masyarakat	persen
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	persen
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	persen
		Persentase peraturan yang dibuat	persen
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	persen
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	persen
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	persen
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	persen
		Persentase kelengkapan administrasi desa	persen
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	persen
		Indeks Kepuasan masyarakat	Angka
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas	persen

No.	Sasaran	Indikator	Satuan
		Umum Pemerintahan	

1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar

Permasalahan Utama pembangunan di Kabupaten Banjar yang teridentifikasi dalam setiap urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Harapan Lama Sekolah (EYS) pada tahun 2017 masih diangka 11,76, berada pada urutan ke 10 dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan serta dibawah Provinsi (12,46).
 - b. Rata rata Lama Sekolah = 7,28 berada di urutan ke 9 dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan serta berada di bawah angka Provinsi (7,99). (Sumber : BPS Kab.Banjar)
 - c. Masih ada anak usia sekolah dasar yang belum terlayani Pendidikan, Pada tahun 2017, APS 7-12 tahun = 98,19 dan APS 13-15 = 82,62.
 - d. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah. Capaian tahun 2017 = 67,80.
 - e. Masih ada siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2017 Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI sebesar 0,28 dan 0,36 pada tingkat SMP/MTs.
 - f. Masih perlu peningkatan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP. Pada Tahun 2017 APK SMP/MTs Kabupaten Banjar mencapai 92,00, meskipun masih berada di atas Provinsi (85,70) dan Nasional (90,00)
 - g. Masih perlu peningkatan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2017 APM SMP/MTs = 67,20. (Capaian Provinsi = 73,73, Capaian Nasional 78,30).
 - h. Masih rendahnya nilai rata-rata ujian nasional di tingkat SMP. Pada tahun 2017 nilai rata rata Ujian Nasional tingkat SMP di Kabupaten Banjar sebesar 53,16, meskipun masih berada di atas nilai rata rata Provinsi sebesar 52,50
 - i. Masih terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya
 - j. Kurang meratanya penyebaran tenaga pendidik
 - k. Turunnya angka kelulusan setiap tahunnya pada Pendidikan kesetaraan paket A. Pada tahun 2016 angka kelulusan = 90,60, pada tahu 2017 menurun menjadi 84,30.

2. Urusan Kesehatan , Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih ada ditemukan Toko obat yang berani mengedarkan/menjual daftar obat-obatan daftar G, sebab toko obat tidak diperkenankan menjual daftar G dimaksud. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1331/Menkes/SK/X/ 2002 pasal 2 ayat (1) berbunyi Pedagang eceran obat hanya menjual obat2an bebas dan bebas terbatas dalam kemasan asli dari pabrik yg membuatnya secara eceran.
 - b. Kurangnya Pengetahuan Kader Posyandu dalam pengukuran BB dan TB.
 - c. Belum terpenuhinya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana yang sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurang efektifnya kinerja jasa pemborongan terpilih dan kondisi lapangan tidak stabil sehingga pekerjaan tidak optimal.
 - b. Belum adanya Master Plan yang tersistem dengan baik, maka pelaksanaan kegiatan layanan drainase pun masih belum begitu tersistematis dengan baik. Realisasi target indikator Persentase Pengurangan Genangan adalah 55,02%. Peningkatannya kecil yakni 0,02% karena dana dialihkan untuk rehabilitasi saluran drainase dalam rangka pencapaian SPM (target 50% penduduk) yakni indikator Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase yang mana realisasi indikator ini baru 20,56%. Selain itu, banyak masyarakat yang menutup saluran, baik untuk usaha maupun tempat tinggal dengan konstruksi yang tidak memberikan ruang untuk melaksanakan pemeliharaan saluran (penggalian sedimentasi).
 - c. Adanya kesulitan dalam mendistribusikan material pekerjaan ke lokasi pekerjaan terkait kendala bentang alam sehingga terdapat 1 paket pekerjaan yakni pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Jalur Utara Kecamatan Aluh-aluh Batas Kota Banjarmasin (Lanjutan) yang agak terlambat penyelesaiannya. Selain itu juga disebabkan karena pekerjaan timbunan baru yang sulit dilakukan ketika musim hujan sehingga penyelesaian keseluruhan pekerjaan agak terlambat. Oleh karena itu

ketika akan berakhir masa kontraknya maka penyedia meminta perpanjangan masa kontrak selama 50 hari kalender sehingga dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai kontrak;

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Keterbatasan pembiayaan yang bersumber pada pendanaan APBD membuat beberapa kegiatan hanya memprioritaskan kegiatan yang sangat strategis untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. Oleh karena itu beberapa kegiatan lebih memprioritaskan pengawasan dan pendataan untuk kebutuhan data primer di tahun 2019.
 - b. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian perumahan di tahun 2018 hanya dapat dilaksanakan pada beberapa perumahan karena tidak semua perumahan yang sudah disahkan dokumen teknisnya telah selesai proses perizinan untuk mendirikan bangunan.
 - c. Adanya perbedaan persepsi terhadap regulasi antara SKPD teknis dan badan pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan (DAK Reguler) di Kawasan kumuh perkotaan dengan sumber pendanaan APBN tahun 2018. Hal ini mengakibatkan, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dikarenakan melewati batas waktu pencairan tahap I.
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Stigma dan pemahaman masyarakat yang berkembang hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat menjadi apatis bahkan pesimis terhadap segala hal yang menyangkut urusan politik.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia serta beragamnya latar belakang pendidikan dan kurangnya peningkatan kapasitas SDM di bidang kebencanaan yang mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan Bencana.
 - c. Keterbatasan Peralatan Evakuasi/Peralatan Penanggulangan Bencana dikarenakan harga peralatan

- yang cukup mahal mengakibatkan kurang optimalnya penanganan bencana.
6. Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih kurangnya keterampilan dalam berusaha dan tidak adanya modal usaha
 - b. Angka ketergantungan penyandang disabilitas sehingga belum/tidak bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan melayani dirinya sendiri
 - c. Rendahnya Pendidikan dan keterbatasan gerak penyandang cacat dan eks trauma
 7. Urusan Tenaga Kerja, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Tingginya jumlah pekerja yang bekerja dibawah jam normal (< 35 jam/minggu)
Tingginya jumlah pekerja dengan keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah
 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan/laki-laki dan perempuan dewasa yang melapor relatif tinggi. Pada tahun 2017 = 32 kasus. Kasus yang paling tinggi pada jenis kasus seksual pada anak perempuan sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus, dengan kasus tertinggi pada jenis kasus seksual pada anak perempuan = 10 kasus.
 - b. Keterwakilan perempuan di eksekutif yang menduduki eselon II, III dan IV masih relatif kecil daripada laki-laki, hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan potensi dan kemampuan masing-masing individu.
Dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. TPAK perempuan sebesar 57,46% sedangkan laki-laki sebesar 85,96%.
 9. Urusan Pangan Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas
 - b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata

- c. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.
10. Urusan Pertanahan Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Keterlambatan bidang dalam menyampaikan data yang diminta;
 - b. Data yang diperlukan sering kali tidak tersedia di bidang dan tidak update;
 - c. Kemampuan teknis aparat perencana dalam melakukan analisis perencanaan secara teknis masih terkendala, hal ini perlu dilakukan upaya keras secara personal;
11. Urusan Lingkungan Hidup, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Luasnya cakupan wilayah untuk pelayanan angkutan persampahan dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam melayani angkutan sampah sehingga belum dapat semua desa di masing – masing kecamatan terlayani dengan baik
 - b. Belum maksimalnya peranan stake holder atau instansi dalam mengendalikan pencemaran air sungai, sehingga air sungai di Kab. Banjar masih tercemar dengan Indeks Kualitas Air masih rendah sebesar 36.67.
Minimnya alokasi anggaran untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau baru pada setiap tahun anggaran sehingga sulit untuk mencapai target sasaran di tahun 2018 ini. Pada tahun 2018 persentasi peningkatan RTH masih sama dengan tahun lalu yaitu sebesar 1,59%.
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya kesadaran orang tua dalam pembuatan akta kelahiran
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan KTP atau KIA
Terlambatnya dan kurang lengkapnya pemenuhan data dari pihak Kecamatan, yang sesuai dengan permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih banyaknya tunggakan pada kelompok SPP dana bergulir;
 - b. Masih belum tertib administrasi dan tertib pembukuan untuk UEM terutama usaha mikro

- c. Masih banyaknya desa yang tidak memiliki Peta Desa dimana Peta Desa sangat Menentukan Batas Desa;
- 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk .
 - b. Rendahnya Partisipasi laki-laki dalam ber KB.
 - c. Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) masih rendah. (Tahun 2017 = 7,70 dan tahun 2018 = 8,55)
 - d. Persentase perkawinan muda masih tergolong tinggi yaitu 15,82%.
Persentase wanita kawin (usia 15-49 tahun) yang tidak pernah mengikuti KB masih relatif tinggi yaitu sebesar 21,40% (peserta KB aktif = 58,75%, peserta KB tidak aktif = 19,85%)
- 15. Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Prasarana transportasi yang ada masih belum lengkap
 - b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga fasilitas keselamatan dan prasarana transportasi sehingga Rambu-rambu lalu lintas terkadang hilang
Belum dilakukan pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ada sehingga masih ditemui kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 16. Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahan yang dihadapi:
 - a. Bentang geografis Kabupaten Banjar yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
 - b. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK)
 - c. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
- 17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Belum optimalnya peran kelembagaan gerakan koperasi
 - b. Target indikator kinerja utama Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil yang ada di RPJMD tahun 2018 sebesar 1 %. Sedangkan target indikator kinerja utama Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil yang ada di renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar 0,25 % dan sudah realisasi sebesar 0,50 %. Persentase kenaikan tiap tahun dari

tahun 2016 – 2021 sebesar 0,25 % tiap tahunnya sedangkan pada RPJMD bersifat komulatif
Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi koperasi dan pelaku UMKM.

18. Urusan Penanaman Modal, Permasalahan yang dihadapi adalah mobilitas cek lapangan cukup tinggi sehingga dalam hal ini diperlukan alat angkut seperti mobil layanan yang cukup besar (mini bus) karena perlu melibatkan SKPD yang terkait dengan perizinan.
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh kecamatan di kabupaten Banjar
 - b. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan.
20. Urusan Statistik, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya responsif dan keaktifan SKPD dalam pengumpulan data sehingga memerlukan waktu yang lama
 - b. Tidak hadirnya petugas pengisi data dari SKPD dalam ekspose awal penyusunan standar harga barang dan jasa
 - c. Data sekunder yang berasal dari pendataan SKPD kebanyakan masih sama dengan data tahun sebelumnya
21. Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang dihadapi adalah Kurangnya event budaya yang mengarah pada industri pariwisata
22. Urusan Perpustakaan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Akan Manfaat Membudayakan Membaca
 - b. Masih Perlunya Peningkatan Minat Baca Masyarakat Dengan Diadakannya Kegiatan Kegiatan Baru Yang Mendorong Peningkatan Minat Baca
23. Urusan kearsipan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip
 - b. Belum adanya pejabat Arsiparis
24. Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan
 - b. Belum optimalnya kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan budidaya
25. Urusan Pariwisata, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Akses menuju lokasi wisata belum tersedia dengan baik

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata
 - c. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan
 - d. Rendahnya SDM pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar obyek wisata
 - e. Belum maksimalnya promosi dan pemanfaatan destinasi wisata
Belum maksimalnya upaya integrasi kegiatan antar destinasi wisata dalam daerah dan kerjasama luar daerah
26. Urusan Pertanian, permasalahan yang dihadapi :
- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja Daerah dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan daerahnya.
 - b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
 - c. Untuk pelaksanaan kegiatan tanam di lapangan banyak di pengaruhi faktor alam sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan di lapangan.
27. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, permasalahan yang dihadapi :
- a. Minimnya tenaga teknis di lapangan sehingga dalam penanganan pemeliharaan ketenagalistrikan belum optimal selain itu peralatan perlengkapan kerja yang masih minim membuat tingginya resiko kecelakaan dalam pekerjaan.
 - b. Keterbatasan sarana masih menjadi permasalahan yang utama dalam kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, saat ini sarana yang tersedia berupa 1 sarana double cabin untuk mendukung kegiatan saat ini sedangkan cakupan layanan pemeliharaan sekitar 5 rayon yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar
28. Urusan Perdagangan, permasalahan yang dihadapi :
- a. Banyaknya PKL yang belum terdaftar secara formal baik menyangkut lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya dan Penggunaan sarana dan prasarana umum seperti bahu oleh PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban umum

- b. Kurangnya tenaga ahli dan fungsional penera sehingga pelayanan tera ulang di pasar rakyat masih belum maksimal. Tenaga ahli penera yang dimiliki Disperindag kabupaten Banjar hanya berjumlah 3 (Tiga) orang.
- 29. Urusan Perindustrian, permasalahan yang dihadapi adalah Melemahnya kondisi sektor industri pengolahan batu permata batumulia serta sektor perdagangan di bidang batu permata batumulia di Kabupaten Banjar dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.
- 30. Urusan Transmigrasi, permasalahan yang dihadapi adalah pengukuran untuk lahan usaha sulit dilakukan karena patok batas tanah banyak yang hilang
- 31. Urusan Administrasi Pemerintahan, permasalahan yang dihadapi:
 - a. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun Anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme Anggaran yang ada
 - b. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan
 - c. Sulitnya untuk mencapai kesepakatan batas desa antar Kecamatan, batas desa antar desa dan batas desa antar Kabupaten/Kota
 - d. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan bantuan sosial dan hibah
 - e. Pembahasan Raperda yang tidak sesuai Jadwal, sehingga output/keluaran Peraturan Daerah tidak sesuai target.
 - f. Pengajuan pelelangan/seleksi tidak sesuai RUP sehingga pelaksanaan tidak sesuai rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dan pengajuan paket-paket lelang ke BLPi dokumen yang disampaikan tidak lengkap oleh SKPD
- 32. Urusan Pengawasan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan dokumen-dokumen bahan pemeriksaan.
 - b. Kekurangpahaman sebagian pengurus barang di SKPD terhadap tata kelola barang persediaan dan aset sehingga pengisian data belum sesuai ketentuan.
 - c. Keterlambatan SKPD atas konfirmasi temuan hasil pemeriksaan dan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 33. Urusan Perencanaan, permasalahan yang dihadapi :
 - a. Kurang tersedianya tenaga ahli dalam penyusunan dokumen

- b. Ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan, karena belum adanya reward dan punishment dalam pelaksanaannya.
 - c. Kurangnya pemahaman SKPD dalam penyajian laporan, sehingga tidak tergambar capaian akan setiap kinerja indikator sasaran maupun capaian indikator program SKPD
34. Urusan Keuangan, permasalahan yang dihadapi :
- a. Penyesuaian NJOP PBB masih menemui kendala karena PBB merupakan pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan kajian lebih mendalam secara akademis, politik dan sosial
 - b. Pajak Air Tanah yang tidak mencapai target dikarenakan rendahnya tarif Nilai Perolehan Air (NPA), sedangkan kewenangan untuk menetapkan NPA sebagian besar pengenaannya berada pada pemerintah provinsi
 - c. SDM yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak
35. Urusan Kepegawaian, permasalahan yang dihadapi :
- a. Data hasil pengukuran kompetensi belum dapat digunakan secara maksimal, karena belum ada tindak lanjut pengembangan kompetensi akibat keterbatasan anggaran di daerah
 - b. Masih banyak jabatan fungsional yang belum paham dengan karirnya sebagai pejabat fungsional, sehingga menghambat perkembangan karirnya sebagai PNS
 - c. Tidak terakomodirnya beberapa permohonan bantuan biaya diklat dan jadwal diklat dari pihak ketiga masih bersifat tentative sehingga mengalami perubahan jadwal.

1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Untuk mengantisipasi permasalahan diatas pada RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2018 menetapkan 8 prioritas pembangunan dan terdiri dari 34 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 8. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2018

Prioritas	Sasaran
1. Percepatan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dan Kualitas Keagamaan	1. Meningkatnya angka partisipasi sekolah

Prioritas	Sasaran
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat 3. Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya 4. Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi 5. Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 6. Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular 7. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama 8. Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik 9. Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal
2. Penguatan Modal Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> 10. Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial 11. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 12. Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda 13. Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat
3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 14. Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD 15. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
4. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> 16. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan 17. Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan

Prioritas	Sasaran
	18. Meningkatkan ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat
5. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	19. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat 20. Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 21. Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi 22. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak; 23. Meningkatkan pengelolaan air minum secara optimal; 24. Meningkatkan perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 25. Meningkatkan investasi daerah
6. Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	26. Meningkatkan cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika; 27. Meningkatkan infrastruktur perhubungan
7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penanganan Lingkungan Hidup	28. Meningkatkan kualitas lingkungan 29. Meningkatkan mitigasi bencana
8. Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah	30. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal 31. Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas

Prioritas	Sasaran
	32. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif 33. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 34. Meningkatkan kinerja perusahaan daerah

Masing-masing sasaran tersebut didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD (56 SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yakni sebanyak 338 program dan 1.182 kegiatan. dari sejumlah program tersebut dapat diklasifikasikan program prioritas ada sebanyak 209 program dan non prioritas ada sebanyak 129 program. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2018 mengalami pengurangan hal ini disebabkan penataan organisasi perangkat daerah dan penyesuaian kewenangan yang diserahkan ke daerah.

1.5. **Sistematika Penyusunan LkjiP Kabupaten Banjar**

Sistematika Penyusunan LKjiP Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut ini:

- ❖ Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Aspek Strategis Kabupaten Banjar dan Permasalahan Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar, Prioritas Daerah dan Sistematika Penulisan LKjiP.
- ❖ Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018.
- ❖ Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja Bappeda Banjar dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018.
- ❖ Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2018 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018.
- ❖ Lampiran :
 - Penetapan Kinerja (PK) (Murni dan Perubahan) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017/8

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banjar
- Target Kinerja RKPD (Murni dan Perubahan) Kabupaten Banjar Tahun 2018.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2018. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2018 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, disajikan dalam Perjanjian Kinerja setiap SKPD Tahun 2018 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	Persen	30
		Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	Kasus	145
		Jumlah Dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan	Rp	280.000.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Persentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an	Persen	94,00
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal	Kasus	10
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI /SDLB	Persen	96,27
		APM SMP/ MTs/SMPLB	Persen	65,66
		Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI /SDLB	Persen	120,7
		APK SMP/ MTs/SMPLB	Persen	94,2
		Angka Putus Sekolah (Apts) APtS SD/MI /SDLB	Persen	0,25
		APtS SMP/ MTs/SMPLB	Persen	0,84
		Angka rata- rata lama sekolah	Tahun	7,07
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	68,12
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	Persen	4,2
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen	85
		Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	Keg	7
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kh	158,0
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 Kh	12,2
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen	40
		Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,04
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen	24,16
9	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen	> 30
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	630
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	2,53

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen	73
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	74
		persentasi kelurahan layak anak	Persen	15,4
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen	60
		Persentase Kejadian Bencana yg tertanggulangi	Persen	100
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen	0,8
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	Persen	60,34
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah (ton)	Ton	248.015
		Produksi komoditas prioritas padi ladang (ton)	Ton	30.151
		Produksi karet (ton)	Ton	21268,69
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah kw/ha	Kw/Ha	45,76
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang kw/ha	Kw/Ha	32,45
		Produktifitas karet (kg/ha)	Kg/Ha	1.291
		Persentase Kelompok tani madya (%)	Persen	3,19
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi (%)	Persen	80,00
		Populasi sapi (ekor)	(Ekor)	17200,00
		Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	Ton	55.000,00
		Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	Ton	11492
		Jumlah konsumsi ikan kg/kapita	Kg/Kapita	50,00
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	Persen	35
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	720,00
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.Kal/Kap/Hr	3640
		Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hr	103,00
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor	90,5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
20	Meningkatnya investasi daerah	Persentasi Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	Persen	85,00
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini Akuntan Publik	Opini	WTP
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentasi Sampah Yang Terolah Di TPA	Persen	100
		Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.	Persen	1,60
		Indeks Kualitas Air	Indeks	Tidak Tercemar
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	Tidak Tercemar
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif	Persen	64,5
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,25
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	Persen	20
		Jumlah nilai ekspor karet	Rupiah	509.018.168,29
		Persentase desa berkembang	Persen	60
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	Orang	1920415,00
		Peningkatan wisatawan mancanegara	Orang	5
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persen	57,50
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	70,00 (546,97 Km)
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	90,32 (264 Unit)
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	Persen	85
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	Persen	100
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	Persen	76.54
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	Persen	97,06
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	Persen	65,18

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD	Persen	100
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen	0,1
		Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persen	100
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	Persen	100
		Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	Persen	100
		Persentase Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	Persen	71,12
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	Persen	75,5
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	Persen	100
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Persen	45
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	Persen	60
		Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD	Persen	80,00
		Persentase Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran	Persen	63
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	Persen	96
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	Persen	57,14
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	2
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	Persen	80
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	75,76
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	Persen	100

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK	WTP
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	Persen	99
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	Persen	79,40
		Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah	Persen	85,00
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	85,00
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejalok masyarakat)	Persen	100
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	Persen	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Persen	100
		Persentase peraturan yang dibuat	Persen	75,00
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	Persen	85,00
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	Persen	44,48
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	Persen	90,00
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	Persen	75,00
		Persentase Kelengkapan Administrasi Desa	Persen	71,12
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti	Persen	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,9
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Persen	30

2.2. Rencana Anggaran Masing-masing Sasaran Tahun 2018

Sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 berikut dimuat pagu anggaran yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai seluruh sasaran strategis yang telah direncanakan.

Tabel 2. 2. Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2018

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	1.008.203.437,00	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	-
			Penurunan Jumlah kasus kriminal	728.203.437
			Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	280.000.000
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	7.052.866.100,00	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	7.052.866.100
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	130.300.000,00	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	130.300.000
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	93.991.728.880,00	Angka Partisipasi Murni (APM)	89.429.378.880
			APM SD / MI / SDLB	
			APM SMP / MTs / SMPLB	
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			APK SD / MI / SDLB	
			APK SMP / MTs / SMPLB	
			Angka Putus Sekolah (APTS)	
			APTS SD / MI / SDLB	
			APTS SMP / MTs / SMPLB	
			Angka rata-rata lama sekolah	
			Angka Partisipasi Kasar PAUD	4.562.350.000
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	677.715.000	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	677.715.000
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	1.827.423.060,00	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	928.335.000
			Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	899.088.060
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	5.792.868.000,00	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	5.223.553.000
			Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	138.050.000
			Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	111.455.000
			Angka laju pertumbuhan penduduk	319.810.000
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	881.549.600	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	881.549.600

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular		Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	160.944.415.000	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	80.944.415.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.000.000.000
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1.058.981.360	Angka Pengangguran Terbuka	1.058.981.360
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	5.346.575.000	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	5.346.575.000
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	286.339.800	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	165.340.000
			Persentase Kelurahan Layak anak	120.999.800
14	Meningkatnya mitigasi bencana	2.171.666.407	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	1.093.156.407
			Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	1.078.510.000
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	1.550.000.000	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	1.550.000.000
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	1.500.000.000	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	1.500.000.000
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	20.699.002.663,00	Produksi karet	211.173.040
			Produksi komoditas prioritas padi sawah	4.298.250.860
			Produksi komoditas prioritas padi ladang	
			Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	
			Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	
			Produktifitas karet	604.152.440
			Persentase Kelompok tani madya	1.442.460.240
			Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	10.751.929.203
			Populasi sapi	1.383.504.080
			Jumlah produksi ikan budidaya	672.251.800
			Jumlah produksi ikan tangkap	1.162.224.000
Jumlah konsumsi ikan	173.057.000			
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	597.125.940,00	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	424.068.940
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan	173.057.000
19		1.103.665.000,00	Ketersediaan Energi	1.103.665.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat		Ketersediaan Protein	
			Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	
20	Meningkatnya investasi daerah	1.113.689.000,00	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	1.113.689.000
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	1.097.131.200	Opini akuntan publik	1.097.131.200
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	19.353.116.250,00	Persentase sampah yang terolah di TPA	12.444.377.470
			Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	3.626.502.280
			Kualitas air	3.282.236.500
			Kualitas udara	
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	2.279.948.800,00	Persentase koperasi aktif.	67.972.800
			Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	-
			Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	71.307.500
			Jumlah nilai ekspor karet.	175.360.000
			Persentase Desa Berkembang	2.140.668.500
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	3.228.710.250,00	Persentase peningkatan wisatawan lokal	3.228.710.250
			Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	3.829.884.883,00	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	3.829.884.883
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	80.972.664.154,00	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	80.972.664.154
			Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	1.066.388.000,00	Persentase pengujian kendaraan bermotor	1.066.388.000
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	5.790.248.700,00	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	358.218.500
			Cakupan layanan internet dan telepon seluler	5.432.030.200
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	9.066.095.160,00	Cakupan rumah layak huni	9.066.095.160
30	Meningkatnya pengelolaan air	35.887.921.298,00	Cakupan air minum	35.887.921.298

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
	minum secara optimal;			
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	1.253.060.500,00	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	117.208.800
			Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	94.299.100
			Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	457.319.800
			Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	-
			Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	255.572.800
			Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	328.660.000
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	64.312.715.760,00	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	767.832.640
			Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	514.923.200
			Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	1.785.230.600
			Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	906.886.120
			Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	4.917.990.000
			Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	1.491.640.680
			Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	2.477.898.160
			Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	213.125.000
			Tingkat Maturitas SPIP	3.199.417.320
			Tingkat Kapabilitas APIP	
			Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	
			Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	1.464.725.000
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Anggaran Per Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Anggaran
			Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	9.607.417.700
			Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	9.607.417.700
			Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	417.145.000
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	776.141.000
			Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	1.229.300.000
			Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejolak masyarakat	1.230.779.000
			Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	21.899.975.000
			Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	550.000.000
			Persentase peraturan yang dibuat	438.897.800
			Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	363.820.000
			Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	452.153.840
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	2.420.866.722,00	Persentase SPM yang terpenuhi	469.030.900
			Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	502.899.600
			Persentase kelengkapan administrasi desa	1.448.936.222
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.198.561.480,00	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	58.178.000
			Indeks Kepuasan masyarakat	326.302.320
			Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	814.081.160
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	539.491.427.404		539.491.427.404



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Meskipun Permenpan dan RB di atas sudah direvisi dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2018 ini telah mengakomodir beberapa perihal penting yang menjadi bagian dari analisa capaian kinerja seperti perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai alternative solusi yang telah dilakukan.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Tabel 3. 1. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kategori Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2018

Pengukuran target Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kab. Banjar tahun 2018. Pencapaian IKU Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini :

Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	33,33	166,5	30,00	44,44	148,13	Sangat Tinggi
		Penurunan Jumlah kasus kriminal	638	90	145,00	154	93,79	Sangat Tinggi
		Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	374280000	156	280.000.000,00	779246170	278,30	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	99,54	108,2	94,00	99,3	105,64	Sangat Tinggi
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bermuansa kearifan lokal	42	-150	10,00	52	-320,00	Sangat Rendah
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	APM SD / MI / SDLB	97,36	101,32	96,27	95,26	98,95	Sangat Tinggi
		APM SMP / MTs / SMPLB	62,58	98,61	65,66	64,74	98,60	Sangat Tinggi
		APK SD / MI / SDLB	113,72	94,57	120,70	111,03	91,99	Sangat Tinggi
		APK SMP / MTs / SMPLB	86,4	96,4	94,20	86,86	92,21	Sangat Tinggi
		APtS SD / MI / SDLB	0,27	100	0,25	0,17	132,00	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
		APtS SMP / MTs / SMPLB	0,34	162,22	0,84	0,36	157,14	Sangat Tinggi
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,6	108,11	7,07	7,37	104,24	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	67,8	103,26	68,12	67,86	99,62	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	6,73	198	4,20	5,3	126,19	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	80	100	85,00	85,07	100,08	Sangat Tinggi
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	8	114,28	7,00	8	114,29	Sangat Tinggi
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	90,85	151,65	158,00	93,3	140,95	Sangat Tinggi
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	69	146,92	12,20	9,98	118,20	Sangat Tinggi
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	37	110,33	40,00	32	120,00	Sangat Tinggi
		Angka laju pertumbuhan penduduk	1,81	112,13	2,04	1,51	125,98	Sangat Tinggi
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	16,5	140,56	24,16	17,74	126,57	Sangat Tinggi
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	82,8	552	30,00	87	290,00	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	624	104,87	630,00	647	102,70	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,2	106,93	80,00	75,99	94,99	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	3,11	78	2,53	3,03	80,24	Tinggi
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	70	100	73,00	50,79	69,58	Sedang
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	142,85	74,00	100	135,14	Sangat Tinggi
		Persentase Kelurahan Layak anak	7,7	100	15,40	15,4	100,00	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	0,06	87,27	60,00	77,6	129,33	Sangat Tinggi
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	0,7	117	0,80	0,7	87,50	Tinggi
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	50	88	60,34	57	94,46	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi karet	17627	91,99	21.268,69	17895,05	84,14	Tinggi
		Produksi komoditas prioritas padi sawah	218855	90,16	248.015,00	200026	80,65	Tinggi
		Produksi komoditas prioritas padi ladang	31532	100	30.151,00	36491	121,03	Sangat Tinggi
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	38,95	90,58	45,76	34,73	75,90	Tinggi
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	28,33	94,43	32,45	34,22	105,45	Sangat Tinggi
		Produktifitas karet	892	76,7	1.291,00	889	68,86	Sedang
		Persentase Kelompok tani madya	3,03	100	3,19	4,43	138,87	Sangat Tinggi
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	81,89	100	80,00	87,35	109,19	Sangat Tinggi
		Populasi sapi	17627	100	17.200,00	18021	104,77	Sangat Tinggi
		Jumlah produksi ikan budidaya	58105	116	55.000,00	60870	110,67	Sangat Tinggi
		Jumlah produksi ikan tangkap	9626	86,0847791	11.492,00	9470	82,41	Tinggi
		Jumlah konsumsi ikan	51	100	50,00	51	102,00	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	35	116,67	35,00	34,69	99,11	Sangat Tinggi
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	715	100,7	720,00	792,6	110,08	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	3591	99,47	3.640,00	3745	102,88	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Protein	150,46	149	103,00	93,13	90,42	Sangat Tinggi
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	89,2	99,11	90,50	89,4	98,78	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	143	169,64	85,00	9016,14	10.607,22	Sangat Tinggi
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	WTP	100	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentasi sampah yang terolah di TPA	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	1,59	100	1,60	1,59	99,38	Sangat Tinggi
		Kualitas air	36	109	Tidak Tercemar	Tercemar Ringan (33,33)	33,33	Sangat Rendah
		Kualitas udara	103	125	Tidak Tercemar	Tidak Tercemar	100,00	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif.	63,9	100,63	64,50	64,2	99,53	Sangat Tinggi
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0,5	66,67	0,25	0,42	168,00	Sangat Tinggi
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	17,14	85,7	20,00	32,9	164,50	Sangat Tinggi
		Jumlah nilai ekspor karet.	52.181.067	10,34	509.018.168,29	107.082.330	21,04	Sangat Rendah
		Persentase Desa Berkembang	22,74	61,16	60,00	51,62	86,03	Tinggi
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan wisatawan lokal	2027415	105,63	1.920.415,00	7105288	369,99	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	-11,89	-237,8	5,00	-6,37	-127,40	Sangat Rendah
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	92,11	167,47	57,50	92,12	160,21	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,85	100,23	70,00	71,97	102,81	Sangat Tinggi
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	89,08	100,8	90,32	98,73	109,31	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	62,95	77,48	85,00	93,7	110,24	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya infrastruktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	80,34	113,15	76,54	92	120,20	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	98,6	102,16	97,06	92,96436377	95,78	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya pengelolaan air	Cakupan air minum	67,19	110,09	65,18	73,2	112,30	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
	minum secara optimal;							
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	65,57	65,57	100,00	71,83	71,83	Sedang
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0,13	91,67	0,10	0,16	40,00	Sangat Rendah
		Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	47,99	47,99	100,00	94,3	94,30	Sangat Tinggi
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	100	100	100,00	0	-	Sangat Rendah
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	30,28	30,28	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	42,24	100	71,12	56,68	79,70	Tinggi
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	91,68	122,24	75,50	95,96	127,10	Sangat Tinggi
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	30	75	45,00	38,15	84,78	Tinggi
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	54,55	136,36	60,00	88	146,67	Sangat Tinggi
		Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	88,23	121,31	80,00	100	125,00	Sangat Tinggi
		Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	52,39	84,5	63,00	57,64	91,49	Sangat Tinggi
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	95,14	100,15	96,00	82,01	85,43	Tinggi
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	30,19	70,43	57,14	59,72	104,52	Sangat Tinggi
		Tingkat Maturitas SPIP	3	100	2,00	3	150,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kapabilitas APIP	3	100	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	81,4	101,75	80,00	81,69	102,11	Sangat Tinggi

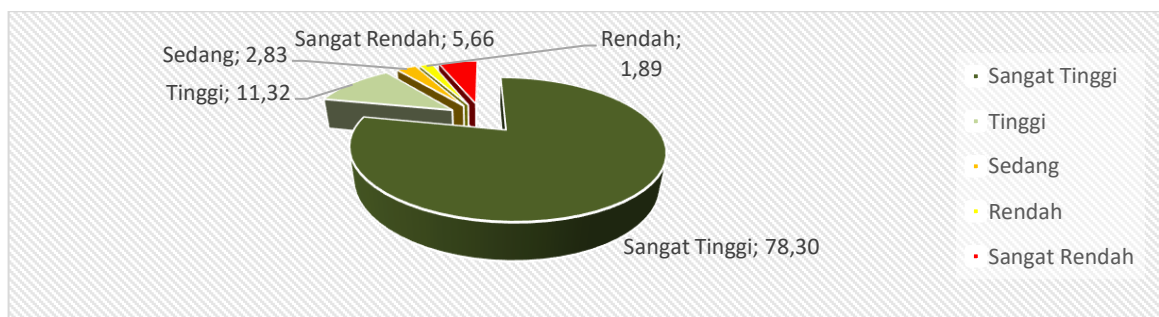
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	79	130,34	75,76	87,97	116,12	Sangat Tinggi
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	95,51	97,46	99,00	103,52	104,57	Sangat Tinggi
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	45,13	113,68	79,40	100	125,94	Sangat Tinggi
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	90,73	103	85,00	84,38	99,27	Sangat Tinggi
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	95,81	98,51	85,00	98,67	116,08	Sangat Tinggi
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	70	70	100,00	61	61,00	Rendah
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase peraturan yang dibuat	99,34	142	75,00	72,22	96,29	Sangat Tinggi
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	92,76	105,49	85,00	64,48	75,86	Tinggi
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	25,68	77,46	44,48	27,04	60,79	Rendah
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	73,53	86,5	90,00	93,1	103,44	Sangat Tinggi
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	50	100	75,00	75	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase kelengkapan administrasi desa	42,24	100	71,12	56,68	79,70	Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori
					Target	Realisasi	% Realisasi	
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	100	100	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan masyarakat	79,04	96,27	81,90	82,58	100,83	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	20	100	30,00	30	100,00	Sangat Tinggi

Gambar 3. 1. Tingkat Capaian IKU Tahun 2018



3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama

Gambaran kondisi yang diharapkan dari sasaran ini adalah suasana kehidupan masyarakat giat melaksanakan Kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari level masyarakat bahkan OPD

daerah yang rutin dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan. Selain itu peringatan hari besar keagamaan juga rutin dilaksanakan, mulai dari haul ulama, hari raya keagamaan, dan lain sebagainya. Harapannya seiring dengan meningkatnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku, sehingga terwujud iklim kehidupan yang damai, sejahtera, dan Barkah.

Lingkungan kehidupan yang berdasarkan ajaran-ajaran agama juga perlu dibiasakan sejak dini, sehingga dari tingkat sekolah dasar seharusnya nilai-nilai agama sudah mulai diajarkan. Selain itu juga perlu wadah yang tepat untuk dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam keseharian. Misalkan seperti lembaga keagamaan yang bisa mempermudah masyarakat dalam beramal dan lembaga pesantren yang bisa mewadahi masyarakat belajar ilmu keagamaan

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu maka ditetapkan sasaran Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama, hasil capaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu Persentase kawasan santri yang diberdayakan, Penurunan Jumlah kasus kriminal dan jumlah dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan. Capaian ketiga indicator tersebut masuk pada kategori Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengamalan Nilai Nilai Agama

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	33,33	166,5%	30%	44,44%	148,15	50%	88,89%
2.	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	171	71,93%	145	154	93,79%	141	90,78%
3.	Jumlah Dana Badan Amil Zakat yang tersalurkan	374.280.000	156%	280.000.000	779.246.170	278.30%	360.000.000	216,46%

a. Persentase Kawasan Santri yang Diberdayakan

Indikator yang kesatu yang mengukur kinerja sasaran Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama adalah Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan. Kawasan santri yang dimaksud disini adalah Lokasi tempat tinggal santri desa/kelurahan yang banyak dihuni para santri, di Kabupaten Banjar telah diinventarisasi ada sebanyak 9 kawasan terdiri dari :

1. Desa Pekauman
2. Desa Melayu Mekar
3. Desa Pasayangan Utara
4. Desa Pasayangan Selatan
5. Kelurahan Pasayangan
6. Kelurahan Keraton
7. Kelurahan Sekumpul
8. Desa Murung Kenanga
9. Desa Antasan Senior

Pemberdayaan kawasan santri dimaknai dengan meningkatnya skil, berkembangnya kelembagaan ekonomi, kebudayaan dan pembangunan fasilitas infrastruktur lainnya di kawasan santri. Pencapaian indikator ini menjadi tanggung jawab beberapa perangkat daerah seperti dinas pendidikan, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas pariwisata dan Kebudayaan dan Bappeda Litbang. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 30%. Kawasan santri yang dibina melalui program pada dinas terkait pada tahun 2018 telah dapat direalisasikan pada 4 kawasan yakni kelurahan Pesayangan, Desa Pekauman, kelurahan sekumpul dan kerataton sekumpul atau 44,44% dari jumlah kawasan yang diberdayakan, lebih rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4. Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kawasan Santri yang Diberdayakan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan	33,33	166,5%	30%	44,44%	148,15	50%	88,89%

Dari tabel tersebut diketahui capaian indikator Persentase Kawasan Santri Yang Diberdayakan sebesar 148,15% diperoleh dari realisasi kawasan santri yang diberdayakan dibandingkan dengan

target, hasil capaian masuk pada kategori capaian sangat tinggi. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tahun ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik dimana tahun ada 3 kawasan yang dibina. Dibandingkan terhadap target akhir RPJMD realisasi tahun kedua periode ini dapat menyumbang pencapaian sebesar 88,89% artinya agar target dapat terwujud maka pencapaian tahun ini dapat di tingkatkan pada tahun yang akan datang.

Faktor pendorong pembinaan kawasan santri tersebut antara lain komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan kawasan santri dan keterbukaan warga terhadap program pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan guna memberdayakan kawasan santri antara lain:

1. Memberdayakan melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal paket A,B dan C dipondok pesantren dan TK Al-Qur'an. Pendidikan pada pondok pesantren banyak menjadi pilihan siswa dan orang tua dengan pertimbangan lebih banyak muatan ilmu agama yang diajarkan, setelah menamatkan pendidikan dasar banyak siswa yang memilih melanjutkan ke pondok pesantren. Hal ini baik karena dipesantren lebih banyak mengajarkan pendidikan agama dan menuntun dalam perbaikan akhlak. Namun sayangnya siswa dipesantren belum mendapat pengakuan melanjutkan sekolah atau dianggap putus sekolah pada system pendidikan apabila dipesantren tersebut tidak menyelenggarakan pendidikan paket dan tercapat pada aplikasi Dapodik. TK Alqur'an juga berperan dalam peningkatan kemampuan siswa membaca dan menulis Alqur'an, biasanya TK Al-Qur'an dilaksanakan pada sore hari.
2. Memberdayakan melalui pembinaan lembaga ekonomi yang ada dikawasan santri seperti koperasi yang ada dipesantren
3. Memfasilitasi perayaan hari-hari besar agama sebagai bagian dari menampakkan syiar-syiar agama.
4. Memberdayakan para pemuda dikawasan santri

Upaya yang dilakukan antara lain :

- a) Dinas Pendidikan pada Tahun 2017 yang lalu Pemerintah Kab. Banjar melalui Dinas Pendidikan telah memfasilitasi pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar melaksanakan program UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil). Tindak lanjutnya pada tahun 2018 kembali memberikan bantuan kepada pondok pesantren dan TK Al-Qur'an berupa :
 - Bantuan Operasional Pendidikan non formal. Diberikan

- untuk insentif Guru TK Al-Qur'an di semua Kecamatan, guru madrasah diniyah dan guru pondok pesantren
- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal (paket C setara SMA). Diberikan kepada 1. PP. Hidayath-thalibin, PP. Almursyidul Amin, PP. Ushuluddin, PP. Darussalam, PP. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, PP. Al-Ihsany, PP. Darul Falah dan PP. Takhashus Diniyah.
- b) Dari jumlah tersebut ada pesantren yang berada pada kawasan santri yakni pesantren darussalam yang ada pada kelurahan pesayangan
- c) Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan pemberdayaan melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan berbagai kegiatan antara lain :
- Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian pada tahun 2018 ini dilaksanakan diantaranya : sosialisasi akuntansi koperasi dan administrasi keuangan dan pelaksanaan RAT (membuat laporan keuangan koperasi) sebanyak 1 kali (50 orang) dilaksanakan di Martapura, aula Kesbangpol. Dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat akan lebih memahami makna berkoperasi dan akan tertarik untuk membentuk koperasi baru sehingga akan menambah kuantitas koperasi baru. Selain itu sosialisasi ini juga dalam rangka perkembangan koperasi dengan memberikan sosialisasi perkoperasian kepada pengurus koperasi, sehingga lebih tertib administrasi dan manajemen serta transparansi dalam pengelolaannya. Masing-masing kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari koperasi pesantren darussalam yang ada pada kelurahan pesayangan
 - Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, dilaksanakan dalam rangka memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi dengan memberikan penghargaan berupa 3 (tiga) unit computer/PC kepada 3 (tiga) koperasi berprestasi yang telah dinilai. Diserahkan pada saat pelaksanaan hari koperasi tingkat kabupaten Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar koperasi berlomba – lomba memperbaiki sistem pengelolaan kelembagaan koperasi. Penerima penghargaan koperasi ini adalah : KPRI Mina Sejahtera, Koppontren Khairul Amin dan KPRI Makmur. Koppontren Khairul Amin lokasinya ada di kelurahan

keraton.

- Kegiatan Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi, ini berisi tentang pemberian bantuan / hibah aplikasi sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan koperasi dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan pada gilirannya RAT dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Diberikan kepada 10 koperasi diantaranya kopentren al amin dan kopentren miftahul sholihin

d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya melalui kegiatan budaya yang bernuansa religi yakni kegiatan kebudayaan yang mengandung unsur penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama. Religi adalah internalisasi dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.

Kegiatan budaya yang bernuansa religi yang telah dilaksanakan meliputi :

- Festival Bedug
- Pasar Wadai Ramadhan
- Festival Sinoman Haderah
- Festival Rebana
- Even Muharram 1439 H
- Even Budaya Tahunan/Festival Rudat
- Festival Maulid Habsyi
- Peringatan Hari Santri 2017

Kegiatan budaya tersebut diselenggarakan di martapura sebagai wujud memeriahkan, menampakkan syair-syair islam dan melegitimasi bahwa martapura adalah kota santri atau kota serambi mekkah. Suksesnya penyelenggaraan didukung oleh keberadaan kelompok seni budaya yang ambnuansa religi di Kabupaten Banjar seperti kelompok seni sinoman hadrah, maulid habsyi dan rudat terutama di lingkungan santri. melibatkan lingkungan pesantren untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya/kesenian bernuansa islami dengan melibatkan masyarakat di sekitar pesantren.

e) Dinas Pemuda dan Olah raga

Pembinaan dilaksanakan melalui program pengembangan

dan keserasian kebijakan pemuda dengan maksud agar pemuda usia 16-30 tahun yang bisa membaca dan menulis huruf arab didukung kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan. Program lainnya adalah Program peningkatan Peran Serta Kepemudaandidukung oleh kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

- f) Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan pemberdayaan pada sisi penyediaan infrastruktur melalui program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan, pada tahun 2017 lalu telah membangun fasilitas infrastruktur di kelurahan sekumpul berupa pembangunan gapura dan penataan drainase di kelurahan sekumpul dan kelurahan pekauman yang menjadi bagian kawasan santri. Pada tahun 2018 ini upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah Pada tahun 2018, Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan penanganan penurunan angka backlog rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan kegiatan peningkatan kualitas hunian. Program tersebut dinamakan Bedah Rumah Barokah dengan sumber pendanaan berasal dari dana APBD. Petunjuk teknis penanganan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (Program Bedah Rumah Barokah) untuk tahun 2018 dilakukan sebanyak 15 unit yang tersebar di Kabupaten Banjar

b. Penurunan Jumlah Kasus Kriminal

Indikator lainnya untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama adalah Penurunan Jumlah Kasus Kriminal, merupakan indikator proxi (pendekatan) karena sulit menemukan indikator yang Smart untuk mengukur hasil dari pengamalan nilai-nilai agama. Apabila nilai-nilai agama diamalkan maka orang tersebut akan memiliki akhlak yang baik dan tentu tidak akan melanggar norma dan peraturan yang berlaku serta tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kasus kriminal yang dimaksud pada indikator ini adalah kasus Narkotika dan Penyalahgunaan obat keras/tidak layak edar.

Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 93,79% atau dengan sangat tinggi, diperoleh dari capaian penurunan kasus kriminal yang ditargetkan menjadi 145 kasus, berhasil diturunkan atau

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

menjadi 154 kasus. (semakin rendah realisasi semakin tinggi capaian kinerja)

Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 5. Capaian Indikator Penurunan Jumlah Kasus Kriminal Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	171	71,93%	145	154	93,79%	141	90,78%

Capaian kinerja tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 71,93% mengalami peningkatan sebesar 21,86 atau menjadi 93,79%. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD capaian tahun 2018 ini telah menyumbang penurunan kasus kriminal dengan capaian 90,78% dimana akhir periode ditargetkan sebesar 141 kasus,

Perkembangan kasus narkoba selama periode 2015 – 2018 di kabupaten Banjar lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6. Perkembangan Kasus Narkoba di Kabupaten Banjar Tahun 2015 s/d 2018

No	jenis kasus	2015	2016	2017	2018
1	Mengedarkan obat keras/tidak izin edar	95	108	136	17
2	Narkotika (transnasional)	54	78	32	118
3	Psikotropika (Transnasional)	2	0	3	19
Jumlah		151	186	171	154

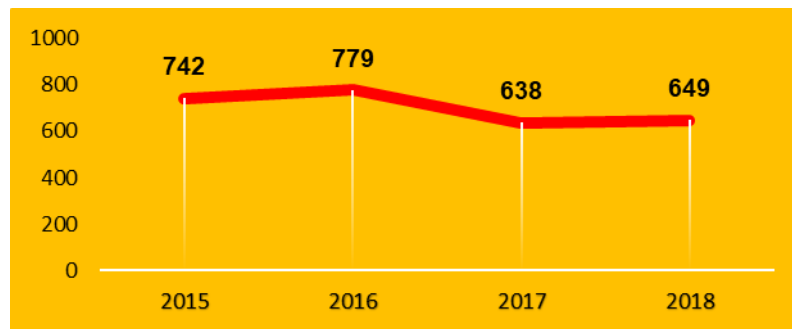
Kasus narkoba selama periode 2015-2018 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, Pada tahun 15 terjadi sebanyak 151 kasus, mengalami peningkatann ditahun berikutnya (2016) menjadi 243 kasus kemudian dapat diturunkan menjadi 171 kasus pada tahun 2017. pada tahun 2018 dapat kembali ditekan menjadi 154 kasus.

Diilihat dari jenis kasusnya, kasus pengedaran obat keras mengalami perbaikan yang sangat menggembirakan, pada tahun

2018 dapat ditekan sehingga kasus yang muncul hanya sebanyak 17 kasus, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 136 kasus. Namun pada kasus narkoba terjadi peningkatan yang sangat tajam dan mengawatirkan, pada tahun 2018 menjadi 118 kasus atau meningkat sebanyak 86 kasus atau 268,75% dari 32 kasus yang terjadi ditahun 2017.

Dilihat dari jumlah kriminal keseluruhan di kabupaten banjar dari tahun 2015 s/d 2018 terjadi fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terjadi kasus kriminal sebanyak 742, terjadi peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 779 kasus atau bertambah sebanyak 37 kasus (merupakan kasus terbanyak selama periode 2015 – 2018). Kemudian pada tahun 2017 dapat ditekan menjadi 638 kasus atau berkurang sebanyak 141 kasus (-18,10%) dan pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan sebanyak 11 kasus atau 1,72% menjadi 649 kasus

Gambar 3. 2. Grafik Perkembangan Kasus Kriminal di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018



Sumber : Laporan Polres Banjar

Upaya penurunan kasus kriminal diintervensi sesuai kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah melalui program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dengan indikator Persentase penyuluhan didaerah rawan narkoba dengan capaian sebesar 120% dimana realisasi sebesar 30% telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Daerah yang dianggap rawan narkoba ada 10 Kecamatan yaitu Aluh-Aluh, Kertak hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Kota, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Mataraman, Martapura Timur. Pada tahun 2018 penyuluhan terkait narkoba yang berada didaerah rawan tersebut yaitu Martapura Kota, Sungai Tabuk dan Aluh-Aluh. Capaian Program tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut

1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba, hal yang telah dilakukan adalah :

- Melakukan penyuluhan narkoba di Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kota, Desa Gudang Hirang Kec Sungai Tabuk, Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh, Desa Batu Balian Kecamatan Sambung Makmur dan Desa Antasan Senior Ilir Kecamatan Martapura Barat. jumlah peserta masing-masing per Desa adalah 60 Peserta, jadi total untuk kegiatan di Desa/Kecamatan berjumlah 300 peserta.
 - Pembinaan santri di Lapas (Lembaga Perasyarakatan) Kelas IIA Martapura Kabupaten Banjar. Martapura 31 Juli 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar bersama-sama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura memberikan penyuluhan kepada para penghuni lapas terutama penghuni lapas narkoba khusus anak. Penghuni lapas yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Santri Lapas ini dihadirkan sekitar 150an peserta.
 - Kegiatan Pembentukan/pembinaan desa bebas narkoba atau Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) bertempat di Desa Tunggul Irang, Kec Martapura Kota dengan jumlah peserta 150 orang. Senin 19 November 2018 bertempat di Desa Tunggul Irang Ilir Pemerintah Daerah Kab Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak henti-hentinya menyerukan akan bahaya dan kerugian dari barang haram yang disebut Narkoba ini. Dengan diisi narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel, Satpol PP Banjar dan Polres Banjar kita mengharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan bahkan menjauhi barang kotor ini.
 - Untuk gerak jalan anti narkoba dan pembentukan satgas gerakan anti narkoba tidak dapat terlaksana, dikarenakan terkendala waktu dan tempat kegiatan.
2. Persentase kawasan yang dibina, dengan target 50% dari 40 kegiatan sampai dengan tahun 2020 dan realisasi yaitu 55% atau 12 kegiatan pada tahun 2018 dan 10 keg pada tahun 2017 terkait penyuluhan pencegahan praktek perjudian dan pencegahan membawa sajam.

Kegiatan Penyuluhan pencegahan praktek perjudian dan pencegahan membawa saja. Adapun lokasi kegiatannya berlokasi 6 Desa sebagai berikut dengan masing-masing 60 peserta dengan narasumber dari polres banjar, BNN Prov Kal-Sel dan dari Bakesbangpol :

1. Desa Bincau, Kecamatan Martapura Kota
2. Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur

3. Desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut
4. Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan
5. Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar
6. Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul

Faktor yang mendorong terjadinya kasus narkoba antara lain :

- a. Faktor ekonomi, bisnis haram dengan menjual narkoba menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Tergidir dengan keuntungan tersebut menjadi pemicu meningkatnya kasus narkoba di kab. Banjar. Sebagai ilustrasi satu gram Sabu dipasar gelap harganya rata-rata Rp 1.3 juta dan jika di pecah untuk dijual lagi bisa sampai Rp 2 juta, tentunya bisa mecapai 2x lipat keuntungannya.
- b. Walaupun di kabupaten banjar tidak ada tempat hiburan namun posisi Kab. Banjar sebagai penyangga kota yang berbatatatan dengan kota kota banjarmasin dan banjarbaru
- c. Penyalahgunaan obat tidak layak edar untuk lari dari Depresi /tekanan hidup yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lainnya
- d. Lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat
- e. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
- f. Kebiasaan sebagian masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa izin dengan alasan tuah dari sajam dapat memberikan keselamatan

Langkah langkah/solusi yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Menanamkan nilai-nilai kesadaran dengan berlandaskan norma hukum pembinaan dan penyuluhan, membentuk satgas anti narkoba ditiap kecamatan. Pencegahan narkoba melalui pendekatan keluarga melalui Pembinaan desa bebas narkoba,
- b. Selalu melibatkan unsur dari kepolisian dalam setiap pembinaan dan penyuluhan terkait kegiatan yang berhubungan dengan penurunan jumlah kriminal.

Upaya yang dilakukan dimasa yang akan datang

1. Mengusulkan membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)
2. Lebih mengintensifkan lagi penyusuluhan pada titik rawan pelanggaran Pendekatan kepada generasi muda melalui pemilihan pemuda/pemudi pelopor anti narkoba

c. Jumlah Dana BAZ Yang Tersalurkankan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Indikator ini merupakan indikator ketiga dari sasaran meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama. Hasil capaian Jumlah Dana BAZ yang tersalurkan pada tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 7. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dana BAZ yang Tersalurkan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) <i>jika ada</i>	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD 10=7/9
						Target	Realisasi	Capaian (Realisasi / Target) 8=7/6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama	Jumlah Dana BAZ yang tersalurkan		374.280.000	156%	280.000.000	779.246.170	278%	360.000.000	216.46%

Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dengan indikator kinerja sasaran Jumlah dana BAZ yang tersalurkan. Indikator Kinerja jumlah dana BAZ yang tersalurkan memiliki definisi operasional berupa jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun muzakki/ masyarakat dan disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat sedangkan formulasinya berupa dana zakat yang tersalurkan.

Dalam rangka merealisasikan peran kontribusi zakat, infaq dan sedekah bagi masyarakat Kabupaten Banjar, maka Pemerintah Kabupaten Banjar membentuk lembaga BAZNAS Kabupaten Banjar. BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan Lembaga Pemerintah non Struktural yang bersifat mandiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, serta mengupayakan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah dalam dalam rangka memberdayakan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip :

- Skala prioritas.
- Pemerataan
- Keadilan dan
- Kemitraan

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Banjar menuju Kabupaten yang Sejahtera dan Barokah.

Prinsip dasar pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar :

- Kepercayaan.
- Amanah.
- Transparan

Program Pendistribusian dan Pendayagunaan :

1. Banjar Taqwa :
 - Bantuan Muallaf
 - Bantuan Fisabilillah
 - Bantuan Keagamaan.
2. Banjar Peduli :
 - Bantuan/santunan fakir, miskin.
 - Bantuan Ibnu Sabil.
 - Bantuan Gharim.
 - Bantuan paket ceria Dhu'afa.
 - Bantuan pasca bencana.
 - Bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa.
3. Banjar Makmur :
 - Bantuan peningkatan `usaha produktif.
4. Banjar Cerdas :
 - Bantuan pendidikan bagi siswa(i) yang orang tuanya kurang mampu.
 - Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam.
5. Banjar Sehat :
 - Bantuan dhuafa yang sakit.

Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar sampai bulan Nopember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 8. Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2018

I	Penerimaan /Pengumpulan:	
	Saldo Tahun 2017	Rp. 111.697.246,-
II	Pengumpulan	
	Zakat	Rp. 233.5700.500,-
	Infaq, Shadaqah	Rp. 485.546.300,-
	Jumlah Pengumpulan	Rp. 719.116.800,-
III	Pengeluaran/Pendistribusian	
	Fakir	Rp. 14.509.000,-
	Miskin	Rp. 533.191.170,-
	Muallaf	Rp. 1.000.000,-
	Fisabilillah	Rp. 211.395.000,-
	Ibnu Sabil	Rp. 575.000,-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

	Gharim	-
	Riqab	-
	Amil	Rp. 18.576.000,-
	Jumlah Pengeluaran/Pendistribusian	Rp. 779.246.170,-
	Saldo Akhir (I+II-III)	Rp. 51.567.876,-

Pada tahun 2018 dari target Penyaluran BAZNAS Kabupaten Banjar sebesar Rp 280.000.000,- maka sampai November 2018 realisasi penyaluran sebesar Rp.779.246.170 capaian realisasi yang cukup tinggi yaitu 278% hal ini terlihat peranan BAZNAS yang cukup besar dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Banjar.

Seluruh pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Banjar dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp.719.116.800- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Saldo Tahun 2017 sebesar Rp.111.697.246,-(Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). Sedangkan Pengeluaran ZIS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp.779.246.170,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari penyaluran ZIS kepada yang berhak dan pengeluaran Operasional dari hak amil. Sisa saldo akhir sampai dengan bulan Nopember untuk tahun 2018 sebesar Rp.51.567.876,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puuh Enam Rupiah).

Capaian Realisasi ini sangat baik yaitu 278% hal ini terlihat peran BAZNAS yang cukup besar dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Banjar. Adapun capaian kinerja sasaran di atas didukung oleh program Penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar

Keberhasilan kinerja diatas merupakan hasil daripada keberhasilan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar.

Untuk merealisasikan penerimaan dan pengumpulan dana BAZ maka BAZNAS Kabupaten Banjar membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada SKPD, Kecamatan Badan Usaha Milik Daerah, KPUD dan

Kementerian Agama, Pada Tahun 2018 Telah terbentuk 59 unit pengumpul zakat , yang terdiri dari 34 UPZ SKPD, 20 UPZ Kecamatan, 3 UPZ perusahaan daerah, 1 UPZ Kementrian Agama dan 1 UPZ KPUD.

Selain dilaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana BAZ, juga terlaksana kegiatan sebagai berikut :

- Telah terbentuknya panitia untuk melaksanakan hari hari besar nasional dan keagamaan,
- Terlaksananya monitoring tenaga sosial keagamaan di kecamatan Paramasaan dan da'i transmigrasi di Kecamatan Cintapuri Darussalam
- Terlaksananya safari ramadhan Bupati Banjar dan Wakil Bupati dan pejabat Kabupaten Banjar ke Masjid Masjid di 19 (Sembilanbelas) kecamatan
- Terlaksananya buka puasa bersama Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar
- Terlaksananya pemberangkatan TPHD
- Terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan calon jamaah haji
- Terlaksananya maulid habsyi dimahligai sultan adam
- Terlaksananya sosialisasi kegiatan Baznas dan sosialisasi hibah keagamaan
- Terbentuknya panitia sosialisasi Baznas dan Sosialisasi hibah keagamaan
- Terlaksananya pemberian uang saku kepada petugas hari hari besar nasional dan keagamaan non PNS, peserta sosialisasi Baznas dan sosialisasi hibah keagamaan.
- Terlaksananya pemberian honorarium narasumber sosialisasi Baznas dan sosialisasi hibah keagamaan , dan kelompok pembaca syair maulid
- Terlaksananya pemberian insentif kepada penceramah apel gabungan
- Terlaksananya pemberian insentif kepada penceramah safari ramadhan
- Terlaksananya pemberian insentif kepada Tenaga Sosial Keagamaan, Dai Taransmigrasi , qori dan penceramah acara buka puasadi Mahligai Sultan Adam, tenaga operator computer S1 dua orang dan satu D3, cleaning service, petugas kebersihan mushala Al adli pemkab Banjar, pembaca doa hari hari besar,

- Terlaksananya pemberian upah kepada petugas operator computer dua orang dan satu D3 serta cleaning service dan tenaga angkut barang jamaah haji, petugas kebersihan mushala Al Adli Pemkab Banjar
- Terlaksananya pembayaran pelayanan kesehatan melalui BPJS bagi Tokoh Masyarakat dan Ulama

Permasalahan

- Masyarakat atau muzaki sebagian besar masih menyalurkan Zakat, Infaq, sadaqohnya secara sendiri bukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

Solusi

- Mengajurkan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat infaq sadaqoh melalui lembaga resmi yaitu BAZNAS.
- Melakukan pembinaan pada unit-unit pengumpul zakat agar dapat lebih meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui unit-unit pengumpul zakat yang ada di wilayah kab. Banjar

3.2.2. Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Peserta Didik

Kemampuan baca tulis Alqur'an merupakan bekal utama bagi siswa untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran islam dimasa depan, oleh karenanya pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuan baca tulis Alqur'an pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan Alqur'an di lembaga pendidikan dasar.

Sejalan dengan itu kemampuan baca tulis Alqur'an dijadikan salah satu sasaran untuk melaksanakan misi pertama dokumen RPJMD. Hasil pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an peserta didik dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu indikator Prosentase Peserta Didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an menunjukkan capaian sebesar 105,64 % dengan predikat Sangat Tinggi.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an peserta didik:

Tabel 3. 9. Realisasi dan Capaian Sasaran Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an Peserta Didik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM)	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an	-	99,54%	108,2	94,00%	99,30%	105,64 %	98,00 %	101,33 %

a. Prosentase Peserta Didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran.

Peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran adalah peserta didik lulus/tamat belajar pada jenjang SD/SMP yang dapat membaca Al Qur'an dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid .

Formulasi perhitungan prosentasi peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran adalah jumlah peserta didik lulus/tamat belajar pada jenjang SD/SMP yang dapat membaca Al Qur'an dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid dibagi jumlah seluruh peserta didik SD/SMP yang lulus/tamat belajar pada tahun n dikali 100 %.

Kompetensi baca tulis Al-Quran dimaksud disini sebagaimana perda Nomor 4 tahun 2004 pada masing-masing jenjang pendidikan adalah adalah :

- 1) Bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SD/ MI diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al Qur'an dan Khatam Al-Qur'an serta hafal 10 (sepuluh) surah pendek.
- 2) bagi peserta didik yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat SMP/ MTS diwajibkan memiliki kemampuan membaca, menulis Al-Qur'an dan Khatam Al Qur'an serta hafal 22 (dua puluh dua) surah pendek

Bagi peserta didik yang sudah memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan telah Khatam Al-Qur'an akan diberikan sertifikat sebagai tanda pengakuan dan bukti terhadap prestasi baca tulis Al-Qur'an. Peserta didik yang wajib untuk memiliki kemampuan baca

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

tulis Al-Qur'an dan Khatam Al-Qur'an adalah mereka yang beragama Islam sedangkan bukan muslim tidak diwajibkan.

Capaian prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran pada tahun 2018 adalah 105,64%, didapat dari realisasi sebesar 99,30% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 94%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 108,2, capaian tahun 2018 menurun sebesar 2,56%

Realisasi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

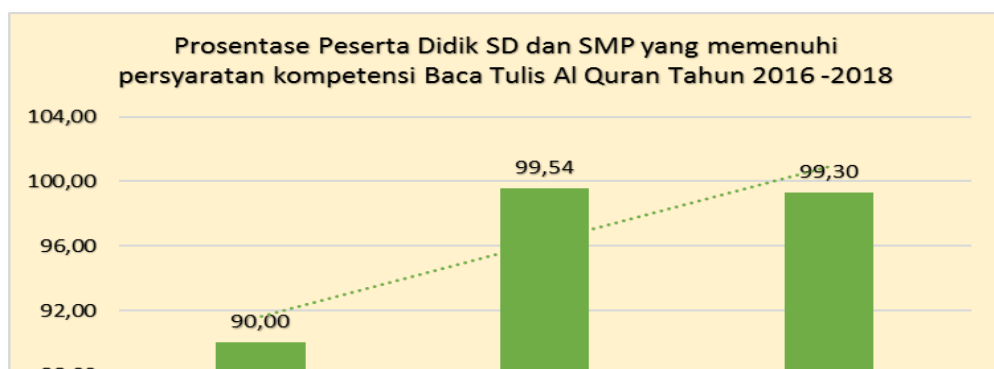
Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis AlQuran	=	$\frac{\sum \text{peserta didik lulus/tamat jenjang SD dan SMP dapat membaca Al Quran sesuai kaidah Tajwid}}{\sum \text{peserta didik SD dan SMP yang lulus pada tahun 2018}} \times 100\%$	
	=	$\frac{82.479 \text{ siswa}}{83.059 \text{ siswa}} \times 100\%$	= 99,30%

Dibandingkan dengan tahun 2017, prosentase peserta didik yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran mengalami penurunan sebesar 0,24 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 99,54% menjadi 99,30% pada tahun 2018. Penurunan ini bukan berarti realisasi tidak baik tetapi karena jumlah lulusan pada tahun 2018 tidak semua beragama Islam. Dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,30% yaitu pada tahun 2016 sebesar 90% menjadi 99,30% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang sebesar 101,33% dari target 98,00% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 105,64% berarti masuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Perkembangan Realisasi prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran pada tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 3. Prosentase Peserta Didik SD dan SMP yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Baca Tulis Al Quran Tahun 2016 -2018



Faktor-faktor penunjang keberhasilan capaian prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Qur'an pada sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an peserta didik adalah :

- Upaya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an telah didukung dengan adanya perda nomor 04 Tahun 2004 tentang khatam Al-Qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar
- Meningkatnya kesadaran orang tua dan siswa akan pentingnya kemampuan baca tulis Alqur'an
- Dinas Pendidikan selalu dan rutin melakukan sosialisasi masalah pentingnya membaca Al Qur'an ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari.
- Setiap Tahunnya UPT Pendidikan Kecamatan selalu melakukan acara Khatam Al Qur'an.
- Capaian tidak mencapai 100% dikarenakan adanya siswa non muslim dan siswa yang telah memiliki sertifikasi Khatam Al Qur'an dari lembaga pendidikan Al Qur'an.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
 Realisasi kegiatan berupa :

- Menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal sebagai bahan kajian pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten yang memuat materi pembelajaran tentang Membaca Al Qur'an, menyalin ayat-ayat Al Qur'an, menghafal surah tertentu/ayat tertentu, dan Batamat Al Qur'an.
 - Kegiatan Seminar Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
 - Sosialisasi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
- Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal untuk membentuk sikap, pemahaman, dan ketrampilan peserta didik terhadap potensi di Kabupaten Banjar. Jumlah peserta 150 orang.
- Program Pendidikan Non Formal
 - ✓ Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
 - Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Sub Keegiatannya adalah Pemberian Insentif Guru TPQ Al Qur'an BKPRMI, Al-Banjari, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah, , bertujuan meningkatkan kesejahteraan Guru Ustadz/Ustadzah TPQ Al Qur'an, Diniyah dan Pondok Pesantren dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya baca tulis Al Qur'an secara baik dan benar sesuai dengan Perda Khatam Al Qur'an Nomor 4 Tahun 2014.

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa akan datang dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai adalah:

- Meningkatkan wawasan Baca Tulis Al Qur'an bagi guru PAI.
- Melakukan sosialisasi kurikulum muatan Al Qur'an.
- Melakukan pengadaan Kitab Suci Al Qur'an ke sekolah – sekolah.

3.2.3. Berkurangnya Pelanggaran Perda Kearifan Lokal

Berkurangnya pelanggaran PERDA bernuansa kearifan lokal merupakan satu sasaran dari tujuan Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, capaian kinerja dari sasaran ini diukur melalui indikator Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal. Hasil pengukuran capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10. Realisasi dan Capaian Sasaran Berkurangnya Pelanggaran PERDA Kearifan Lokal

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...)	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Penurunan jumlah pelanggaran perda yang bernuansa kearifan lokal	-	42 Kasus	-150%	10 Kasus	52 Kasus	-320%	6	-666,67

indikator ini dikatakan baik pencapaiannya apabila realisasinya semakin rendah dan sebaliknya buruk apabila capaiannya tinggi, untuk indikator seperti ini mengukurnya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Pada tahun 2018 terdapat 52 kasus pelanggaran, realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 10 kasus dengan capaian sebesar -320%, dapat dikategorikan sangat rendah. Dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 6 kasus, maka diperoleh capaian sebesar -666,67% hal ini menunjukkan perlunya upaya dan perhatian yang lebih kuat lagi agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

PERDA yang bernuansa kearifan lokal yang dimaksud disini adalah Perda Nomor 05 tahun 2004 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombong Dan Yang Sejenis Serta Makan Minum Dan Atau Merokok Ditempat Umum Pada Bulan Ramadan. Pada tahun 2017 terdapat 42 kasus pelanggaran, dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi kasus pelanggaran, tahun 2015 jumlah kasus pelanggaran sebanyak 19 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2016 dapat ditekan hingga menjadi 13 kasus, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan.

Jenis pelanggaran PERDA yang bernuansa kearifan lokal paling banyak terjadi adalah melakukan aktivitas makan minum dan merokok ditempat umum pada siang hari di bulan Ramadhan, lebih rinci jenis pelanggaran perda dapat dilihat pada tabel berikut :

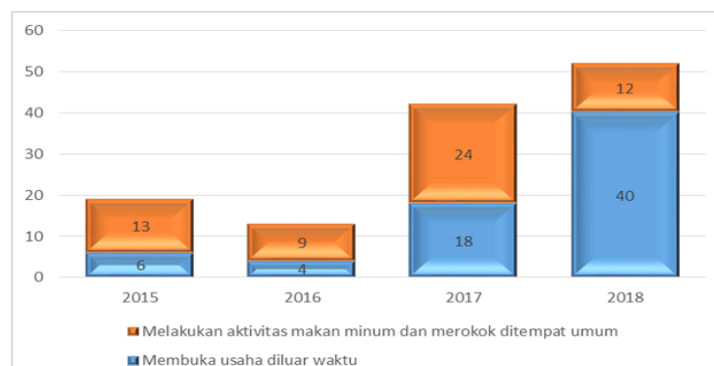
Tabel 3.11. Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda Berkearifan Lokal

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Uraian Jenis Kasus Pelanggaran	2015	2016	2017	2018
Membuka usaha diluar waktu	6 kasus	4 kasus	18 kasus	40 Kasus
Melakukan aktivitas makan minum dan merokok ditempat umum	13 kasus	9 kasus	24 kasus	12 Kasus
Jumlah Kasus Pelanggaran	19 kasus	13 kasus	42 kasus	52 Kasus

Selama periode tahun 2015 s/d 2018 terjadi fluktuasi kasus pelanggaran perda dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah kasus pelanggaran ada sebanyak 19 kasus, pada tahun berikutnya dapat ditekan menjadi 13 kasus, namun ditahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 42 kasus pelanggaran yang ditangani antara lain 18 kasus kegiatan membuka usaha diluar waktu yang telah diatur didalam Perda dan melakukan aktifitas makan minum dan merokok ditempat umum diluar waktu yang telah diatur didalam Perda terdapat 24 kasus. Kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan 10 kasus pelanggaran yang ditangani menjadi 52 kasus terdiri dari 40 kasus pelanggaran karena membuka usaha dagang menjual makanan dan minuman diluar waktu dan 12 kasus melakukan aktivitas makan minum dan merokok ditempat umum pada bulan ramadhan.

Gambar 3. 4. Kasus Pelanggaran Perda Berkearifan Lokal Periode Tahun 2015 s/d 2018



Dilihat dari jenis kasus, kasus membuka usaha dagang menjual makanan dan minuman diluar waktu mengalami peningkatan sangat tajam yakni sebesar 40 kasus atau meningkat sebesar 122,22%. Namun sebaliknya pada kasus melakukan aktivitas makan dan minum ditempat umum mengalami penurunan dari 24 kasus pada tahun 2017 dapat ditekan menjadi 12 kasus pada tahun 2018

Tingginya tingkat temuan dan penyelesaian kasus di dukung oleh

- a) pelaksanaan operasi dilakukan terencana oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan unsur TNI/POLRI yang merupakan mitra kerja dari Satpol PP Kabupaten Banjar dan penanganan penyelesaian pelanggaran kasus berkoordinasi dengan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang mana proses penanganan kasus langsung ditangani oleh PPNS yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Banjar
- b) Tingkat sumber daya aparatur terutama dalam petugas penyelesaian kasus seperti PPNS dan perangkat pendukungnya berkerja secara professional dan optimal dalam penanganan kasus

Program dan kegiatan pada perangkat daerah yang dilakukan pada tahun 2018 untuk menurunkan pelanggaran perda kearifan lokal adalah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal pada tingkat program indikator kinerja yang ingin dicapai adalah persentase kasus pelanggaran Perda bernuansa kearifan lokal dengan tingkat penyelesaian target 100% dari 52 kasus pelanggaran perda berkearifan lokal yang didapat dalam hasil pelaksanaan operasi gabungan bersama TNI/Polri dapat diselesaikan seluruhnya atau dengan capaian sebesar 100% atau skala yang didapat Sangat Tinggi.

Kinerja program tersebut didukung oleh kegiatan :

- a) Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi Perda bernuansa kearifan lokal.
- b) Jumlah pelaksanaan operasi penegakan perda berkearifan lokal

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 12. Capaian Program / Kegiatan Pendukung Sasaran

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Realisasi Tahun (n-1)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Penurunan jumlah pelanggaran perda yang bernuansa kearifan lokal	Persentase tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda dan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

	lainnya							
Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi Perda bernuansa kearifan lokal	87,5%	20 kali	20 kali	100%	35 kali	57,14%	
	Jumlah pelaksanaan operasi penegakan perda berkearifan lokal	100%	20 opgab	20 opgab	100%	35 opgab	100%	

Tabel diatas menunjukkan capaian target kinerja pada program pencapaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan 100% atau kriteria penilaian realisasi kinerja yang didapat adalah Sangat Tinggi dengan formulasi perhitungan dari Indikator program adalah :

Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Perda bernuansa kearifan lokal khususnya untuk penegakan Perda Nomor 05 tahun 2004 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombong Dan Yang Sejenis Serta Makan Minum Dan Atau Merokok Ditempat Umum Pada Bulan Ramadan, target yang ingin dicapai untuk tahun 2018 ini adalah 11 kecamatan selama 20 kali kegiatan/hari yaitu Kecamatan Martapura 10 kali, Kecamatan Martapura timur 2 kali, Martapura barat 1 kali, Kecamatan Sungai Tabuk 3 kali, Kecamatan Astambul 3 kali, Kecamatan Mataraman 4 kali, Kecamatan Simpang empat 3 kali, Kecamatan Gambut 4 kali, Kecamatan Kertak Hanyar 3 kali, Kecamatan Karang intan 1 kali, Kecamatan Aranio 1 kali

Untuk indikator kegiatan kedua terlaksananya operasi penegakan perda bernuansa kearifan lokal dengan target pada tahun 2018 adalah 100%.

Jumlah rencana kegiatan operasi gabungan adalah 20 kali kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan di 11 wilayah kecamatan

Permasalahan yang dihadapi masih tingginya kasus pelanggaran dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam usaha mewujudkan sasaran pertama yaitu berkurangnya pelanggaran Perda kearifan lokal dengan indikator kinerjanya penurunan pelanggaran perda yang bernuansa kearifan lokal butuh penangangan beberapa pihak tidak hanya Satpol PP, dimana beberapa SKPD atau instansi lain harus berperan dan mendukung dalam hal meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat Kabupaten banjar dalam menjalankan peraturan daerah yang bernuansa kearifan lokal serta meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dimasyarakat kabupaten Banjar.
- b) Tingginya kebutuhan masyarakat pada bulan puasa dan menghadapi hari raya yang menyebabkan tingginya pula

- tingkat pelanggaran.
- c) Jumlah aparat atau anggota Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Banjar.
 - d) Kurang pasnya penetapan indicator kinerja untuk tingkat sasaran yang mengakibatkan nilai capaian pada indicator sasaran bernilai rendah

Solusi yang dilakukan untuk menekan jumlah kasus pelanggaran Perda Kearifan Lokal adalah :

- a) Meningkatkan target kinerja dilevel kegiatan (eselon IV) terutama untuk indikator kinerja pertama persentase jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Perda bernuansa kearifan lokal, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dimasyarakat.
- b) Meningkatkan koordinasi kepada SKPD atau instansi lain yang mendukung atau berkaitan dengan perwujudan misi kepala daerah yang sama terutama pada misi 1 (pertama) dan atau terhadap peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bernuansa lokal.
- c) Merubah pola penyampaian atau penyebaran informasi dan sosialisasi berkenaan dengan perda berkearifan local.
- d) Merumuskan kembali penetapan indikator ditingkat sasaran pada reuiu renstra tahun depan agar ketika capaian ditingkat kegiatan, program bagus indikator sasaran juga berefek bagus.

3.2.4. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah.

Meningkatnya angka partisipasi sekolah merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan strategi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses sarana pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mengurangi jumlah siswa putus sekolah,

meningkatkan kesadaran kepada orangtua siswa akan pentingnya pendidikan terhadap anak-anaknya, meningkatkan jumlah sekolah inklusi sehingga anak dengan kebutuhan khusus pada tingkat awal dapat menjalani proses belajar di sekolah umum, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan serta meningkatkan peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket.

Capaian sasaran diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu : 1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB, 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB, 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB, 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB, 5) Angka Putus Sekolah (AptS) SD/MI/SDLB, 6) Angka Putus Sekolah (AptS) SMP/MTs/SMPLB, 7) Angka rata-rata lama sekolah dan 8) Angka Partisipasi Kasar PAUD.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran indikator sasaran meningkatnya angka partisipasi sekolah adalah dari laporan sekolah dan Disdukcapil (data penduduk) yang diolah/dianalisis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Pencapaian sasaran peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan hasil positif dengan capaian melebihi diatas 100% (di atas dari target yang ditetapkan) pada Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB (132,00) dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB (157,14), sedangkan capaian untuk indikator lainnya kurang memuaskan karena berada di bawah dari target yang ditetapkan meskipun capaian berada di atas 91% yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB (98,95%), Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB (98,60%) , Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB (91,99), Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB (92,21%), angka rata-rata lama sekolah (99,15%) dan angka partisipasi kasar PAUD (99,62%). Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (Renstra Kemendikbud)	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI /SDLB	82,88%	97,36%	101,32%	96,27%	95,26 %	98,95 %	96,63%	98,58 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

2.	APM SMP/MTs/SMPLB	73,07%	62,58%	98,61%	65,66%	64,74 %	98,60 %	70,06%	92,41 %
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	98,02%	113,72%	94,57%	120,70%	111,03 %	91,99 %	121,60%	91,31 %
4.	APK SD/MI /SDLB APK SMP/MTs/SMPLB	82,40%	86,40%	96,40%	94,20%	86,86 %	92,21 %	103,35%	84,04 %
5.	Angka Putus Sekolah (Apts) APtS SD/MI /SDLB	0,88%	0,27%	100%	0,25%	0,17 %	132,00 %	0,21%	119,05 %
6.	APtS SMP/MTs/SMPLB	1,08%	0,34%	162,22%	0,84%	0,36 %	157,14 %	0,74%	151,35 %
7.	Angka rata-rata lama sekolah	8,5 Tahun	7,6 Tahun	108,11%	7,07 Tahun	7,37 thn	104,24 %	7,14 Tahun	103,22 %
8.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	74,30%	67,80%	103,26%	68,12%	67,86 %	99,62 %	73,05%	92,90 %

Sumber : LKJIP Dinas Pendidikan Kab. Banjar, 2018

a. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/SDLB

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah SD/MI/SDLB (7-12 tahun) dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun dan dinyatakan dalam persentase. APM SD/MI/SDLB mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia sekolah 7 -12 tahun.

Formulasi perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB adalah jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%.

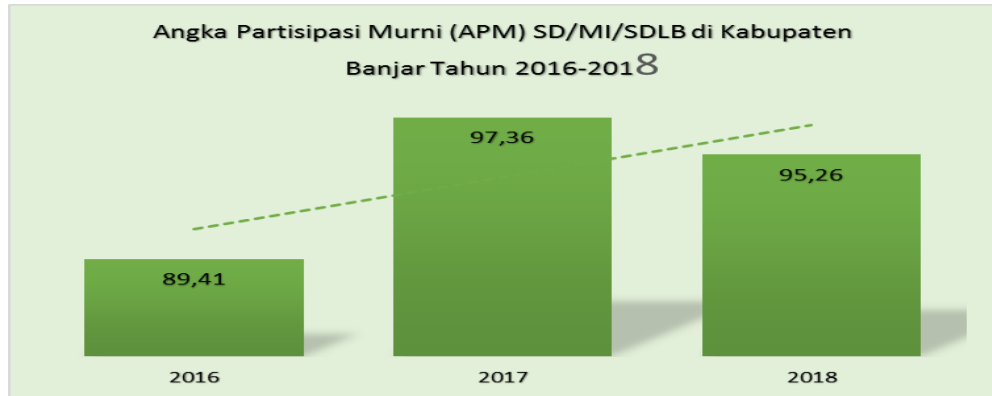
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB pada tahun 2018 adalah 98,95% didapat dari realisasi sebesar 95,26% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96,27%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (101,32%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 2,37%. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

APM SD/MI/SDLB	$= \frac{\sum \text{siswa usia 7-12 tahun pd jenjang SD/MI/SDLB}}{\sum \text{penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{50.554}{53.069} \times 100\% = 95,26\%$
----------------	---

Dibandingkan dengan tahun 2017 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB mengalami penurunan sebesar 2,1 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,36 % menjadi 95,26 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 98,58 % dari target 96,63 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 98,95 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi

Gambar 3. 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018



Pencapaian kinerja pada tahun 2018 di bawah dari target sebesar 96,27% . Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan berupaya maksimal dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan agar tercapai dengan baik.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat, APM SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar di atas provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 14. Perbandingan Realisasi APM SD/MI/SDLB

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
1	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB	93,00 %	92,20 %	95,26 %

Sumber data: Renstra Disdik Kab. Banjar, PDSPK Kemdikbud

Upaya yang dilakukan untuk keberhasilan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB antara lain adalah :

- Membangun dan memberikan izin operasional bagi sekolah baru yang sesuai prosedur di perbatasan padat penduduk untuk supaya dapat menampung peserta didik baru;
- Selalu melakukan kerjasama dan koordinasi untuk melakukan pendataan siswa;
- Mengoptimalkan program Paket A;
- Selalu memantau penerimaan murid baru di sekolah agar lebih diperhatikan dan tepat waktu.

Sedangkan langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa akan datang dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai adalah:

- Melengkapi sarana dan prasarana sekolah
- Meningkatkan fungsi pengawasan dan adanya sanksi bagi pelanggar aturan
- Mengoptimalkan kinerja pengawas sekolah

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah SMP/MTs/SMPLB (13-15 tahun) dengan penduduk usia sekolah 13-15 tahun dan dinyatakan dalam persentase. APM SMP/MTs/SMPLB mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia sekolah 13 -15 tahun.

Formulasi perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB adalah jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100%.

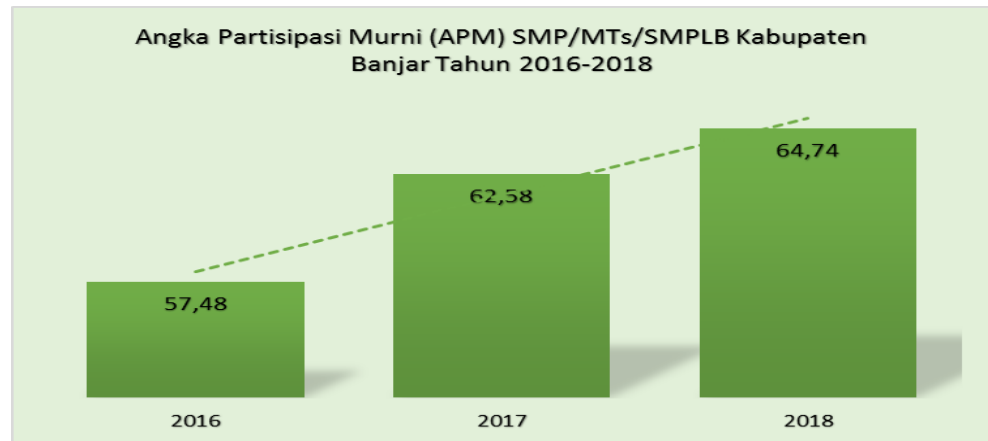
Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2018 adalah 98,60% didapat dari realisasi sebesar 64,74% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 65,66%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (98,61%), capaian tahun 2018 meningkat sebesar 0,01%. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

APM SMP/MTs/SMPLB	$= \frac{\sum \text{siswa usia 13-15 tahun pd jenjang SMP/MTs/SMPLB}}{\sum \text{penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
	$= \frac{17.987}{27.785} \times 100\% = 64,74\%$

Dibandingkan dengan tahun 2017 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB mengalami peningkatan sebesar 2,16 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 62,58 % menjadi 64,74 % pada tahun 2018, tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 92,41 % dari target 70,06 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 98,60 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Capaian tahun 2018 ini masih di bawah target sebesar 65,66%.

Gambar 3. 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018



Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat, APM SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar dibawah dari provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 15. Perbandingan Realisasi APM SMP/MTs/SMPLB

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
1	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	77,00 %	73,60 %	64,74 %

Sumber data: Renstra Disdik Kab. Banjar, PDSPK Kemdikbud

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya APM SMP/MTs/SMPLB sesuai dengan target yang ditetapkan adalah:

- Anak usia 13-15 di Kab. Banjar banyak bersekolah di Madrasah salafi dan pondok pesantren yang tidak tergolong jenjang pendidikan dasar, karenanya saat perhitungan APM santri ini tidak dihitung, karena mengalami kesulitan mendatannya.
- Kondisi Kab. Banjar memiliki geografis yang unik, seperti daerah daratan, daerah sungai, daerah perkotaan, pedesaan, terpencil, terjauh bahkan daerah perbatasan. Kondisi ini memberi dampak sulitnya anak usia sekolah melanjutkan pendidikannya seperti melewati rawa, sungai atau terpencil yang tidak tersedia alat transportasi umum karenanya banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat.
- Faktor ekonomis sangat berpengaruh juga seperti pemanfaatan anak untuk membantu mencari nafkah orangtua, sehingga tidak ada waktu lagi bagi anak bersekolah pada akhirnya tidak mau bersekolah lagi.

- Kawin dini banyak juga ditemui di usia 12-15 tahun di Kab. Banjar. Hal ini disebabkan oleh budaya daerah yang menyatakan orang tua merasa malu kalau anaknya tidak dikawinkan dan anggap mengurangi beban kehidupan orangtua.
- Domisili anak perbatasan menyebabkan banyaknya anak usia SMP sederajat melanjutkan ke Kab./Kota lain karena mereka beranggapan lebih dekat sekolah di Kab./Kota lain dan lebih bermutu dibanding sekolah di Kabupaten Banjar.

Solusi yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan agar APM SMP/MTs/SMPLB terus meningkat adalah:

- Anak yang di pondok pesantren dan salafiyah diwajibkan mengikuti pendidikan formal melalui SMP Terbuka dengan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di Madrasah itu sendiri.
- Segera menerbitkan Instruksi Bupati agar pengasuh Ponpes dan salafiyah mau membuka SMP Terbuka.
- Anak yang di pondok pesantren dan salafiyah diwajibkan mengikuti program kejar paket B (setara SMP)

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD/MI/SDLB terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI/SDLB (7-12 tahun). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB menggambarkan keikutsertaan penduduk dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk pada jenjang Pendidikan SD/MI/SDLB.

Formulasi perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB adalah jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SD/MI/SDLB dari berbagai usia dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikali 100%.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB pada tahun 2018 adalah 91,99% didapat dari realisasi sebesar 111,03% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 120,70%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (94,57%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 2,58%. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

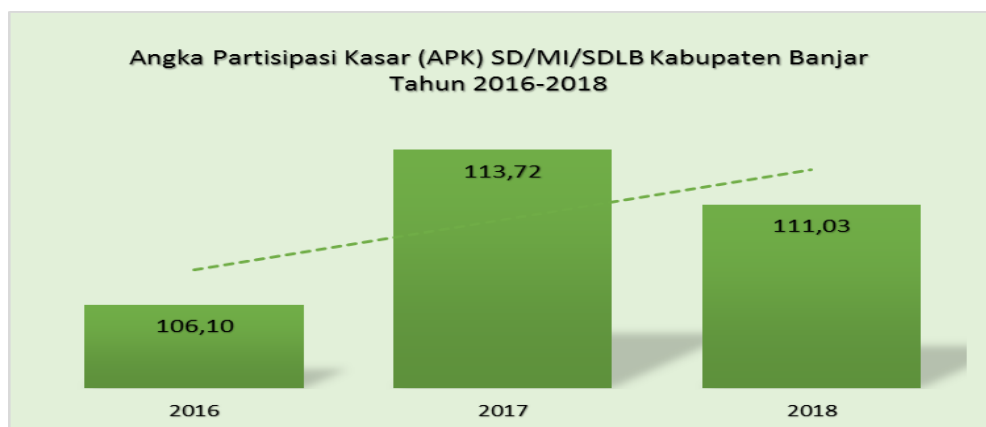
APK SD/MI/SDLB	$= \frac{\sum \text{siswa berbagai usia pd jenjang SD/MI/SDLB}}{\sum \text{penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
----------------	--

$$= \frac{58.925}{53.069} \times 100\% = 111,03\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB mengalami penurunan sebesar 2,69% yaitu pada tahun 2017 sebesar 113,72% menjadi 111,03% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 91,31 % dari target 121,60% pada tahun 2020. Capaian tahun 2018 masih dibawah dari target yang ditetapkan sebesar 120,70%.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 91,99 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi

Gambar 3. 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018



Jika dibandingkan dengan provinsi dan pusat realisasi APK SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar lebih tinggi dari provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 16. Perbandingan Realisasi APK SD/MI/SDLB

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB	105,90%	105,70 %	111,03 %

Sumber data: Renstra Disdik Kab. Banjar, PDSPK Kemdikbud

Faktor-faktor penunjang yang menyebabkan tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB pada sasaran meningkatnya angka partisipasi sekolah adalah:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak jumlah anak yang bersekolah;

- Adanya siswa SD/MI/SDLB yang berasal dari daerah/kota disekitar wilayah Kabupaten Banjar yang bersekolah di wilayah Kabupaten Banjar, misal siswa yang berdomisili di kota Banjarmasin tapi bersekolah di Kecamatan Kertak Hanyar/Gambut;
- Adanya program dari pemerintah untuk pendidikan gratis di jenjang pendidikan dasar, serta program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa yang kurang mampu.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP/MTs/SMPLB terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB (13-15 tahun). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB menggambarkan keikutsertaan penduduk dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk pada jenjang Pendidikan SMP/MTs/SMPLB.

Formulasi perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB adalah jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/SMPLB dari berbagai usia dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikali 100%.

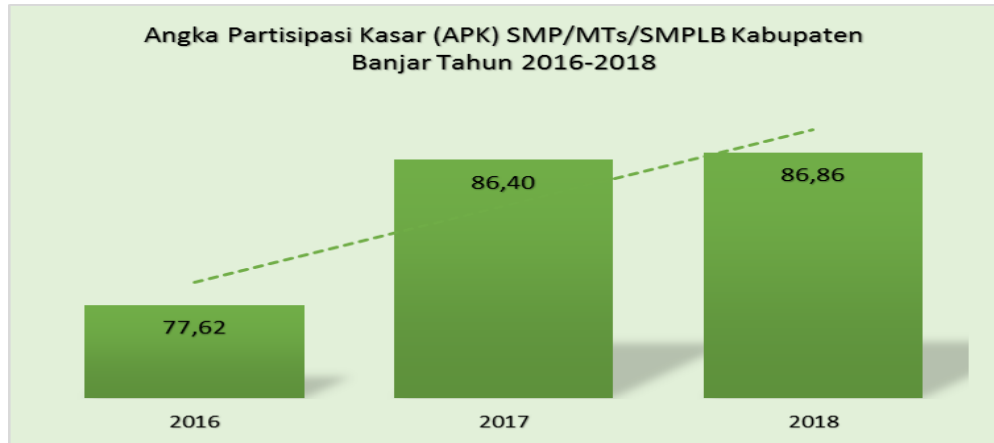
Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2018 adalah 92,21% didapat dari realisasi sebesar 86,86 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 91,20%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (96,40%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 4,19%. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

APK SMP/MTs/SMPLB	$= \frac{\sum \text{siswa berbagai usia pd jenjang SMP/MTs/SMPLB}}{\sum \text{penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
	$= \frac{24.134}{27.785} \times 100\% = 86,86\%$

Dibandingkan dengan tahun 2017 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB mengalami peningkatan sebesar 0,46% yaitu pada tahun 2017 sebesar 86,40% menjadi 86,86% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 84,04 % dari target 103,35% pada tahun 2020. Capaian tahun 2018 masih dibawah dari target yang ditetapkan sebesar 94,20%.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92,21 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi

Gambar 3. 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018



Jika dibandingkan dengan Provinsi dan pusat ,APK SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar masih dibawah provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 17. P Perbandingan Realisasi APK SMP/MTs/SMPLB

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB	102,10%	99,40 %	86,86 %

e. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI/SDLB

Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI/SDLB.

Formulasi Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB adalah Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang bersekolah

Capaian angka putus sekolah SD/MI/SDLB pada tahun 2018 adalah 132,00% didapat dari realisasi sebesar 0,17% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,25%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (100%), capaian tahun 2018 meningkat sebesar

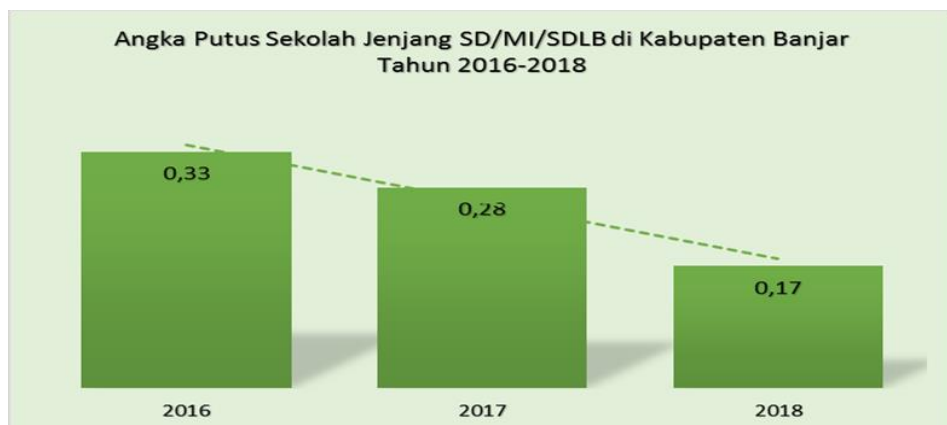
32%. Realisasi angka putus sekolah SD/MI/SDLB diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Angka putus sekolah SD/MI/SDLB	=	$\frac{\sum \text{penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\sum \text{penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/sedang bersekolah}}$	X 100%	
	=	$\frac{98}{58.459}$	X 100%	= 0,17%

Dibandingkan dengan tahun 2017, angka putus sekolah mengalami penurunan sebesar 0,1% yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,27% menjadi 0,17% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 119,05% dari target 0,21% pada tahun 2020. Realisasi pada tahun 2018 sangat baik karena kurang dari target sebesar 0,25%.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 132,00% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Gambar 3. 9. Perbandingan Realisasi APK SMP/MTs/SMPLB



f. Angka Putus Sekolah (APIS) SMP/MTs/SMPLB

Angka Putus Sekolah SMPMTs/SMPLB merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB.

Formulasi Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB adalah Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang bersekolah.

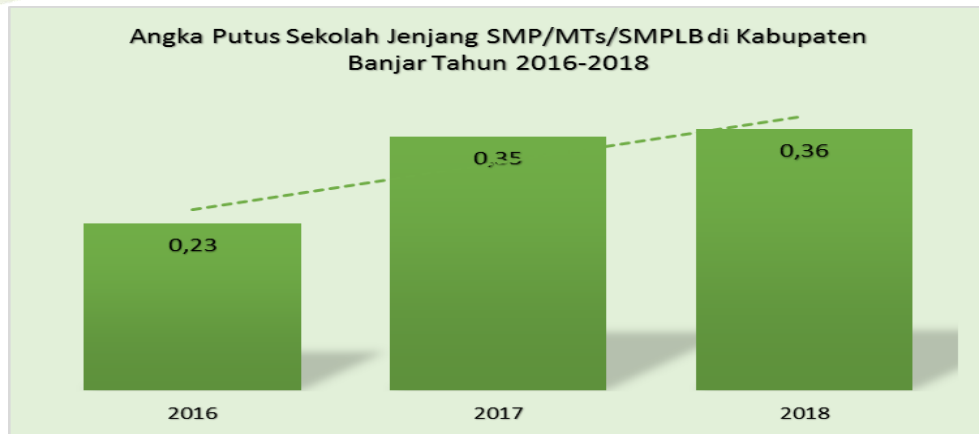
Capaian angka putus sekolah SMP/MTs/SMPB pada tahun 2018 adalah 157,14% didapat dari realisasi sebesar 0,36% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,84%. Dibandingkan capaian tahun 2017 (162,22%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 5,08%. Realisasi angka putus sekolah SD/MI/SDLB diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Angka putus sekolah SMP/MTs/SMPLB	$= \frac{\sum \text{penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\sum \text{penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\%$
	$= \frac{86}{23.931} \times 100\% = 0,36\%$

Dibandingkan dengan tahun 2017, angka putus sekolah SMP/MTs/SMPLB mengalami peningkatan sebesar 0,02% yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,34% menjadi 0,36% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 151,35% dari target 0,74% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 157,14% berarti masuk dalam kategori capaian kategori sangat tinggi.

Gambar 3. 10. Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs/SMPLB di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018



g. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Formulasi perhitungan angka rata rata lama sekolah adalah dari rumus :

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke} - i)$$

dengan:

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke-i =

- a. Tidak pernah sekolah = 0
- b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Capaian angka rata rata lama sekolah pada tahun 2018 adalah 104.24% didapat dari realisasi sebesar 7,37 tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 7,07 tahun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (108,11%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 3.87%. Realisasi angka rata rata lama sekolah diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar yaitu dari jumlah penduduk di Kabupaten Banjar secara keseluruhan sebanyak 548.120 orang, yang terbagi berdasarkan pendidikan :

- Tidak/belum sekolah 113.225 orang
- Belum tamat SD/sederajat 76.017 orang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

- Tamat SD/ sederajat 167.097 orang
- SLTP/ sederajat 86.170 orang
- SLTA/ sederajat 83.541 orang
- Diploma I/II 2.066 orang
- Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda 4.052 orang
- Diploma IV/ Strata I 14.977 orang
- Strata II 928 orang
- Strata III 47 orang

Tabel 3. 18. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar

Ijazah Pendidikan Formal Yang Dimiliki	Jumlah Penduduk 15 Keatas yang sedang sekolah/telah berijazah	Lama Masa Pendidikan Yang di habiskan	Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan Yang dihabiskan
S3/Doktor	47	21	987
S2	928	18	16.704
S1	14.977	16	239.632
DIII	4.052	15	60.780
DII	2.066	14	28.924
SMA/SMK/MA	83.541	12	1.002.492
SMP/MTs	86.170	9	77.553
SD/MI	167.097	6	1.002.582
Masih sekolah	76.017		76.017
Jumlah	434.895		3.203.648

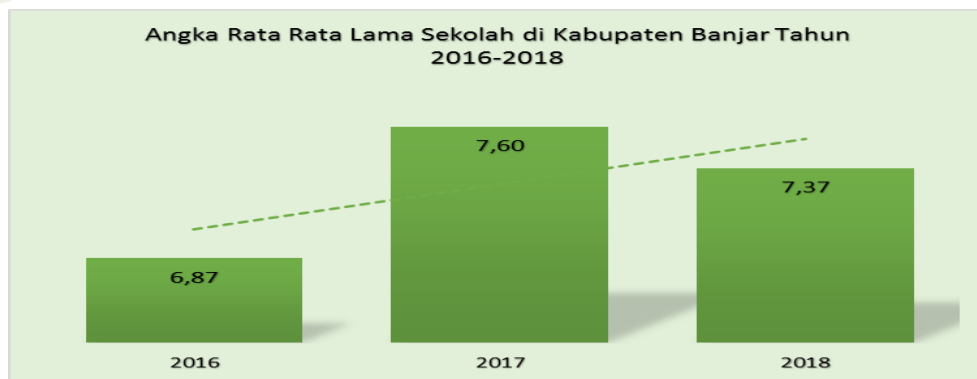
Sumber: Data Kependudukan semester I tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Jumlah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar} &: \frac{3.203.648}{434.895} \\ &= 7.37 \end{aligned}$$

Dibandingkan dengan tahun 2017, angka rata rata lama sekolah mengalami penurunan sebesar 0,23 yaitu pada tahun 2017 sebesar 7,6 tahun menjadi 7,37 tahun pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 103.22% dari target 7,14 tahun pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 104.24% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Gambar 3. 11. Angka Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2018



Pencapaian kinerja untuk indikator APM SD/MI/SDLB, APM SMP/MTs/SMPLB, APK SD/MI/SDLB, APK SMP/MTs/SMPLB, APTS SD/MI/SDLB, APTS SMP/MTs/SMPLB dan Angka rata-rata lama sekolah didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Target kegiatan adalah pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah sebanyak 4 ruang dengan realisasi kinerja sebanyak 4 ruang dengan capaian 100%.

Gambar 3. 12. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah SDN Pasar Kamis 1, Kertak Hanyar



- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Target kegiatan adalah penambahan ruang kelas sekolah sebanyak 18 ruang dengan realisasi sebanyak 18 ruang dengan capaian 100%.

Gambar 3. 13. Pembangunan ruang kelas baru SDN Pulau Nyiur 2, Karang Intan



- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Guru Sekolah
Target kegiatan adalah penambahan ruang guru sekolah sebanyak 4 ruang dengan realisasi sebanyak 4 ruang dengan capaian 100%.

Gambar 3. 14. Pembangunan Ruang Guru SDN Paau, Aranio



- ✓ Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Kegiatan ini merupakan kegiatan meningkatkan kualitas taman lapangan sebagai tempat upacara sekaligus tempat bermain. Realisasi kegiatan berupa pengurugan halaman, dan pemagaran SD dan SMP, dengan rincian sebagai berikut:

Pengurugan Halaman SD : sebanyak 7 SD, Pengurugan halaman SMP sebanyak 5 SMP, pembuatan pagar SD sebanyak 6 SD.

Gambar 3. 15. Pembangunan Pagar Halaman SDN Danau Salak 1, Astambul



Gambar 3. 16. Pengurugan Halaman SDN Keliling Benteng Tengah, Martapura Barat



- ✓ Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
Target kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah sebanyak 2 ruang laboratorium dengan realisasi kegiatan sebanyak 2 ruang laboratorium (laboratorium IPA dan keterampilan) dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Target kinerja kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary) adalah 6 unit di 6 SD dengan realisasi kinerja 6 unit dengan capaian 100%.
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membangun atau merehabilitasi prasarana sanitari berupa WC atau Jamban untuk para guru dan siswa sebagai sarana penunjang lainnya.

Gambar 3. 17. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary WC Guru dan Siswa SDN Sungai Uyak, Sambung Makmur



- ✓ Kegiatan Pengadaan Mebeleur Sekolah

Merupakan kegiatan untuk menyediakan prasarana untuk menunjang pembelajaran berupa pengadaan meja dan kursi siswa .

Realisasi kegiatan adalah pengadaan meja dan kursi pada 45 sekolah SD dengan rata rata satu sekolah sebanyak 32 set pada 37 sekolah SD dan 64 set pada 8 sekolah SD.

Gambar 3. 18. Pengadaan Meubeler SD Tahun 2018



- ✓ Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Target kinerja pada kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah (DAK reguler SMP) sebanyak 15 paket dengan realisasi kinerja sebanyak 15 paket di 15 SMP dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Kegiatan ini adalah kegiatan untuk memelihara dan memperbaiki Rumah Dinas untuk para kepala sekolah, guru atau penjaga sekolah yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak bisa didiami lagi.
Target kinerja pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah sebanyak 16 paket pada 16 sekolah SD dengan realisasi kinerja sebanyak 16 paket pada 16 sekolah SD dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah
Target kinerja pada kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sebanyak 33 ruang dengan realisasi kinerja sebanyak 33 ruang pada 11 sekolah SD dan 7 sekolah SMP dengan capaian 100%.

Gambar 3. 19. Rehabilitasi Berat SDN Tatah Pemangkih Baru, Tatah Makmur



- ✓ Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
Target kinerja pada kegiatan penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs sebanyak 85 sekolah dengan realisasi kinerja sebanyak 85 sekolah dengan capaian 100 %. Kegiatan berupa : ujian sekolah SD, Pra ujian sekolah SD, operasional dan monitoring BOS Kabupaten Banjar Tahun 2018
- ✓ Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Target kinerja pada kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sebanyak 3.312 siswa dengan realisasi kinerja sebanyak 3312 siswa dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa : olimpiade sains SD, olimpiade olahraga siswa nasional SD, gerak jalan beregu Hardiknas siswa SD, olimpiade olahraga siswa nasional, Festival lomba seni siswa nasional, lomba motivasi belajar mandiri.

Gambar 3. 20. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Tahun 2018



- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
Target kinerja pada kegiatan penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar sebanyak 40 sekolah dengan realisasi kinerja sebanyak 40 sekolah dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK reguler SMP)
Target kinerja pada kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK reguler SMP) sebanyak 1 paket dengan realisasi kinerja sebanyak 1 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga.
- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SD)
Target kegiatan adalah penambahan ruang kelas sebanyak 11 ruang kelas pada 7 sekolah SMP (DAK reguler SMP) .Realisasi kegiatan sebanyak 11 ruang kelas pada 7 sekolah SMP dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Barat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SD)
Target kegiatan (DAK reguler SD) sebanyak 34 ruang dengan realisasi kinerja sebanyak 34 ruang dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK Reguler SMP)
- ✓ Target kinerja pada kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah (DAK reguler SMP) sebanyak 1 paket dengan realisasi kinerja 1 paket dengan capaian (100%). Adapun realisasi kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah 1 paket (DAK reguler SMP).

- ✓ Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SD)
- ✓ Target kinerja pada kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK reguler SD) sebanyak 39 paket dengan realisasi kinerja sebanyak 39 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah (DAK reguler SMP).
- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)
Target kinerja pada kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK reguler SD) sebanyak 3 paket dengan realisasi kegiatan sebanyak 3 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary sebanyak 3 paket (DAK reguler SD).
Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary bertujuan agar terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dengan pemberian bantuan berupa jamban untuk sekolah.
- ✓ Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (DAK Reguler SMP)
Target kinerja kegiatan pembangunan gedung sekolah (DAK reguler SMP) sebanyak 2 paket dengan realisasi kegiatan 2 paket dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)
- ✓ Target kinerja kegiatan pembangunan gedung sekolah (DAK reguler SMP) sebanyak 25 unit dengan realisasi kegiatan sebanyak 25 unit dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)
Target kinerja kegiatan pembangunan gedung sekolah (DAK reguler SMP) sebanyak 1 paket dengan realisasi kegiatan 1 paket dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Barat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SMP)
Target kinerja pada kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK reguler SMP) sebanyak 10 paket pada 8 SMP dengan realisasi kegiatan sebanyak 10 paket pada 8 SMP dengan capaian 100%.

- ✓ Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)
Target kinerja kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK reguler SMP) sebanyak 1 paket dengan realisasi kegiatan 1 paket dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK reguler SMP).
- ✓ Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SKB)
Target kinerja pada kegiatan Pengadaan ruang kelas sekolah (DAK reguler SKB) sebanyak 4 ruang dengan realisasi kegiatan sebanyak 4 ruang dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP
Adapun realisasi kegiatan berupa Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP sebanyak 420 sekolah.
- Program Pendidikan Non Formal
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Diklat Tutor Paket A , Paket B dan Paket C dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan proses pembelajaran pada warga belajar dilembaganya dengan jumlah peserta 50 orang.
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
Target kinerja pada kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa :

 - Sosialisasi Ujian Nasional Paket B dan Paket C dengan jumlah peserta 60 orang

Gambar 3. 21. Sosialisasi Ujian Nasional Paket B dan C se Kabupaten Banjar Tahun 2018



- Sosialisasi Akreditasi Lembaga PKBM LKP dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang
- Kegiatan Workshop Pengelola PKBM dan LKP dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang

Gambar 3. 22. Sosialisasi Ujian Nasional Paket B dan C se Kabupaten Banjar Tahun 2018



- ✓ Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SKB)
Target kinerja pada kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa sebanyak 1 paket dengan realisasi kinerja sebanyak 1 paket dengan capaian 100%
Pengadaan koleksi buku perpustakaan satu paket sebanyak 1000 eksemplar buku dengan 180 judul.
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang

- Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif Guru TPA Al Qur'an, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah
- Diklat Mata pelajaran yang di UASDBN dengan peserta sebanyak 49 orang
- Seleksi Akademik Kepala SD yang memiliki NUKS dengan jumlah peserta sebanyak 89 orang
- Pelaksanaan program PKB Guru SD dengan jumlah peserta sebanyak 110 orang
- Kegiatan Kualitas Pembelajaran di Daerah Terpencil dengan jumlah peserta sebanyak 160 orang
- Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 43 orang
- Kegiatan Penunjang aneka tunjangan Guru SD dan SMP
- Kegiatan Diklat Kepala SD yang belum memiliki NUKS on the JOB learning ke sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang
- Kegiatan Diklat Kepala SD yang belum memiliki NUKS in servis 1 dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang
- Kegiatan Diklat Kepala SD yang belum memiliki NUKS in servis 2 dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang
- Kegiatan Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus berupa pemberian insentif kepada guru honor sebanyak 132 orang
- Kegiatan Operasional Korwas dengan peserta sebanyak 43 orang
- Kegiatan Pelaksanaan Validasi sertifikasi dan sosialisasi sertifikasi dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang
- ✓ Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Target kinerja pada kegiatan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi sebanyak 11 guru dengan realisasi kegiatan sebanyak 11 guru dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Target kinerja pada kegiatan Pengembangan mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebanyak 4 sekolah dengan realisasi kegiatan 4 sekolah dengan capaian 100%.

Untuk meningkatkan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar lebih profesional melalui kegiatan keterampilan penulisan artikel ilmiah.

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
Target kinerja pada kegiatan pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan sebanyak 1 kerjasama dengan realisasi sebanyak 1 kerjasama dengan capaian 100% Adapun kegiatan berupa keikutsertaan Dinas Pendidikan dalam Pameran Pembangunan pada saat HUT RI tahun 2018.
 - ✓ Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Target kinerja pada kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan adalah (3) dengan realisasi kinerja (3) dengan capaian (100%)
Adapun realisasi kegiatan berupa :
 - Kegiatan sosialisasi pendataan Pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 463 orang

Gambar 3. 23. Sosialisasi Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2018



- Kegiatan pelaksanaan validasi data kecamatan

Gambar 3. 24. Kegiatan Validasi Data Kecamatan Dinas Pendidikan Kab. Banjar Tahun 2018



h. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD yaitu Proporsi anak mengikuti pendidikan usia dini aktif pada jenjang pendidikan usia dini terhadap penduduk pada kelompok usia pendidikan usia dini.

Formulasi perhitungan jumlah anak didik PAUD dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun.

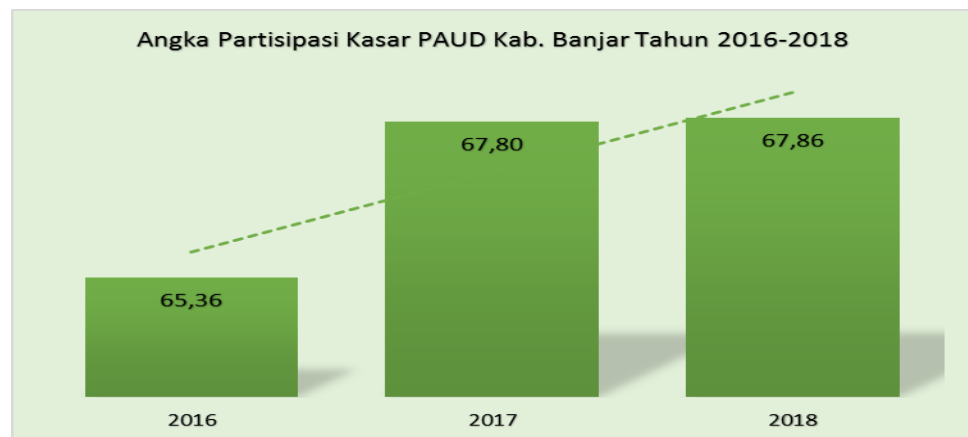
Capaian angka partisipasi kasar PAUD pada tahun 2018 adalah 99,62% didapat dari realisasi sebesar 67,86% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 68,12 %. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (103,26%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 3,64%. Realisasi angka partisipasi kasar diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

APK PAUD	$= \frac{\sum \text{anak didik PAUD}}{\sum \text{penduduk kelompok usia 0-6 tahun}} \times 100\%$
	$= \frac{17.786}{26.210} \times 100\% = 67,86\%$

Dibandingkan dengan tahun 2017, angka partisipasi kasar PAUD mengalami peningkatan sebesar 0,06% yaitu pada tahun 2017 sebesar 67,80 % menjadi 67,86 pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 92,90% dari target 73,05% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 99,62% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Gambar 3. 25. Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2018



Jika dibandingkan dengan Provinsi dan pusat APK PAUD Kabupaten Banjar masih dibawah provinsi dan pusat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 19. Perbandingan Realisasi APK PAUD antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Pusat	Propinsi	Kabupaten
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	74,30 %	69,30 %	67,86 %

Sumber data : Renstra Disdik Kab. Banjar, PDSPK Kemdikbud

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan. Program dan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut :

➤ Program pendidikan anak usia dini

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah PAUD
Target kinerja pada kegiatan pembangunan gedung sekolah PAUD sebanyak 4 paket (gedung sekolah PAUD) di 4 kecamatan dengan realisasi kegiatan sebanyak 4 paket (gedung sekolah PAUD) di 4 kecamatan sebagai PAUD pembina dengan capaian 100%.
- ✓ Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Target kinerja pada kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUDNI sebanyak 20 sekolah dengan realisasi kegiatan sebanyak 20 sekolah dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan peralatan penunjang pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Meliputi pengadaan Peralatan Pendidikan berupa Alat Peraga Edukatif indoor dan out door

✓ Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah

Target kinerja pada kegiatan pengadaan mebeluer sekolah sebanyak 3 buah dengan realisasi kegiatan sebanyak 3 buah dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa pengadaan meubeler sekolah untuk PAUD/TK. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan prasarana yang menunjang pembelajaran, berupa pengadaan meja dan kursi siswa, lemari buku dan berkas juga perlengkapan lainnya.

✓ Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Target kinerja pada kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir PAUDNI sebanyak 9 buah dengan realisasi kegiatan 9 buah dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas yang berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar utama serta sebagai sarana interaksi antara guru dan siswa, meliputi Rehabilitasi Sedang dan Rehabilitasi Berat ruang belajar

✓ Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)

Target kinerja pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebanyak 7 PAUD Negeri dengan realisasi kinerja 7 PAUD Negeri dengan capaian 100%.

Adapun realisasi kegiatan berupa bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) Negeri melalui dana DAK Non Fisik.

- Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Target kinerja pada kegiatan pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (100 %) dengan realisasi kinerja (98,89%).

Adapun realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Pemberian Insentif Guru PAUD (TK,KB,TPA,SPS), Pemberian Insentif Guru TPQ Al Qur'an BKPRMI, Al-Banjari, Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Salafiyah.
- Sosialisasi BOP PAUD terbagi 4 tahap dengan jumlah peserta sebanyak 860 orang

Gambar 3. 26. Sosialisasi BOP PAUD



- Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD sebanyak 20 lembaga PAUD
- Lomba Gugus PAUD Peduli Lingkungan Tingkat Kab. Banjar

Gambar 3. 27. Meningkatnya Mitigasi Bencana



- Kegiatan Festival Kreativitas Anak

Gambar 3. 28. Kegiatan Festival Kreativitas Anak



- Hari Aksara internasional (HAI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 3. 29. Kegiatan Hari Aksara Internasional Tahun 2018



- Sosialisasi Dapodik PAUD ada 2 Tahap dengan jumlah peserta sebanyak 430 orang

- Kegiatan Pengadaan Laptop untuk data Dapodik PAUD sebanyak 30 buah untuk 30 PAUD.
- Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya Workshop Penilik PAUD, Petugas Lapangan PAUD, Pamong Belajar SKB dan Pengawas TK dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Penilik dan mengevaluasi hasil kegiatan, kendala dan hambatan dilapangan.(3.) Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan sampai ke Tingkat Nasional.(4)

Gambar 3. 30. Workshop Penilik, Pengawas, Petugas Lapangan PAUDNI dan Pamong Belajar Tahun 2018



Gambar 3. 31. Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Kab. Banjar tahun 2018



Permasalahan

- Anak usia 13-15 di Kabupaten Banjar banyak bersekolah di Madsarah salafi dan pondok pesantren yang tidak tergolong jenjang pendidikan Dasar, karenanya saat penghitungan APM santri ini tidak dihitung, karena mengalami kesulitan mendatannya.
- Kondisi Kab.Banjar memiliki geografis yang unik, seperti daerah daratan, daerah sungaidarerah perkotaan, pedesaan, terpencil, terjauh, bahkan daerah perbatasan. Kondisi ini memberi dampak sulitnya anak usia sekolah melanjutkan pendidikannya, seperti melewati rawa, sungai atau terpencil yang tidak tersedia alat transportasi umum karenanya banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat.
- Faktor ekonomis sangat berpengaruh juga seperti pemanfaatan anak untuk membantu mencari nafkah orangtua, sehingga tidak ada waktu lagi bagi anak bersekolah dan padaakhirnya tidak mau bersekolah lagi.
- Kawin dini banyak juga ditemui di usia 12-15 tahun di Kab. Banjar. Hal ini disebabkan oleh budaya daerah yang menyatakan orangtua merasa malu kalau anaknya tidak dikawinkan dan dianggap mampu mengurangi beban kehidupan orangtua.
- Domisili anak di perbatasan menyebabkan banyaknya anak usia SMP sederajat melanjutkan ke Kab/kota lain karena mereka beranggapan lebih dekat sekolah di kab/kota lain dan lebih bermutu dibanding sekolah di Kabupaten Banjar sendiri.

Solusi

- Anak yang di Pondok Pesantren dan Salafi DIWAJIBKAN mengikuti pendidikan Fomal melalui SMP TERBUKA dengan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di Madrasah itu sendiri.
- Segera menerbitkan INSTRUKSI BUPATI agar pengasuh Ponpes dan salafiah mau membuka SMP Terbuka.
- Perlu segera dibangun infrastruktur jembatan, jalan desa gang-gang kecil dan alat transformatasi seperti kelotok dinas, angkot atau subsidi anak sekolah naik angkot. Kalau memungkinkan mobil2 dinas yang sudah tidak terpakai, dapat dijadikan mobil angkut gratis seperti di Kota banjarbaru.
- Ke depan bisa diperjuangkan BOSDA agar sekolah menjadi lebih baik dalam memebrikan pelayanannya dan menjadikan sekolah semakin berkulaitas serta memiliki daya saing tinggi, sehingga memotivasi masyarakat memasukkan anaknya di sekolah tersebut.

- Melengkapi sarana dan prasarana sekolah/tempat Pendidikan
- Melakukan koordinasi dengan Kemenag dalam pelayanan pendidikan terutama masalah data siswa.
- Memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa akan pentingnya pendidikan.
- Membuka program paket A, B dan C untuk penyataran pendidikan.
- Melakukan pendataan desa/kelurahan yang telah memenuhi standar sarpras PAUD
- Melakukan sosialisasi program PAUD Pra SD 1 Tahun.
- Membuat draf Peraturan Bupati tentang pendidikan PAUD.
- Menambah jejaring kemitraan berkenaan dengan PAUD.

Melakukan sosialisasi secara intens dan marathon ke Kecamatan bagi lembaga penerima BOP PAUD.

3.2.5. Meningkatnya Budaya Baca Pelajar Dan Masyarakat

Peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah merupakan salah satu kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka peningkatan budaya baca pelajar dan masyarakat. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian sasaran meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat diukur dengan indikator persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah, capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 20. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat Kab. Banjar Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (5:7)
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi) (5:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	198%	4,20%	5,30%	126.19%	5,3%	100%

a. Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah

Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah merupakan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling. Untuk capaian jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Banjar meningkat jika dibandingkan dengan kunjungan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebanyak 23.767 kunjungan dan tahun 2018 ini sebanyak 28.751 kunjungan, sehingga ada peningkatan sebesar 20,97%. Demikian pula dengan jumlah kunjungan ke Mobil Pelayanan Perpustakaan Keliling, hal ini disebabkan karena koleksi buku yang sudah ditambah dan lebih bervariasi, disamping itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga lebih bervariasi dengan adanya kerjasama dengan mitra dan atau library supporter yang mendukung kegiatan perpustakaan, diantaranya:

- 1) Kerjasama/bermitra dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melalui program Perpuseru,
- 2) Kerjasama dengan Polres Banjar melalui Program Kabinaktar Binmas Polres Banjar
- 3) Kerjasama dengan beberapa SKPD terkait yang mendukung program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, dan pula sebaliknya program dan kegiatan perpustakaan yang dapat mendukung program SKPD lain dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan dalam pencapaian misi kedua.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diatas dan kegiatan pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi serta Perpuseru sehingga indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan yakni dengan capaian tahun 2018

sebesar 126.9% dan telah berhasil melampaui target akhir RPJMD dengan capaian 100% dari target 5,3% pada tahun 2020.

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar melalui Bidang Perpustakaan juga melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah :

- Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan, dengan outcome adalah untuk menumbuhkan kembangkan minat dan kegemaran membaca melalui berbagai bahan bacaan dan media dan menarik minat baca anak melalui buku-buku cerita lokal budaya daerah, sejarah dan kepahlawanan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Kegiatan ini adalah kegiatan rutin bulanan yang sasarannya adalah untuk siswa-siswi TK dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah baik sekolah negeri maupun swasta yang sekolahnya mempunyai perpustakaan sekolah.
- ✓ Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca
Kegiatan ini adalah kegiatan lomba bercerita tingkat SD/Sederajat yang merupakan kegiatan rutin tahunan, kegiatan ini juga dilaksanakan di tingkat Propinsi dan tingkat Pusat.
- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca berupa Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling dimaksudkan untuk menjangkau masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah-wilayah kecil seperti di kelurahan atau pedesaan di seluruh Kabupaten Banjar.
- ✓ Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Kegiatan ini adalah kegiatan perpustakaan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam memperoleh berbagai macam informasi serta meningkatkan ilmu pengetahuan, pada tahun ini dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan, biasanya waktu pelaksanaannya bersamaan dengan peringatan hari jadi

Kabupaten Banjar (pameran/Expo) yang dilaksanakan setiap bulan Agustus setiap tahunnya, pada tahun 2018 ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 19 Agustus 2018 bertempat di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura.

- ✓ Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Berupa pengadaan buku/koleksi perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 1500 eksemplar, terdiri dari kasifikasi buku dari buku buku umum, sosial dan budaya, ekonomi dan tehnologi serta buku keagamaan, untuk buku buku keagamaan porsinya lebih besar dari pengadaan buku lainnya.

Sehingga jumlah koleksi buku keseluruhan sampai dengan Desember 2018 menjadi 15.962 judul / 22.863 eksemplar dan jika digabung secara keseluruhan dengan jumlah koleksi tabloid, majalah, koran sampai dengan Desember 2018 menjadi 47.528 eksemplar.

- ✓ Perpustakaan menjadi Pusat Belajar Masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi bekerjasama dengan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) melalui Program Perpuseru yaitu kegiatan yang berorientasi pada Pendidikan, Kesehatan dan UKM. Jumlah Peserta yang mendaftar pelatihan tersebut sebanyak 2314 orang.

Sebagai realisasi dari pengembangan kegiatan tersebut sudah ada 3 (tiga) Perpustakaan Desa/Kelurahan yang mereplikasi kegiatan perpustakaan daerah yaitu perpustakaan desa Indrasari Kecamatan Martapura, perpustakaan kelurahan Pesayangan Kecamatan Martapura dan perpustakaan desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur.

3.2.6. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni Dan Budaya

Meningkatnya pelestarian dan apresiasi terhadap seni dan budaya merupakan salah satu sasaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui dinas kebudayaan pariwisata dalam meningkatkan perlindungan serta pengembangan seni dan budaya dengan strategi pengembangan dan pemeliharaan terhadap keragaman dan kekayaan seni dan budaya. Pada Tahun 2018 pencapaian sasaran apresiasi terhadap seni dan budaya menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata capaian sebesar 100% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan kinerja

sasaran terwujud dari pembinaan kelompok-kelompok seni dan budaya serta masih memastikan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi di masyarakat Kabupaten Banjar tetap terjaga. Capaian sasaran meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya diukur dengan 2(dua) indikator, yaitu : persentase kelompok seni dan budaya yang dibina dan jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 21. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni dan Budaya

N o.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM)	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD/ Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (5:7)
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi) (5:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina		80	100	85	85,07	100,08	100	85,07
2.	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	Cakupan gelar seni/jumlah gelar seni yang dilakukan	8	114.28	7 Keg	8 Keg	114,29	8 Kegiatan	100

a. Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina

Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina merupakan jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina berbanding dengan jumlah seluruh kelompok seni dan budaya lokal. Capaian jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina pada tahun 2018 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 80% dibandingkan dengan target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 80%. Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina pada tahun 2018 sebanyak 188 kelompok dari jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten banjar sebanyak 221 kelompok. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian pada tahun 2018 tetap dan mampu menyumbang 80% dari target 100% pada tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program pengelolaan kekayaan budaya
Program ini dilaksanakan untuk mencapai outcome meningkatnya pelestarian serta apresiasi terhadap seni dan budaya, dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :
 - ✓ Indikator outcome : Cakupan pemajuan kebudayaan tak benda
 - ✓ Target kinerja outcome : 62,5%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 62,5%
 - ✓ Capaian : 100%
 Untuk mencapai terget outcame tersebut dilaksanakan kegiatan :
 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah berupa , penyelenggaraan even budaya sebanyak 4 even
 - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
 - ✓ Indikator outcome : Cakupan kemajuan kebudayaan tak benda
 - ✓ Target kinerja outcome : 62,5%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 62,5%
 - ✓ Capaian : 100%
 Untuk mencapai terget outcame tersebut dilaksanakan kegiatan :
 - Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah sebanyak 3 (tiga) kali
 - Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah sebanyak 3 (tiga) kali
- Program pengelolaan kekayaan budaya
 - ✓ Indikator outcome : Prosentase budaya benda yang dikelola
 - ✓ Target kinerja outcome : 72,73%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 72,73%
 - ✓ Capaian : 100%
 Untuk mencapai terget outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, dengan indikator output, target, realisasi beserta capaian sebagai berikut :
 - Output : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya benda

- Indikator output 1 : Jumlah juru pelihara warisan/ cagar budaya yang dikoordinir
- Target kinerja output 1 : 360 orang bulan
- Realisasi kinerja output 1 : 360 orang bulan
- Capaian : 100%
- Indikator output 2 : Jumlah petugas informasi seni dan budaya yang dikoordinir
- Target kinerja output 2 : 36 orang bulan
- Realisasi kinerja output : 36 orang bulan
- Capaian : 100%
- o Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air :
 - Indikator output : Jumlah tenaga ahli cagar budaya yang tersertifikasi
 - Target kinerja output : 9 orang
 - Realisasi kinerja output : 8orang
 - Capaian : 88,89%
- Program pengembangan nilai budaya
 - ✓ Indikator outcome : Prosentase budaya benda yang dikelola
 - ✓ Target kinerja outcome : 72,73%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 72,73%
 - ✓ Capaian : 100%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :

- o Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, dengan indikator output, target, realisasi beserta capaian sebagai berikut :
 - Indikator output : jumlah penelitian/kajian warisan budaya yang dilaksanakan
 - Target kinerja output : 3 kegiatan
 - Realisasi kinerja output : 3 kegiatan
 - Capaian : 100%

b. Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi

Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi merupakan jumlah kegiatan kebudayaan yang mengandung unsur penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.

Capaian jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi pada tahun 2018 adalah 114,29% didapat dari realisasi sebesar 8 kegiatan dibandingkan dengan target tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 8 kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian pada tahun 2018 mengalami peningkatan 14,29% dan telah mencapai target akhir pada tahun 2020. Faktor keberhasilan sehingga tercapainya target yang ditetapkan karena didukung oleh keberadaan kelompok seni budaya yang bernuansa religi di Kabupaten Banjar seperti kelompok seni sinoman hadrah, maulid habsyi dan rudat terutama di lingkungan santri.

Kegiatan budaya yang bernuansa religi yang telah dilaksanakan meliputi :

1. Festival Bedug
2. Pasar Wadai Ramadhan
3. Festival Sinoman Haderah
4. Festival Rebana
5. Even Muharram 1440 H
6. Even Budaya Tahunan/Festival Rudat
7. Festival Maulid Habsyi
8. Peringatan Hari Santri 2018

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome meningkatnya pelestarian serta apresiasi terhadap seni dan budaya, dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

- ✓ Indikator outcome : Cakupan pemajuan kebudayaan tak benda
- ✓ Target kinerja outcome : 62,50%
- ✓ Realisasi kinerja outcome : 62,50%
- ✓ Capaian : 100%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :

- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, berupa berupa penyelenggaraan even budaya sebanyak 8 even

Permasalahan

- Banyaknya kelompok seni dan budaya yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Banjar yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat terus aktif dan mampu melestarikan kebudayaan lokal yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM Disbudpar;
- Semakin berkurangnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional terutama yang bernuansa religi sehingga proses regenerasi dalam rangka pelestarian budaya menjadi terhambat

Solusi

- Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan kelompok seni dan budaya serta secara rutin menyelenggarakan festival seni dan budaya agar tersedia wadah bagi kelompok seni dan budaya untuk tetap aktif dan mengembangkan diri
- Melibatkan lingkungan pesantren untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya/kesenian bernuansa islami dengan melibatkan masyarakat di sekitar pesantren

3.2.7. Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan Dan Kematian Bayi

Dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar sejak tahun 2016 membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dengan tugas penggerakan masyarakat agar berperan aktif dalam pelayanan kesehatan dasar khususnya yang berkaitan dengan masalah kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan status gizi masyarakat.

Keberadaan Satgas Desa tersebut didukung oleh lintas sektor terkait di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sehingga kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan dari hulu sampai permasalahan pelayanan terdepan.

Jenis layanan, tugas dan uraian yang diberikan kepada Satgas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Melalui Satuan Tugas Desa di Kabupaten Banjar adalah:

Tabel 3. 22. Tugas dan Jenis Layanan Satgas Desa

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No	Jenis Layanan	Uraian
1	Keluarga mengikuti KB	Bekerjasama dengan tenaga kesehatan untuk memantau serta menganjurkan kepada setiap keluarga yang merupakan pasangan usia subur, suami atau istri atau keduanya agar terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan/atau menggunakan alat kontrasepsi
2	Ibu bersalin di fasilitas kesehatan	Bekerjasama dengan tenaga kesehatan terutama bidan di desa untuk mendampingi ibu hamil agar melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta melaporkan seluruh perkembangan, kejadian / gejala yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil hingga melahirkan di fasilitas kesehatan.
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Memantau serta menganjurkan agar bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4	Bayi diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan	Mendampingi, menganjurkan, memantau serta melaporkan agar ibu bayi/balita selalu memberikan ASI Eksklusif saja selama 6 bulan
5	Pertumbuhan balita dipantau setiap bulan	Menganjurkan untuk memantau tumbuh kembang balita setiap bulan serta permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan status gizi balita ke tenaga kesehatan

Sumber : Perbup Nomor 24 Tahun 2016

Upaya ini memberikan hasil yang cukup bermakna dalam mengatasi permasalahan kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat di Kabupaten Banjar yang dapat diukur berdasarkan hasil capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejak pertengahan tahun 2016.

Pada tahun 2018 Hasil evaluasi capaian kinerja pencapaian sasaran menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi menunjukkan hasil yang positif atau kategori **sangat tinggi**, dengan rata-rata capaiannya 141,10%. Capaian sasaran menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi diukur dengan 4 (empat) indikator yang terdiri dari 2 (dua) indikator dengan SKPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan yaitu Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dan Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, 2 (dua) indikator dengan SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-59 tahun (ASFR) dan Angka laju

pertumbuhan penduduk. Masalah kematian ibu melahirkan dan kematian bayi tidak semata-mata menjadi masalah kesehatan sehingga dalam penanggulangannya melibatkan lintas sektor terkait yang mempunyai peran cukup besar yaitu DP2KBP3A. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. 23. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	90,85	151,65	158	93,30	140,94	110,4	115,49%
2.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	6,90	146,92	12,2	9,98	118,19	10,7	106,73%
3.	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	37,66	110,33%	40	32	120 %	36	111,11%
4.	Angka laju pertumbuhan penduduk	1,81%	112,13%	2,04%	1,51%	125,98%	2%	125,25%

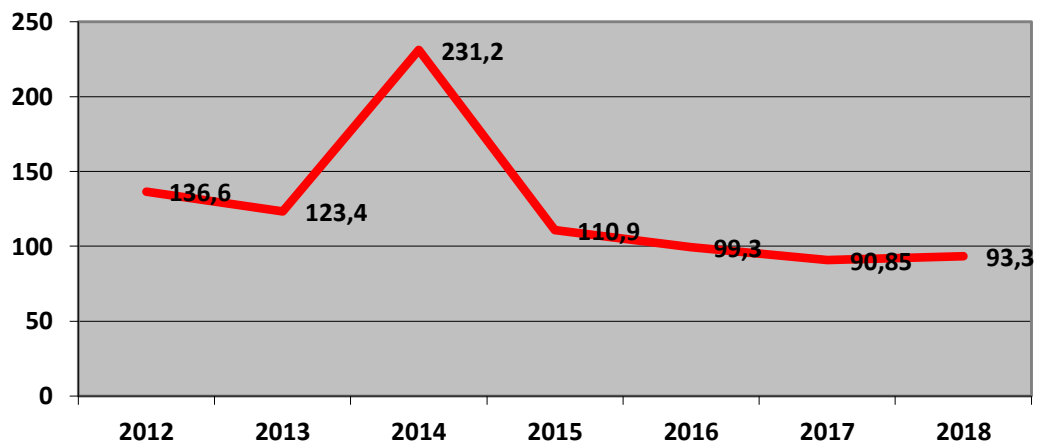
Sumber : Dinas Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu bangsa diukur dengan menentukan tinggi rendahnya angka kematian ibu dan perinatal dalam 100.000 persalinan hidup. Kematian maternal menurut batasan dari The Tenth Revision of The International Classification of Diseases (ICD – 10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya, tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Capaian indikator Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup sebesar 140.94% atau masuk kategori Sangat tinggi. Realisasi indikator ini sebesar 93,30 artinya lebih rendah dari target sebesar 158 per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini bersifat negatif artinya semakin rendah realisasi yang dicapai kinerjanya semakin baik. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada tahun 2017, terjadi peningkatan angka kematian ibu melahirkan ditahun 2018 yang tahun 2017 sebesar 90,85/100.000 kelahiran hidup menjadi 93,30/100.000 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2020 capaian tahun 2018 ini menyumbang 115.49%. Progres Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 32. AKI Kabupaten Banjar Tahun 2012-2017



Sumber : Dinas Kesehatan

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Angka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan sejak tahun 2012, kemudian naik cukup tinggi pada tahun 2014 dan selanjutnya turun secara teratur hingga tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 93,30 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan Angka kematian ibu melahirkan yang cukup bermakna tersebut disebabkan antara lain oleh intervensi yang dilakukan melalui pembentukan Satgas Desa seperti diuraikan diatas.

Perhitungan Angka kematian ibu dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu jumlah kelahiran hidup dan kasus kematian ibu melahirkan. Tabel dibawah ini memberikan gambaran jumlah kelahiran hidup dan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Tabel 3. 24. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Perhitungan AKI per 100.000 kh
2012	14	10.246	136,6
2013	13	10.533	123,4
2014	25	10.813	231,2
2015	12	10.814	108,1
2016	11	11.074	99,3
2017	10	11.007	90,85
2018			93,30

Sumber : Bidang Kesmas

Penurunan Angka Kematian Ibu pada tahun 2017 dan Kenaikan Angka Kematian pada tahun 2018 tidak hanya bergantung pada naiknya jumlah kelahiran hidup, namun secara absolut jumlah kasusnya pun dapat ditekan seperti terlihat pada Tabel diatas.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pertolongan Persalinan Dari Keluarga Kurang Mampu dan Jaminan Persalinan. Capaian fisik dari program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yaitu sebesar 81,57%, dengan capaian keuangan sebesar 80,47%.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan melalui program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang didukung dengan kegiatan :

- Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu yaitu berupa :
 - Sewa Rumah Tunggu Kelahiran 3 buah (RTK), dimana rumah tunggu kelahiran ini diperuntukkan bagi ibu bersalin yang rumahnya jauh dari sarana fasilitas kesehatan, sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi dalam persalinan;
 - Kunjungan untuk pelacakan Ibu Hamil Resiko Tinggi Di Desa wilayah kerja puskesmas;
 - Pendampingan ibu hamil resiko tinggi.
 - Monitoring dan Evaluasi Program ke Puskesmas/Bimtek
- Kegiatan Jampersal yaitu berupa :

- Pertemuan sosialisasi jaminan persalinan, sehingga para petugas kesehatan dapat mengetahui semua kegiatan yang menjadi tanggungan dalam kegiatan jaminan persalinan (jampersal);
- Monev jaminan persalinan untuk monitoring serta evaluasi semua hambatan dalam kegiatan jaminan persalinan di Puskesmas.
- Kegiatan kelas ibu hamil di setiap desa;
- AMP (Audit Maternal Perinatal) tingkat Puskesmas yaitu audit kasus kematian ibu di desa dengan pelaksana tim dari Puskesmas;
- Pertemuan ANC terpadu di tingkat Kabupaten Banjar peserta seluruh bidan coordinator Puskesmas dan Staf dari seksi kesehatan keluarga dan gizi;

b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Capaian indikator Angka kematian bayi (AKB) adalah sebesar 9,98 per 1.000 kelahiran atau masuk kategori Sangat Tinggi. Hasil ini lebih rendah dibandingkan target tahun 2018 yaitu 12,2 per 1.000 kelahiran hidup dengan persen capaian sebesar 118,19% dan indikator ini bersifat negatif sebagaimana angka kematian ibu melahirkan. Dibandingkan dengan capaian awal pada tahun 2017, terjadi kenaikan dari 6,9/1.000 kelahiran hidup menjadi 9,98/1.000 kelahiran hidup. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2020 capaian tahun 2018 ini sudah tercapai yaitu 118,19%, tercapainya target akhir RPJMD sudah terjadi sejak tahun 2017. Progres Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka kematian bayi ini berkaitan dengan

pembentukan Satgas Desa sebagaimana penurunan kematian ibu melahirkan.

Tabel 3. 25. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Bayi

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Perhitungan AKB per 1.000 kh
2011	105	9.986	10,5
2012	112	10.246	10,9
2013	126	10.533	12,0
2014	158	10.813	14,6
2015	103	10.814	9,52
2016	106	11.074	9,57
2017	83	11.007	6,9

Sumber :Bidang Kesmas Dinas Kesehatan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari Program yang mendukung indikator ini adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian kinerja dari program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ini adalah 99,06%, dan capaian keuangan sebesar 80%.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menurunkan angka kematian bayi melalui program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang didukung dengan kegiatan :

- Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu yaitu berupa :
 - Evaluasi Program Kesehatan Anak di Puskesmas
 - Pertemuan ANC (Audit Maternal Children) tingkat Puskesmas yaitu audit kasus kematian bayi di desa dengan pelaksana tim dari Puskesmas terpadu di tingkat Kabupaten Banjar peserta seluruh bidan koordinator Puskesmas dan Staf dari seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - Pertemuan Penyelia fasilitatif
 - Monitoring dan Evaluasi Program ke Puskesmas/Bimtek
- Kegiatan Jampersal yaitu berupa
 - Rumah Tunggu Kelahiran
 - Jaminan Pembiayaan Kelahiran dan Perawatan Bayi
 - Monev KIA ke puskesmas

c. Angka Pada Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun merupakan penduduk wanita usia antara 15-19 tahun yang pernah melahirkan

atau sedang mengalami hamil anak pertama. ASFR dalam kegunaannya adalah untuk mengukur tingkat kehamilan usia muda dimana melahirkan dalam usia 15-19 tahun adalah kelahiran yang berisiko terhadap ibu maupun anaknya. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik.

Formulasi perhitungan Jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia 15-19 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia 15-19 tahun dikali 1000

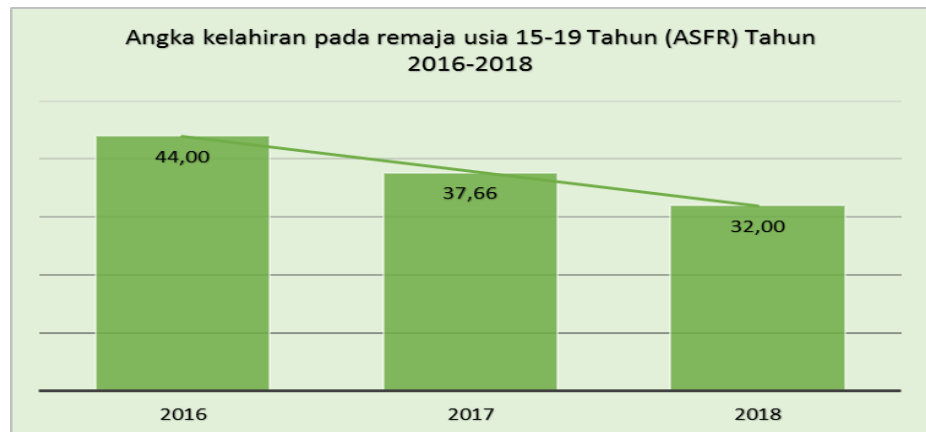
Capaian angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) pada tahun 2018 adalah 120% didapat dari realisasi sebesar 32 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 40. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (110,33%), capaian tahun 2018 meningkat sebesar 9,67%. Realisasi angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

ASFR	$= \frac{\sum \text{kelahiran dari wanita kelompok usia 15-19 tahun}}{\sum \text{penduduk wanita kelompok usia 15-19 tahun}} \times 1000$ $= \frac{4.286}{133.870} \times 1000 = 32$
------	--

Dibandingkan dengan tahun 2017, angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) mengalami penurunan sebesar 5,66 yaitu pada tahun 2017 sebesar 37,66 menjadi 32,00 pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 111.11% dari target 36 pada tahun 2020.

Perkembangan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) tahun 2016 -2018, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. 33. Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR) Tahun 2016 - 2018



Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 120% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi

Keberhasilan pencapaian indikator Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun pada tahun 2018 di dukung oleh Program dan Kegiatan :

- Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Program dilaksanakan dalam mencapai outcome Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang generasi berencana (GenRe)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Realisasi Kegiatan berupa :

- Kegiatan operasional PIK remaja / mahasiswa .
Realisasi capaian kegiatan operasional PIK remaja / mahasiswa sebanyak 10 orang pembina PIK R dan 10 kelompok PIK R.
- Kegiatan pertemuan PIK remaja / mahasiswa
Adapun realisasi capaian kegiatan pertemuan PIK remaja / mahasiswa adalah dilaksanakan di martapura kota dan karang intan dengan jumlah peserta 40 orang.

d. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometric dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik

Capaian angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 adalah 125,98% didapat dari realisasi sebesar 1,51 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 2,04%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (112,13%), capaian tahun 2018 meningkat sebesar 13,85%.

Dibandingkan dengan tahun 2017, angka laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 0,3% yaitu pada tahun 2017 sebesar 1,81% menjadi 1,51% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 125,25% dari target 2% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 125.98% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui DP2KBP3A serta stakeholder lainnya dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain adalah :

- Program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tk Kecamatan
Realisasi kegiatan berupa sosialisasi pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan di 8 kecamatan dengan jumlah peserta 160 orang, Hasil dari kegiatan termotivasinya Remaja guna menunda usia kawin sehingga menekan perkawinan di usia muda.

Gambar 3. 34. Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Tingkat Kecamatan



Gambar 3. 35. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di Sekolah



- ✓ Sosialisasi Mitra Kerja di Kecamatan Kampung KB
Realisasi kegiatan berupa Sosialisasi Mitra Kerja di 3 Desa Kampung KB dengan peserta 90 orang yang berlokasi di tiga kecamatan yaitu : Desa Kelampaian Ilir Kecamatan astambul, Desa Tanjung Rema Kec.Martapura Kota, Desa Aranio Kec.Aranio.
- ✓ Kegiatan Pramuka Saka Kencana
Realisasi kegiatan Pramuka Saka Kencana dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan berupa sosialisasi program KB yang berlokasi di empat tempat kegiatan dengan 120 peserta .
- ✓ Kegiatan KIE melalui Pameran Pembangunan
Realisasi kegiatan berupa Pameran Pembangunan yang dilaksanakan di Alun Alun Ratu Zalecha . Hasil Kegiatan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan KB.

- ✓ Kegiatan Pamphlet KB
Realisasi kegiatan berupa pengadaan pamphlet KB sebanyak 1.000. lembar. Kegiatan bertujuan untuk Promosi dan Informasi bagi masyarakat tentang penundaan usia perkawinan, dan HIV /Aids.

Gambar 3. 36. Promosi dan Informasi berupa Pamphlet KB



- ✓ Kegiatan Spanduk KB dan Umbul Umbul
Realisasi kegiatan berupa Pemasangan Spanduk KB di Baliho sebanyak 6 lembar dan pemasangan umbul –umbul dilaksanakan pada saat kegiatan Pameran Pembangunan yg berlokasi di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura pada saat ada kegiatan di masyarakat seperti kegiatan untuk kampung KB. Kegiatan bertujuan untuk Promosi dan Informasi .
- ✓ Kegiatan Rakornas BKKBN Tingkat Nasional
Kegiatan berupa mengikuti Rakornas BKKBN Tingkat Nasional Seminar Hari Kependudukan Dunia di BKKBN Pusat Jakarta.
- ✓ Kegiatan Harganas Tingkat Nasional
Realisasi kegiatan mengikuti rangkaian kegiatan Harganas Tingkat Nasional di Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Kegiatan bertujuan untuk menambah wawasan dan motivasi guna kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama Bidang Pengendalian Penduduk.
- Program Keluarga Berencana
 - ✓ Kegiatan Bhakti Sosial Kab. Kes. TNI
Kegiatan berupa Kegiatan Baksos TNI . Hasil kegiatan 22 orang akseptor yang terlayani.
 - ✓ Kegiatan Bhakti Sosial kesatuan Gerak KB- PKK
Kegiatan berupa Kegiatan Baksos KB Kes - dengan hasil kegiatan 35 orang akseptor yang terlayani.

- Program pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 - ✓ Kegiatan Seminar Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Individu
Kegiatan pelaksanaan seminar edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Individu dengan jumlah peserta 50 orang.
 - ✓ Kegiatan Pelayanan IVA
Kegiatan berupa pelayanan IVA dengan peserta yang dilayani sebanyak 50 orang.
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - ✓ Kegiatan Sosialisasi MKJP di era JKN
Kegiatan Sosialisasi MKJP di era JKN dengan jumlah peserta 40 orang.
 - ✓ Kegiatan Sosialisasi BKB
Kegiatan Sosialisasi BKB dengan jumlah peserta 40 orang.
 - ✓ Kegiatan Pertemuan evaluasi pengelola program KB klinik
Kegiatan Pertemuan evaluasi pengelola program KB klinik dengan jumlah peserta 24 orang.
- Program Pelayanan Kontrasepsi
 - ✓ Kegiatan Pelayanan Konseling KB
Terpenuhinya obat-obatan sebagai penunjang kegiatan pelayanan KB MKJP
 - ✓ Kegiatan jasa pelayanan medis (MOP/MOW).
Kegiatan jasa pelayanan medis (MOP/MOW) berupa pelayanan medis operasi wanita sebanyak 10 akseptor.

Permasalahan

- Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar.
- Rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber KB, dimungkinkan karena kurang mendapatkan informasi yang utuh tentang program KB. (Pemakaian jenis/alat KB yang digunakan umumnya untuk wanita, Suntikan = 51,29%, Pil KB = 43,23%, Susuk KB = 2,39%, Pantang berkala = 0,43, Kondom/karet KB = 1,46%, lainnya = 2,66)
- Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 8,55 dari target 14,70% (.Pada Tahun 2017 = 7,70)
- Persentase Perkawinan muda di Kabupaten Banjar masih tergolong tinggi yaitu 15,82%. Berdasarkan data Susenas 2017, terbanyak kawin muda adalah perempuan yaitu 27,29%.

- Pasangan usia subur (PUS) pada tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu 40,87 (WUS sebesar 55,46%), sehingga masih besar peluang jumlah anak yang akan dilahirkan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk.
- Persentase wanita kawin (usia 15-49 tahun) yang tidak pernah mengikuti KB masih relatif tinggi yaitu sebesar 21,40%. (peserta KB aktif = 58,75%, peserta KB tidak aktif = 19,85%).

Solusi

- Peningkatan jumlah KB aktif dan KB mandiri tidak hanya pada wanita tetapi juga pada laki laki
- Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan
- Menggiatkan program kampung KB yang diintegrasikan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

3.2.8. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk Dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari hari. Dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang sering disebut reference. Buku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS dengan indeks berat menurut umur, indeks tinggi badan menurut umur, berat badan dibanding tinggi badan. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Indikator Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang merupakan indikator negatif dengan pengertian bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang kurang baik dan perhitungannya menggunakan rumus 2 kali target dikurangi realisasi kemudian dibagi dengan target. Capaian indikator ini sebesar 17,74 dari target sebesar 24,16% dan realisasi sebesar 126,57% atau dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Capaian sasaran menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang diukur dengan indikator prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang, sebagai mana di sampaikan pada table berikut:

Tabel 3. 26. Realisasi dan Capaian Sasaran Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (7:5)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi) (5:4)		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	16.5	140.56	24,16%	17,74%	126,57	17%	95.65%

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari hari. Dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang sering disebut *reference*. Buku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS dengan indeks berat menurut umur, indeks tinggi badan menurut umur, berat badan dibanding tinggi badan.

Indikator Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang merupakan indikator negatif dengan pengertian bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang kurang baik dan perhitungannya menggunakan rumus 2 kali target dikurangi realisasi kemudian dibagi dengan target. Capaian indikator ini sebesar 126,57% dari target sebesar 24,16% dengan realisasi sebesar 17,74% atau dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu adanya penempatan tenaga gizi yang ditempatkan di daerah yang kekurangan tenaga gizi, selain itu juga adanya integrasi Posyandu dengan BKB dan PAUD. Keberhasilan capaian indikator ini merupakan bagian dari pembentukan Satgas Desa yang meliputi akselerasi penurunan AKI, AKB dan perbaikan gizi balita.

Perbandingan capaian Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang terhadap capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan prevalensi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27. Perbandingan Realisasi Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Terhadap Provinsi dan Nasional

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No	Indikator	Satuan	Banjar			Kal.Sel			Nasional		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen	34,96*)	20,46	28,49	26,2	18,8	16,5	19,6*)		

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan
*) Data Riskesdas 2013

Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Banjar pada tahun 2015 sebesar 34,96% dan prevalensi Kalimantan Selatan sebesar 27,40% sedangkan angka nasional sebesar 19,63%, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Berdasarkan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016, prevalensi Kabupaten Banjar sebesar 20,46% lebih tinggi dari prevalensi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 18,8%

Gambar 3. 37. Acara Sosialisasi Satgas Desa oleh Kepala Dinas Kesehatan



Capaian indikator persentase UKBM Purnama dan Mandiri sebesar 23,13 dengan realisasi 25,56% atau masuk kategori Sangat Rendah. Hasil ini sama dengan target tahun 2018 yaitu 30 dan indikator ini bersifat positif. Dibandingkan dengan capaian awal pada tahun 2017, terjadi penurunan dari 30 menjadi 23,13 yang mana target akhir RPJMD tahun 2020 adalah sebesar 30. Kendala Kabupaten Banjar dalam menaikkan persentase UKBM Purnama dan Mandiri ini berkaitan dengan masih kurangnya komunikasi lintas sektor, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan UKBM, serta peran serta masyarakat yang masih kurang dalam pengembangan UKBM di lingkungannya.

Untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap UKBM, maka perlu dilakukan komunikasi dengan lintas sektor yang terkait dengan UKBM, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Tokoh Masyarakat, selain itu juga meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan UKBM dengan melakukan pelatihan kader, memasukkan masalah kesehatan dalam SMD dan MMD serta melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana UKBM.

Indikator cakupan penimbangan balita dari target 85% dapat di realisasikan 74,45% dengan kategori predikat Tinggi. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui Penimbangan atau Penimbangan Total terhadap seluruh balita umur 0 sampai dengan 4 tahun dengan indeks berat badan per umur.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu adanya penempatan tenaga gizi yang ditempatkan di daerah yang kekurangan tenaga gizi, selain itu juga adanya integrasi Posyandu dengan BKB dan PAUD. Keberhasilan capaian indikator ini merupakan bagian dari pembentukan Satgas Desa yang meliputi akselerasi penurunan AKI, AKB dan perbaikan gizi balita.

Indikator Rasio Jumlah balita perposyandu, dari target 80 balita/posyandu, dapat terealisasi 80 Balita/posyandu atau 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana Posyandu yang baik serta adanya pelatihan-pelatihan terhadap kader posyandu, selain itu juga dengan mengoptimalkan peran Bidan di desa dalam memberikan pelayanan kesehatan di Posyandu.

Setelah keluarnya Perbup No 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka semua kegiatan Posyandu dikelola oleh desa sehingga kegiatan di posyandu dapat lebih optimal sesuai dengan kondisi dan keadaan di wilayahnya masing-masing.

Upaya yang dilakukan dalam penurunan kejadian masalah gizi kurang dan gizi buruk yaitu melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang didukung oleh :

- Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi yaitu berupa :
 - Pertemuan Penyusunan Peta Masalah Gizi
 - Pertemuan Penyusunan Peta Masalah Gizi Sebanyak 24 Orang TPG sehingga diharapkan dari pertemuan ini bisa diperoleh Gambaran Status gizi dan permasalahan gizi di masyarakat melalui PWS Gizi
 - Pembelajaran peta informasi gizi di Kabupaten Klaten Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan Dinas

- Kesehatan Propinsi Kalsel dan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota (tentang program-program gizi yang diunggulkan seperti pelaporan PWS Gizi melalui Software Posyanduku)
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pekan Penimbangan di Tingkat Puskesmas dengan Sasaran 1602 Kader Posyandu yang akan turun ke lapangan (posyandu) melakukan kegiatan pekan penimbangan
 - Pekan penimbangan di 513 Posyandu
 - Kegiatan pekan penimbangan balita sebanyak 1 kali pada bulan Februari dengan sasaran 48.080 Sampel
 - Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin yaitu berupa :
 - Pengadaan Bubur dan Biskuit MP-ASI
 - Distribusi Bubur dan Biskuit MP-ASI
 - Kurang Energi Protein dan Kurang Energi Kronik
 - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya
 - Konseling Menyusui
 - Garam Beryodium
 - Vitamin A
 - Sosialisasi 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)
 - Pertemuan Multi sektor Gizi Makro dan Mikro
 - Taburia
 - Kelas BGM
 - Pengumpulan Data Status Anemia Remaja Putri
 - Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
 - Keluarga Sadar Gizi
 - Pekan Sarapan Anak Nasional
 - Peningkatan Gizi Lebih
 - Konseling Permasalahan Gemuk dan Obesitas

Permasalahan :

- Kegiatan Pekan Penimbangan Menggunakan sampel yang banyak hal ini sangat baik namun ada kekurangannya terjadi pembengkakan biaya dan memungkinkan terjadi human error;
- Kurangnya Pengetahuan Kader Posyandu dalam pengukuran BB dan TB.

Solusi :

- Perlu Alternatif kegiatan lain yang lebih efektif dengan hasil yang sama dengan pekan penimbangan seperti PSG dengan metode sampling;
- Melakukan Pelatihan Kader Posyandu.

3.2.9. Terkendalinya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, prevalensi penyakit tidak menular cenderung mengalami kenaikan khususnya Hipertensi dan Diabetes Melitus, sehingga untuk mengatasi masalah ini Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di haruskan ada sub unit atau setingkat Seksi yang menangani masalah penyakit tidak menular baik di Dinas Kesehatan Provinsi maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Kebijakan sasaran ini pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah Peningkatan jumlah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) dan optimalisasi dan revitalisasi upaya promosi kesehatan untuk mencapai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Posbindu PTM adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh kader kesehatan dengan bantuan petugas kesehatan yang kegiatannya berupa pemantauan / pemeriksaan kesehatan secara rutin penyakit-penyakit tidak menular khususnya Hipertensi dan Diabetes serta promosi dan penyuluhan kesehatan.

Sebagai gambaran berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi Hipertensi di Kabupaten Banjar sebesar 25,65% lebih tinggi dibandingkan prevalensi hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 10,82%. Untuk Diabetes Melitus berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensinya sebesar 1,56%, angka ini masih termasuk cukup tinggi karena ada kabupaten lain di Kalimantan Selatan dengan prevalensi 1,01%.

Pada tahun 2018 pencapaian sasaran terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular menunjukkan hasil positif dengan capaian sebesar lebih dari 100% masuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian sasaran terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular diukur dengan indikator presentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) purnama dan mandiri, sebagai mana di sampaikan pada table berikut :

Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Terkendalinya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	82.8	552	30	87	290%	≥60	145%

Gambar 3. 38. Pelayanan di Posbindu PTM



Sebagai gambaran berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, prevalensi Hipertensi di Kabupaten Banjar sebesar 25,65% lebih tinggi dibandingkan prevalensi hasil Riskesdas tahun 2007 yaitu 10,82%. Untuk Diabetes Melitus berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensinya sebesar 1,56%, angka ini masih termasuk cukup tinggi karena ada kabupaten lain di Kalimantan Selatan dengan prevalensi 1,01%

Capaian indikator Posbindu PTM Utama sebesar 87 dari target 30 persen atau persen capaiannya sebesar 290% dengan predikat Sangat Tinggi. Analisa tercapainya indikator ini adalah karena adanya

pencepatan pembentukan Posbindu PTM sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dimana untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelaksanaan skriningnya salah satunya adalah di Posbindu PTM dengan target 100% sasaran, sehingga untuk dapat menjangkau sasaran lebih maksimal perlu dibentuk Posbindu PTM lebih banyak dengan standar pelayanan untuk yang Purnama dan Mandiri.

Indikator persentase Puskesmas dengan pandu PTM dapat direalisasikan sebesar 66,63% dari target 75% dengan capaian 88,8% dengan predikat Tinggi. Kegiatan dari Pandu PTM adalah tindak lanjut faktor resiko Posbindu PTM, deteksi dini faktor resiko PTM dilanjutkan dengan tahapan Posbindu serta dilakukan pengobatan.

Capaian indikator yang belum mencapai target yang karena tidak semua Puskesmas memiliki petugas yang sudah dilatih kegiatan Pandu PTM serta masih kurangnya sosialisasi kegiatan Pandu PTM ke semua petugas Puskesmas. Kegiatan Pandu PTM merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan sehingga pelaksanaan Pandu PTM masih belum banyak diketahui oleh semua petugas di Puskesmas.

Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian adalah dengan melakukan sosialisasi kegiatan pandu PTM ke semua petugas Puskesmas terutama kepada Kepala Puskesmas dan pengelola PTM serta mengadakan pelatihan terhadap pengelola PTM, disamping itu juga perlunya pengenalan alur penanganan dan penanganan PTM yang dilakukan pemeriksaan di Puskesmas.

Capaian indikator prevalensi hipertensi adalah sebesar 5,57 % dari target 24,86 % tercapai 177,59% dengan kategori Sangat Tinggi. Hipertensi merupakan suatu masalah kesehatan yang sering terjadi pada masyarakat. Hipertensi diukur pada penduduk umur 15 tahun keatas yang diukur sistol dan diastolnya pada saat pemeriksaan, hipertensi yaitu jika tekanan darah sistol lebih besar sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastol lebih besar sama dengan 90 mmHg (National Institute of Health, 2004).

Dengan capaian ini menunjukkan bahwa prevalensi kejadian hipertensi di Kabupaten Banjar masih tinggi dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang kejadian hipertensi masih rendah sehingga tidak terjadi masalah akibat hipertensi.

Capaian indikator prevalensi diabetes mellitus pada tahun 2018 tercapai 1,77 dengan kategori Tinggi. Dari target 1,53 direalisasikan 1,77. **Diabetes mellitus** adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi

insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya. Tubuh pasien dengan diabetes mellitus tidak dapat memproduksi atau tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas, sehingga kadar gula darah meningkat dan dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang pada pasien tersebut.

Diabetes melitus (DM) masih menjadi persoalan kesehatan serius dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ke-4 dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Bahkan jumlah pengidap diabetes terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama untuk DM tipe 2. Data WHO memperkirakan jumlah penderita DM tipe 2 di Indonesia akan meningkat signifikan hingga 21,3 juta jiwa pada 2030 mendatang. "Lebih dari 60 persen pengidap diabetes tidak sadar kalau terkena diabetes. Kebanyakan datang ke dokter dalam kondisi sudah komplikasi. Program edukasi dan sosialisasi akan gejala, upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes ini sangat dibutuhkan untuk menekan prevalensi diabetes secara nasional.

Di Kabupaten Banjar melalui kegiatan pemeriksaan dan skrining di Posbindu PTM dapat membantu dalam penemuan dan pengobatan penderita diabetes melitus. Dengan dilakukannya penemuan kasus secara dini dapat menekan komplikasi lebih lanjut serta menjaga kadar gula darah dalam batas yang normal. Sehingga prevalensi diabetes melitus di kabupaten banjar dapat ditekan.

Indikator Persentase pelayanan kesehatan paripurna bagi calon jamaah haji dari target 74,0% dapat direalisasikan sebesar 100% atau sebesar 135,13% dengan kategori Sangat Tinggi. Indikator ini didapatkan dari jumlah calon jama'ah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari pemeriksaan tahap 1 dan 2 termasuk pemeriksaan lengkap, pelayanan rujukan dan tes kebugaran yang dilakukan minimal 3 bulan sebelum keberangkatan untuk di entry dalam siskohatkes.

Dinas kesehatan Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pemeriksaan jamaah melibatkan Puskesmas yang diwilayah kerjanya ada jamaah haji. Semua Puskesmas di Kabupaten Banjar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama untuk calon jama'ah haji yaitu memiliki tenaga 1 (satu) orang dokter umum pria atau wanita, 1 (satu) orang perawat wanita, 1 (satu) orang perawat pria dan 1 (satu) orang analis laboratorium kesehatan. Dan Memiliki prasarana gedung yang memadai bagi pelayanan, memiliki fasilitas diagnostik terkalibrasi, memiliki fasilitas laboratorium sederhana dan memiliki sarana serta manajemen catatan medik yang baik.

Pemeriksaan pada calon jama'ah haji tersebut bertujuan untuk identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jemaah haji serta sebagai dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji.

3.2.10. Meningkatnya Mutu Pelayanan Di RSUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan RSUD Ratu Zalecha Martapura ditetapkan sebagai RS rujukan regional 2 (dua) yang meliputi kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dengan keadaan tersebut dari tahun ke tahun RSUD Ratu Zalecha Martapura terus berbenah diri untuk meningkatkan citra rumah sakit sebagai wujud nyata dalam pelayanan kesehatan yang prima.

Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD merupakan kinerja utama yang ditempuh dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RSUD. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan di RSUD menunjukkan hasil yang sangat memuaskan atau masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata sebesar 100%. Capaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan di RSUD diukur dengan 2 (dua) indikator Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sasaran dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 29. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan di RSUD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (5:7)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi) (5:4)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	624	104,87	630 Dok	647 Dok	102,70%	700 Dokumen	92,43%
2.	Indeks Kepuasan	80.2	106,93%	80%	75,99%	94,99%	85%	89,40%

Masyarakat (IKM)								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : RSUD Ratu Zalecha

a. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur

Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan pelayanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Capaian pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2018 adalah 102,70% didapat dari realisasi sebesar 647 Dokumen dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 630 Dokumen. Tercapainya pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2018 ini dikarenakan seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan untuk pemenuhan dan penerapan SOP sesuai dengan standar.

Jumlah SOP tahun 2018 turun dari tahun 2017 disebabkan adanya SOP pada tahun 2016 yang mirip atau sama, sehingga SOP yang mirip atau yang sama dihilangkan/digabungkan, dan juga karena ada salah dalam penjumlahan dalam perhitungan SOP keseluruhan. Terlepas dari itu capaian pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2017 telah berhasil menyumbang 92,42% dari target 700 dokumen pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,

Outcome yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebesar 102,70% (647 SOP). Pencapaian ini melebihi dari target 630 SOP yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan dengan output yaitu: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang telah tersedia, target 85 %. Hasil kegiatan persentase 98,73%, klasifikasi indikator berdasarkan capaiannya (sangat tinggi).

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. RSUD Ratu Zalecha Martapura sebagai salah satu pelayanan publik yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dalam perbaikan pelayan publik ini dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana institusi publik dalam memberikan pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD pada tahun 2018 adalah 95,00% didapat dari realisasi sebesar 75,99% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD mengalami peningkatan 14,8% dan capaian pada tahun 2018 telah berhasil menyumbang 95,00% dari target 85% pada tahun 2020.

Faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi dalam tercapainya target adalah :

- ✓ Jam pelayanan disetiap unit sesuai jadwal yang telah ditentukan
- ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan untuk kenyamanan pasien
- ✓ Penerapan pedoman dan SPO sesuai standar disetiap unit pelayanan
- ✓ Komitmen seluruh pegawai RS untuk meningkatkan mutu pelayanan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,

Outcome yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2018 adalah sebesar 75,99% (target 80%). Pencapaian ini 95,00% belum mencapai target yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang telah tersedia, target 80 %. Realisasi 79% Hasil kegiatan persentase

98,80%, klasifikasi indikator berdasarkan capaiannya (sangat tinggi).

Permasalahan :

- Masih kurang maksimalnya fungsi pengawasan kontrol dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga masih ditemukan pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak efisien

Solusi :

- Diharapkan fungsi pengawasan kontrol lebih dimaksimalkan dengan melakukan evaluasi secara berkala

3.2.11. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Pengangguran Terbuka, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang positif dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 persentase angka pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 2,55 % dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 3,11 % dengan capaian sebesar 78%. Sementara pada tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebesar 2,53 % realisasi sebesar 3,03% atau capaian sebesar 80.24% masuk dalam kategori tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2018 berhasil menyumbang 121.20% untuk target akhir RPJMD.

Capaian target kinerja indikator Angka Pengangguran Terbuka, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 30. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Angka Pengangguran Terbuka	3,11 %	78 %	2,53 %	*3,03	80.24 %	2,50	78.80 %

Tabel 3. 31. Program / kegiatan DISNAKERTRANS Tahun 2018 per sasaran

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (n-1)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan peluang kerja baru	7,23%	20%	20%	100	35%	100%
1.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja yang masuk dalam dunia kerja setelah mendapatkan kegiatan pelatihan produktivitas	278	173	438	100	178	156
2.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah Orang yang mendapatkan peluang kerja baru	150	150	150	100	150	100
4.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah calon TKI yang faham tentang prosedur, mekanisme dan persyaratan bekerja didalam dan diluar negeri	90	90	110	100%	90	100
		Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA yang paham prosedur perpanjangan IMTA	0	4	6	100		
2.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan lembaga pelatihan kerja	100%	54%	81%	100	60%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (n-1)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		yang dikembangkan						
	1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang bekerja setelah mendapatkan pelatihan LPK	64	64	249	100	64	118
3.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penurunan sengketa/kasus hubungan industrial yang diselesaikan	0	6%	58%	100%	8%	95%
	1. Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial yang selesai ditangani	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang selesai ditangani	12	15	7	100	10	70
		Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana HI	0	45	42	93%	55	76%
	2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah PP/PKB/PKW T/Permenaker 19/2012 sesuai aturan	55	25	69	100	35	100
	3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan Hukum dan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMP	0	150	140	93%	160	74%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (n-1)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Jaminan Sosial ketenagakerjaan							
		Jumlah Tenaga Kerja yang ikut BPJS ketenagakerjaan	0	204	14.513	100%	250	100
4.	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Persentase penyediaan tenaga kerja yang bermitra dengan perusahaan	0	10%	10%	100%		
	1. Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga kerja yang masuk dalam dunia kerja yang telah mendapatkan pelatihan pengembangan kompetensi	0	80	80	100%		
	2. Peningkatan pengembangan kesempatan kerja	Jumlah perusahaan yang terlibat aktif dalam bursa kerja online	0	5	12	100		

Definisi Kesempatan Kerja adalah sumber daya manusia yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha dapat dipergunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur ekonomi. Peningkatan Kesempatan kerja memakai indikator kinerja persentase peningkatan

peluang kerja baru dengan Definisi operasional adalah meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja dari tahun yang lalu, perhitungan indicator adalah Jumlah Peluang kerja di Tahun N di kurang dengan peluang kerja N-1 dibagi dengan peluang kerja di Tahun N di Kali 100%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 Kabupaten Banjar Persentase peningkatan peluang kerja baru di tahun 2018 meningkat dari 287.442 orang menjadi 293.552 sebesar 2,1%. Dan bila dilihat dari jumlah lowongan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar maka ada penurunan sebesar 29% dari tahun 2017 sebesar 278 orang menurun 215 orang ditahun 2018 tetapi keberhasilan sasaran peningkatan kesempatan kerja ini terbantu dengan kegiatan Job Fair yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Maret 2018 di Halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar dengan peluang kerja sebanyak 1118 orang, jadi peningkatan peluang kerja ditahun 2018 meningkat sebanyak 100% dari Tahun 2017.

Diperkirakan kesempatan kerja pada tahun 2018-2021 akan didominasi kesempatan kerja disektor pertanian, dimana pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 108.802 orang (37,06 %) dan pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebanyak 110.025 orang (35,23 %). Pada lapangan usaha pertanian ini diperkirakan jumlah kesempatan kerja akan tetap meningkat, namun secara proporsi diperkirakan akan mengalami penurunan. perkiraan menurunnya kontribusi lapangan usaha ini dikarenakan alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan. Khususnya pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin. Dan apabila kita hubungkan dengan nilai perkiraan kontribusi PDRB sektor ini pada periode 2018-2021 memang juga akan terus mengalami penurunan. Lapangan usaha yang menjadi terbesar kedua dalam penyediaan kesempatan kerja adalah sektor Perdagangan dimana pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 72.332 orang (24,64 %) dan pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebanyak 74.440 orang (23,84 %). Lapangan usaha berikutnya yang diperkirakan akan menjadi terbesar ketiga dalam penyediaan kesempatan kerja adalah Jasa Kemasyarakatan dengan 39.337 orang (13,40 %) dan pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebanyak 43.190 orang (13,83 %).

Tabel 3. 32. Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021 (Orang)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021
----	----------------	------	------	------	------

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

1	Pertanian	108.802	109.175	109.583	110.025
2	Pertambangan	7.152	7.347	7.553	7.787
3	Industri/Pengolahan	26.612	27.716	28.776	29.765
4	Listrik, Gas, dan Air	911	948	985	1.022
5	Bangunan	19.414	20.354	21.358	22.434
6	Perdagangan	72.332	73.039	73.740	74.440
7	Angkutan	10.992	11.984	12.998	14.066
8	Keuangan	8.001	8.483	9.001	9.559
9	Jasa Kemasyarakatan	39.337	40.687	41.985	43.190
	Jumlah	293.552	299.733	305.977	312.269

Sementara itu sektor yang diperkirakan paling sedikit menyediakan kesempatan kerja adalah sektor Listrik, Gas dan Air. Menurut perkiraan pada tahun 2018 sektor ini cuma akan menyediakan kesempatan kerja sebanyak 911 orang (0,31%), kemudian ditahun 2021 akan sedikit meningkat menjadi 1.022 orang dengan (0,33 %).

Sedangkan berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banjar sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 33. Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan dan Penempatan Tahun 2018

No	Bulan	Pencari Kerja Terdaftar		Jumlah	Lowongan		Jumlah	Penempatan		Jumlah
		L	W		L	W		L	W	
1	Januari	128	68	196	2	7	9	2	5	7
2	Februari	59	51	110	3	1	4	3	1	4
3	Maret	155	148	303	10	1	11	10	1	11
4	April	66	28	94	11	1	12	11	1	12
5	Mei	206	90	296	12	0	12	12	0	12
6	Juni	222	220	442	10	5	15	10	5	15
7	Juli	282	337	619	9	24	33	9	24	33
8	Agustus	97	64	161	5	6	11	5	6	11
9	September	121	129	250	2	8	10	2	8	10
10	Oktober	82	91	173	12	3	15	12	3	15
11	November	70	24	94	15	2	17	14	2	16
12	Desember	95	94	189	24	42	66	24	42	66
	Jumlah	1583	1344	2927	115	100	215	114	98	212

Jadi ditahun 2018 peningkatan kesempatan kerja lebih besar pada lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, bangunan sebagaimana table 2.2. Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi tenaga kerja adalah sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dengan indicator jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja baru. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi bagi pencari kerja pemula mengenai informasi pasar kerja dan kesempatan kerja di dunia usaha dilaksanakan di 3 (tiga) sekolah yaitu :
 - a. MA Sultan Sulaiman Kec. Karang Intan pada tanggal 3 September 2018, jumlah peserta 50 orang peserta kelas XII
 - b. SMKNS Islami Alffath Astambul tanggal 25 oktober 2018 jumlah peserta 50 orang terdiri dari kelas XII
 - c. SMKN 1 Simpang Empat tanggal 26 oktober 2018 jumlah peserta 50 orang terdiri dari kelas XII.

Dengan dilaksanakan sosialisasi informasi pasar kerja dan kesempatan kerja ini diharapkan Tahun 2019 kesempatan kerja akan meningkat dan untuk Tahun 2018 jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja baru adalah sebesar 215 orang

2. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai adalah kegiatan sosialisasi yang terdiri dari :
 - a. Ijin mempekerjakan tenaga asing, kegiatan ini lebih menekankan agar perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing faham akan prosedur perpanjangan IMTA sehingga TKA yang bekerja di wilayah Kab. Banjar dapat membayarkan konpensasi IMTAny sesuai prosedur ketentuan yang berlaku. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2018 perusahaan yang mengikuti terdiri dari :
 1. PT.MMI
 2. PT.Palmina
 3. PT.Sucofindo
 4. PT. Tata
 5. PT. Good Jewelry
 6. SMA Banua

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA yang paham prosedur IMTA sebanyak 6 perusahaan.

- b. Sosialisasi mengenai cara cegah TKI Non procedural dan prosedual penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri

kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai yang dilaksanakan di 2 kecamatan di Kab. Banjar yaitu :

1. Kecamatan Cintapuri pada tanggal 10 September 2018 jumlah peserta 30 orang
2. Kecamatan pengaron tanggal 24 September 2018 jumlah peserta 30 orang

Berdasarkan kegiatan ini indikator Jumlah calon TKI yang faham tentang prosedur, mekanisme dan persyaratan bekerja didalam dan diluar negeri adalah sebanyak 60 orang

c. Kegiatan pameran kesempatan kerja (Banjar Job Fair 2018) yang dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tanggal 20 s.d 21 Maret 2018, dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah perusahaan yang hadir dan berpartisipasi menyediakan lowongan sebanyak 21 perusahaan.
2. Jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1118 lowongan dengan formasi 75 jabatan yang ada di perusahaan dari wilayah Kab. Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Jumlah pencari kerja yang datang sebanyak 1727 orang dari wilayah, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kab. Tabalong, Kota Banjarbaru, Kab. Balangan, Kab. Batola, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. HST, Kab. HSS, Kab. Pulau Laut, Kab. HSU, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kapuas, Kota Palangkaraya, Kab. Kotawaringin Barat/Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah lamaran yang diserahkan ke perusahaan sebanyak 2 (dua) kali jumlah pencari kerja.

3. Kegiatan Pelatihan wirausaha baru bidang pertanian yaitu budidaya jamur di Desa Pematang Danai kecamatan Mataraman dengan peserta 15 orang. Kegiatan ini akan dimonitoring ditahun 2019, berapa orang yang berwirausaha setelah mendapatkan pelatihan ini.

Berdasarkan Hasil monitoring kegiatan Tahun 2017, indicator jumlah tenaga kerja yang masuk dalam dunia kerja setelah mendapatkan kegiatan pelatihan produktivitas adalah sebanyak 438 orang.

- Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator persentase peningkatan lembaga pelatihan yang dikembangkan/dibina (Jumlah LPK yang dibina/Jumlah LPK x 100%) untuk tahun 2018 realisasi 81% dari, target 54%, pencapaian kinerja

sebanyak 100% dengan rincian jumlah LPK yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 22 LPK. didukung kegiatan :

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, untuk Tahun 2018 target 64 orang, kegiatan yg di dani APBD sebanyak 16 orang dan kegiatan yang dilaksanakan LPK yang bekerja sama dengan Disnaker sebanyak 233 orang
- Sosialisasi pembinaan/pengembangan lembaga pelatihan kerja tanggal 11 Desember 2018 dan diikuti sebanyak 22 LPK.

Permasalahan

Kendala/hambatan pada sasaran peningkatan kesempatan kerja ini adalah :

- Tenaga kerja asing yang bekerja di Kab. Banjar rata-rata memiliki ijin memperkerjakan tenaga asing pada Kementerian Tenaga Kerja dan Pemerintah Propinsi, karena mereka bersifat jangka panjang dan sementara (6 bulan).
- Lokasi Kegiatan susah dicapai/tidak diketahui undangan
- Untuk kegiatan Job Fair 2018 Tidak adanya dana untuk petugas keamanan, lalu lintas, parkir dan kesehatan, Kurangnya Jumlah partisi, seharusnya ada 21 buah namun yang tersedia hanya 17 buah, tidak ada pendingin ruangan, tidak adanya alat untuk scan barcode
- Dalam penyelenggaraan monitoring kegiatan mengalami hambatan :
 - Perjalanan jauh dan tidak sesuai dengan dana yang tersedia.
 - Memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu

Solusi

Langkah langkah/solusi yang akan dilaksanakan :

- Tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan Job fair dengan dana APBD untuk meningkatkan kesempatan kerja pencari kerja
- Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait ataupun perangkat desa terlebih dahulu baru melaksanakan cek lokasi
- Membentuk dan menjalin kerjasama dengan perangkat desa terkait dan instansi terkait melalui penyulhan yang dijasikan lokasi kegiatan

3.2.12. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah masalah yang tidak ada habis habisnya pada suatu daerah. Keberhasilan cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu ukuran kepedulian dan keberhasilan daerah dalam mensejahterakan penduduknya.

Untuk itu meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengakhiri kemiskinan sesuai dengan tujuan SDG's.

Capaian sasaran sebesar 69,58% % masuk dalam kategori Sedang, yang diukur dengan 1 indikator yaitu persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani.

Capaian target kinerja indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 34. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	100	70%	100%	73%	50,79%	69,58%	80	63,49%

a. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan

lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS yaitu Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah social psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Komunitas Adat Terpencil.

Formulasi perhitungan adalah jumlah PMKS (fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar dll) yang mendapat pelayanan dibagi dengan jumlah PMKS (fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar) yang terdaftar dikali 100%.

Capaian persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani pada tahun 2018 adalah 69,58% didapat dari realisasi sebesar 50,79% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 73%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (100%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 49,21%. Realisasi persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani diperoleh dengan pengukuran sebagai berikut :

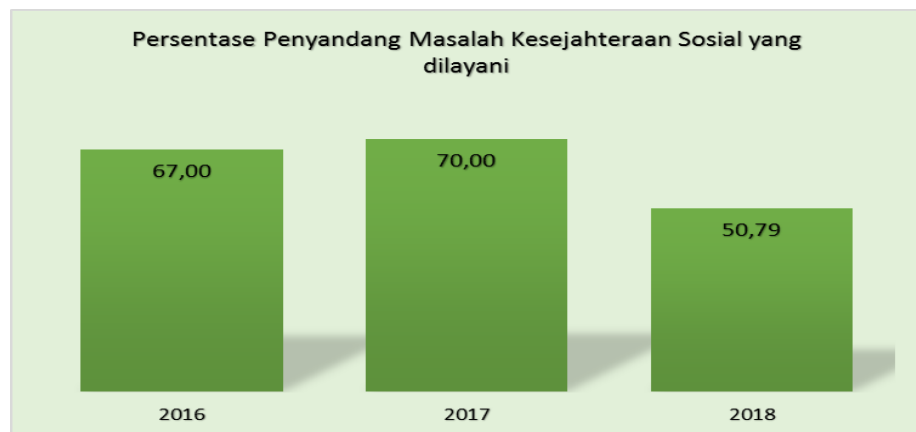
Persentase penyandang masalah kesejahteraan social yang dilayani	$= \frac{\sum \text{PMKS yang mendapat pelayanan}}{\sum \text{PMKS yang terdaftar}} \times 100\%$
	$= \frac{13.614}{26.806} \times 100\% = 50,79\%$

Dibandingkan dengan tahun 2017, persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani mengalami penurunan sebesar 19,21% yaitu pada tahun 2017 sebesar 70% menjadi 50,79% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada

akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 63,49% dari target 80% pada tahun 2020.

Perkembangan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani selama 3 tahun terakhir (tahun 2016-2018) dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3. 39. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilayani Tahun 2016 – 2018



Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 69,58% berarti masuk dalam capaian kategori sedang.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan , antara lain sebagai berikut

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan:
 - Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak; Kegiatan berupa Tim Koordinasi dan Operasional Perlindungan Sosial Hukum Perempuan Anak;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

- Kegiatan berupa Validasi Data PMKS, PBI JKN dan KKS kab. Banjar
- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Kegiatan berupa penanganan bencana dan peningkatan keterampilan relawan sosial Tagana Kab. Banjar.
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan:
 - Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; Kegiatan berupa pemberian pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin, pemberian peralatan dan bahan untuk berusaha.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin; Pemberian Bahan Material untuk pemenuhan kebutuhan papan masyarakat miskin (Bedah Rumah).

Gambar 3. 40. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilayani Tahun 2016 – 2018



- Pendidikan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan berupa bimbingan sosial bagi PMKS (Wanita Rawan Sosial Ekonomi), bantuan uang saku dan transport untuk siswa PSBR dan PSBW serta pemberian peralatan dan perlengkapan membuat kue bagi WRSE.

- Program Pembinaan Anak Terlantar; Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; kegiatan berupa penanganan orang terlantar.
- Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya, dengan kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma; Kegiatan berupa Bimbingan sosial untuk Penyandang Disabilitas, pelatihan Baca Tulis Al Quran Digital/Brailey, pemberian peralatan dan perlengkapan membuat kue, penyerahan Al Quran Digital/Brailey bagi peserta bintek dan penyerahan Al Quran Digital/Brailey untuk Perpustakaan Daerah.
 - Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma. Kegiatan berupa pembinaan Penyandang Disabilitas dengan diikuti pendidikan dan pelatihan ke Solo, Makassar, Cibinong dan Provinsi.
- Program Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; kegiatan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan, penyerahan blender dan mesin pencuci kendaraan bermotor bagi eks Napi, Narkoba dan gepeng di Kab. Banjar. Adapun tingkat capain program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 35. Capain Program dan Kegiatan Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran Strategis Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (2017)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (2017)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
	1. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Pelatihan dan Modal Usaha	10 orang	10 orang	10 orang	100%	80 orang	
	2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah rumah keluarga miskin yang mendapat kegiatan bedah rumah	20 rumah	15 rumah	13 rumah	86,67%		
	3. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	- Jumlah WRSB - Siswa PSBR - PSBW Yang mendapat bantuan pelatihan keterampilan	30 kel 60 orang 40 orang	5 kel 5 orang 5 orang	15 kel 15 orang 15 orang	100%		
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
	1. Pelayanan dan perlindungan social,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak	Persentase anak yang mendapatkan izin adopsi	100%	100% (6 orang)	100% (2 orang)	100%	25 orang	
	2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen Data PMKS,PBI JKN dan KKS Kab.Banjara yang dilaksanakan	3 dok	3 dok	3 dok	100		
	3. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana alam yang mendapat bantuan dan pelayanan	100%	100%	100%	100%		
3	Pembinaan Anak Terlantar							
	1. Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah orang terlantar yang terbantu	20 jiwa	20 jiwa	20 jiwa	100%	150 orang	
4	Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma							
	1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang terbantu	70 jiwa	50 jiwa	50 jiwa	100%	275 orang	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (2017)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
5	2	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang terbantu	14 jiwa	35 jiwa	35 jiwa	100%	
		Pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya)						
	1	Pendayagunaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks narapidana (BWBLP) yang terbina	80 jiwa	125 jiwa	125 jiwa	100%	440 orang

Permasalahan :

- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banjar masih cukup banyak. Pada tahun 2017 sebanyak 25.181 jiwa yang terdiri dari 26 jenis. Dari 26 jenis PMKS, 4 jenis yang terbesar adalah 1) Fakir miskin Miskin = 12659, 2) Lanjut Usia Terlantar = 3123, 3) Keluarga Berumah tidak layak huni = 2803, 4) Wanita Rawan Sosial Ekonomi = 2522 .
- Belum seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial (26 jenis PMKS). Pada tahun 2018 yang tertangani (sumber dana APBD) adalah : bedah rumah = 13 rumah, WRSE = 15 orang, PSBR/PSBW = 30 orang, Evakuasi orang/anak terlantar = 20 orang, Penyandang disabilitas = 85 orang, Eks penyandang penyakit sosial = 30 orang, NAPZA = 60 orang, UEP = 15 orang, PMKS lainnya = 5000 jiwa. Sumber dana dari APBN (Kemensos RI) : Rastra = 15.346 jiwa, PKH = 55.917 KK, PBI JKN = 107.092 jiwa.
- PSKS dan pekerja sosial masih terbatas kuantitas maupun kualitasnya
- Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial
- Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PMKS
- Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan terutama jaminan sosial

bagi Odk yang selama ini hanya mengandalkan bantuan dari dana APBN melalui Dinas Sosial Provinsi

- Belum tersedianya data yang valid tentang warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial
- Lokasi dan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banjar sehingga sulit untuk ditangani.

Solusi :

- Peningkatan pelatihan bagi PMKS yang berorientasi pada manfaat
- Peningkatan pelayanan masalah sosial dan pembinaan kemandirian kepada penyandang masalah social
- Validasi data PMKS yang akurat dan berkelanjutan

3.2.13. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan " sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki"

Selain itu banyaknya realita yang berkembang di masyarakat dimana adanya sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam kehidupannya.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki laki.

Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Untuk itu meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberdayakan perempuan sebagai penopang pembangunan dan melindungi anak sebagai penerus bangsa.

Capaian Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat tinggi dengan rata rata capaian 117,57% . Capaian sasaran diukur dengan 2(dua) indikator yaitu Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Persentase Kelurahan Layak anak, capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 36. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	142,85%	74	100	135,14	80	125
2	Persentasi kelurahan layak anak	7,7	100%	15,4	15,4	100	46	33,41

a. Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu penyelesaian kekerasan terhadap anak dan perempuan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi dari segi ekonomi

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Formulasi perhitungan adalah jumlah penanganan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tuntas dan ditutup kasusnya berbanding dengan jumlah pengaduan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani.

Capaian Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 adalah 135,14% didapat dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 74%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (142,85%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 7,71%. Realisasi rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	$= \frac{\sum \text{penanganan masalah perempuan dan anak yang tuntas dan ditutup kasusnya}}{\sum \text{pengaduan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani}} \times 100\%$
	$= \frac{35 \text{ kasus}}{35 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$

Dibandingkan dengan tahun 2017 rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sama yaitu pada tahun 2017 sebesar 100% dan pada tahun 2018 juga 100%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 125% dari target 80% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 135,14% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Gambar 3. 41. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Keberhasilan capaian indikator diatas dikarenakan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksimal, koordinasi yang baik dan intensif baik dengan kepolisian, pihak RS dan Psikolog ULM, Rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak lapas anak lintas sektor yg terkait.

Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :
 - Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - Kegiatan berupa jasa medis untuk visum korban kekerasan
- Program Penguatan dan Pengarusutamaan Gender
 - Kegiatan *peningkatan kapasitas dan jaringan pemberdayaan perempuan dan anak*
 - Kegiatan Pertemuan FAD Tk. Nasional
 - Rapat Bulanan FAD
 - Koordinasi Kota Layak Anak (KLA).

b. Persentasi kelurahan layak anak

Kabupaten dan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui hak Pengarusutamaan Hak Anak.

Kelurahan layak anak yaitu kelurahan yang telah memenuhi 31 indikator .

Formulasi perhitungan persentase kelurahan layak anak adalah jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria layak anak dibandingkan jumlah seluruh kelurahan yang ada dikalikan dengan 100.

Capaian persentase kelurahan layak anak pada tahun 2018 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 15,4% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 15,4%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (100%), capaian tahun 2018 sama 100%. Realisasi persentase kelurahan layak anak diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Persentase kelurahan layak anak	=	$\frac{\sum \text{jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria layak anak}}{\sum \text{kelurahan di Kab.Banjar}}$	X 100%
	=	$\frac{2 \text{ kelurahan}}{13 \text{ kelurahan}}$	X 100% = 15,4%

Dibandingkan dengan tahun 2017 ,persentase kelurahan anak mengalami peningkatan sebesar 7,7% yaitu pada tahun 2017 sebesar 7,7% menjadi 15,4% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 33,41% dari target 46% pada tahun 2020.

Gambar 3. 42. Persentase Kelurahan Layak Anak Tahun 2016-2018



Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Adapun program yang menjadi faktor penguangkit ketercapaian sasaran persentase Kelurahan Layak Anak yaitu:

- Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
Dengan kegiatan :
 - Kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak.
 - Kegiatan Sosialisasi Program Kegiatan dan Peraturan Perundang-undangan PP dan PA.
 - Kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak
 - Kegiatan sosialisasi puskesmas ramah anak martapura.
 - sosialisasi pola asuh anak

Prestasi yang didapat bidang Perlindungan Anak Tahun 2018 yaitu : penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Pratama

Permasalahan :

- Tidak adanya PERDA dan PERBUP mengenai perlindungan perempuan dan anak
- Masih minimnya sarana prasarana khususnya pada fasilitas umum yang mendukung pemenuhan hak anak seperti pojok laktasi dan pojok bermain
- Kasus kekerasan terhadap anak perempuan/laki-laki dan perempuan dewasa yang melapor relatif tinggi, yaitu Pada tahun 2017 total 32 kasus. Kasus yang paling tinggi pada jenis kasus seksual pada anak perempuan sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus, dengan kasus tertinggi pada jenis kasus seksual pada anak perempuan = 10 kasus. (Sumber : LKJiP DP2KBP3A)
- Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
- Belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Solusi :

- Pembuatan Perda/Perbub tentang perlindungan perempuan dan anak
- Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak

- Peningkatan kemampuan perempuan untuk dapat aktif dalam pengarusutamaan gender
- Peningkatan perlindungan hak anak dan Sosialisasi anak
- Perlu lebih giat lagi sosialisasi terkait Layak Anak khususnya di tingkat sekolah dan sarana kesehatan

Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

3.2.14. Meningkatkan Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

Meningkatnya mitigasi bencana merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka menciptakan stabilitas yang aman bagi pembangunan di Kabupaten Banjar, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana baik pra maupun pasca sehingga perencanaan pembangunan sudah dapat mengendalikan dan mengatasi terjadinya bencana baik alam maupun sosial.

Capaian sasaran meningkatnya mitigasi bencana dengan dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase pengurangan resiko bencana,
2. Persentase kejadian bencana yang tertanggulangi.

Kedua indikator tersebut capaiannya masuk pada kategori sangat tinggi. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 37. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD (5÷7x100)
	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (5÷4x100)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pengurangan Resiko Bencana	0.06%	87,27%	60	77,6	129,37	70%	110,86
Persentase Kejadian Bencana yg tertanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%

a. Persentase Pengurangan Resiko Bencana

Menurut UNISDR, Disaster Risk Reduction (DRR) atau Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan dan badai, melalui etika pencegahan.

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana

Definisi operasional pengurangan resiko bencana adalah upaya preventif dengan memberikan pembekalan kepada masyarakat dan relawan berupa pengetahuan dan pelatihan bagaimana cara menanggulangi bencana, evakuasi saat terjadi bencana dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis serta himbauan dalam bentuk spanduk leaflet dan sebagainya.

Formulasi perhitungan yang digunakan oleh BPBD Kab. Banjar adalah jumlah kelompok masyarakat (desa) yang mendapat Sosialisasi pengurangan bencana dibagi jumlah seluruh desa rawan bencana dikali 100%.

Capaian persentase pengurangan resiko bencana pada tahun 2018 adalah 129,37% didapat dari realisasi sebesar 77,62% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 60%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (87,27%), capaian tahun 2018 meningkat sebesar 42,1%. Realisasi persentase pengurangan resiko bencana diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Persentase pengurangan resiko bencana	$= \frac{\sum \text{kel.masy. (desa) yang mendapat Sosialisasi pengurangan resiko bencana}}{\sum \text{desa rawan bencana}} \times 100\%$
	$= \frac{215 \text{ desa}}{\quad} \times 100\% = 77,62\%$

277 desa

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase pengurangan resiko bencana mengalami peningkatan sebesar 22,62% yaitu pada tahun 2017 sebesar 55% menjadi 77,62% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian pada tahun 2018 menyumbang 110,86% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 129,37% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Pengurangan Resiko Bencana didukung oleh program kegiatan yaitu:

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang didukung oleh kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana dengan sub kegiatan berupa :
 - ✓ Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebanyak 7 kali Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebencanaan serta upaya-upaya dalam menghadapi bencana dan pengurangan resiko bencana (PRB).

Gambar 3. 43. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana



Gambar 3. 44. Sosialisasi PRB di Desa Tanah Habang Kecamatan Mataraman



- ✓ Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) sebanyak 5 kali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan, keterampilan dan penambahan wawasan kepada peserta/masyarakat dalam penanggulangan bencana.

**Gambar 3. 45. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan FPBBM
Kec. Martapura Barat, Kec. Martapura
Timur dan Kec. Astambul**



- ✓ Sosialisasi Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebanyak 1 kali . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.

**Gambar 3. 46. Sosialisasi Pengembangan Desa Tangguh
Bencana**



- ✓ Rapat Koordinasi (RAKOR) Penanggulangan Bencana sebanyak 2 kali. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah koordinatif kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Gambar 3. 47. Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla



- ✓ Sosialisasi Apel Siaga Bencana sebanyak 1 kali Tujuan diselenggarakan Apel Siaga sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana

Gambar 3. 48. Apel Siaga B Rakor Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabut Asap akibat Karhutla



- ✓ Gladi Penanggulangan Bencana sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 250 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan serta meningkatkan kapasitas masyarakat, aparatur pemerintahan beserta dunia usaha dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi terjadinya bencana sehingga terjalin kerjasama dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana di daerah Kab. Banjar

Gambar 3. 49. Gladi Penanggulangan Bencana Bertempat di Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk



Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 38. Capaian Program dan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

No.	Program/ Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Target Akhir	Capaian s/d Tahun 2018
-----	-------------------	------------	------------	--------------	------------------------

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

		Realisasi	Capaian (% Realisasi)	Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)	RPJMD / Renstra	terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8
	Program :							
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam							
	Kegiatan :							
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana dengan indicator kinerja terlaksananya dan tersebarluasnya informasi potensi bencana	13 Kali	100	18 Kali	17 Kali	94,44	31 Kali	54,84

b. Persentase Kejadian Bencana yang Tertanggulangi

Persentase kejadian bencana yang tertanggulangi yaitu kemampuan daerah untuk menanggulangi dampak bencana yang terjadi. Formulasi perhitungan persentase kejadian bencana yang tertanggulangi adalah kejadian bencana yang ditanggulangi dibagi dengan seluruh jumlah kejadian bencana dikalikan 100%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar selalu di respon dan di tanggulangi sesuai dengan kebutuhan peralatan dan logistik yang perlukan.

Berdasarkan laporan petugas operator kecamatan tentang kejadian bencana, tim langsung diterjunkan untuk mengidentifikasi kerusakan/ kerugian yang dialami korban. Setelah itu akan dikirim bantuan peralatan atau logistik serta sandang berupa bahan makanan siap saji serta pakaian yang diperlukan. Untuk capaian pada indikator kinerja ini sebesar 100% yang berarti seluruh kejadian bencana yang ada di Kabupaten banjar telah tertanggulangi dengan baik.

Capaian persentase kejadian bencana yang tertanggulangi pada tahun 2018 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Demikian juga capaian tahun 2017 sebesar 100%. Realisasi persentase kejadian bencana yang tertanggulangi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase kejadian bencana yang tertanggulangi} = \frac{\sum \text{bencana yang tertanggulangi}}{\sum \text{bencana yang terjadi}} \times 100\%$$

$$= \frac{132}{132} \times 100\% = 100\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase kejadian bencana yang tertanggulangi sama yaitu pada tahun 2017 sebesar 100% demikian juga pada tahun 2018 sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 100% dari target 100% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian antara lain sebagai berikut :

- Program Tanggap darurat
 - ✓ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana dengan indicator kinerja tersedianya kapasitas sumber daya aparatur kebencanaan yang terlatih melalui kegiatan berupa
 - In House Training Dapur Umum Lapangan sebanyak 1 kali dengan peserta 35 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur BPBD khususnya dalam penanganan darurat di bidang pelayanan konsumsi kepada masyarakat korban bencana dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu (efisiensi waktu) dan nilai gizi (higiene & sanitasi makanan) serta rasa makanan yang akan disajikan kepada masyarakat korban bencana,

Gambar 3. 50. In House Training Dapur Umum Lapangan



- In House Training Scuba Diving sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 5 orang. Kegiatan tersebut bertujuan agar memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Rescuer untuk dapat melaksanakan tugas penyelamatan maupun monitoring di dalam air secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi

Gambar 3. 51. In House Training Scuba Diving



- In House Training Tim Reaksi Cepat sebanyak 1 kali dengan peserta 25 orang Banjar. Tujuan kegiatan agar memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk dapat melakukan penyelesaian masalah dengan cara kerjasama tim dan agar personil BPBD mampu bertahan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi.

Gambar 3. 52. In House Training Tim Reaksi Cepat



- Pelatihan Satgas Pusdalops sebanyak 1 kali dengan 35 orang peserta bertujuan untuk menunjang berjalannya sistem koordinasi, komunikasi dan informasi, peringatan dini, penanganan darurat dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil BPBD agar mampu dalam menggunakan alat komunikasi dalam menyampaikan informasi kebencanaan serta mampu menghitung luasan lahan untuk pelaporan/penyampaian laporan ke Pusdalops BPBD.

Gambar 3. 53. In House Training Tim Reaksi Cepat



- ✓ Kegiatan Tanggap darurat di daerah terkena bencana dengan indikator terpenuhinya penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi Pembentukan Posko Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
- ✓ Kegiatan Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dengan indikator tersedianya

bahan logistic dan peralatan penanggulangan bencana meliputi;

- Belanja bahan logistic selama 12 bulan dengan membeli berbagai keperluan logistic dalam rangka penanggulangan bencana.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 39. Capaian Program Dan Kegiatan Tanggap Darurat

No.	Program/ Kegiatan	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
		Realisasi	Capaian (% Realisasi)	Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3		4	5	6	7	8
	Program :							
	Tanggap darurat							
	Kegiatan :							
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100	0	0
2	Tanggap darurat di daerah terkena bencana	5 Posko	100	5 Posko	4 Posko	80	5 Posko	80
3	Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	4,903 Pcs	92,19	10.411 Pcs	10.376 Pcs	99,66	19.000 Pcs	54,61

Permasalahan

- Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu instrumen Pembangunan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya berbasis pada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) karena tidak hanya BPBD yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi resiko bencana oleh karena itu masih kurangnya sinergitas antara stakeholder.
- Masih kurangnya peralatan evakuasi penanggulangan bencana

- Perlunya pembinaan kelembagaan bagi masyarakat terhadap proses tahapan pengajuan bantuan untuk pasca bencana dalam penanggulangan bencana.
- Kurangnya data-data presisi dalam penyusunan kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)
- Keterbatasan SDM/beragamnya latar belakang pendidikan dan kurangnya peningkatan kapasitas SDM di bidang kebencanaan yang mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan bencana.
- Keterbatasan peralatan dikarenakan harga peralatan cukup mahal yang mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan bencana.
- Keterbatasan informasi dikarenakan tidak tersedianya jaringan komunikasi di daerah terdampak dan lambatnya pelaporan dari aparat desa yang mengakibatkan terlambatnya penanganan korban bencana.
- Lokasi kejadian (akses jalan/medan jalan yang berat menuju lokasi yang terdampak) yang mengakibatkan terhambatnya waktu penanganan kebencanaan.
- Waktu kejadian (bencana terjadi pada saat diluar jam dinas) yang mengakibatkan terlambatnya penanganan korban bencana.
- Keterbatasan logistik dan ketersediaan *buffer stock* dikarenakan terbatasnya APBD mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pemberian logistik untuk korban bencana.
- Informasi yang tidak akurat dikarenakan data yang sesuai dengan hasil investigasi yang mengakibatkan tidak sinkronnya penggunaan peralatan kebencanaan maupun jumlah bantuan yang harus diberikan.

Solusi

- Untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana seharusnya ditetapkan dalam Perbup/Perda sehingga RPB bukan saja menjadi dokumen BPBD tetapi menjadi dokumen Kabupaten yang dapat menjadi acuan stakeholder terkait.
- Peningkatan sarana dan prasarana baik dalam kegiatan pra bencana baik sarana transportasi, bahan dan alat bantu penyebarluasan informasi kebencanaan.

- Peningkatan keterampilan petugas dalam kegiatan pra bencana sehingga dapat dipahami oleh semua tingkat pendidikan masyarakat
- Meningkatkan SDM yang ada di bidang kebencanaan (peningkatan/sertifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan bidang kebencanaan).
- Memaksimalkan serta meningkatkan sarana dan peralatan yang ada sesuai kebutuhan kebencanaan.
- Menggunakan radio 2 (dua) arah, telepon, media sosial untuk menerima informasi kebencanaan untuk kesiapan aparatur desa dalam menyampaikan informasi.
- Menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan medan (penambahan sarana transportasi untuk medan berat guna penanganan kebencanaan maupun penyaluran logistik).
- Menggunakan media sosial untuk menerima informasi kebencanaan dan mengaktifkan Pusdalops 24 jam.

3.2.15. Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan Dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda

Pemuda adalah potensi dan penerus perjuangan bangsa yang harus dipersiapkan sebagai kader masa depan. Kemajuan di berbagai bidang telah membawa dampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kepada pemuda sebagai penerus bangsa. Terlebih lagi di dalam perkembangan dunia yang semakin terhubung tanpa batas antara Negara yang satu dengan Negara yang lain, menuntut sikap pemuda yang memiliki karakteristik kebangsaan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

Derasnya arus globalisasi di satu sisi merupakan manfaat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menempa diri sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik. Terbukanya arus informasi dewasa ini menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memotivasi dan menginspirasi diri untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang bermanfaat, salah satunya adalah mengembangkan motivasi kewirausahaan. Namun di sisi yang lain, arus globalisasi telah mendorong sebagian generasi muda bersikap konsumerisme. Semakin banyaknya mall dan tempat-tempat hiburan, tidak hanya di kota-kota

besar, tetapi juga telah melanda kota-kota kecil telah mendorong konsumerisme di kalangan generasi muda. Apalagi arus informasi yang begitu cepat, sehingga generasi muda kita dicekoki dengan berbagai produk dan budaya serta gaya hidup yang seringkali tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang dan menjadi falsafah hidup bangsa ini.

Program pemberdayaan pemuda dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap analisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran.

Untuk itu meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda dimana pemuda merupakan Sumber Daya Manusia yang sangat potensial untuk membangun daerah.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas dan organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda adalah sebesar 87,50% dan tergolong dalam kategori capaian tinggi. Capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 40. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD (5÷7x100)
	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (5÷4x100)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pemuda yang	0,70%	117%	0,80	0,70%	87,50	1,2	58,33

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD (5÷7x100)
	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (5÷4x100)		
1	2	3	4	5	6	7	8
mendapat binaan kewirausahaan							

Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan adalah dengan definisi sebagai berikut : Pemuda adalah penduduk dengan usia 16 – 30 Tahun dan Pembinaan Kepemimpinan adalah pelatihan dan kegiatan sejenisnya yang berorientasi pada pembentukan karakter pemuda, Formulasi perhitungan untuk sasaran ini adalah jumlah pemuda yang dibina/ jumlah seluruh pemuda x 100%.

Capaian persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan pada tahun 2018 adalah 87,50% didapat dari realisasi sebesar 0,70% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,80%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (117%), capaian tahun 2018 menurun sebesar 29,5%. Realisasi persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Persentase pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	=	$\frac{\sum \text{pemuda yang dibina}}{\sum \text{pemuda kab.Banjar (usia 16-30 tahun)}} \times 100\%$	
	=	$\frac{1.020}{145.680} \times 100\%$	= 0,70%

Dibandingkan dengan tahun 2017, persentase pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan sebesar 0,70% sama dengan tahun 2018 yang juga mencapai 0,70%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 55,33% dari target 1,2% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 87,50% berarti masuk dalam capaian kategori tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dengan indikator program persentase Pemuda Yang Dapat Dikembangkan Bakat dan Potensinya, didukung kegiatan :
 - Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan, berupa pemuda yang dikembangkan potensinya melalui Pencarian Bakat Pemuda berupa seleksi seleksi berjenjang diantaranya Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Bhakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Paskibraka Indonesia dan Napak Tilas Jejak Pahlawan.
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator program persentase Pemuda Yang berperan dalam pembangunan, didukung kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Dasar kepemimpinan, berupa pemuda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dasar sebanyak 77 org
 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan berupa pemuda yang ikut dalam kegiatan PHBN dan Duta Pemuda sebanyak 83 orang
 - Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah, dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang. Tujuan kegiatan adalah pemuda paham akan peraturan keorganisasian dan UU pemuda.

Permasalahan

- Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu Persentasi Pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga mengalami kendala dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran karena belum adanya Perda yang mengatur tentang kepemudaan sehingga kegiatan kewirausahaan merupakan Tugas dan fungsi SKPD lain seperti Disnaker, Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM, jadi sulit untuk dikerjakan oleh Dispora

Solusi

- Pembuatan Perda tentang kepemudaan.
- Peningkatan kemandirian dalam kewirausahaan bagi pemuda
- Peningkatan pembinaan kecakapan hidup bagi siswa menengah ke atas
- Peningkatam kesadaran nasionalisme bagi pemuda dan siswa tingkat menengah melalui prestasi dan kemandirian

3.2.16. Meningkatnya Perilaku Berolah Raga Di Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Perilaku Berolahraga di Masyarakat diukur dengan indikator Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga, memiliki capaian kinerja sasaran sebesar 88 % masuk dalam kategori tinggi, dengan realisasi 50 % dari target 56,86 %. capaian indikator dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 41. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan dan Jiwa Kewirausahaan Pemuda

Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD (5÷7x100)
	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (5÷4x100)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Fasilitas olahraga	50%	88%	60,34%	57%	94,46%	67,24	84,77%

Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga adalah jumlah desa /kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga salah satu atau lebih yaitu lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis dan fasilitas olahraga lainnya.

Formulasi perhitungan persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga adalah jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%.

Capaian persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga pada tahun 2018 adalah 94,46% didapat dari realisasi sebesar 57% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 60,34%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (88%), capaian tahun 2018 meningkat sebesar 6,46%. Realisasi persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga} = \frac{\sum \text{desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga}}{\sum \text{desa/kelurahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{165}{290} \times 100\% = 57\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017, persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga mengalami peningkatan sebesar 7% yaitu pada tahun 2017 sebesar 50% menjadi 57% pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 84,77% dari target 67,24 pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 94,46% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Gambar 3. 54. Persentase Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Olahraga Tahun 2016-2018



Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut :

- Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

- ✓ Kegiatan Peningkatan Kesehatan jasmani dan rekreasi

Gambar 3. 55. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani berupa kegiatan olahraga sepak bola dan Volly



- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Permasalahan

- Perlu biaya yang cukup besar untuk pembangunan fasilitas olahraga sehingga peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga cukup kecil.

Solusi

- Pengadaan fasilitas lapangan olah raga dan sarana penunjangnya dapat bekerjasama dengan pihak desa melalui optimalisasi dana desa.

3.2.17. Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan

Ditinjau dari struktur perekonomian, Kabupaten Banjar berada pada tipe agraris terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertanian yang menyumbang lebih dari 18,61% dari total PDRB atau memberikan kontribusi terbesar. Merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah daerah membangun sektor pertanian karena sesuai dengan potensi daerah. Dilakukan melalui sasaran Meningkatnya Produksi Dan Produktifitas Pertanian Dan Perikanan, kinerjanya diukur melalui 12 indikator, rata-rata capaian sebesar 95,49% masuk dalam kategori tinggi. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 42. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Produksi komoditas prioritas padi sawah (ton)	90,16	248.015	200.026*	80,65	263.251	75,98
2.	Produksi komoditas prioritas padi ladang (ton)	100%	30.151	36.491*	121,03	36.671	99,51
3.	Produksi karet (ton)	91,99%	21.268,69	17.895,05	84,14	26.205,16	68,29
4.	Produktifitas komoditas prioritas padi sawah kw/ha	90,58%	45,76	34,73*	75,90	52,33	66,37
5.	Produktifitas komoditas prioritas padi ladang kw/ha	94,43%	32,45	34,22*	105,45	39,30	87,07
6.	Produktifitas karet (kg/ha)	76,70%	1.291	889	68,86	1.590	55,91
7.	Persentase Kelompok tani madya (%)	100%	3,19	4,43	132,60	3,68	120,38
8.	Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi (%)	100%	80	87,35	109,19%	80	109,19
9.	Populasi sapi (ekor)	104%	17.200	18.021	104,77	18000	100,12
10.	Jumlah produksi ikan budidaya (ton)	116%	55.000	60.870,36	110,67 %	70.000	86,96
11.	Jumlah produksi ikan tangkap (ton)	86%	11.492	9.470	82,41	12.112	78,19
12.	Jumlah konsumsi ikan kg/kapita	116,7%	50	51	102	50	102

Dari 13 indikator kinerja pada sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan di atas, 8 indikator termasuk kategori sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori tinggi, 2 Indikator Sedang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka terlihat pada tabel di atas bahwa ada 3 indikator yang melampaui terhadap target akhir RPJMD yaitu capaian indikator Prosentasi Kelompok Tani Madya (114,95), Persentase Produksi Olahan

Hasil Peternakan (107,11), Peningkatan Populasi Ternak Sapi (100,12), dan Prosentasi Luasan Pertanian yang Terlayani Irigasi (130 %).

Analisa capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Indikator komoditas prioritas padi sawah

Yang dimaksud dengan produksi padi sawah adalah jumlah output atau hasil panen padi sawah dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam. Formulasi produksi padi adalah fungsi dari luasan lahan yang panen dikali produktifitas lahan (sampling ubinan) pada 1 atau beberapa kali musim tanam

Definisi operasional dari produksi padi sawah adalah jumlah output atau hasil panen padi sawah dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam, dengan formulasi :

$$\text{Produksi Padi Sawah (ton)} = \sum_n^i Q_1 + Q_2 + Q_3$$

dengan :

Q₁ : Produksi padi sawah subround I (Januari-April)

Q₂ : Produksi padi sawah subround II (Mei-Agustus)

Q₃ : Produksi padi sawah subround III (September-Desember)

Adapun data realisasi produksi komoditas prioritas padi sawah tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 43. Data Realisasi Produksi Komoditas Prioritas Padi Sawah Tahun 2018

Uraian	Realisasi (ton)	Keterangan
Subgron I	11.187	Angka tetap dari BPS Kab. Banjar
Subgron II	144.437	Angka tetap dari BPS Kab. Banjar
Subgron III	44.402	Estimasi Angka sementara dari Dinas TPH
Total	200.026	Angka Sementara

Pada tahun 2018 sebesar 200.026 ton, bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasi ini menorehkan capaian sebesar 80,65% dengan kategori tinggi. Dibanding tahun 2017 capaian kinerja indikator tahun ini mengalami penurunan sebesar 9,51 %, pada tahun 2017 mampu mencapai target 90,16%. Capaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2018 sebesar (75,98) atau capaian tahun ini telah mengalami penurun sebesar (7,16 %) dimana pada tahun 2017 sudah mencapai 83,14%

Dari sisi realisasi, produksi padi sawah tiap tahunnya mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 ini merupakan produksi terendah dari tahun-tahun sebelumnya. dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 18.859 ton (7.76%), produksi padi sawah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 44. Realisasi Indikator Produksi Padi Sawah Tahun 2013 s/d 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
Produksi padi sawah	(ton)	236.614	235.504	242.947	218.885	200.026

Penurunan produksi padi sawah dibandingkan tahun 2017 dan tidak tercapainya target produksi padi sawah tahun 2018 disebabkan oleh faktor:

- a. Pada tahun 2018 pengembangan padi lebih banyak di alokasikan ke padi di lahan kering.
- b. Bantuan benih padi untuk kelompok tani terlambat sehingga usaha tani padi di lahan sawah sebagian besar dilakukan secara swadaya sehingga penggunaan sarpras belum optimal seperti penggunaan pupuk yang tidak sesuai rekomendasi.
- c. Adanya serangan tungro di sebagian kecamatan. Serangan tungro tersebut tidak menyebabkan puso, namun berdampak pada penurunan hasil produksi dan produktivitas
- d. Sumber daya petani masih melakukan budidaya secara konvensional dan tidak menerapkan teknologi terkini.
- e. Semakin berkurangnya minat pemuda untuk bertani, sebagian besar petani berusia rata-rata lebih dari 45 tahun. Pada umumnya usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam mengelola usahatani pengembangan penerapan teknologi.
- f. berkurangnya luas tanam dan panen sebagai dampak dari alih fungsi lahan potensial dan dampak perubahan iklim
- g. petani hanya dapat menanam satu kali setahun musim hujan yang panjang pada awal musim tanam (Okt-Mar 2017/2018) menyebabkan permukaan air di lahan pasang surut.
- h. tadah hujan dan lebak cukup tinggi dan dalam waktu cukup lama sehingga petani memundurkan jadwal tanamnya

b. Indikator Produksi komoditas prioritas padi ladang

Definisi operasional dari produktifitas padi sawah dan ladang adalah produksi padi sawah dan ladang per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani padi sawah dan ladang selama satu kali musim tanam. Formulasi produktifitas padi diperoleh dari hasil sampling ubinan pada 1 atau beberapa kali musim tanam. dengan formulasi :

$$\text{Produksi Padi Ladang (ton)} = \sum_n^i Q_1 + Q_2 + Q_3$$

dengan :

Q_1 : Produksi padi ladang subround I (Januari-April)

Q_2 : Produksi padi ladang subround II (Mei-Agustus)

Q_3 : Produksi padi ladang subround III (September-Desember)

Adapun data realisasi produksi komoditas prioritas padi ladang tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 45. Realisasi Produksi Komoditas Prioritas Padi Ladang Tahun 2018

Uraian	Realisasi (ton)	Keterangan
Subgron I	21.271	Angka tetap dari BPS Kab. Banjar
Subgron II	14.299	Angka tetap dari BPS Kab. Banjar
Subgron III	922	Estimasi Angka sementara dari Dinas TPH
Total	36.491	Angka Sementara

c. Indikator Produktivitas komoditas prioritas padi sawah

Definisi operasional dari produktivitas padi sawah adalah produksi padi sawah per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani padi sawah, dengan formulasi :

$$\text{Produktivitas Padi Sawah} = \frac{\text{Produksi Padi Sawah (Kwintal)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$$

Adapun data realisasi produksi komoditas prioritas padi ladang tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 46. Realisasi Produksi Komoditas Prioritas Padi Ladang Tahun 2018

Uraian	Realisasi	Keterangan
Produksi Padi Sawah (Kw)	200.026	Angka Sementara
Luas Panen (Ha)	57.598,70	Angka Sementara
Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)	34,73	Angka Sementara

Pada tahun 2018 realisasi produktifitas komoditas prioritas padi sawah sebesar 34,73 kw/ha. Jika dibandingkan dengan realisasi produktifitas komoditas prioritas padi sawah pada tahun 2017 (38,95 kw/ha), terjadi penurunan produktifitas padi sawah sebesar 4,22 kw/ha atau sebesar 10,83%. Jika di bandingkan dengan target produktifitas padi sawah tahun 2018 yaitu sebesar 45,76 kw/ha, capaian produktifitas hanya sebesar 75,90%. Produktifitas padi sawah tahun 2018 telah menyumbang sebesar 66,37% terhadap target akhir RPJMD sebesar 52,33 kw/ha dan tersisa 33,63% produktivitas komoditas padi sawah sampai akhir periode renstra.

Penurunan produktifitas padi sawah dibandingkan tahun 2017 dan tidak tercapainya target produktifitas padi sawah tahun 2018 disebabkan oleh faktor :

- a. pada tahun 2018 pengembangan padi lebih banyak di alokasikan ke padi di lahan kering.
- b. bantuan benih padi untuk kelompok tani terlambat sehingga usahatani padi di lahan sawah sebagian besar dilakukan secara swadaya sehingga penggunaan sarpras belum optimal seperti penggunaan pupuk yang tidak sesuai rekomendasi.
- c. adanya serangan tungro di sebagian kecamatan. Serangan tungro tersebut tidak menyebabkan puso, namun berdampak pada penurunan hasil produksi dan produktivitas
- d. sumber daya petani masih melakukan budidaya secara konvensional dan tidak menerapkan teknologi terkini.
- e. semakin berkurangnya minat pemuda untuk bertani, sebagian besar petani berusia rata-rata lebih dari 45 tahun. Pada umumnya usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam mengelola usahatani pengembangan penerapan teknologi.

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator produktivitas padi sawah adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 - Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
- Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
 - Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija berupa pelaksanaan GP-PTT padi, palawija
 - Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman
 - Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
 - Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
 - Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air
 - Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (DAK Reguler)
 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
 - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat.
 - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan berupa 1 unit alsintan untuk kelompok tani dengan realisasi 1 unit.
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, didukung dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut :
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
 - Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

d. Indikator Produktifitas komoditas prioritas padi ladang

Yang dimaksud dengan produktivitas padi ladang adalah produksi ladang persatuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi ladang. Pada tahun 2018, realisasi produktifitas Padi ladang sebesar 34.22 Kw/Ha, Target Produktifitas padi ladang tahun 2018 sebesar 32,45 Kw/Ha, maka capaian indikator kinerja =

(realisasi/target) x 100% yaitu sebesar 105,45 %. Capaian indikator kinerja tersebut termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja " Sangat Tinggi". Capaian indikator tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 94,43 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 28,33 kw/ha, maka produktivitas mengalami peningkatan sebesar 5,89 %.

Petani termotivasi untuk menanam padi di lahan kering (padi ladang) dengan membuka lahan baru dengan adanya kegiatan APBD Provinsi yaitu pengembangan padi di lahan kering dan sebagian varietas yang digunakan adalah varietas unggul

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator peningkatan produksi padi sawah, produksi padi ladang, produktivitas padi sawah dan produktivitas padi ladang adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Berupa penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi). satu kegiatan tidak terlaksana yaitu sosialisasi perbub harga tertinggal eceran pupuk karena pada tahun 2017 harga tertinggi eceran pupuk hanya ditetapkan dengan SK kepla Dinas.
 - Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Target kinerja pada kegiatan adalah 5 kegiatan dengan realisasi kinerja 5 kegiatan dengan capaian 100%. Adapun realisasi kegiatan berupa kegiatan budidaya anggrek dan lomba/kontes durian.
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
berupa angka sasaran dan realisasi tanam, panen, produksi dan produktivitas, data statistik pertanian disusun dari 20 kecamatan.
 - Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
berupa data base sebaran penerima pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Target kinerja pada kegiatan adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja 1 kegiatan dengan capaian 100%.

- Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija berupa pelaksanaan GP-PTT padi, palawija dan field day. Target kinerja pada kegiatan adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja 1 kegiatan dengan capaian 100%.
- Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman berupa pembinaan dan pengembangan poktan tanaman hortikultura (jeruk, pisang, cabe). Target kinerja pada kegiatan adalah 2 kegiatan dengan realisasi kinerja 2 kegiatan dengan capaian 100%.
- Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan berupa operasional perbibitan dan perbenihan UPT balai benih selama setahun untuk penyediaan benih/bibit unggul bersertifikat. Target kinerja pada kegiatan adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja 1 kegiatan dengan capaian 100%.
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian berupa pengendalian OPT padi, OPT jeruk dan OPT pisang, sehingga serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura kurang dari 5%. Target kinerja pada kegiatan adalah 6 kegiatan dengan realisasi kinerja 6 kegiatan dengan capaian 100%.
- Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air berupa perencanaan pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam) 2 unit/paket, perencanaan pembangunan embung sebanyak 2 unit/paket,
- Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (DAK Reguler) Adapun realisasi kegiatan berupa pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam) sebanyak 2 paket pekerjaan.
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;
 - Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan berupa monitoring dan pendataan harga pasar produk pertanian/perkebunan. Target kinerja pada kegiatan adalah 3 kegiatan dengan realisasi kinerja 3 kegiatan dengan capaian 100%.
 - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat. Target kinerja 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

- Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan berupa 1 unit alsintan untuk kelompok tani dengan realisasi 1 unit.
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dengan target kinerja 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan;
 - Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan target 20 kegiatan dan terealisasi 20 kegiatan;
 - Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 2 kegiatan, dengan realisasi 2 kegiatan;
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 20 Kegiatan dengan realisasi 20 kegiatan;
 - Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan untuk 150 orang dengan realiasi sebanyak 150 orang;

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan sebanyak 20 kegiatan dengan realisasi 20 kegiatan

e. Indikator Produksi Karet

Poduksi karet adalah jumlah output atau hasil panen karet dari luas lahan perkebunan selama satu kali musim

Pada tahun 2018 Realisasi produksi karet sebesar 17.895,05 ton belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar yaitu 21.268,69 ton atau kinerjanya 84,14 % masuk pada kategori tinggi. Hasil kinerja indikator lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang berhasil mencatat hasil kinerja sebesar 17.888,68 Ton. Jika diproyeksikan dengan target tahun 2021 sebesar 26.205,16 ton realisasi produksi tahun 2018 sudah mencapai 68,29 % dari target akhir RPJMD 2021.

Tidak tercapainya target **produksi karet** disebabkan karena tanaman karet yang ada banyak sudah tua dan tidak produktif lagi sedangkan kegiatan pengembangan dan replanting karet masih baru dan belum berproduksi. Diharapkan dalam waktu 4 tahun ke depan, tanaman karet yang diremajakan sudah mulai menghasilkan dan berkontribusi terhadap capaian kinerja SKPD. Disamping itu juga

faktor regulasi juga menjadi kendala karena dari anggaran daerah tidak bisa memberikan bantuan langsung berupa bibit, pupuk, obat dan lain-lain sehingga tidak memberi pengaruh yang langsung terhadap kinerja.

Program kegiatan APBD yang mendukung keberhasilan sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan (subsektor peternakan dan perkebunan) yaitu :

1. Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
2. Program dan kegiatan Pendukung :
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 - b. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
 - Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
 - Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

f. Indikator produktivitas karet

Produktifitas karet didefinisikan produksi padi ladang per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani karet. Realisasi Indikator produktifitas karet belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.291 kg/ha, hanya dapat tercapai 889 kg/ha atau sebesar 68,86%. Dengan proyeksi target 2021 sebesar 1.590 kg/ha, masih kekurangan 701 kg/ha untuk memenuhi target akhir 2021 atau hanya dapat menyumbang 55,91%. Jika dibandingkan dengan produktifitas karet tahun 2017 sebesar 892 kg/ha, Realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,34%.

Penurunnya produktifitas karet karena banyaknya tanaman tua, rusak dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta adanya serangan OPT. Untuk meningkatkan produktifitas telah dilaksanakan peremajaan karet saat ini sedang dalam pelaksanaan (mulai tanam) sehingga belum menghasilkan/belum berproduksi.

Upaya-upaya untuk mencapai target indikator Produksi Karet dan produktivitas karet dilaksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Outcome yang diharapkan adalah bertambahnya luas tanaman karet melalui kegiatan peremajaan karet seluas 25.242 Hektar tahun 2017 hektar menjadi 25.542 pada tahun 2018, kegiatan pada program tersebut adalah

- Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Output kegiatan berupa Pembinaan dan pendampingan kegiatan pengembangan dan peremajaan karet seluas 300 Hektar(APBN) dengan realisasi seluas 200 Ha atau 66,78 %
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
Output kegiatan berupa terlaksananya kegiatan Luas areal kebun terkendali dari OPT seluas 70 Hektar dengan realisasi seluas 70 Hektar atau 100 % dengan anggaran dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
Bimbingan Teknis Pengendalian OPT Perkebunan
 - Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran lahan dan kebun
 - Koordinasi antisipasi dan kesiapsiagaan kebakaran lahan dan kebun
 - Pembangunan Demplot Pembukaan lahan tanpa bakar

g. Indikator Persentase kelompok tani madya

Yang dimaksud kelompok tani madya adalah kelompok tani kelas madya yang ada di Kabupaten Banjar selama kurun waktu 1 tahun. Sedangkan formulasinya adalah perbandingan jumlah kelas kelompok tani madya dengan jumlah total kelompok tani. Kelompok tani madya adalah kelompok tani yang paling banyak berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian.

Pada tahun 2018, realisasi persentase kelompok tani madya sebesar 4,43% atau dengan capaian 132,60% terhadap target sebesar 3,19% Capaian indikator kinerja tersebut termasuk kriteria penilaian

realisasi kinerja " Sangat Tinggi". Capaian kinerja tahun 2018 lebih besar dibanding dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yakni sebesar 32,60%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 3,03%, maka kelompok tani madya mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Dibanding dengan target akhir RPJMD, realisasi tahun ini telah menyumbang capaian 3,68%. Maka sudah terlampaui target tersebut hingga mencapai 4,43 % atau capainya mencapai 114,95

Meningkatnya jumlah kelompok tani madya didukung oleh kemauan kelompok tani untuk berkembang, penyuluh yang bisa memberikan motivasi, dan fasilitasi Dana APBD Kabupaten

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator adalah melakukan Pembinaan dinas pada penyuluh dan pembinaan penyuluh pada kelompok tani

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase kelompok tani madya adalah Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

- o Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan. berupa terlaksananya diklat teknis bagi 20 orang penyuluh.
- o Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan berupa terfasilitasinya peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS/ Non PNS sebanyak 158 orang
- o Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan berupa terfasilitasinya penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku utama/ pelaku usaha dan kelompok di 20 kecamatan.

h. Capaian Indikator Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi

Sasaran ini menunjang salah satu sasaran RPJMD pada misi III yakni "Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan". Indikator kinerja sasaran ini adalah 'Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi'.

Capaian indikator kinerja “Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi’ dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebesar 100% yang diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Luas lahan pertanian terlayani air irigasi}}{\text{Luas lahan pertanian total}} \times 100\%$$

$$= \frac{27.458 \text{ Ha}}{31.436 \text{ Ha}} \times 100\% = 87,35\%$$

Tabel 3. 47. Indikator Kinerja Persentase Luasan Pertanian Yang Terlayani Air Irigasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (Realisasi Tahun n / Target akhir jangka menengah)
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi	81.89%	100%	80%	87,35%	109.19%	80%	109.19%

Indikator kinerja “Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi’ ini ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Pintu Air

Kegiatan ini meliputi pekerjaan Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut Pintu Air, meliputi Pembuatan Tabat Desa Lok Tanah, Pembuatan Tabat Desa Pemangkih Darat, Pembuatan Tabat Desa Pasayangan Barat, Pembuatan Tabat Desa Mali-Mali, pembuatan Tabat Desa Kusambi, Pembuatan Tabat Desa Munggu Raya, Pembuatan Tabat Desa Tatah Hanyar Rt.6, Perencanaan Teknis 2019, dan Pengawasan Teknis 2018. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pintu Air atau Tabat dimaksudkan untuk menahan dan menaikkan tinggi muka air,

sehingga diharapkan dapat mengairi persawahan yang ada di sekitar dan di bagian hulunya. Pembangunan pintu air/tabat dilaksanakan di desa. Pelaksanaan pembangunan pintu air atau tabat memerlukan kecermatan pada saat survey dan pelaksanaan di lapangan. Tebalnya lapisan tanah lunak berpotensi menyulitkan pelaksanaan dan pengawasan, selain dapat menimbulkan risiko kegagalan konstruksi.

b. Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Merupakan kegiatan normalisasi, pengerukan sungai, perbaikan saluran, perencanaan dan pengawasan. Pada tahun 2018, kegiatan ini meliputi Rehabilitasi Siring Sungai Keladan Baru, Rehabilitasi Sungai Mali-Mali, Rehabilitasi Sungai Kosambi, Rehabilitasi Sungai Tatah Kapuk, Rehabilitasi Saluran Sungai Rell, Sungai Surahman dan Sungai Rukam, Perencanaan Teknis, Pengawasan Teknis 2018.

Pelaksanaan kegiatan Normalisasi Saluran Sungai merupakan kegiatan pengembalian kondisi saluran sungai agar mampu melayani debit normalnya. Normalisasi ini diperlukan, karena pada beberapa daerah saluran sungai mengalami pendangkalan yang diakibatkan oleh adanya sedimentasi, hanyutan dan tanaman liar yang tumbuh sepanjang sungai. Pendangkalan mengakibatkan arus air tidak lancar, yang pada gilirannya menyebabkan kadar asam air sungai meningkat. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi kurang subur. Pelaksanaan kegiatan Normalisasi Saluran Sungai juga melaksanakan perbaikan tanggul penahan air asin agar tanaman padi terhindar dari masuknya air asin yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman padi.

c. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan rehabilitasi daerah irigasi dan daerah rawa yang meliputi Pemeliharaan Daerah Irigasi Sungkai (108 Ha), Pemeliharaan Daerah Irigasi Lihung (179 Ha), Pemeliharaan Daerah Irigasi Mandiangin (104 Ha), Pemeliharaan Daerah Rawa Pasayangan dan Antalangu (912 Ha), Pemeliharaan Daerah Rawa Sei. Kitano, Sei. Akar Bagantung, Kelampayan/Tengah, Munggu Raya, dan Pematang Hambawang (1.135 Ha), Pemeliharaan Daerah Rawa Landung, Liakhmad, Lok Buntar dan Sei. Antasan Keliling

Benteng (1.000 Ha), Pemeliharaan Daerah Rawa Selat Makmur, Babirik, Lawahan, Jambu Raya dan Kampung Baru (2.727 Ha), Pemeliharaan Sungai Paku Alam dan Sungai Tandipah (225 Ha), Pemeliharaan Saluran Polder Liang (900 Ha), Pemeliharaan Saluran Desa Tajau Landung (500 Ha), Pemeliharaan Saluran Pematang Panjang, Sungai Jabar dan Keliling Kecil Kec. Sei. Tabuk (1.150 Ha), Pengawasan Teknis 2018, Pemeliharaan/Rehabilitasi Daerah Irigasi/Rawa/Sungai (Swakelola), Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap (Swakelola), Belanja Konsultasi Perencanaan 2019, Belanja Pembuatan Peta Geoparsial 2018 Zona 1, dan Belanja Pembuatan Peta Geoparsial 2018 Zona 2.

d. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Kegiatan ini ditujukan untuk memberdayakan petani agar ikut dalam kegiatan pembangunan. Program Pembinaan Petani Pemakai Air ini merupakan salah satu kegiatan pada bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menjalin Silaturahmi dan Komunikasi antara Masyarakat Pemakai Air dan Pemerintah Kabupaten Banjar serta mampu menambah wawasan bagi kita semua baik dalam teknis pertanian maupun teknis pengairan, selain itu dengan adanya kegiatan P3A ini Pengairan di daerah kita dapat terjaga dan terpelihara fasilitasnya.

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini ditujukan untuk memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kemajuan realisasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan.

f. Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai (DAK Penugasan)

Kegiatan ini meliputi Rehabilitasi Jaringan Irigasi : Rehabilitasi Saluran Dan Bangunan Pelengkap DIR Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa : Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Sungai Kitano, Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Antasan, Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Antasan Bawah Ringin, Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Antasan Sutun, Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Lok Baintan, Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Lok Buntar,

Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Handil Jawa, Biaya Pengawasan dan Pengendalian.



Sebelum



Sesudah

Gambar 3. 56. Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap DIR Antasan



Sebelum



Sesudah

Gambar 3. 57. Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap



Sebelum



Sesudah

**Gambar 3. 58. Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap
DIR Handil Jawa**

Permasalahan

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian' bisa dikatakan tidak ada. Hanya saja tetap perlu meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian.

Solusi

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian' adalah diharapkan Pemerintah Daerah bisa meningkatkan usaha pencarian sumber dana lain selain APBD, misalnya dengan dana DAK.

i. Indikator Populasi sapi

Populasi sapi adalah jumlah sapi yang ada di Kabupaten Banjar indikator sasaran populasi sapi tercapai 104,77% dengan kategori capaian sangat tinggi, diperoleh dari pencapaian dari target 17.200 ekor dapat direalisasikan sebesar 18.021 ekor. Kinerja Realisasi populasi sapi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori sangat tinggi. Perbandingan terhadap proyeksi target akhir RPJMD 2021 sebesar 18.000 ekor, maka realisasi produksi tahun 2018 sudah mencapai 100,17% dan Jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2017 sebesar 17.627 ekor, realiasasi 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,24%.

Faktor penentu keberhasilan indikator sasaran adalah meningkatnya angka kelahiran ternak dalam 2 (dua) tahun terakhir yang mencapai lebih dari 2.000 ekor.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017 guna pencapaian indikator sasaran adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- o Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, output yang dihasilkan berupa target Akseptor 2.800 ekor dengan realisasi sebanyak 3.747 ekor, IB target sebanyak 4.200 dosis dengan realisasi 3.813 dosis dan Kelahiran IB target 1.972 ekor realisasi sebanyak 2.460 ekor
- o Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat output yang dihasilkan berupa Pembinaan mendukung UPSUS SIWAB (155 ok).

j. Indikator Jumlah Produksi Ikan Budidaya,

Definisi operasional (DO) dari produksi perikanan budidaya adalah Jumlah output atau hasil panen ikan budidaya. Produksi Ikan Budidaya di Kabupaten Banjar terdiri dari lahan kolam, sawah, karamba, dan jaring apung. Komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Banjar yaitu ikan patin, nila, lele dan mas

Produksi perikanan Budidaya pada tahun 2018 ini sebesar 60.870,36 ton atau mencapai 110,67 % dari targetnya sebesar 55.000 ton . Capaian indikator ini telah tercapai lebih dari 100% dan dalam penilaian realisasi kinerja termasuk kriteria sangat tinggi. bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 untuk produksi budidaya mengalami peningkatan sebesar 2.765,36 ton. Produksi perikanan budidaya mencapai 86.96% dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 70.000 ton.

Faktor pendukung pencapaian kinerja Produksi perikanan Budidaya`

- kondisi cuaca yang lebih baik
- tingkat harga ikan yang baik sehingga meningkatkan minat banyak pembudidaya untuk memelihara ikan dengan baik
- ketersediaan benih ikan untuk pembesaran ikan dapat terjaga dengan baik (pasokan benih terpenuhi baik dari BBI maupun dari luar daerah).
- peningkatan pengetahuan pembudidaya dan pembinaan yang dilakukan pihak dinas tentang pemeliharaan dan penanganan ikan yang baik yang dapat meminimalisir resiko kematian ikan dan penanganan yang bisa memelihara ikan dengan baik dan dapat meminimalisir resiko kematian ikan.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan tahun 2018 ada 2 program:

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- Keberhasilan Pencapaian IKU tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

- Pembinaan kepada pembudidaya ikan.
- Monitoring budidaya dan kualitas air
- Partisipasi pembudidaya dan dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kal-Sel dan Kementerian Kelautan Perikanan.

k. Indikator Jumlah produksi ikan tangkap produksi perikanan tangkap

Definisi operasional (DO) dari perikanan tangkap adalah jumlah output atau hasil panen ikan tangkap. Perikanan tangkap yang dimaksud disini terutama adalah hasil perikanan tangkap di laut yang dilakukan oleh para nelayan di Kecamatan Aluh-aluh

Realisasi produksi ikan tangkap tahun 2018 sebesar 9.470 ton dari target sebesar 11,492ton atau sebesar 82.41%, dengan kategori tinggi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 produksi ikan tangkap mengalami penurunan sebesar 156 ton. Produksi ikan tangkap tersebut mencapai 78,19 % dari target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 12.112 ton

Penurunan produksi ikan tangkap disebabkan antara lain :

- jumlah trip melaut berkurang karena adanya beberapa kapal yang tidak beroperasi
- faktor kondisi cuaca yang kurang bagus (gelombang tinggi) dan untuk perairan umum berkurang akibat adanya alih fungsi lahan.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan tahun 2018 untuk IKU jumlah produksi Ikan Tangkap ada 4 program:

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan;
- Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut;
- Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

l. Pada indikator Konsumsi ikan

Definisi operasional (DO) dari konsumsi perikanan adalah banyaknya konsumsi ikan per orang . Sedangkan formulasinya adalah jumlah konsumsi ikan (kg) / orang. Angka konsumsi ikan menunjukkan jumlah ikan yang di konsumsi oleh masyarakat, yang mana ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik untuk tubuh

Angka konsumsi ikan ini menunjukkan jumlah ikan yang di konsumsi oleh masyarakat, yang mana Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik untuk tubuh. Angka konsumsi ikan

Kabupaten banjar tahun 2018 dari 51 kg/kapita/tahun, telah dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 51 kg/kapita/tahun dengan capaian 102% dengan kategori sangat tinggi

Angka konsumsi ikan Kabupaten banjar tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari 51 kg/kapita/tahun. Dibanding dengan target akhir periode RPJMD realisasi tahun ini telah melampaui atau 102% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 50 kg/kapita/tahun

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran disebabkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan yang lebih dominan mengkonsumsi ikan segar. Meningkatnya minat mengkonsumsi ikan tidak terlepas kaitannya dengan peran dinas dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah tentang penting makan ikan melalui kegiatan gemarikan dan pembinaan.

Program yang telah dilakukan yakni Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya yaitu kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Permasalahan

- Permasalahan yang dihadapi pada sasaran Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan pada tanaman padi sawah dan padi lading adalah
 - Pada tahun 2018 pengembangan padi lebih banyak di alokasikan ke padi di lahan kering.
 - Bantuan benih padi untuk kelompok tani terlambat sehingga usahatani padi di lahan sawah sebagian besar dilakukan secara swadaya sehingga penggunaan sarpras belum optimal seperti penggunaan pupuk yang tidak sesuai rekomendasi.
 - Adanya serangan tungro di sebagian kecamatan. Serangan tungro tersebut tidak menyebabkan puso, namun berdampak pada penurunan hasil produksi dan produktivitas.
 - Sumber daya petani masih melakukan budidaya secara konvensional dan tidak menerapkan teknologi terkini.
 - Semakin berkurangnya minat pemuda untuk bertani, sebagian besar petani berusia rata-rata lebih dari 45 tahun. Pada umumnya usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam

- mengelola usahatani pengembangan penerapan teknologi.
- Adanya peraturan dari kementerian pertanian yang menyatakan bahwa indikator kinerja penyuluh pertanian diukur dari jumlah kelas kelompok tani yang meningkat, satu penyuluh pertanian minimal dapat meningkatkan 5 kelas kelompok tani dalam satu tahun.
 - Adanya peningkatan supervisi dan pembinaan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banjar ke penyuluh pertanian.
- Varietas yang digunakan petani sebagian besar adalah varietas lokal dengan produktivitas masih dibawah varietas unggul dengan alasan
- Pemilihan varietas ini lebih didasarkan pada preferensi masyarakat Banjar terhadap beras lokal karena sebagian besar petani berusaha tani untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
 - selain itu pemilihan varietas lokal didasarkan pada harga jual gabah yang tinggi dibandingkan gabah dari varietas unggul.
- Permasalahan pada produksi karet antara lain :
- Banyaknya tanaman karet yang sudah tua, rusak dan tidak produktif
 - Penggunaan bibit bukan klon unggul
 - Lemahnya sumber daya petani dalam kelembagaan kelompok dan teknologi dalam pengolahan karet itu sendiri.
 - Intensitas sadap yang cukup tinggi
 - Rendahnya daya saing dalam perekonomian daerah khusus iklim usaha, rendahnya kemampuan SDM dan kelembagaan serta belum optimalnya kemitraan antara Pemerintah dengan dunia usaha dan kerjasama antar daerah
 - Belum optimalnya pendampingan dan fasilitasi menuju kemandirian dan pengelolaan berkelanjutan.
 - Pemberian bantuan kepada kelompok tani tidak bisa direalisasikan terkendala peraturan tentang Badan Hukum Kelompok. pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat 5 tentang Bantuan/Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

- hukum. Sementara Kelompok tani yang ada hampir tidak ada yang berbadan hukum sehingga bantuan bibit dan pupuk tidak dapat direalisasikan sehingga output kegiatan hanya berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi
- Serangan OPT perkebunan, gangguan usaha perkebunan, kebakaran lahan.
- Permasalahan pada produksi ternak :
- Pematangan ternak betina produktif
 - Jumlah kepemilikan ternak petani masih rendah dan belum mencapai skala ekonomis, membuat usaha dibidang peternakan masih terkesan berjalan lamban.
 - masih tingginya pematangan sapi yang memiliki kondisi baik, terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding) serta penurunan populasi sapi antara lain karena kemampuan reproduksi yang rendah.
 - Sebagian pelaku bisnis sapi potong memilih mendatangkan sapi dari luar daerah bahkan dari pulau jawa, karena mereka menganggap dengan mendatangkan lebih memberi untung.
 - Lemahnya sumber daya manusia/petani khususnya peternak dalam mengelola ternaknya, juga ternak bantuan pemerintah.
 - Upaya penambahan populasi berupa pemasukan bibit ternak dari luar terkendala regulasi.
 - Bantuan bibit ternak kepada masyarakat terkendala persyaratan badan hukum kelompok tani
 - Meningkatkan jumlah kelahiran melalui inseminasi buatan, intensifikasi kawin alam, memberikan insentif terhadap peternak sapi yang ternaknya mengalami kebuntingan atau bisa melahirkan pedet baru.
 - Serangan Penyakit ternak
 - Kualitas Hijauan Pakan ternak yang masih rendah
- Permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya adalah :
- Harga pakan yang relative tinggi
 - masih kurangnya kesadaran pembudidaya untuk menggunakan benih dan induk ikan yang berkualitas dan kuantitas sumber air.
 - Adanya hama dan penyakit ikan.
- Permasalahan yang dihadapi produksi ikan tangkap antara lain:

- Adanya perpindahan status dari nelayan ke petani atau alih profesi
- faktor alam yang terjadi menyebabkan nelayan tidak bisa menangkap ikan secara maksimal
- Adanya larangan menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah
- Terbatasnya areal penangkapan bagi nelayan akibat daya/kapasitas motorisasi kapal atau perahu masih kecil (< 5GT)
- Masih adanya masyarakat yang melakukan kegiatan illegal fishing berupa penggunaan alat tangkap berbahaya dan melakukan penangkapan anak-anak ikan dan ikan yang memijah.

Solusi

langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan pada sasaran Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan

- Upaya yang dilakukan untuk menjaga produksi dan produktivitas padi sawah dan ladang disaat laju alih fungsi lahan semakin meningkat yaitu dengan :
 - Intensifikasi pertanian melalui BANJAR SAPA (batanam banih jajar legowo sakali mewiwit dua kali panen). Kegiatan tersebut mengkombinasikan sistem tanam jajar legowo dengan sawit dupa. Penerapan sistem tanam jajar legowo memungkinkan populasi tanaman meningkat, produksi meningkat dan gabah lebih berkualitas. Penerapan sistem sawit dupa dengan IP 180 memungkinkan peningkatan populasi tanaman unggul dan lokal. Kegiatan BANJAR SAPA juga diikuti dengan peningkatan pemanfaatan galangan sawah dengan penanaman tanaman hortikultura baik tanaman semusim (sayuran) dan tanaman tahunan (jeruk dan pisang).
 - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan jalan pertanian dengan sumber dana APBN dan DAK. Penyediaan sarana pengelolaan air dilakukan dengan membangun fasilitas sumber air yaitu pembangunan irigasi air tanah (dalam/dangkal), pembangunan embung, tabat/dam parit dalam kerangka konservasi air dan

antisipasi perubahan iklim. Pembangunan/ perbaikan jalan pertanian yaitu jalan usaha tani dan jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasa

- Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penyediaan bibit, penyaluran pupuk bersubsidi, fasilitasi akses pembiayaan/permodalan. Selain itu juga dalam rangka peningkatan produk hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan.
 - Peningkatan kapasitas penyuluhan dan penguatan kelembagaan penyuluhan juga dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi karena penyuluhan merupakan kunci untuk perubahan, penyebar inovasi pertanian dan motivasi bagi petani yang selama ini bertani karena naluri dan tuntutan keluarga, agar dapat berubah untuk berusaha tani dengan berorientasi pasar (agribisnis).
 - Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan mutu produk olahan pertanian yang diperdagangkan meningkat.
- Untuk meningkatkan produktivitas komoditas pada sawah dan padi ladang adalah
- Meningkatkan tanaman varietas unggul dengan indeks pertanaman IP180 dengan tanam sawit dupa serta IP 200 (tanam varietas unggul-unggul). Meningkatkan pengelolaan lahan dan air sehingga kesuburan lahan terjaga.
 - Meningkatkan penerapan paket teknologi seperti manajemen tanah sehingga dapat mengembalikan kesuburan tanah yang sudah berkurang karena penggunaan pupuk kimia terus menerus dan tidak adanya pergiliran tanaman, mengidentifikasi varietas yang spesifik lokasi serta pengawalan manajemen budidayanya secara intensif. pemanfaatan kalender tanam secara optimal.

- Untuk peningkatan produksi dan produktifitas karet rakyat. Mengingat terbatasnya anggaran daerah, Pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan berupaya memperoleh bantuan atau dukungan kegiatan melalui dana APBD provinsi dan APBN. pada tahun 2018 ini melalui bantuan dari APBN dan APBN-P telah melakukan kegiatan peremajaan karet untuk mengganti tanaman-tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi sehingga diharapkan produksi karet di tahun-tahun mendatang akan meningkat serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani/pekebun di Kabupaten Banjar.
- Mengupayakan bantuan dan dukungan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi maupun pusat melalui Dana Dekons dan APBN serta diharapkan adanya regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan kepada kelompok tani yang tidak berbadan hukum.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase kelompok tani madya yaitu dengan
 - Pembinaan dinas pada penyuluh dan pembinaan penyuluh pada kelompok tani
 - Pembinaan yang lebih intensif agar kelompok tani lebih aktif dan mandiri serta mempunyai wawasan kewirausahaan;
 - Memberikan reward dan punishment terhadap penyuluh dan petani
- Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian yang dilayani air irigasi dimasa yang akan datang akan dilakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan yang telah dilakukan perbaikan dan melanjutkan pekerjaan rehab saluran dan bangunan pelengkap daerah irigasi/ daerah irigasi rawa lainnya.
- Upaya Dalam rangka meningkatkan populasi ternak
 - Penambahan ternak perlu dilakukan terus dan perbaikan mutu genetik ternak baik melalui kawin suntik maupun kawin alam, memilih induk dan pejantan yang baik dan unggul selalu ditingkatkan Sehingga pertumbuhan ternak akan lebih cepat yang pada akhirnya berpengaruh pada bobot akhir.
 - Untuk menekan pematangan ternak besar, perlu di masyarakatkan keaneka ragaman protein hewani dengan memakan selain daging ternak besar seperti unggas, telur

- dan ikan, hal ini bisa mendorong untuk tumbuh kembangnya ternak ternak yang lain.
- Dibidang permodalan pemerintah telah memberikan pembinaan dan paket baik untuk ternak besar,kecil maupun unggas, Pembinaan penanaman rumput unggul terus ditingkatkan hal ini untuk memperbaiki mutu pakan ternak,selain itu penanaman rumput mampu memperbaiki dan mempertahankan adanya erosi.
 - Perawatan ternak dan menjaga kesehatan tetap dilakukan dan dijaga bila perlu ditingkatkan karena hanya ternak yang sehat yang baik pertumbuhannya.
 - Perbaikan sumber daya manusia melalui pembinaan kelompok, study banding dan pelatihan-pelatihan teknis perlu ditingkatkan
 - Pelaku usaha perlu penambahan modal baik lewat swasta maupun pemerintah untuk memperbesar usahanya.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya:
- Melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ikan untuk mendorong pembuatan pakan ikan yang berkualitas secara mandiri untuk mengurangi biaya produksi budidaya.
 - Menyalurkan bantuan mesin pakan ikan GERPARI untuk menumbuhkan pakan mandiri
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan, Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Bibit Ikan Nila/Patin
 - Melakukan monitoring kualitas air dan hama penyakit ikan.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap pakan ikan baik pakan pabrik maupun pakan buatan secara mandiri untuk mengetahui kadar nutrisi yang terkandung dalam pakan.
 - Melakukan sosialisasi dan aplikasi vaksinasi ikan
 - Memberikan bantuan vaksinasi ikan (Hydrovac) untuk mencegah aeromonas hydrophila
 - Pembinaan dan bantuan benih ikan kepada UPR dan pembudidaya guna menghasilkan benih unggul
 - Pemberian pelatihan CPIB, CBIB, dan CPPIB kepada pembudidaya ikan
 - Sosialisasi dan pemberian vaksin terhadap ikan agar tahan penyakit

- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan tangkap :
 - Memberikan arahan/pembinaan untuk membuat proposal guna mendapatkan bantuan untuk mendukung agar bisa meningkatkan hasil produksi tangkap.
 - Perlunya restocking
 - Perlunya penanaman mangrove guna memperbaiki ekosistem perikanan tangkap
 - Memberikan sosialisasi untuk bisa merubah alat tangkap yang ramah lingkungan guna memaksimalkan hasil tangkapan
 - Bantuan sarana penangkapan yang ramah lingkungan
 - Melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi hukum perikanan dan pelestarian sumber daya ikan kepada masyarakat (nelayan)
 - Melakukan kegiatan Razia pada kawasan perairan umum dan laut serta pasar-pasar tradisional.

3.2.18. Meningkatnya Kualitas Hasil Industri Pengolahan Perkebunan Dan Perikanan

Peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan merupakan salah satu kinerja yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk pengembangan ekonomi daerah sebagai upaya menjawab permasalahan ekonomi yang selama ini bergantung pada sector pertambangan. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan menunjukkan hasil positif. Pencapaian sasaran peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 100 %. Capaian sasaran peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan perikanan diukur dengan 2 (dua) buah indikator yaitu; Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan dan Jumlah produksi olahan hasil perikanan, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 48. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan Kab. Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	116,67%	35	34,69	99,11	50	69,38%
2	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	100,70%	720	792	110,08	740	107,11

b. Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan

Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan adalah Persentase peningkatan jenis produk pengolahan hasil perkebunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan merupakan penggunaan bahan pembeku yang direkomendasi. Capaian pada tahun 2018 sebesar 99,11 %, didapat dari realisasi persentase peningkatan hasil olahan perkebunan sebesar 34,69 % dibandingkan dengan target pada tahun 2017 sebesar 35 %. Produk pengolahan hasil perkebunan berupa produksi bokar di kawasan sentra produksi yang menggunakan bahan pembeku yang telah direkomendasi oleh Kementerian Pertanian berupa asam semut dan deorub. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,31 %, tahun lalu capaian kinerja adalah sebesar 35 %.

Keberhasilan kinerja pada tahun 2018 merupakan hasil dari dukungan program daerah, provinsi dan pusat berupa peran petugas penyuluh dan dukungan kegiatan dari APBN berupa bantuan pembeku asam semut. Berikut adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan.

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Output dari kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis adalah terlaksananya Bimbingan Teknis karet Sit Asap dan Temu Usaha Kecamatan karang Intan dan Aranio dan Sungai Pinang
Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya sumberdaya petugas dan pelaku agribisnis

perkebunan karet dalam mengolah dan meningkatkan mutu olahan.

- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

Target kinerja Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu komoditas hasil perkebunan, pengembangan perkebunan dan klarifikasi usaha perkebunan. Output kegiatan berupa terlaksananya pembinaan fasilitasi kemitraan agribisnis kelompok dan kerjasama pelaku agribisnis, pertemuan tim Pembina Pengembangan Perkebunan yaitu pertemuan Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K). Outcome kegiatan berupa terjalannya kerjasama perusahaan perkebunan dan poktan dan meningkatnya usaha perkebunan rakyat.

Pada tahun anggaran 2018 Kab. Banjar melalui sumber dana APBN mendapat bantuan peralatan pasca panen di 2 (dua) kelompok tani yaitu :

- Kel. Tani Mandiri Raya Desa Abirau Kec. Karang Intan, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2018 berupa : pisau sadap 50 buah, mangkok sadap, talang sadap, ring mangkok sadap masing-masing 12.500 buah, bak pembeku lateks 50 buah dan bahan pembeku lateks 150 liter
- Kel. Tani Bina Bersama Desa Takuti Kec. Mataraman, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2018 berupa : pisau sadap 50 buah, mangkok sadap, talang sadap, ring mangkok sadap masing-masing 12.500 buah, bak pembeku lateks 50 buah dan bahan pembeku lateks 150 liter

Pada tahun anggaran 2018 Kab. Banjar melalui sumber dana APBN mendapat bantuan peralatan Pengolahan Sheet di 5 (lima) kelompok tani yaitu :

- Kel. Tani Sido Makmur Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2018

- Kel. Tani Sidodadi Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman, Bantuan Peralatan Pasca Panen yang diberikan melalui dana APBN Ditjend Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2018
- Kel.Tani Lebah Madu Bersama Desa Pematang Danau Kec.Mataraman
- Kel.Tani Sumber Makmur Desa Belimbing Lama Kec.Sungai Pinang
- Kel.Tani Maju Tani Desa Mandi Kapau Barat Kec.Karang Intan

Pada tahun 2018 Kab.Banjjar melalui sumber dana APBN juga mendapat bantuan hibah bangunan dan pengolahan asap cair pada Kel.Tani Maju Tani Desa Mandi Kapau Barat Kec.Karang Intan berupa bangunan dan alat ketel pengolahan asap cair.

c. Jumlah produksi olahan hasil perikanan

Jumlah produksi olahan hasil perikanan merupakan jumlah olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun Kabupaten Banjar pada tahun 2018. Capaian Jumlah produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2018 adalah 110,08 % didapat dari realisasi sebesar 792kg/tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 720 kg/Tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi olahan ikan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 dengan jumlah produksi 715 kg/Tahun, minat masyarakat dalam mengkomsumsi olahan ikan masih rendah jika dibanding minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan segar. jumlah produksi olahan hasil perikanan capaian pada tahun 2018 telah berhasil menyumbang 107,11 % dari target 740 pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 Tergolong sangat berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut

- Program Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;
 - Kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Adapun berbagai kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan peningkatan jumlah produksi olahan hasil perikanan adalah sebagai berikut: subkegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan, lomba ikan hias, pasar murah, temu bisnis usaha perikanan,

bimbingan teknis manajemen usaha dan diversifikasi olahan, gemarikan, dan lomba kudapan ikan

Permasalahan

- Keragaman atau diversifikasi produk hasil perikanan masih rendah
- Peralatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan masih sederhana
- Kurangnya daya tarik produk perikanan yang dihasilkan

Solusi

- Perlu dukungan sarana lanjutan berupa tempat pengeringan hasil olah (Rumah Asap) sehingga produk akan lebih baik dan disimpan lebih lama.
- Pembinaan bimbingan penanganan Pengolahan Hasil serta perlu pengujian dan analisis berkelanjutan dan Pembinaan organisasi kelompok perlu ditingkatkan, serta pengembangan usaha kelompok secara berkelanjutan
- Melaksanakan sosialisasi/ pelatihan/ bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Menggalakan kegiatan GEMARIKAN kepada masyarakat
- Melaksanakan promosi terhadap produk olahan hasil perikanan yang dimiliki daerah melalui pameran, pasar murah, lomba kudapan.
- Melakukan kegiatan promosi produk hasil olahan
- Melakukan pendampingan bagi pelaku usaha perikanan (pengolah dan pemasar) untuk perluasan usaha melalui kegiatan pendampingan pengajuan KUR ke bank

3.2.19. Meningkatnya Ketersediaan Dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat merupakan salah satu kinerja yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat menunjukkan hasil yang sangat positif dengan capaian rata-rata 99,52% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) buah indikator yaitu; ketersediaan energy, ketersediaan protein dan nilai/skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan pola Konsumsi Pangan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2017 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Ketersediaan Energi	99,47	3.640	3.745	102,9	3.700	101,22%
2	Ketersediaan Protein	149	103	93,13	90,4 %	107	87,04%
3	Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	99,11	90,5	89,4	98,78	91,5	97,70%

a. Ketersediaan Energi

Indikator Ketersediaan energi merupakan ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan kalori dan BDD (bagian yang dapat dimakan). Indikator kinerja tercapainya ketersediaan energi dihitung berdasarkan jumlah kandungan energi dari bahan komoditas pangan yang tersedia dari hasil produksi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan Energi (Kkal) dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 325 \text{ hari}$$

Berdasarkan perhitungan ketersediaan energy pada tahun 2018 pada analisis neraca bahan makanan (NBM) jumlah akumulasi ketersediaan kalori bahan makanan sebesar 695.624,67 Kkal dengan jumlah penduduk sebesar 571.531 jiwa maka realisasi ketersediaan energy pada Tahun 2018 adalah 3.640 Kkal/kap/hr. Capaian kinerja ketesedian energi tergolong sangat tinggi /berhasil dengan capaian sebesar 98,78 %, didapat dari realisasi sebesar 3.745 Kkal/kap/hr dibanding dengan target ketersediaan energy sebesar 3.640 Kkal/kap/hr .

Keberhasilan kinerja disebabkan oleh tercapainya target produksi komoditas pangan penyumbang energi di Kabupaten Banjar pada selama tahun 2018, bila dibandingkan dengan target ketersediaan energi nasional sebesar 2400 Kkal/kap/hr maka Kabupaten Banjar surplus ketersediaan energi sebanyak 1345

Kkal/kap/hr (56%), sementara bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 3.558 Kkal/kap/hr, maka mengalami Peningkatan sebesar 109 Kkal/kap/hr, jumlah ketersediaan energi, capaian pada tahun 2018 telah berhasil menyumbang 101,22% dari target 3.700 Kkal/kap/hr pada tahun 2020.

b. Ketersediaan Protein

Indikator Ketersediaan protein merupakan ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan protein dan BDD (bagian yang dapat dimakan).

Indikator kinerja tercapainya ketersediaan protein dihitung berdasarkan jumlah kandungan protein dari hasil produksi bahan komoditas pangan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan protein (gram) dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 325 \text{ hari}$$

Berdasarkan perhitungan ketersediaan protein Tahun 2018 pada analisis bahan makanan (NBM) jumlah ketersediaan protein bahan makanan yang tersedia tersedia sebesar 17.298.67 Ton dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 571.531 jiwa maka realisasi ketersediaan protein pada Tahun 2018 adalah 93,13 gram/kap/hr. Capaian kinerja ketesedian protein tergolong sangat tinggi /berhasil dengan capaian sebesar 90,42%, didapat dari realisasi sebesar 93,13 gram/kap/hr dibanding dengan target ketesedian protein sebesar 103 gram/kap/hr. Keberhasilan kinerja disebabkan oleh tercapainya target produksi komoditas penyumbang protein seperti komoditas perikanan dan peternakan di Kabupaten Banjar pada selama tahun 2018, bila dibandingkan dengan target ketersediaan protein nasional sebesar 63 gram/kap/hr maka Kabupaten Banjar surplus ketersediaan protein sebanyak 30,13 gram/kap/hr (47,82%), sementara itu tingkat ketercapaian ketersediaan protein tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 159,46 gram/kap/hr, maka mengalami penurunan sebesar 66,33 gram/kap/hr (59%). Keberhasilan capaian kinerja ketersediaan protein pada tahun 2018 telah berhasil menyumbang 87,04% dari target 107 gram/kap/hr pada tahun 2020.

c. Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Indikator Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. PPH diartikan sebagai susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk, baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan segi-segi social, ekonomi, budaya, agama dan citarasa.

Capaian kinerja skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 98,78%, didapat dari realisasi kinerja sebesar 89,4% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90,5%, keberhasilan kinerja masuk kategori sangat tinggi/sangat berhasil yang didapat dari Situasi konsumsi pangan diwilayah Kabupaten Banjar yang datanya diambil dari lokasi survey konsumsi pangan tahun 2018.

Tingkat konsumsi energi penduduk Kab. Banjar baru mencapai 1.768,6 kkal/kap/hari dari idealnya 2.150 kkal/kap/hari atau baru mencapai 82,26 % dari AKE (Angka Kecukupan Energi). Kontribusi energi menurut kelompok pangan, hasil survey menunjukkan bahwa sumber energi terbesar selain bersumber dari padi-padian adalah dari pangan hewani 11,4 %, disusul sayuran dan buah 5,5%, lemak 9,3 % dan kacang-kacangan dan sayuran sebesar 4,5 %. dilihat skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual Tahun 2017 sebesar 89,2, maka jelas untuk menyempurnakan PPH menuju nilai 100, maka pangan sumber energi dari padi-padian perlu dikurangi dan dialihkan pada umbi-umbian dan berasal dari minyak berlemak serta buah/biji berminyak sementara pola konsumsi kelompok pangan lain tetap di pertahankan sebagaimana biasanya

Perbandingan Skor PPH di Kabupaten Banjar, yang ditampilkan berdasarkan kegiatan pemantauan konsumsi pangan di desa pelaksana P2KP dan non P2KP (27 Desa dari 9 Kecamatan se Kabupaten Banjar) dengan jumlah sampel 270 orang pada Tahun 2018 adalah 89,4 dibandingkan skor PPH tahun 2016 dan 2017 sebesar 89,2, mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin, hal ini menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat banjar pada tahun 2018 perbaikannya tidak terlalu mendasar, polanya masih seperti tahun 2016 dan 2017 atau masih terpola pada banyaknya konsumsi beras (padi-padian) dibandingkan konsumsi bahan pangan lainnya sehingga skor PPH tidak mengalami kenaikan yang signifikan

Dibandingkan target skor PPH provinsi Kalimantan Selatan sebesar 84,9, tahun 2017 maka capaian kinerja skor PPH Kab. Banjar lebih tinggi sebesar 4,5 poin, atau tingkat capaian 105,3 % (sangat tinggi) dan bila kita bandingkan dengan target nasional sebesar 92,5, maka skor PPH Kab Banjar masih tertinggal sebesar 3,2 poin atau dengan tingkat capaian sebesar 96,7% (sangat tinggi)

1. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil capaian 3 (tiga) indikator sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya, maka indikator kinerja tercapainya ketersediaan Energi mencapai angka 102,9% dengan penyerapan anggaran sebesar 82% atau tingkat efisiensi sebesar 18,68%, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 50. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Tercapainya Ketersediaan Energi Kkal/Kap/hr	102,9	81,32%	18,68%
	Tercapainya Ketersediaan Protein Gr/Kap/hr	90,4		
	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	98,78		

Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2018 Tergolong sangat berhasil, keberhasilan pencapaian sasaran ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan). Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut;
 - **Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 64,025,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34,947,000,- (54,58%)

Target kinerja pada kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah Penurunan dan pembinaan desa rawan pangan sebanyak 2 desa, dengan realisasi kinerja 0 dengan capaian 0% (capaian ini tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan persyaratan penentuan desa rawan pangan penduduk miskinnya minimal 33% , beradasar analisa Data Dasar rumah Tangga dan angka statistic tahun 2016 tidak ditemukan desa di kabupaten Banjar yang mempunyai penduduk miskin berjumlah 33%, sehingga kegiatan lebih banyak diarahkan kepembinaan desa-desa eks rawan pangan tahun-tahun sebelumnya dan desa-desa rentan kerawanan pangan).

➤ **Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 96,800,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66,176,592,- (68,36%) dan realisasi fisik 80%

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah adalah Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah dengan target sebanyak 5 ton, dengan realisasi kegiatan 0 ton (0%). Adapun realisasi kegiatan (fisik) sebesar 80% adalah pembelian alat dan bahan gudang lumbung pangan serta perbaikan gudang. Kegiatan tidak dapat direalisasikan mengingat tidak/belum adanya payung hukum yang mengatur tentang mekanisme pengadaan dan penyaluran bahan pangan dalam rangka pengisian lumbung pangan milik pemerintah (CPP).

➤ **Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 37,880,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.895.000,- (71%) dan realisasi fisik 100%

Target kinerja pada kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa yaitu Meningkatnya Ketersediaan Pangan di Desa dengan target sebanyak 13 desa, dengan realisasi kegiatan 10 desa (76,9%). Kegiatan yang dapat direalisasikan antara lain administrasi kegiatan, rapat-rapat, dan perjalanan dinas dalam daerah berupa pembinaan kelompok lumbung serta perjalanan dinas luar daerah ke Badan Ketahanan

Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka konsultasi kegiatan tersebut.

➤ **Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 50.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.659.000,- (31,04%) dan realisasi fisik 100%

Target kinerja pada kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah yaitu Tersedianya Informasi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dengan target sebanyak 3 laporan, dengan realisasi kegiatan 3 laporan (100,0%). Kegiatan yang dapat direalisasikan antara lain perjalanan dinas luar daerah ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka konsultasi kegiatan tersebut.

Adapun realisasi kegiatan berupa tersusunnya 3 laporan kondisi ketahanan pangan di Kab. Banjar dengan laporan sebagai berikut :

- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Banjar (berisikan data produksi komoditas pangan kecamatan dan ketersediaan pangan tingkat Kabupaten).
- Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM), laporan ini menyajikan data ketersediaan pangan berupa energi, protein dan lemak yang siap dikonsumsi oleh penduduk.
- Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), laporan ini menyajikan tingkat ketahanan pangan dilihat dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

➤ **Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.495.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.290.000,- (95,26%) dan realisasi fisik 100%

Target kinerja pada kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok yaitu Terlaksananya dan Tersusunnya Pemantauan Harga Pangan Pokok dengan target sebanyak 5 laporan, dengan realisasi kegiatan 5 laporan (100,0%). Kegiatan yang dapat direalisasikan antara lain perjalanan dinas dalam daerah berupa pemantauan (monitoring) harga pangan pokok ke beberapa pasar kecamatan (Martapura,

Gambut, Kertak Hanyar) serta perjalanan dinas luar daerah ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka konsultasi kegiatan tersebut.

➤ **Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 62,900,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.135.000,- (62,22%) dan realisasi fisik 70%

Target kinerja pada kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian yaitu Terwujudnya Pendampingan Pembinaan Terhadap Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan target sebanyak 13 LDPM, dengan realisasi kegiatan 13 LDPM (100,0%). Kegiatan yang dapat direalisasikan antara lain rapat-rapat, perjalanan dinas dalam daerah berupa pembinaan ke 13 Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pelaksana kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) serta perjalanan dinas luar daerah ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka konsultasi kegiatan tersebut.

➤ **Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.000.000,- (39,16%) dan realisasi fisik 40%

Target kinerja pada kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan yaitu Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perberasan/Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan target sebanyak 2 kegiatan, dengan realisasi 0 kegiatan (0,0%). Kegiatan yang dapat direalisasikan antara lain perjalanan dinas luar daerah ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka konsultasi kegiatan tersebut.

Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, baik pada Seksi Ketersediaan Pangan maupun Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan yang nyaris tidak tersedia personel berkompeten yang menangani kegiatan tersebut menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang staf Seksi Distribusi dan

Kerawanan Pangan dibantu oleh 1 (satu) staf Subbag Umpeg serta didukung beberapa orang Tenaga Kontrak (PTT).

Kegiatan yang dapat direalisasikan antara lain perjalanan dinas luar daerah ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka konsultasi kegiatan tersebut.

➤ **Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 107.050.000 .,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.445.000 ,- (67,29%) dan realisasi fisik 100%

Target kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya analisis pola konsumsi dan suplai makanan (PPH) dengan target 1 dokumen, dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian (100%)

Realisasi kegiatan ini berupa pelaksanaan survey konsumsi makanan masyarakat dengan keluaran diketahuinya skor Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi energy, dan konsumsi protein masyarakat Kabupaten Banjar yang dihimpun dalam dokumen/laporan PPH.

➤ **Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 447.125.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 409.314.000,- (91,54%) dan realisasi fisik 100%

Target kinerja pada kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif ini adalah terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak 3 kegiatan dengan realisasi sebanyak 3 kegiatan atau dengan capaian 100%

Adapun realisasi kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluh sumber pangan alternatif lewat :

- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui konsep kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tahun 2018 , pertumbuhan KRPL Tahun 2018 sebanyak 5 kelompok yang tersebar di empat kecamatan yaitu :

Kecamatan Karang intan 1 kelompok, Kecamatan Martapura Kota 2 kelompok, Kecamatan Martapura Timur 1 Kelompok, dan Kecamatan Astambul 1 kelompok

Kegiatan yang dilaksanakan pada kelompok kelompok tersebut adalah :

1. Sosialisasi pemanfaatan perkarangan melalui metode sekolah lapangan (SL) oleh pendamping desa
 2. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
 3. Pembuatan kebun bibit
 4. Pengembangan perkarangan anggota
 5. Pendampingan dan penyuluhan pangan B2SA
 6. Kegiatan untuk demplot kelompok
 7. Pengembangan kebun bibit
 8. Pengembangan perkarangan anggota
 9. Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA
 10. Pengolahan hasil KRPL
 11. Mengembangkan demplot dan kebun bibit secara berkelanjutan
 12. Mengembangkan perkarangan anggota secara berkelanjutan
 13. Setiap rumah anggota mengembangkan sarana pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga
 14. Mengembangkan potensi ekonomi KRPL (membangun kemitraan, mengolah dan mengelola hasil KRPL, dan lain-lain).
- Lomba Menu Cipta Gizi B2SA Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)". Lomba tersebut dimasukkan agar setiap individu yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menyediakan menu keluarga sehari-sehari dapat menyajikan menu beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) dilaksanakan pada hari selasa tanggal 7 agustus 2018 pada jam 08.00 wita sampai selesai. Tempat pelaksanaan Lomba B2SA ada 20 peserta yang berasal dari kecamatan sekabupaten banjar.

Juri Lomba B2SA berasal dari ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, SMKN Banjarmasin dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar. Kriteria penilaian Lomba B2SA adalah kreativitas pengembangan resep masakan dengan pemanfaatan pangan lokal (40%), cita rasa (20%) dan penyajian makanan dan aspek keamanan (40%).

Hasil penilaian pemenang lomba B2SA tahun 2018 ini berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing juri, dimana dewan juri memilih pemenang lomba berdasarkan urutan nilai yang tertinggi. Adapun hasil pemenang yang telah ditetapkan adalah:

- Juara I Kecamatan Mataraman
- Juara II Kecamatan Kertak Hanyar
- Juara III Kecamatan Martapura Timur
- Juara Harapan I Kecamatan Martapura Kota
- Juara Harapan II Kecamatan Martapura Barat
- Juara Harapan III Kecamatan Pengaron
- Penyuluhan lewat sarana Pameran pembangunan dan expo pada saat hari jadi Kabupaten Banjar dan HUT RI Tahun 2018.
- Sosialisasi keamanan pangan segar (buah dan sayur) disekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang keamanan pangan kepada anak sekolah yang dalam hal ini masih dalam tahap pertumbuhan. Agar pertumbuhan anak tidak terganggu akibat dari pangan yang tidak aman. Disamping itu juga diberikan pemahaman agar gemar makan sayur dan buah. Supaya meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah. Sosialisasi ini diberikan kepada sekolah SD yang ada dikampung KB. Dan juga sekolah yang ada kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Ada 10 sekolah Dasar, dimana tiap sekolah sebanyak 50 orang anak.

➤ **Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 169.290.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.655.400,- (97,85%) dan realisasi fisik 100%

Target Kinerja pada kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan adalah meningkatnya mutu dan keamanan pangan dengan target 80% dan terealisasi 72,72%

Adapun realisasi kegiatan berupa uji lab makanan segar buah dan sayur yang dipasarkan pada pasar pasar tradisional di Kab. Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendeteksi keamanan pangan buah dan sayur sekaligus meningkatkan pembinaan dan pengawasan bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat terutama bahan makanan buah dan sayur segar

Dalam rangka mendeteksi tingkat keamanan buah dan sayur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar telah melakukan uji laboratorium di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan pasca panen pertanian di Bogor Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2018, jenis uji yang dilakukan terhadap sayuran adalah : residu pestisida/golongan organoklorin dan organofosfat serta bakteri E.coli

Komoditas yang diuji adalah Pepaya, pisang, semangka, sirsak, kemangi, saledri, cabe rawit, cabe merah besar, timun, pare, kacang panjang, berdasarkan hasil uji lab 11 sampel di dapat 3 komoditas yang kurang aman yaitu kemangi, cabe rawit dan saledri yang tercemar bakteri E.coli, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan pangan buah dan sayur di Kab. Banjar sebesar 72,72%.

2. Dana Dekonsentrasi Tahun 2018

Dalam rangka mendukung program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banjar yang dibiayai oleh Anggaran Belanja Daerah (PAD) sebagaimana tahun yang lalu, untuk tahun 2018 ini telah dialokasikan Dana Dekonsentrasi dengan Nomor Satker 018.11.159192 dan Nomor DIPA DK:SP DIPA-018.11.3.159192/2018 tanggal 15 Desember 2017 yang bersumber dari Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2018 sebesar Rp. 358.500.000,- dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat berupa kegiatan :

1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan, dengan dana Rp. 296.500.000, dengan kegiatan
 - a. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - b. Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - c. Pemberdayaan Pekarangan Pangan 5 KRPL
 - d. Pendampingan kabupaten Banjar (5 kelompok)
 - e. Pemantauan , Monitoring dan Evaluasi ke Desa
2. Koordinasi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar, dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,-, untuk kegiatan :
 - a. Sosialisasi Keamanan Pangan Segar
 - b. Uji Laboratorium
 - c. Rapid Test Kit Pestisida dan Chlorine
 - d. Pencetakan Data Keamanan Pangan Segar

3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 20.000.000,-
 - a. Honor Operasional Satuan Kerja
 - b. Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
 - d. ATK

Adapun target dan realisasi penggunaan dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 51. Target dan realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Urusan Wajib Urusan

NO	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp.Juta)	Realisasi Belanja (Rp. Juta)	%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
	Ketahanan Pangan	6.088.000	29.200.000	66.900.000	262.400.000	358.500.000	358.488.000	97,07

Permasalahan

- kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- belum difahami dan diterapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida bahan kimia dan bahan tambahan pengawet;
- masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan hygiene dalam produksi;
- belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban paritel untuk menerapkan Good Ritel Practices (GRP);
- masih rendahnya kesadaran ritel untuk menjual produk segar aman dan bermutu;
- belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas;
- terbatasnya laboratorium yang terakreditasi;
- merebaknya penyalah gunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- standar keamanan pangan untuk sayu dan buah segar impor yang belum terjamin keamanannya;

- belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hokum dibidang pangan segar;
- koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.
- Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja Daerah dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan daerahnya.
- Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- Rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering dilakukan, sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi lambat.
- Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten/kota.
- Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

Solusi

- Dinas Ketahanan Pangan perlu terus meningkatkan kinerja sumberdaya yang ada dengan meningkatkan jumlah personel yang profisional di budang ketahanan pangan

- Pemerintah Daerah perlu menjaga sumberdaya yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dengan tidak memutasi memasukkan pejabat dari luar yang tidak kompeten, dan memaksimalkan sumberdaya yang ada sebagai pejabat sesuai tupoksinya
- Pemerintah Daerah perlu mengambil alih pembiayaan pembiayaan pusat/provinsi yang berkaitan dengan program dan kegiatan fisik yang tidak di alokasikan lagi kedaerah yang masih diperlukan dalam kerangka keberhasilan dan keberlanjutan ketahanan pangan.

3.2.20. Meningkatkan Investasi Daerah

Peningkatan investasi daerah dapat diketahui dengan membandingkan realisasi pertumbuhan investasi yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran pertumbuhan investasi menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar 10607,22 % dengan kategori sangat tinggi. Capaian sasaran pertumbuhan investasi diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan investasi yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 52. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentasi Pertumbuhan Investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)		143	169,64%	85%	9016,14 %	10607,22 %	88%	10245.61%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 342.098.042.274.131 atau 9.016,14% melebihi target yang ditetapkan yaitu 85%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 nilai Realisasi Investasi mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya dimana realisasi sebesar Rp. 3.752.664.596.570. Keberhasilan capaian pada tahun 2017 sudah mampu mencapai target invests yang ditetapkan untuk akhir RPJMD yaitu dengan target 88,5%. Adapun perhitungan Realisasi tersebut didapat dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi Tahun 2018} - \text{Realisasi Tahun 2017}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase Realisasi
Investasi

Realisasi Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 nilai Realisasi Investasinya sebesar Rp. 3.752.664.596.570 hal ini disebabkan karena kemungkinan ada kesalahan pemahaman dari beberapa perusahaan dalam hal penginputan perencanaan investasi di OSS (Online Single Submission) beberapa perusahaan menginput data perencanaan investasi sesuai dengan perencanaan investasi dari kantor pusat bukan kantor cabang yang berada di Kab. Banjar selain itu ada beberapa perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha melakukan double input yang seharusnya dibagi perbidang usaha tetapi malah diinput sesuai jumlah perencanaan investasi setiap bidang usahanya

Meningkatnya investasi daerah ini disebabkan karena banyak sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP Kab Banjar terhadap para investor sehingga meningkatkan kesadaran investor/masyarakat tentang pentingnya berinvestasi di Kabupaten Banjar, selain itu semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD terkait guna memudahkan dan melancarkan dalam pemrosesan perizinan. Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas menjadi salah satu berhasilnya investasi di Kabupaten Banjar sehingga mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Selain itu masih banyak penyebab meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Banjar yaitu tingkat keamanan usaha yang cukup tinggi dan keadaan yang kondusif juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah investasi, banyaknya kemudahan yang diberikan DPMPTSP Kab. Banjar kepada para investor guna mempermudah pelayanan perizinan, kepastian hukum, regulasi yang jelas dan sumber daya alam yang melimpah dan yang masih tersedia terutama dibidang Kelapa Sawit, Properti dan karet bahkan di bidang perdagangan dan perumahan juga menjadi daya tarik bagi investor.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 Tergolong berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Sosialisasi :

Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan investasi daerah DPMPTSP melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, DPMPTSP juga melakukan rapat atau pertemuan rutin setiap bulan untuk

mengevaluasi dan meningkatkan koordinasi selain itu cek lapangan juga rutin dilakukan bersama SKPD terkait guna memonitoring dan mengontrol semua kelengkapan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah perusahaan daerah, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Banjar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan melalui penyederhanaan prosedur investasi dan desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal.

Otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerah, baik melalui pengembangan komoditas dan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya terus menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Banjar, seperti penyederhanaan prosedur investasi, transparansi dan kepastian hukum serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas penunjang investasi.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat mengidentifikasi potensi investasi melalui kegiatan identifikasi potensi investasi ke Kecamatan-kecamatan yang dianggap memiliki potensi investasi untuk dikembangkan.

Permasalahan

- Terlalu tingginya tingkat realisasi perencanaan investasi dikarenakan adanya aplikasi baru Online Single Submission (OSS) yang mewajibkan perusahaan menginput sendiri izin yang ingin mereka ajukan dan dalam hal pengisian jumlah modal yang mereka miliki terkadang tidak sesuai dengan kenyataan sebagai contoh perusahaan yang hanya sebagai cabang dari perusahaan pusat memiliki jumlah modal yang sama, kasus kedua perusahaan yang memiliki bidang usaha lebih dari satu bidang menginput jumlah perencanaan investasi yang sama dengan total perencanaan seluruh bidang yang seharusnya perencanaan investasi dibagi menurut bidang masing-masing.

- Permasalahan yang kadang muncul dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya kesadaran dan Antusias pelaku usaha untuk datang menghadiri sosialisasi yang diberikan oleh DPMPTSP, dari 200 undangan yang disebar hanya 50% yang berhadir dan mengikuti sosialisasi karena dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin bagi perusahaan mereka yang tentunya akan berimbas pada kenaikan nilai investasi di Kabupaten Banjar.

Solusi

- Untuk permasalahan pertama pihak DPMPTSP melalui bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal akan berusaha mencari tau kebenaran dari data yang mereka usulkan melalui LKPM dan akan memberikan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi OSS.
- untuk permasalahan kedua, Pihak DPMPTSP akan memberikan undangan bukan hanya diberikan secara tertulis, kami juga akan memberikan undangan secara lisan dan langsung mengajak kepada para pelaku usaha tentang manfaat yang akan didapat dari sosialisasi tersebut.

3.2.21. Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja perusahaan daerah dapat dilihat melalui indicator Opini akuntan publik menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat sangat berhasil.

Sasaran di atas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu meningkatkan investasi dan kerjasama swasta.

Indikator meningkatnya kinerja perusahaan daerah di Kabupaten Banjar adalah opini akuntan publik dalam hal ini menjadikan perusahaan daerah yang sehat dan menguntungkan.

Hingga saat ini, Perusahaan Daerah sedang melakukan proses audit dan untuk pernyataan/opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah pernyataan/opini dari pihak yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas laporan keuangan perusahaan daerah. Kriteria wtp sendiri adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengukapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem

pengendalian interen. Opini audit akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan dianggap telah menyalanggrakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambil keputusan.

Untuk laporan keuangan perusahaan daerah kabupaten banjar, diaudit oleh kantor akuntan public (KAP) yang akan memberikan opini/ Pernyataan atas laporan keuangan perusahaan daerah tersebut, hasil audit atas laporan keuangan bagi perusahaan daerah belum ada, karena masih proses audit, hasil audit dapat diketahui selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup buku,

Adapun perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Banjar sebanyak 9 (sembilan) dengan profil sbb. :

Tabel 3. 53. Daftar Perusahaan Daerah di Kabupaten Banjar

No.	Nama Perusahaan Daerah	Bidang Usaha	Hasil Audit	Keuntungan Bersih
1.	PDAM Intan Banjar	Air Bersih	Dalam Proses	belum ada data
2.	PD Baramarta	Pertambangan Batubara	Dalam Proses	belum ada data
3.	PD Pasar Bauntung Batuah	Perdagangan	Dalam Proses	belum ada data
4.	PT Banjar Intan Mandiri	Holding Company	Dalam Proses	belum ada data
5.	PT BPD Kalsel	Perbankan-Saham Minoritas	Dalam Proses	belum ada data
6.	PD BPR Martapura	Perbankan-Saham Mayoritas	Tanpa Audit	belum ada data
7.	PD BPR Astambul	Perbankan-Saham Mayoritas	Tanpa Audit	belum ada data
8.	PD BPR Simpang Empat	Perbankan-Saham Mayoritas	Dalam Proses	belum ada data
9.	PD BPR Sungai Tabuk	Perbankan-Saham Mayoritas	Dalam Proses	belum ada data

Pada tahun 2018 ini ditargetkan kinerja dari 7 perusahaan daerah yang di audit konsultan publik semuanya dengan hasil Wajar.

Setda Bagian ekonomi tahun ini optimis mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dikarenakan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya perusahaan daerah selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga dapat diproyeksikan hasil kinerja perusahaan daerah tahun 2018 adalah sbb. bagian ekonomis tahun ini optimis mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dikarenakan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya perusahaan daerah selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Bagian ekonomi tahun ini optimis mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dikarenakan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya perusahaan daerah selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga kinerja perusahaan daerah pada tahun 2018 dapat diproyeksi sbb. :

Tabel 3. 54. Realisasi Dan Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Opini Akuntan Publik		WTP	100%	WTP	100%	WTP	WTP	

Kinerja perusahaan daerah tidak hanya dilihat aspek kesehatan perusahaan saja, melainkan juga dapat dilihat dari kontribusi positif terhadap pendapatan yang dicerminkan oleh keuntungan bersih perusahaan. Berikut ini adalah data target dan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari perusahaan daerah selama kurun waktu 2016-2018.

Gambar 3. 59. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Perusahaan Daerah Selama Kurun Waktu 2016-2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

TAHUN	JENIS SUMBER	TARGET	REALISASI
1	4	5	6
2016	PD. BARAMARTA	3.000.000.000	3.594.786.856
2016	BUMD	3.121.441.551	3.121.441.551
2016	PD . PASAR BAUNTUNG BATUAH	-	-
2016	PD. B I M	-	-
2017	PD. BARAMARTA	3.000.000.000	3.000.000.000
2017	BUMD	3.176.743.721	3.787.200.322
2017	PD . PASAR BAUNTUNG BATUAH	-	-
2017	PD. B I M	-	-
2018	PD. BARAMARTA	3.000.000.000	96.281.382
2018	BUMD	3.121.441.551	3.593.792.211
2018	PD . PASAR BAUNTUNG BATUAH	-	352.148.994
2018	PD. B I M	-	-

Adapun capaian kinerja sasaran di atas didukung oleh program utama berupa Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan memfasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi dan kegiatan monitoring

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut

Tabel 3. 55. Capaian Program / Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 Sasaran Meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Realisasi tahun 2017	Capaian tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2		3	4	5	6	7	8

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Program / Kegiatan	Realisasi tahun 2017	Capaian tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Indikator : perusahaan daerah yang diaudit	7 BUMD	100%	7 BUMD	7 BUMD	100%	7 BUMD	100 %
	Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Indikator : penyusunan draft raperda dan naskah akademik BUMD?	100	100%	9 laporan	9 laporan	100%	9 laporan	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator : jumlah laporan monev BUMD?	3	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	100%

Program yang dilaksanakan Bagian Ekonomi untuk mencapai target sasaran meningkatnya kinerja perusahaan daerah dengan indikator kinerja sasaran Opini Auntau Publik adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan **Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi** dengan Anggaran sebesar Rp. 194.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.195.040,- atau 87,54 %.

Langkah-langkah kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah beserta Naskah Akademik/ Naskah Keterangan tentang BUMD Kabupaten Banjar dalam rangka lanjutan proses evaluasi Peraturan BUMD dan pembahasan secara lebih komprehensif..
3. Mengikuti Rapat pembahasan pada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Banjar terhadap usulan Raperda tentang BUMD

pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 untuk selanjutnya agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hasil yang dicapai adalah tersusunnya draft Rancangan Peraturan Daerah beserta Naskah Akademik/ Naskah Keterangan Kabupaten Banjar tentang Peraturan BUMD (PDAM Intan Banjar, PD. Baramarta, PT. BIM dan PD. Pasar Bauntung Batuah). Secara yuridis peraturan daerah ini penting sebagai payung hukum dalam rangka peningkatan investasi terhadap perusahaan daerah, termasuk penyertaan modal pemerintah daerah untuk mengembangkan perusahaan yang selanjutnya diharapkan perusahaan daerah dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Permasalahan

- Kegiatan Pemantauan/monitoring diluar kantor seperti ke kecamatan, lokasi pasar, BUMD dan perusahaan lainnya yang memerlukan fasilitas transportasi, sedangkan untuk transportasi (mobil operasional) harus meminjam, dimana sering terjadi benturan jadwal kegiatan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Solusi

- Diharapkan dapat disediakan mobil operasional untuk kegiatan pemantauan/ monitoring ke lapangan.

3.2.22. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan dapat diketahui dengan membandingkan realisasi pengelolaan kualitas lingkungan yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sasaran meningkatnya kualitas lingkungan diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu ; Persentase sampah yang terolah di TPA, Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara. Dari empat indikator tersebut, 3 diantaranya tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 56. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

									Akhir RPJMD
1.	Persentasi Sampah Yang Terolah Di TPA		100	100	100	100	100%	100	100
2	Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.		1,59	1,59	1,60	1,59	99,37%	1,63	97,55%
3	Indeks Kualitas Air		Tercemar ringan (4 sungai) tercemar sedang (8 sungai)	Tercemar ringan (4 sungai) tercemar sedang (8 sungai)	Tidak Tercemar	Tercemar Ringan (33,33)	33,33	Tercemar ringan (100%)	0
4	Indeks Kualitas Udara		Tidak Tercemar	100%	Tidak Tercemar	Tidak Tercemar	100%	Tidak Tercemar	100%

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dengan 4 indikator di atas, ada 2 indikator yang tercapai dan 2 indikator yang tidak tercapai. Berdasarkan kategori, ada 3 indikator yang berpredikat sangat tinggi dan 1 indikator berpredikat sangat rendah.

Capaian tersebut di atas didukung oleh 6 (enam) program utama yaitu :

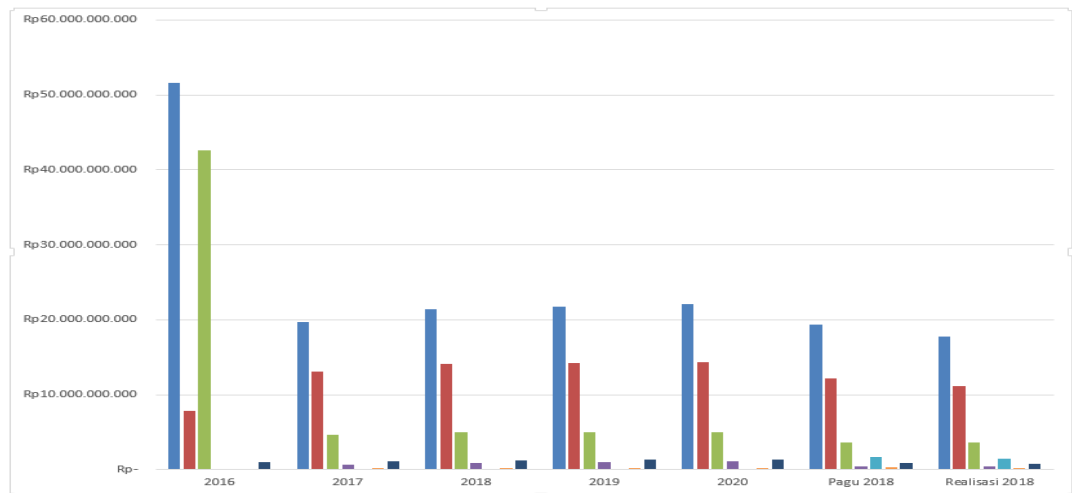
1. Indikator Persentasi Sampah Yang Terolah Di TPA didukung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Indikator Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan didukung Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3. Indikator Indeks Kualitas Air didukung Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Indikator Kualitas udara didukung Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup

Selengkapnya perbandingan pendanaan RPJMD 2016-2021 dan realisasinya pada tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Gambar 3. 60. Perbandingan Pendanaan RPJMD 2016-2021 Dan Realisasinya Pada Tahun 2018

Sasaran/ Program	Pendanaan RPJMD					2018			
	2016	2017	2018	2019	2020	Pagu 2018	Realisasi 2018	Sisa	Serapan
Meningkatnya kualitas lingkungan	Rp51.579.350.602	Rp19.721.971.170	Rp21.462.304.749	Rp21.789.304.749	Rp 22.116.304.749	Rp 19.353.116.250	Rp17.811.032.581	Rp1.542.083.669	92,03%
88. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 7.802.179.300	Rp 13.113.967.690	Rp 14.144.000.000	Rp 14.246.000.000	Rp 14.348.000.000	Rp 12.219.377.470	Rp 11.163.817.072	Rp 1.065.560.398	91,28%
89. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 42.632.171.302	Rp 4.618.003.480	Rp 5.003.304.749	Rp 5.028.304.749	Rp 5.053.304.749	Rp 3.626.502.280	Rp 3.594.120.318	Rp 32.381.962	99,11%
90. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp -	Rp 715.000.000	Rp 860.000.000	Rp 980.000.000	Rp 1.100.000.000	Rp 420.042.500	Rp 419.190.000	Rp 852.500	99,80%
91. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.730.007.400	Rp 1.470.677.342	Rp 259.330.058	85,01%
92. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp 145.000.000	Rp 175.000.000	Rp 205.000.000	Rp 235.000.000	Rp 265.000.000	Rp 285.656.800	Rp 186.924.986	Rp 98.731.814	65,44%
93. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Rp 1.000.000.000	Rp 1.100.000.000	Rp 1.250.000.000	Rp 1.300.000.000	Rp 1.350.000.000	Rp 846.529.800	Rp 761.740.644	Rp 84.789.156	89,98%
Jumlah Rata-rata						Rp 19.353.116.250	Rp 17.811.032.581	Rp 1.542.083.669	92,03%

Gambar 3. 61. Grafik Perbandingan Pendanaan RPJMD 2016-2021 Dan Realisasinya Pada Tahun 2018



a. Persentasi Sampah Yang Terolah Di TPA

Capaian kinerja yang diukur dengan indikator sasaran berupa Persentase sampah yang terolah di TPA dapat memenuhi target yang direncanakan yaitu karena didukung dengan teknologi pengelolaan sampah, alat dan tenaga persampahan serta didukung dengan anggaran yang mencukupi dalam menunjang pengelolaan persampahan di TPA.

Persentase Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir Akhir (TPA) Sampah

SPM sistem pengoperasian TPA sampah	=	(koef.pengoperasian TPAx40% + (Koeff. Kualitas Pengolahan lindix40%)+(Koeff.Penanganan gasx20%)
-------------------------------------	---	---

$$= (1 \times 40\%) + (0 \times 40\%) + (1 \times 20\%)$$

$$= 100\%$$

Meningkatnya persentase sampah yang terolah di TPA, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 100% dikategorikan Sangat Baik. Kinerja ini sudah dicapai sejak tahun 2016 sehingga juga mencapai target RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 3. 62. Persentase Sampah yang Terolah di TPA (%)



Tabel 3. 57. Perbandingan Capaian Kinerja Sampah Terolah Dengan Target RPJMD

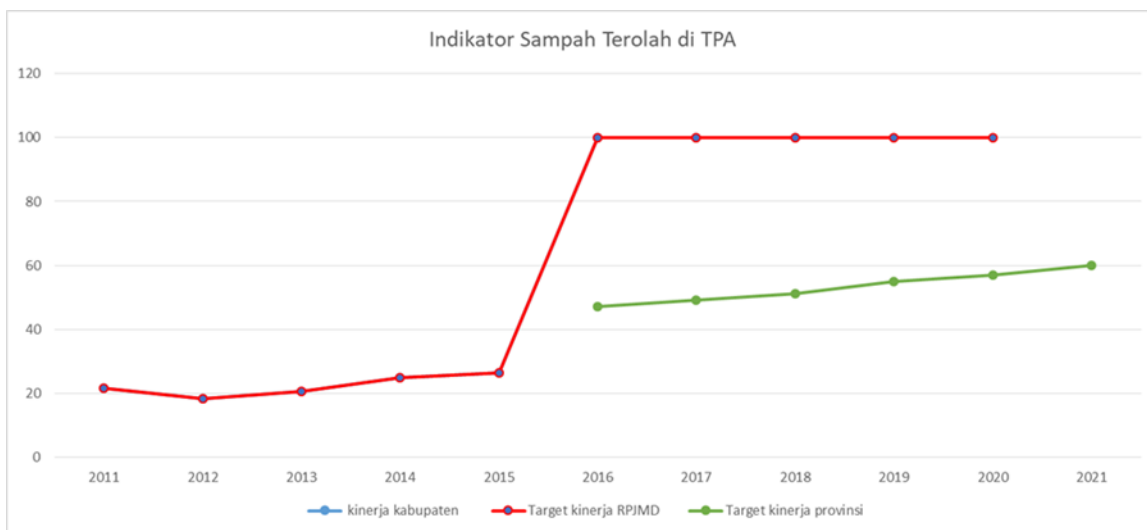
Persentasi Sampah Yang Terolah di TPA (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Capaian Kinerja Kabupaten Banjar	40	50	60	60	60	100
Target Kinerja Kabupaten Banjar (RPJMD)	100	100	100	100	100

Adapun perbandingan target kabupaten yang lebih tinggi dibanding dengan target provinsi adalah sbb. :

Tabel 3. 58. Perbandingan Target Kabupaten yang Lebih Tinggi Dibanding Dengan Target Provinsi

Persentasi sampah terolah di TPA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
kinerja kabupaten	21,72	18,3	20,54	25	26,55	100	100	100			
Target kinerja RPJMD	21,72	18,3	20,54	25	26,37	100	100	100	100	100	
Target kinerja provinsi						47,13	49,23	51,27	54,91	57,12	60

Gambar 3. 63. Grafik Indikator Sampah Terolah di TPA



Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja periode 2011-2015 adalah 40% pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2015 sebesar 60%. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 secara signifikan capaian kinerja mencapai 100% sebagaimana ditargetkan RPJMD. Pengolahan sampah di TPA 100% meliputi pengoperasian di TPA, pengolahan lindi dan penanganan gas.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 tergolong sangat berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan kegiatan:
 1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan
 Pada kegiatan ini target yang ditetapkan di tahun 2018 adalah 1 dokumen dengan realisasi capaian sebesar 1 dokumen atau 100%, output kinerja kegiatannya adalah menyusun dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam kegiatan ini dengan jumlah koresponden sebanyak 380 koresponden di 9 kecamatan.
 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pada kegiatan ini kinerjanya adalah Jumlah penduduk yang terlayani dalam pengangkutan sampah sebanyak 215.505 orang dengan realisasi sebanyak 215.505 orang atau mencapai 100%. Untuk kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Tempat Sampah Biasa Skala Rumah Tangga sebanyak 48 set
 - b. Pengadaan Mesin Pencacah Sampah sebanyak 1 buah.
 - c. Tempat sampah 100 liter + trolley sebanyak 22 buah
 - d. Pengadaan Tempat Sampah Standar sebanyak 60 buah
 - e. Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 5 unit
 - f. Pekerjaan Rehab Landasan Kontainer/TPS/Bank Sampah sebanyak 1 paket
 - g. Pekerjaan Rehab Pembuatan Landasan Kontainer TPS 3 R (PSLB3) 2 lokasi
3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Pada kegiatan ini kinerjanya adalah tersedianya sistem pengelolaan sampah di perkotaan dengan target 10 kec. Realisasinya mencapai 10 kecamatan atau 100%. Untuk kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan persampahan di 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar antara lain Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Astambul, Karang Intan, Aranio dan Mataraman
 - b. Pengurangan timbulan sampah sebesar 17.10%
 - c. Tersedianya bahan bakar minyak untuk 33 buah truck pengangkut sampah, roda 4, roda3, dan roda 2 serta alat berat sebanyak 4 buah
 - d. Tersedianya perbaikan spare part untuk 33 buah truck pengangkut sampah, roda 4, roda 3 dan roda 2 serta alat berat sebanyak 4 buah
 - e. Tersedianya jasa service untuk 33 buah truck pengangkut sampah, roda 4, roda 3 dan roda 2 serta alat berat sebanyak 4 buah
 - f. Tersedianya gaji petugas kebersihan sebanyak 216 orang
4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Pada kegiatan ini kinerjanya adalah sosialisasi kepada masyarakat target 150 orang realisasi 150 orang atau mencapai 100%. Kegiatan pelaksanaannya melakukan

- sosialisasi persampahan sosialisasi perijinan penyimpanan Limbah B3 dan sosialisasi bank sampah kepada masyarakat.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pada kegiatan ini kinerjanya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dengan target 121 titik pantau dengan realisasi 121 titik pantau atau mencapai 100%.
 6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Penugasan)
Pada kegiatan ini kinerjanya adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan target sebanyak 6 paket pekerjaan sedangkan realisasinya sebanyak 4 paket. Pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan DAK ini adalah : Pembangunan Rumah Pengomposan, Konsultan Perencanaan Pemb. Rumah Pengomposan & PDU Sampah, Pembangunan Bank Sampah dan Konsultan Pengawasan Pemb. Bank Sampah.
 7. Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan
Pada kegiatan ini kinerjanya adalah Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan target 100% dan realisasinya telah mencapai 100%. Dengan kegiatan upah tenaga kerja TPA, perawatan kendaraan / mesin operasional TPA, belanja BBM kendaraan, alat berat dan mesin composting

➤ **Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau**

Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan, yaitu kegiatan Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan BLUD, di kegiatan ini merupakan kegiatan dengan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD. Adapun pengalokasian dana BLUD ini digunakan untuk operasional rutin di kantor BLUD serta untuk promosi layanan jasa BLUD.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan tersebut di atas secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 59. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan

No.	Program / Kegiatan	Realisasi Tahun (2017)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

1	3	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator: Persentase Pengangkutan Sampah	38,5%	40%	40%	100%	43%	93%
	Kegiatan :						
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Indikator: Tersusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dok	1 dok	1 dok	100%	5 dok	60% (tiap tahun 1 dok)
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Indikator: Jumlah penduduk yang terlayani dalam pengangkutan sampah	210.505	215.505	215.505	100%	225.505	95%
3	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Indikator: Tercapainya Kebersihan di wilayah kecamatan	9 kec	10 kec	10 kec	100%	12 kec	83%
4	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Indikator: Jumlah peserta sosialisasi persampahan	100 org	150 org	150 org	100%	620 org	40% (2017=100 org 2018=150 org)
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indikator: Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	121 ttk pantau	121 ttk pantau	121 ttk pantau	100%	123	98.37%
6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Penugasan) Indikator: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		6 paket	4 paket	66%	-	-
7	Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan Indikator: Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Permasalahan

1. Luasnya cakupan wilayah untuk pelayanan angkutan persampahan dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengangkutan sampah sehingga belum dapat semua desa di masing – masing kecamatan terlayani dengan baik
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 6 sore sampai jam 6 pagi, sehingga setelah armada pengangkutan sampah sudah melaksanakan pengangkutan masih ditemui sampah yang diletakan oleh masyarakat/penduduk di ruas/bahu jalan.
3. Sulitnya menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi

Saran-saran :

1. Dalam upaya pelayanan persampahan yang maksimal perlu dukungan dan komitmen kita bersama dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
2. Diharapkan pencairan dana kegiatan dapat direalisasikan sesuai jadwal dan peruntukannya, dan sistem keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mendukung penyelenggaraan kegiatan ditahun-tahun mendatang dengan GU yang lebih banyak dan proporsional.

Adapun realisasi keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan adalah sbb. :

Gambar 3. 64. Realisasi Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sasaran/ Program	Pendanaan RPJMD						2018				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pagu 2018	Realisasi 2018	Sisa	Serapan	Efisiensi
88 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 7.802.179.300	Rp 13.113.967.690	Rp 14.144.000.000	Rp 14.246.000.000	Rp 14.348.000.000	Rp -	Rp 12.219.377.470	Rp 11.153.817.072	Rp 1.065.560.398	91,28%	8,72%

Gambar 3. 65. Grafik Realisasi Keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



b. Rasio Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen Dari Luas Kawasan Perkotaan.

Capaian luasan Ruang Terbuka Hijau dari tahun ke tahun belum mengalami peningkatan luasan RTH yang ada seluas 2.529 m² dengan angka persentasi kumulatif tahunan 1,60% dan angka kumulatif tahunan seluas 107.565,06 m². Sedangkan nilai target SPM yang harus dicapai adalah 6.707.000 m².

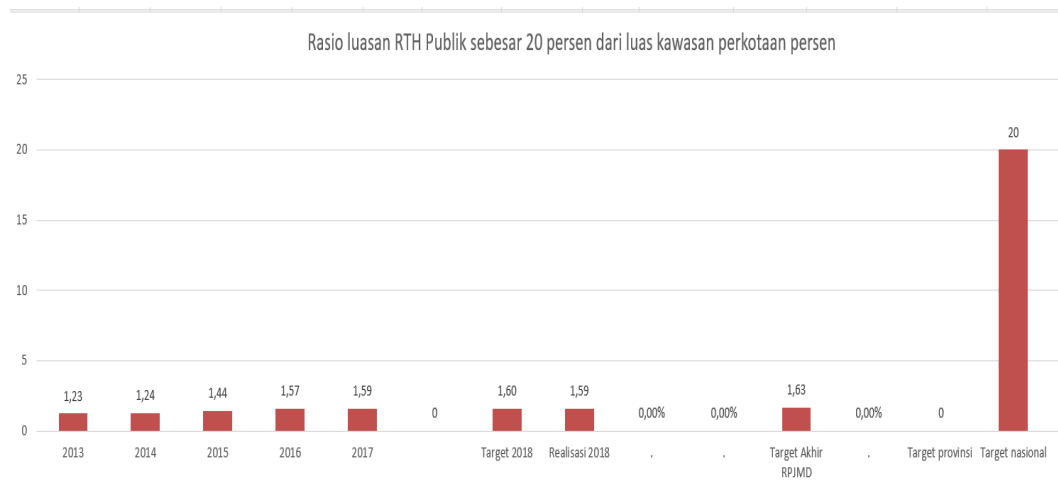
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan luasan yang ditetapkan yaitu 20% dari luas perkotaan, dan formulanya :

$$\frac{\text{Luasan RTH Publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH Publik yang seharusnya (20\% luas wilayah perkotaan)}} \times 100\% = \text{Kondisi Awal}$$

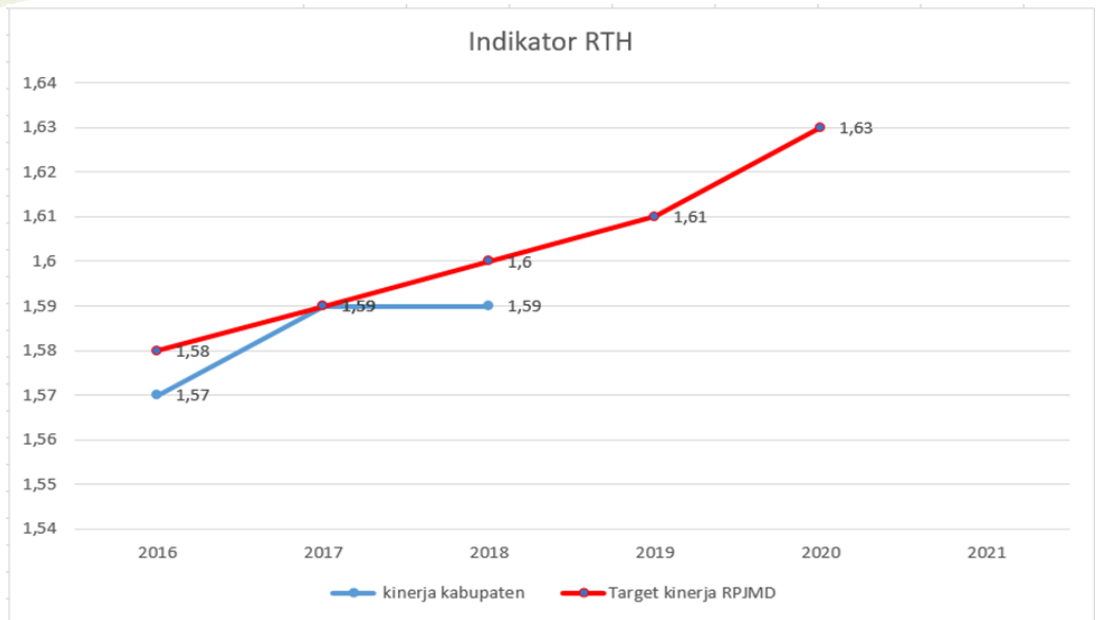
Berikut ditampilkan diagram komparatif target 2018, 2021 dan target nasional terhadap realisasi 2016,2017 dan 2018.

Gambar 3. 66. Diagram Komparatif Target 2018, 2021 dan Target Nasional Terhadap Realisasi 2016,2017 dan 2018



Jika diperbandingkan dengan target RPJMD 2016-2021 maka dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3. 67. Diagram Komparatif Target 2018, 2021 dan Target Nasional Terhadap Realisasi 2016,2017 dan 2018 diperbandingkan dengan target RPJMD 2016-2021



Program yang menunjang kinerja tersebut diatas yaitu : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut ;

- **Penataan Ruang Terbuka Hijau**
Luas ruang terbuka hijau dalam kondisi baik dengan target sebesar 6.707.000 m² realisasinya sebesar 107.565m² atau sebesar 1,59%. Kinerja pada kegiatan ini adalah melakukan / melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau dan membuat tambahan Taman Baru untuk pencapaian target SPM 20% dari luas perkotaan dengan tanpa penambahan taman pada lokasi di Kab. Banjar tetap dengan target kinerja **penataan** sebanyak 18 lokasi realisasinya 18 lokasi (100%).
- **Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau**
Jumlah taman hijau dan ruang terbuka hijau yang tersedia dengan target **pemeliharaan** sebanyak 26 lokasi dengan realisasi sebanyak 26 lokasi atau 100%.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 60. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan

No.	Program / Kegiatan	Tahun 2018	Capaian s/d Tahun n
-----	--------------------	------------	---------------------

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

		Realisasi Tahun (2017)	Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)	Target Akhir RPJMD / Renstra	terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
1	3	5	6	7	8	9	10
1	Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator: Taman Hijau atau RTH publik yang tersedia	26 lokasi	26 lokasi	26 lokasi	100%	30 lokasi	86,66%
	Kegiatan :						
	Penataan RTH Indikator: Tertatanya Taman Hijau dan RTH Publik	16 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	100%	20 lokasi	90%
	Pemeliharaan RTH Indikator: Jumlah Taman Hijau atau RTH publik yang terpelihara	26 lokasi	26 lokasi	26 lokasi	100%	30 lokasi	86,66%

Permasalahan

Kendala pada sasaran ini adalah kendala pada sasaran ini adalah minimnya alokasi anggaran untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau pada setiap tahun anggaran sehingga sulit untuk mencapai target seperti yang ditetapkan pada target SPM

Solusi

agar pemerintah daerah memperhatikan alokasi anggaran ruang terbuka hijau untuk meningkatkan perluasannya dan menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 99,38% (Sangat Baik).

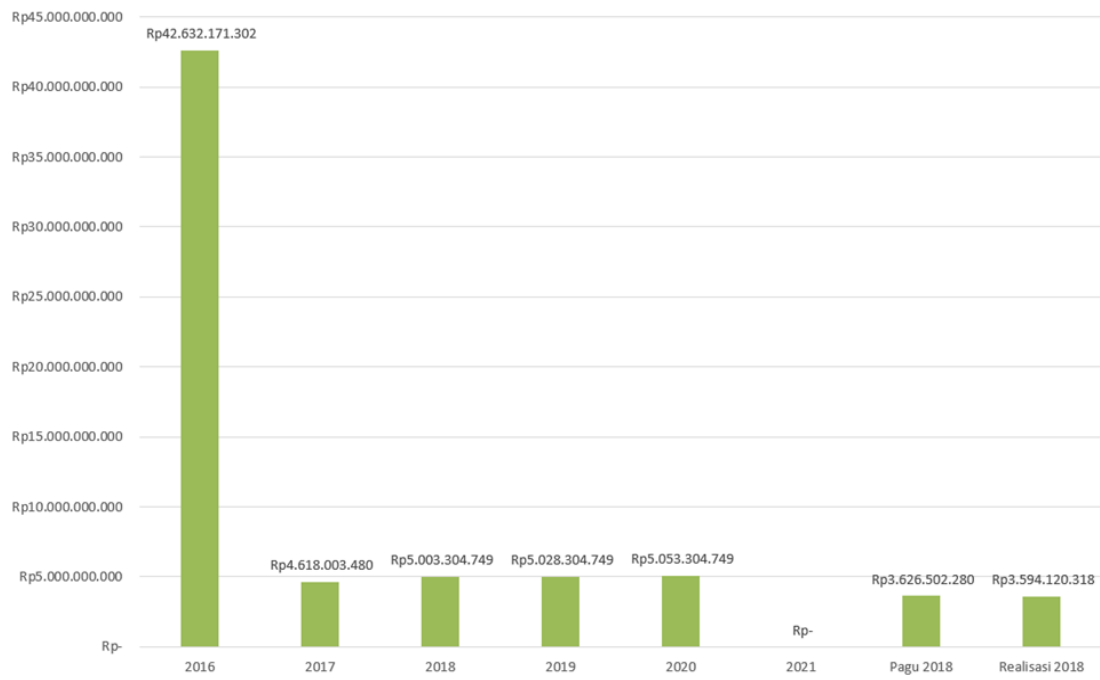
Adapun perbandingan pendanaan program pada RPJMD 2016-2021 dengan anggaran 2018 adalah :

Gambar 3. 68. Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018

Sasaran/ Program	Pendanaan RPJMD						2018			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pagu 2018	Realisasi 2018	Sisa	Serapan
89. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp42.632.171.302	Rp 4.618.003.480	Rp 5.003.304.749	Rp 5.028.304.749	Rp 5.053.304.749	Rp -	Rp 3.626.502.280	Rp 3.594.120.318	Rp 32.381.962	99,11%

Gambar 3. 69. Grafik Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018

89. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau



c. Indeks Kualitas Air

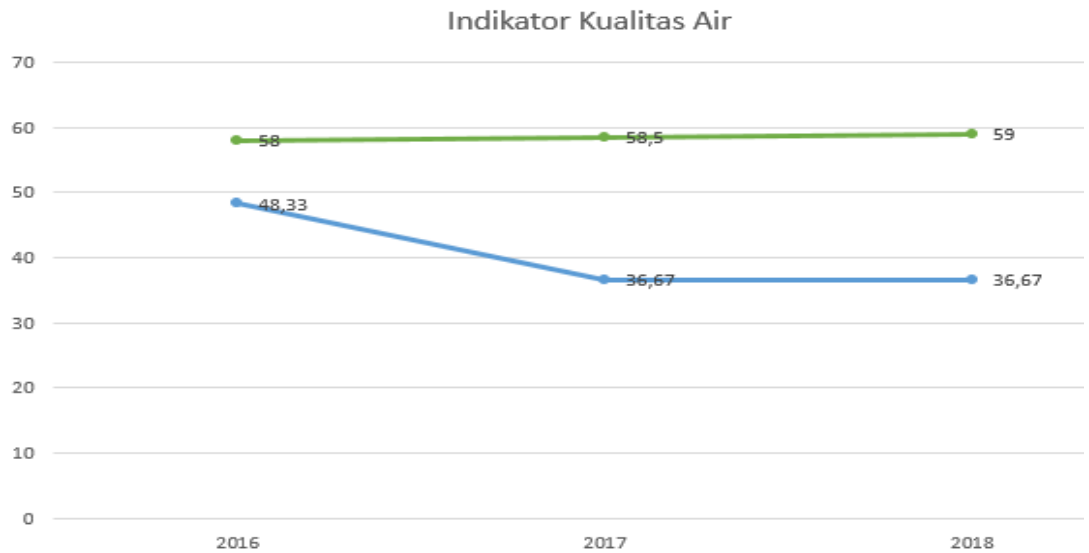
Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan diharapkan diperoleh dari meningkatnya kualitas air yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks kualitas air (IKA) atau penurunan pencemaran air. Tabel berikut memperlihatkan capaian tahun 2018.

Tabel 3. 61. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya		Capaian 2017	2018					
			2016	2017		Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Kriteria	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun n thd Target Akhir RPJMD
54	Indeks Kualitas Air (IKA)	status pencemaran	tercemar ringan (11 sungai) tercemar sedang (1 sungai)	tercemar ringan (4 sungai) tercemar sedang (8 sungai)	tercemar ringan (4 sungai) tercemar sedang (8 sungai)	tercemar ringan (100%)	tercemar ringan (33,33%)	33,33%	Sangat Rendah (Merah)	tercemar ringan (100%)	0,00%

c adalah 36,67%, ada peningkatan dibanding IKA pada tahun sebesar 36,00% %. Namun masih belum mengembalikan kualitas air dibanding tahun 2016 yang mencapai 48,33%, bahkan dibanding target IKA provinsi sebesar 59%. Untuk mudahnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3. 70. Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Pada Tahun 2018



Indikator kinerja diatas dasar bobot hasil uji laboratorium dengan Formula:

Formula Air:

$$\% \text{Sungai} = \frac{\text{Sungai}}{\text{Total Sungai}} \times 100\%$$

$$\text{Skor} = \% \text{Sungai} \times \text{Bobot}$$

$$\text{Indeks Kualitas Air} = \frac{\sum \text{Skor}}{\text{Total Bobot}}$$

Hasilnya terbagi dalam tercemar ringan, berat dan sedang.

Hasilnya terbagi dalam kategori : memenuhi mutu baku, tercemar ringan, tercemar sedang dan tercemar berat. Penentuan kategori tersebut berdasarkan pengukuran indeks pencemaran (Plj), yaitu :

Jika $0 \leq \text{Plj} \leq 1,0$ maka memenuhi baku mutu (kondisi tidak tercemar)

Jika $1,0 < \text{Plj} \leq 5,0$, maka tercemar ringan

Jika $5,0 < \text{Plj} \leq 10$, maka tercemar sedang

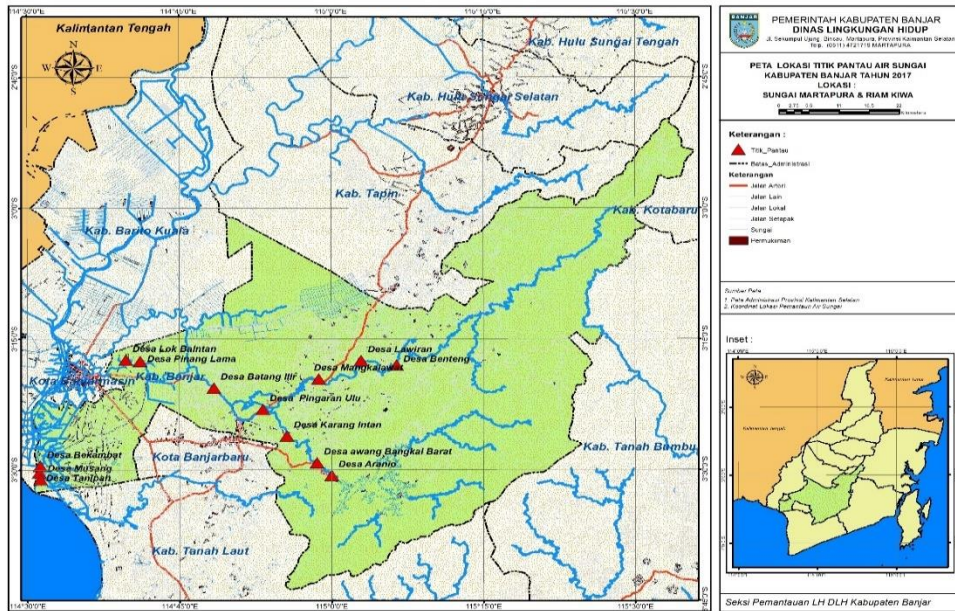
Jika >10 , maka tercemar berat.

Semakin besar angka Plj menunjukkan kualitas air semakin tercemar.

Berdasarkan pengukuran pada 12 titik samping sungai tahun 2016 s.d. 2018 berikut :

Gambar 3. 71. Pengukuran Kualitas Air Pengukuran Pada 12 Titik Samping Sungai Tahun 2016 s.d. 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018



diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

Tabel Hasil pengujian kualitas air

Gambar 3. 72. Hasil Pengujian Kualitas Air

LOKASI SAMPLING	2016		2017		2018		peningkatan/ penurunan	
	Pij	Status	Pij	Status	Pij	Status	2016/2017	2017/2018
11 Sungai Tanipah	3,07	tercemar ringan	3,15	tercemar ringan	4,7	tercemar ringan	0,08	1,55
3 Sungai Pinang Lama	2,32	tercemar ringan	3,77	tercemar ringan	6,75	tercemar sedang	1,45	2,98
4 Sungai Karang Intan	2,95	tercemar ringan	4,25	tercemar ringan	4,72	tercemar ringan	1,30	0,47
1 Sungai Pingaran Ulu	2,74	tercemar ringan	4,99	tercemar ringan	7,15	tercemar sedang	2,25	2,16
12 Sungai Bakambat	3,93	tercemar ringan	5,15	tercemar sedang	5,34	tercemar sedang	1,22	0,19
10 Sungai Musang	3,51	tercemar ringan	5,45	tercemar sedang	5,97	tercemar sedang	1,94	0,52
6 Sungai Aranio	2,62	tercemar ringan	5,70	tercemar sedang	3,79	tercemar ringan	3,08	-1,91
2 Sungai Batang	2,94	tercemar ringan	5,73	tercemar sedang	5,95	tercemar sedang	2,79	0,22
5 Sungai Asam	3,39	tercemar ringan	6,00	tercemar sedang	4,16	tercemar ringan	2,61	-1,84
9 Sungai Mangkalawat	5,29	tercemar sedang	6,13	tercemar sedang	6,55	tercemar sedang	0,84	0,42
7 Sungai Benteng	3,71	tercemar ringan	6,77	tercemar sedang	5,32	tercemar sedang	3,06	-1,45
8 Sungai Lawiran	4,29	tercemar ringan	9,83	tercemar sedang	6,46	tercemar sedang	5,54	-3,37

Dari data di atas terlihat bahwa terjadi penurunan kualitas air yang semula pada 2016 yang tercemar ringan ada 11 sungai (91,67%) menurun menjadi 4 sungai (33,33%) pada tahun 2017 dan 2018, sebaliknya yang tercemar sedang meningkat dari 1 sungai (8,33%) menjadi 8 sungai (66,67%). Bila dilihat dari sisi peningkatan/ penurunan Pij antara tahun 2016/2017 terjadi penurunan kualitas air pada semua sungai. Tetapi dengan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2018 terjadi peningkatan kualitas air pada 4 sungai, yaitu : Sungai Aranio, Sungai Asam, Sungai Benteng dan Sungai Lawiran.

Adapun sumber pencemaran air sungai diukur dari parameter : TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli dan total coliform. Parameter yang berkontribusi terbesar terhadap pencemaran air secara berurutan adalah bakteri : total coliform, total fosfat, limbah : COD dan BOD.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu nilainya memang ada penurunan untuk kualitas air dan kenaikan untuk kualitas udara, hal ini disebabkan adanya skor titik penilaian dalam menguji Kualitas Air maupun Udara tersebut, namun hasilnya tetap lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Namun demikian upaya-upaya terhadap pengawasan dan pengendalian kualitas air terus menerus dilakukan.

Dalam menunjang pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut diatas didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

- **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan** dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi Kota Sehat/Adipura
 - i. Target kinerjanya menciptakan kota yang bersih dalam penilaian Adipura sebanyak 3 kali penilaian, yang realisasinya 3 kali penilaian atau 100%. Kegiatan ini terdiri penilaian fisik lapangan sebesar 95% yang meliputi:
 1. Evaluasi Pengelolaan Sampah
 2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
 3. Hutan Kota
 4. Drainase Perkotaan
 5. Saluran air terbuka (Sungai)
 6. Bank Sampah
 7. Pengelolaan kebersihan lingkungan sekolah, perkantoran dan pasar
 8. Pengendalian pencemaran air dan fasilitas public di kawasan perkotaan.
 - ii. Sedangkan untuk daftar isian non fisik penilaiannya sebesar 5% yang berisikan berbagai data dalam bentuk pertanyaan dan data pendukung lainnya.
 - b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - i. Kinerjanya pada kegiatan ini melakukan pemantauan kualitas air dan udara dengan cara menguji kualitas air maupun udara dengan target sebanyak 68 titik dan realisasinya mencapai 68 titik pengambilan sampel atau 100%. Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai pada Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 5 Tahap dengan 12 Titik Pantau pada daerah hulu, tengah dan hilir yang meliputi;
 1. Sungai Martapura sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul, titik tengah di Desa Sungai Rangas Hambuku

- Kecamatan Martapura Barat dan titik hilir di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Sungai Riam Kiwa sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Benteng Kecamatan Pengaron, titik tengah di Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat dan titik hilir di Desa Mangkalawat Kecamatan Mataraman.
 3. Sungai Riam Kanan sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Aranio Kecamatan Aranio, titik tengah di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan dan titik hilir di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan.
 4. Sungai Barito sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh, titik tengah di Desa Bekambat Kecamatan Aluh-Aluh dan titik hilir di Musang Kecamatan Aluh-Aluh.
- ii. Masing – masing titik dilaksanakan sebanyak 5 (lima) tahap dalam satu tahun, dan dianggap telah mewakili musim yang berlaku yaitu awal musim penghujan, musim penghujan, peralihan antara musim penghujan dan kemarau (pancaroba), awal musim kemarau dan musim kemarau.
 - iii. Pengujian dan analisa sampel udara mewakili wilayah permukiman, transportasi, perkantoran dan industry dengan total titik pantau sebanyak 4 titik dan masing-masing dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang dianggap mewakili musim yang ada.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- i. Kinerja pada kegiatan ini mengawasi ijin lingkungan di perusahaan atau pelaku usaha dengan target sebesar 20 perusahaan, sedangkan realisasinya mencapai 43 perusahaan atau 172%.
- d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- i. Kinerja dalam kegiatan ini adalah melaksanakan survey lapangan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha yang memiliki izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dengan target 12 Perusahaan sedangkan realisasinya mencapai 10 perusahaan atau 83%. Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3 adalah pelaku usaha untuk dapat memiliki izin TPS Limbah B3 seiring

meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang industry dan perdagangan maka dilaksanakan kewajiban kepada pelaku usaha agar mengolah dan memproses pembuatan izin TPS limbah B3.

- e. Pengkajian Dampak Lingkungan
 - i. Kinerja dalam kegiatan ini adalah melaksanakan proses penyelesaian dokumen lingkungan dengan target 120 perusahaan realisasi sebesar 152 perusahaan atau 126%. Kegiatan ini adalah melaksanakan proses penyelesaian dokumen lingkungan, dalam melakukan usaha ataupun kegiatan terdapat peraturan perundangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha. Tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan.
 - ii. Adapun jenis dokumen lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan)
 2. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan)
 3. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan)
 4. DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- f. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)
 - i. Kinerja pada kegiatan ini adalah melaksanakan pelaporan wajib perlindungan dan pengelolaan LH yang tersampaikan tepat waktu oleh perusahaan atau pelaku usaha dengan target sebesar 10 perusahaan, sedangkan realisasinya mencapai 9 perusahaan atau 90%.
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
 - i. Kinerja pada kegiatan ini adalah pengaduan masyarakat yang terlayani dengan target 20 kasus dengan realisasi sebanyak 15 kasus atau 75%
- h. Pengkajian pengembangan Sistem Insentif dan Disentif
 - i. Kinerja pada kegiatan ini adalah terwujudnya kawasan sadar lingkungan dan menginventarisir kawasan rawan kerusakan lingkungan dengan target 2 kecamatan dengan realisasi 2 kecamatan atau 100%
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja pada kegiatan ini Meningkatnya ketaatan sumber pencemar institusi/perusahaan dan Terlaksananya pelayanan pengendalian pencemaran melalui klinik P3LH dengan target sebesar 20 perusahaan, sedangkan realisasinya mencapai 32 perusahaan atau 160%. Adapun pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- 1) Kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang bergerak di jenis usaha Pertambangan batubara, Pabrik & perkebunan karet, industry perbengkelan & reparasi, hotel & restoran, show room & bengkel, pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Perumahan, Rumah Sakit, Laboratorium, Perkebunan Kelapa Sawit, serta kegiatan yang beresiko mencemari lingkungan lainnya
 - 2) Rapat koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihadiri seluruh jajaran DLH Kab. Banjar dengan materi rapat berupa hasil temuan dilapangan dan saran tindak lanjut serta rapat pengaduan pencemaran bersama instansi terkait & perusahaan terlapor
 - 3) Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
- Kegiatan penunjang lainnya seperti belanja ATK, dokumentasi, fotocopy, pemberian honor tim kajian teknis dan penjiilidan pelaporan

➤ **Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH**

- a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Kinerja di kegiatan ini yaitu jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata dengan target 75 sekolah sedangkan realisasinya mencapai 75 sekolah atau 100%.

Dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi dan memberikan binaan terhadap sekolah Adiwiyata untuk dijadikan Program unggulan sekolah Adiwiyata di Kab. Banjar dengan memberikan sosialisasi, pembinaan, evaluasi dan verifikasi.

- b. Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup
- Kinerja di kegiatan ini yaitu tersedianya Database Lingkungan Hidup Kab. Banjar dengan target sebanyak 3 dokumen dengan realiasi 3 dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

- 1) Penyusunan laporan Periodik Sampah tahun 2018
- 2) Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tahun 2018

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 62. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan

No.	Program / Kegiatan	Capaian Tahun (2017)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	3	5	6	7	8	9	10
1	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator: Persentase jumlah pencemaran air dan udara	47%	50%	50%	100%	55%	90%
	Kegiatan :						
	Koordinasi Penilaian Kota sehat / Adipura Indikator: Jumlah Penilaian Adipura	3 kali penilaian	3 kali penilaian	3 kali penilaian	100%	15 kali	60%
	Pemantauan kualitas lingkungan Indikator: Jumlah Titik pantau Udara dan Air (Sungai/ Danau, Laut dan Kawasan Pilihan)	60 titik pantau	68 titik pantau	68 titik pantau	100%	70 titik pantau	97%
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH Indikator: Jumlah Perusahaan yang akan diawasi izin lingkungannya	-	20 perusahaan	43 Perusahaan	215%	60 perusahaan	71%
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Indikator: Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3	27 perusahaan	12 perusahaan	10 perusahaan	83%	54 perusahaan	68%
	Pengkajian dampak lingkungan Indikator: Tercapainya Ketaatan Perusahaan & Masyarakat dalam pengelolaan LH	216 dok lingkungan	120 dok lingkungan	152 dok lingkungan	126%	450 perusahaan	81%
	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) Indikator: Jumlah Publikasi pelaporan wajib perlindungan dan pengelolaan LH yang tersampaikan tepat waktu	-	10 perusahaan	9 perusahaan	90%	20 perusahaan	45%
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH Indikator: Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	14 kasus	20 kasus	15 kasus	75%	25 kasus	96%
	Pengkajian pengembangan Sistem Insentif dan Disentif Indikator: Terwujudnya kawasan sadar lingkungan dan menginventarisir kawasan rawan kerusakan lingkungan	-	2 kecamatan	2 kecamatan	100%	2 kecamatan	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Program / Kegiatan	Capaian Tahun (2017)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indikator: Meningkatnya ketaatan sumber pencemar institusi/perusahaan dan Terlaksananya pelayanan pengendalian pencemaran melalui klinik P3LH	43 perusahaan	20 perusahaan	32 perusahaan	160%	82 perusahaan	91%
2	Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Indikator: sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata Kegiatan :	65 sekolah	75 sekolah	75 sekolah	100%	90 sekolah	83%
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Indikator: Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	65 sekolah	75 sekolah	75 sekolah	100%	90 sekolah	83%
	Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup Indikator: Tersedianya Database Lingkungan Hidup Kab. Banjar	2 dok	3 dok/lap	3 dok/lap	100%	14 dok	57%

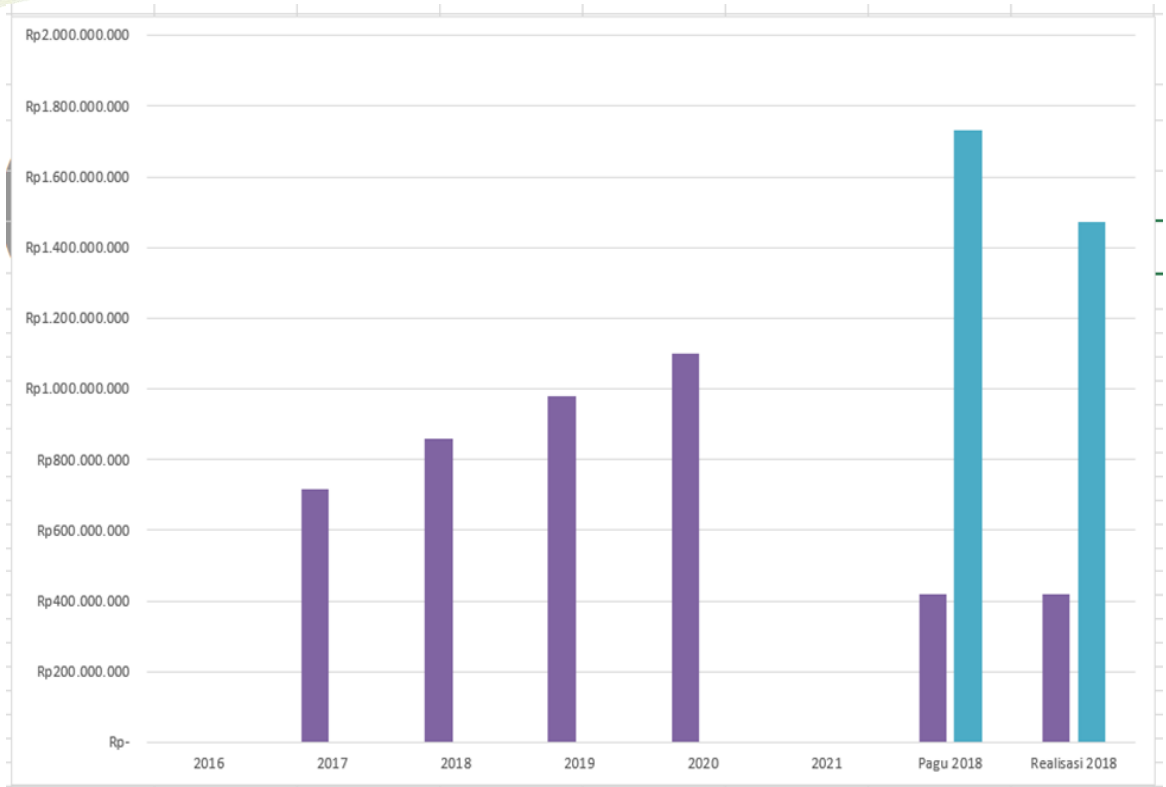
Adapun perbandingan pendanaan program pada RPJMD 2016-2021 dengan anggaran 2018 adalah sbb. :

Gambar 3. 73. Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018

Sasaran/ Program	Pendanaan RPJMD					2018				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pagu 2018	Realisasi 2018	Sisa	Serapan
90. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp -	Rp 715.000.000	Rp 860.000.000	Rp 980.000.000	Rp 1.100.000.000	Rp -	Rp 420.042.500	Rp 419.190.000	Rp 852.500	99,80%
91. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.730.007.400	Rp 1.470.677.342	Rp 259.330.058	85,01%

Data di atas dapat ditampilkan secara sederhana dengan diagram batang berikut :

Gambar 3. 74. Diagram Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 Dengan Anggaran 2018



d. Indeks Kualitas Udara

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan juga diharapkan diperoleh dari meningkatnya kualitas udara yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks kualitas udara (IKU) atau penurunan pencemaran udara. Tabel berikut memperlihatkan capaian tahun 2018

Gambar 3. 75. Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya		Capaian 2017	2018					
			2016	2017		Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Kriteria	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun n thd Target Akhir RPJMD
55	Indeks Kualitas Udara (IKU)	status pencemaran	tidak tercemar	tidak tercemar	100%	tidak tercemar	tidak tercemar	100,00%	Sangat Tinggi (Hijau)	tidak tercemar	100,00%

Indikator kinerja diatas dasar bobot hasil uji laboratorium dengan formula:

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - (50 / 0.9 \times (\text{Teu} - 01))$$

Pengambilan sample dilakukan pada 4 titik yang mewakili aspek transportasi (Trio motor), permukiman (jalan A. Yani), industri (pabrik tahu) dan perkantoran (pemda). Parameter pengukuran kualitas udara meliputi : suhu, kelembaban, arah angin, TSP, NO2, SO2, CO dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Ozon (O3). Namun parameter yang diuji adalah SO₂, NO₂ dan CO saja. NO₂ mengindikasikan potensi pencemaran dari sumber asap kendaraan dan SO₂ mengindikasikan potensi pencemaran dari asap industri.

Tabel 3. 63. Hasil pengujian kualitas udara tahun 2016-2018

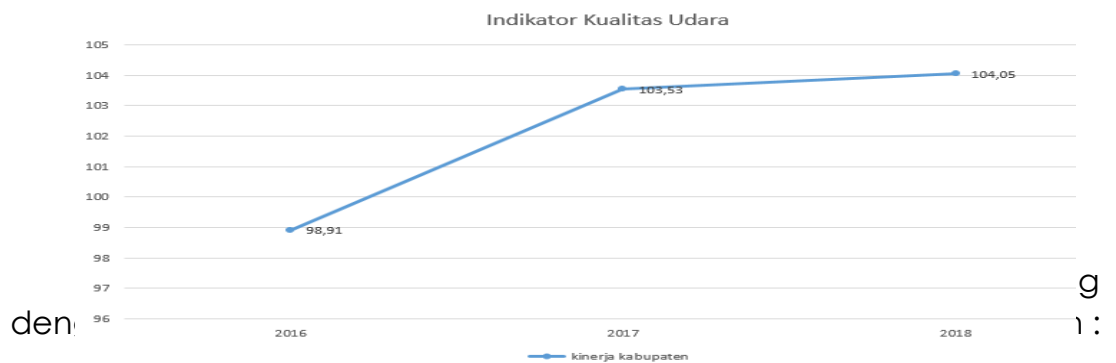
TAHUN	No.	PARAMETER	SATUAN		HASIL PENGUJIAN				BAKU MUTU
					Trio Motor	Jl. A. Yani km.12	Pabrik Tahu	Perkantoran Pemda	
2016	2.	Sulfur dioksida (SO ₂)	µg/m ³	1	52,3	52,2	40,9	43,11	900
2016	3.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	µg/m ³	1	40,15	45,11	33,36	30,75	200
2016	4.	Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³	114	350	618	108	111	20.000
2017	2.	Sulfur dioksida (SO ₂)	µg/m ³		<18,1	<18,1	<5,4	<5,4	900
2017	3.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	µg/m ³		9,2	3,8	10,3	24,5	200
2017	4.	Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³		2026	732	1762	938	20.000
2018	2.	Sulfur dioksida (SO ₂)	µg/m ³		<5,4	<5,4	<5,4	<5,4	900
2018	3.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	µg/m ³		8,1	6,9	6,9	4,9	200
2018	4.	Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³		<458	1362	<458	675	20.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa parameter NO₂, SO₂ dan CO masih memenuhi mutu baku atau tidak terjadi pencemaran udara selama 3 tahun terakhir.

Secara kuantitatif realisasi capaian kualitas udara tahun 2018 sebesar 104,05%, meningkat dibanding dengan indikator kinerja kualitas udara tahun 2017 sebesar 103%. Meningkatnya indeks kualitas udara tersebut menunjukkan kondisi kualitas lingkungan pada aspek udara di Kabupaten Banjar semakin bagus.

Sebagaimana dapat ditampilkan secara sederhana dengan digram batang berikut :

Gambar 3. 76. Diagram Realisasi Capaian Kualitas Udara Tahun 2018



- ✓ Penegakan Perda tentang lingkungan
- ✓ Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup

- ✓ Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
- ✓ Pengawasan terpadu dalam penegakkan hukum lingkungan
- ✓ Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menunjang pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut diatas didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program Peningkatan Pengendalian Polusi**

- a. Pengujian Emisi/Polusi udara akibat aktivitas industry
Kinerja di kegiatan ini yaitu jumlah Sumber Pencemar di Lingkungan Industri dengan target sebanyak 13 sumber pencemar dengan realisasi sebanyak 18 sumber pencemar atau sebesar 138%.
- b. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Kinerja di kegiatan ini yaitu jumlah perusahaan yang mengikuti penyuluhan dan bimtek dengan target sebanyak 45 perusahaan dengan realisasi sebanyak 79 perusahaan atau 175%

➤ **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

- a. Pengendalian dampak perubahan iklim
Kinerja di kegiatan ini yaitu jumlah sektor kegiatan yang dilakukan perhitungan Emisi GRK dengan target 5 sektor sedangkan realisasi mencapai 5 sektor atau 100%.
- b. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ekosistem
Kinerja di kegiatan ini yaitu jumlah tanaman di taman keanekaragaman hayati yang terpelihara dengan target sebanyak 400 pohon dengan realisasi sebanyak 500 pohon atau 125%.
- c. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan Konservasi
Kinerja di kegiatan ini yaitu jumlah kawasan konservasi dan ekosistem (hutan Kota) yang dikelola dengan target 1 kawasan sedangkan realisasinya 1 kawasan atau 100%

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 64. Capaian Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2018 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan

No.	Program / Kegiatan		Tahun 2018		Capaian s/d Tahun n
-----	--------------------	--	------------	--	---------------------

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

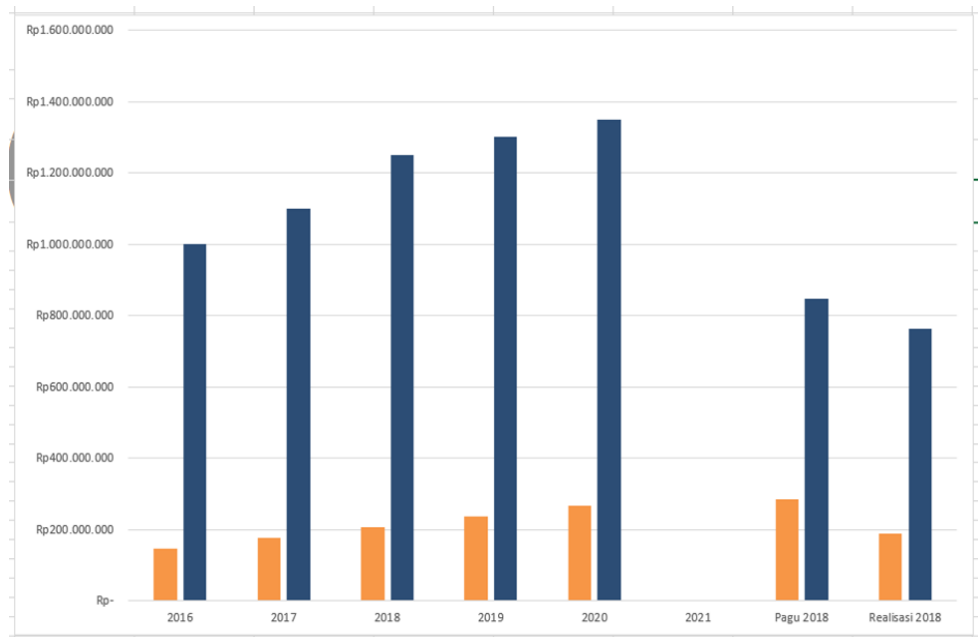
		Capaian Tahun (2017)	Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)	Target Akhir RPJMD / Renstra	terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
1	3	5	6	7	8	9	10
3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi Indikator: Penyuluhan dan Bintek serta inventarisasi sumber pencemar udara terhadap pelaku usaha dan atau masyarakat dalam rangka pengendalian polusi dan pencemaran	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	100%
	Kegiatan :						
	Pengujian Emisi/Polusi udara akibat aktivitas industri Indikator: Jumlah Sumber Pencemar di Lingkungan Industri	-	13 sumber pencemar	18 sumber pencemar	138%	31 sumber pencemar	58%
	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Indikator: Jumlah perusahaan yang mengikuti penyuluhan dan bimtek	36 perusahaan	45 perusahaan	79 perusahaan	175%	150 perush	76%
	Kegiatan :						
4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Indikator: Sektor kegiatan yang dilakukan perhitungan Emisi GRK	5 sektor	5 sektor	5 sektor	100%	5 sektor	100%
	Kegiatan :						
	Pengendalian dampak perubahan iklim Indikator: Jumlah sektor kegiatan yang dilakukan perhitungan Emisi GRK	3 sektor	5 sektor	5 sektor	100%	18 sektor	44%
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ekosistem Indikator: Jumlah tanaman di taman keanekaragaman hayati yang terpelihara	375 pohon	400 pohon	500 pohon	125%	2.100 pohon	59%
	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan Konservasi Indikator: Jumlah kawasan konservasi dan ekosistem (hutan Kota) yang dikelola	-	1 kawasan	1 kawasan	100%	3 kawasan	33%
	Kegiatan :						

Adapun perbandingan pendanaan program pada RPJMD 2016-2021 dengan anggaran 2018 adalah sbb. :

Gambar 3. 77. Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 dengan Anggaran 2018

Sasaran/ Program	Pendanaan RPJMD							2018				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pagu 2018	Realisasi 2018	Sisa	Serapan	Efisiensi	
92. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp. 145.000.000	Rp. 175.000.000	Rp. 205.000.000	Rp. 235.000.000	Rp. 265.000.000	Rp. -	Rp. 285.656.800	Rp. 186.924.986	Rp. 98.731.814	65,44%	34,56%	
93. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.350.000.000	Rp. -	Rp. 846.529.800	Rp. 761.740.644	Rp. 84.789.156	89,98%	10,02%	

Gambar 3. 78. Diagram Perbandingan Pendanaan Program Pada RPJMD 2016-2021 dengan Anggaran 2018



Permasalahan :

1. Belum maksimalnya peranan stake holder atau instansi dalam mengendalikan pencemaran air sungai, sehingga air sungai di Kab. Banjar masih tercemar dengan yang terindikasikan dengan Indek Kualitas Air masih rendah yaitu sebesar 36.67%
2. Belum selesainya bangunan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kab Banjar, sehingga dalam pengujian laboratorium masih menggunakan pihak ketiga

Solusi :

1. Dalam upaya peningkatan kualitas air dan udara yang maksimal perlu dukungan dan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar. Peran SKPD terkait, seperti Dinas PUPR melalui program penghapusan jamban apung dan Dinas Kesehatan melalui program PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) harus lebih dioptimalkan lagi.
2. Diharapkan agar bangunan laboratorium secepatnya dapat terselesaikan sehingga operasional Laboratorium dalam rangka bahan evaluasi dan mengendalikan dampak lingkungan dapat berjalan dengan baik

3.2.23. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk itu meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya menghadapi MEA sejak diberlakukannya pada tahun 2015 agar dapat bertahan dan bersaing.

Capaian sasaran meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat kurang berhasil dengan rata-rata capaian 64,74% tergolong dalam kategori capaian rendah, capaian sasaran diukur dengan 5 (lima) buah indikator yaitu 1) Persentase Koperasi aktif, 2) Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil, 3) Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi, 4) Jumlah nilai ekspor karet dan 5) Persentase desa berkembang. Dari Indikator yang mendukung sasaran ini hanya 1 (satu) yang mencapai target 100%, yaitu indikator kinerja persentase desa berkembang. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 65. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Masyarakat Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhd Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase koperasi aktif		63,9	100,63	64,50	64,20	99,53	66.5	96.54
2	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil		0.50	66,67	0.25	0.42	168	1,50	28
3	Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi		17,14	85,7	20	32.9	164.5	20	164.5
4	Jumlah nilai ekspor karet		52.181.067	10	509.018.168,29	107.082.330	21,04	518.158.646,23	20,67

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhd Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
5	Persentase desa berkembang		22,74	61,16	44,40	51,62	116,26	66,06	78,14

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Formulasi perhitungan Persentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi yang terdaftar dikali 100 %.

Capaian persentase koperasi aktif pada tahun 2018 adalah 99,53 % didapat dari realisasi sebesar 64,20 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 64,50 %. Realisasi Persentase koperasi aktif diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Koperasi Aktif} &= \frac{\sum \text{Koperasi aktif}}{\sum \text{Koperasi terdaftar}} \times 100\% \\
 &= \frac{154 \text{ unit}}{241 \text{ unit}} \times 100\% = 99,53\%
 \end{aligned}$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 63,90 % menjadi 99,53 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 96.54 % dari target 66.5 % pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 99.53 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi .

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Program dilaksanakan dalam mencapai Outcome Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
Kegiatan sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian bertujuan agar masyarakat lebih memahami makna berkoperasi dan tertarik untuk membentuk koperasi baru sehingga akan menambah kuantitas koperasi baru.
- Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi. Hal ini dimaksudkan agar koperasi berlomba – lomba memperbaiki sistem pengelolaan kelembagaan koperasi.
- Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi.
Kegiatan ini berisi tentang pemberian bantuan / hibah aplikasi sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan koperasi dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan koperasi sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan pada gilirannya RAT dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Diberikan kepada 10 koperasi yaitu : Ksp Barakat kayu tangi, ksu al wazro aisyah, Kpri makmur, kpri senasib, kpri pendidikan tehnik, kpri sama suka, kopentren al amin, kopentren miftahul sholihin, kpri berkat usaha mandiri dan Koperasi untung bersama.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini berisi tentang pembuatan data keragaan koperasi yang dibuat tiap triwulan. Data keragaan koperasi ini berisikan data koperasi beserta pengelolaan manajemen dan unit usahanya di seluruh Kabupaten Banjar.
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, yaitu dengan berbagai kegiatan seperti :
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Sosialisasi dukungan informasi penyedia permodalan
Kegiatan ini berupa pelaksanaan sosialisasi permodalan UMK dengan target kinerja sebanyak 80 UMK (2 Kecamatan) yaitu di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio. kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro mengerti dan memahami bagaimana cara meminjam modal sesuai dengan yang

diharapkan untuk pembuatan permodalan. Sehingga para pelaku usaha mikro akan dapat mengembangkan dan memajukan usaha untuk ke depannya.

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, yaitu dengan berbagai kegiatan seperti :
 - Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah ; Kegiatan ini berisi kegiatan pendataan UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tersedianya data UMKM yang valid di Kabupaten Banjar, yang berguna sebagai data dasar pengambilan kebijakan dalam pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini mendata UMKM secara by name by address, pada tahun 2018 telah mendata / mengupdate data sebanyak 4000 UM. Sebelum pendataan, para petugas pendata (sekretaris desa / sekretaris lurah) diberikan Bimbingan Tekhnis pedoman pengisian formulir pendataan UMKM.
 - Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM Kegiatan ini berisi kegiatan pendampingan usaha bagi UMK guna meningkatkan skala usaha mikro menjadi kecil. Kegiatan ini berupa pembentukan Tim Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro (lintas sektor).

Gambar 3. 79. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyedia Permodalan



b. Persentase Skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil

Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih

lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Capaian Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil pada tahun 2018 adalah 168 % didapat dari realisasi sebesar 0,42 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,25 %. Realisasi persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil} = \frac{\sum \text{usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil}}{\sum \text{total usaha mikro}} \times 100\%$$

$$= \frac{88 \text{ unit}}{35.105 \text{ unit}} \times 100\% = 0,42\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,5 % menjadi 168 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 28 % dari target 1,50 % pada tahun 2021. Target yang ditetapkan dari tahun 2017 sampai dengan akhir RPJMD merupakan target tahunan (bukan akumulasi) yang ingin dicapai sesuai dengan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 168 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam merealisasikan target yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dengan sangat baik serta peran dari BUMD dan Perbankan berupa dukungan permodalan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

Kegiatan ini berupa: fasilitasi kegiatan rapat awal pembubaran koperasi, rakor perkoperasian, fasilitasi kegiatan perkoperasian. Rakor perkoperasian dilaksanakan di Martapura dengan mengundang 100 gerakan koperasi di Kabupaten Banjar. Fasilitasi kegiatan perkoperasian

berupa penyuluhan dan pembinaan koperasi, Kegiatan ini dalam rangka pencapaian target IKU persentase koperasi aktif 64,5 % pada tahun 2018. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah

Gambar 3. 80. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi



- Pembinaan dan pengawasan manajemen usaha koperasi
Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dalam rangka penyusunan profil kinerja usaha koperasi, sebagai bahan informasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi bagi instansi terkait.
- Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil menengah
Kegiatan ini berisikan pembentukan tim monitoring, evaluasi dan kredit program. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka menambah modal kerja apalagi dengan suku bunga yang sangat rendah. Aplikasi SIKP mampu mengakomodir manajemen izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Ijin Usaha Mikro dan Kecil merupakan penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 7 yang berisikan tentang penumbuhan iklim usaha yang salah satunya adalah perizinan usaha. Presiden RI mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden No. 96 tahun 2014 tentang

perizinan untuk Usaha Mikro Kecil. Pada Tahun 2018 ini IUMK yang telah terbit yaitu sebanyak 422 IUMK.

Gambar 3. 81. Rapat Tim Monitoring, Evaluasi dan Kredit Program



- Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Kegiatan ini berupa memfasilitasi para UKM guna mengembangkan usahanya yaitu berupa pendampingan pembangunan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi. Pembangunan revitalisasi pasar rakyat tahun 2018 diserahkan kepada Koperasi Paramasan Bawah Kec. Paramasan yang dananya bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
Kegiatan ini memberikan pemahaman bagi UMKM tentang pentingnya hak paten merek usaha yang diproduksi oleh para pelaku usaha. Narasumber kegiatan sosialisasi HAKI ini dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan 1 (satu) kali di Martapura dengan jumlah peserta 30 orang tetapi tidak dapat terealisasi.
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan kewirausahaan yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan teknis administrasi, manajemen dan pengelolaan keuangan bagi pengusaha kecil. Target kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali dengan jumlah peserta sebanyak 30 UMK yang

- dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Agustus 2018 bertempat di Wisma Sultan Sulaiman Martapura.
- Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
Kegiatan ini berupa pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, guna untuk meningkatkan keterampilan manajerial SDM pengurus dan pengelola koperasi yang profesional. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali di Martapura dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang pengurus Koperasi/KUD.

Gambar 3. 82. Rapat Tim Monitoring, Evaluasi dan Kredit Program



c. Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi

Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi dihitung berdasarkan pendapatan perkapita pada kawasan transmigrasi tahun perhitungan dikurangi pendapatan perkapita di kawasan transmigrasi tahun sebelumnya dibagi pendapatan perkapita tahun sebelumnya dikali 100 %.

Sasaran pengukuran adalah warga transmigrasi unit pemukiman (UPT) Cintapuri sebanyak 209 KK, dari 209 KK tersebut 25 % bekerja pada PT. Borneo Indo Tani yang bergerak pada perkebunan kelapa sawit, sedangkan 75 % nya adalah petani karet.

Realisasi Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kawasan transmingrasi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- Untuk pendapatan tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

- Dibandingkan pada tahun 2016 dan 2017 kenaikan pendapatan pada tahun 2018 sebesar 32,9 %, yaitu sebesar Rp. 37.872.438,-/org/thn

Capaian persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi pada tahun 2018 adalah 164.5 % didapat dari realisasi sebesar 32.9 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 20 %. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 164.5 % dari target 20 % pada tahun 2020.

Faktor Pendukung pencapaian sasaran ini adalah disekitar wilayah transmigrasi cintapuri terdapat perusahaan sawit (PT. Borneo Indo Tani dan PT. Palmina Utama) dan masyarakat juga bekerja pada perusahaan tambang batu bara (PT. Talen, PT. CPP dll) sedangkan dari sektor lain (buruh tani, pedagang, warung makmin, pencari ikan, tukang bangunan dan bengkel sepeda motor).

Permasalahan

- Data susah di dapat karena banyak rumah yang hancur dan notabane ditinggalkan penghuninya.
- Kondisi Prasarana Perhubungan/Transportasi dan Kondisi Sarana Perumahan banyak yang sudah rusak berat
- Kurang pelatihan dan Keterampilan Bagi Masyarakatnya

Solusi

- Agar jalan yang rusak segera diperbaiki sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari rezeki dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia, melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan kewirausahaan atau keterampilan / keahlian sehingga peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dapat tercapai.
- Tahun 2019 akan dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat eks Transmigrasi

d. Jumlah nilai ekspor karet

Karet merupakan komoditas yang sangat potensial di Kabupaten Banjar ,diharapkan dengan meningkatnya nilai ekspor karet dari Kabupaten Banjar dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat khususnya para petani karet. Formulasi perhitungan diperoleh dari nilai ekspor produksi karet secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun dengan mata uang dollar Amerika. Sumber data perhitungan diperoleh dari Badan Pusat Statitik Kabupaten Banjar.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Capaian jumlah nilai ekspor karet pada tahun 2018 adalah sebesar 82.371.023 Kg sedangkan target yang ditetapkan sebesar 509.018.168,29 (USD). Nilai ekspor diperoleh dengan mengkonversi jumlah volume ekspor karet menjadi nilai dengan mata uang Rupiah.

Saat ini harga karet internasional di kisaran US\$ 1.300 - US\$ 1.350 per ton. Apabila di konversikan maka realisasi ekspor karet adalah :

$$\frac{82.371,023 \times 1.300}{509.018.168,29} * 100\% = \frac{107.082.329,9}{509.018.168,29} \times 100\% = 21,04\%$$

Gambar 3. 83. Ekspor Produk Karet Kabupaten Banjar

Tabel 7.7 Ekspor Produk Lampit Rotan Sarung Tangan Karet Tikar Purun dan Karet dari Kabupaten Banjar 2016
Exports Rattan Carpet Rubber Glove Purun Mat and Natural Rubber from Banjar Regency 2016

Jenis Komoditi <i>Comodity</i>	Negara Tujuan <i>Desnination Country</i>	Satuan <i>Unit</i>	Volume <i>Volume</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tikar Purun	- Jepang/ <i>Japan</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
Purun Mat	- Malaysia/ <i>Malaysia</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
	- Taiwan/ <i>Taiwan</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
2. Lampit Rotan	- Jepang/ <i>Japan</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
Rattan Carpet	- Malaysia/ <i>Malaysia</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
	- Korea/ <i>Korea</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
3. Rotan Sabrina	- Jepang/ <i>Japan</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
Sabrina Rattan	- Singapura/ <i>Singapore</i>	Meter Persegi/ <i>Meter Square</i>	-
4. Bantal Rotan	- Jepang/ <i>Japan</i>	Buah/ <i>Piece</i>	-
Rattan Pillow	- Taiwan/ <i>Taiwan</i>	Buah/ <i>Piece</i>	-
5. Sarung Tangan Karet	- USA/ <i>USA</i>	Buah/ <i>Piece</i>	-
Rubber Glove	- Perancis/ <i>France</i>	Buah/ <i>Piece</i>	-
6. Karet	- Singapura/ <i>Singapore</i>	Kilogram/ <i>Kilograms</i>	31 189 956
Natural Rubber	- USA/ <i>USA</i>	Kilogram/ <i>Kilograms</i>	51 181 067

Sumber/Source: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar/Industrial and Trade Agency of Banjar Regency

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2018

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 21,04 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat rendah.

Apabila dilihat perkembangan ekspor karet Kabupaten Banjar 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 66. Ekspor Karet Kabupaten Banjar Tahun 2012 – 2016

Tahun	Volume ekspor karet (ton)	%
2012	19.272,00	630,89
2013	26.775,15	38,93
2014	23.821,20	-11,03
2015	24.014,66	0,18
2016	33.193,06	0,075

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pemasaran karet adalah peningkatan investasi produksi dan produktivitas serta ekspor. Kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pemasaran.

Perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencapai kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar dan perdagangan luar negeri
Target kinerja terlaksananya penerbitan STP BOKOR SIR, yaitu Pelayanan Pembuatan Tanda Daftar Pengusaha/Pedagang Karet dan Pencatatan Serta Pembuatan Laporan.
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya pelayanan pembuatan tanda daftar pengusaha/ pedagang karet agar tersedianya data pengusaha/pedagang karet di Kabupaten Banjar.
 - Monitoring/pendataan bahan olah komoditi ekspor daerah standar Indonesia rubber
Kegiatan ini mempunyai tujuan agar tersedianya dokumen bank data komoditi ekspor rubber di Kabupaten Banjar selama 1 tahun yang dilaksanakan pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Mataraman, Simpang empat, Karang Intan dan Aranio.
 - Belanja Bimtek mutu bahan olah karet
Kegiatan ini mempunyai tujuan agar meningkatnya bimbingan teknis bahan olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber.
 - Perjadin Bimtek dan Monitoring Bimtek Mutu Bahan Olahan Karet

Kegiatan ini mempunyai tujuan agar meningkatnya pengetahuan aparat teknis tentang peluang pasar dan potensi ekspor daerah.

- o Konsultasi Teknis Peningkatan Peluang Pasar dan Potensi Ekspor Daerah

Kegiatan ini bertujuan melaporkan perkembangan penerbitan STPP Bokar SIR dan konsultasi mengenai peluang pasar dan usaha peningkatan mutu bahan olah karet. Realisasi kegiatan : Dilaksanakan 2 kali sebanyak 5 orang ke direktorat standarisasi dan pengendalian mutu Bogor.

e. Persentase Desa Berkembang

Status desa didasarkan pada klasifikasi dalam indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

IDM didapat dari data BPS RI yang perhitungannya hanya dilakukan sebanyak 3 tahun sekali dan dirilis oleh Kemendes dan PDT RI setiap 3 tahun sekali, terakhir rilis tahun 2015. DPMD Kabupaten Banjar tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung persentase desa berkembang, sehingga data persentase desa berkembang sangat tergantung pada Rilis IDM Kemendes dan PDT RI.

Formulasi perhitungan adalah jumlah desa berkembang dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Banjar dikali 100 %. Capaian persentase desa berkembang pada tahun 2018 adalah 86.03 % didapat dari realisasi sebesar 51,62 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan 60 % .

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase desa berkembang mengalami peningkatan yaitu 28,88%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian pada tahun 2018 menyumbang 60.73 % dari target 85 % pada tahun 2021.

Untuk pemenuhan variabel/indikator penilaian IDM melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan Program dan kegiatan dalam mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - o Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Kegiatan pelatihan manajemen usaha ekonomi masyarakat dimaksudkan agar lembaga ekonomi yang dibentuk masyarakat secara manajemen agar tertib administrasi, pemberdayaan usaha skala mikro, kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha, salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu usaha agar tercipta usaha yang akan menghasilkan laba bagi usaha yang akan dibentuk. Kegiatan Penunjang Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi dan Kegiatan Workshop Kawasan Perdesaan

- Kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, Target kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi dan Informasi Bagi Masyarakat Desa adalah 16 kec dengan realisasi kinerja 16 Kec dengan capaian 100% Realisasi kegiatan berupa terlaksannaya kegiatan pembinaan BPSPAM berupa monev Pamsimas yang ada di 16 Kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada awalnya kegiatan ini berupa pelatihan BPSPAM dan monev BPSPAM, namun karena adanya pengurangan anggaran pada DPA APBD P Tahun 2018 maka kegiatan pelatihan BPSPAM dihapus dan hanya dilakukan kegiatan monev BPSPAM di 16 Kecamatan di Kabupaten Banjar. Target kinerja pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan adalah 50 Org, 5 Kec, 20 Kec dengan realisasi kinerja 50 org, 5 kec, 20 kec dengan capaian 100%, Realisasi kinerja Terlaksananya kegiatan pelatihan SIP, lomba posyandu, pokjanal posyandu (3 kegiatan) dengan capaian 100 %.
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Target kinerja pada Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa adalah Terlaksananya kegiatan BBGR, Pelatihan evaluasi perkembangan desa/kelurahan dan

Profil Desa/Kelurahan, TMMD, Lomba Desa, Pokjandal evaluasi perkembangan desa / kelurahan dan profil desa kelurahan.

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Target kinerja pada kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah Terlaksananya pembinaan dan evaluasi administrasi PKK, Rakon PKK, Jambore Kader PKK, Sosialisasi Hatinya PKK dasawisma, LP3PKK (5 keg) dengan realisasi kinerja Terlaksananya pembinaan dan evaluasi administrasi PKK, Rakon PKK, Jambore Kader PKK, Sosialisasi Hatinya PKK dasawisma,LP3PKK (5 keg) dengan capaian 100 %.

- Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, Target kinerja pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa adalah 59 Org, 50 Org, 6 Kec dengan realisasi kinerja 59 Org, 50 Org, 6 Kec dengan capaian 100%. Target kinerja pada kegiatan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa adalah Terlaksananya sosialisasi BUMDesa (6 kecamatan), Rakor Bumdes dan Pembinaan Bumdes dengan realisasi kinerja Terlaksananya sosialisasi BUMDesa (6 kecamatan), Rakor Bumdes dan Pembinaan Bumdes dengan capaian 100 %.
 - Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan, Target kinerja pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan adalah 1 kali, 6 Kec dengan realisasi kinerja 1 kali, 6 kec dengan capaian 100%.

Permasalahan :

- Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM di pasar nasional maupun internasional.
- Terbatasnya akses koperasi dan usaha mikro terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, permodolan, teknologi, pemasaran dan kemitraan

- Masih terbatasnya sumber daya koperasi dan UKM yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, pemasaran serta permodalan.
- Masih banyaknya tunggakan pada kelompok SPP dana bergulir;
- Masih belum tertib administrasi dan tertib pembukuan untuk UEM terutama usaha mikro;
- Banyaknya kader posyandu yang belum mengerti tentang pengisian data administrasi pembukuan di posyandu dan Sistem Informasi Posyandu;

Solusi :

- Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan teknis, pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
- Memperluas jangkauan akses koperasi dan UKM terhadap sumber daya : meningkatkan bahan baku lokal misal kerjasama dengan petani lokal, lebih pro aktif untuk kemitraan dengan BUMN, Perbankan, swasta (minimarket,supermarket dll) untuk permodalan dan pemasaran.
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar baik dengan dana APBD maupun dana desa agar lebih fokus,terintegrasi dan bersinergi antar instansi pemerintah, masyarakat dan swasta.
- Meningkatkan produktivitas, kualitas dan ekspor karet melalui pemberian bibit unggul, pupuk, pelatihan/pembinaan panen dan pasca panen serta fasilitasi pemasaran sampai tingkat ekspor.
- Melakukan pembinaan berupa pelatihan agar tertib administrasi dan pembukuan UEM;
- Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap kader posyandu dalam pengisian data administrasi pembukuan di posyandu dan Sistem Informasi Posyandu;
- Melakukan pembinaan dan perbaikan dalam lembaga BPSPAM, pelatihan dan mencek ulang sumber air usulan pamsimas;

3.2.24. Mengembangkan Kepariwisata Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Memperhatikan potensi dan peluang masa depan, Pariwisata merupakan salah satu andalan Kabupaten Banjar dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain, pariwisata akan mendorong pembangunan daerah yang mengedepankan kaidah-kaidah perencanaan, arsitektural, budaya lokal, estetika dan kualitas lingkungan serta memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Potensi objek pariwisata di Kabupaten Banjar cukup banyak, baik wisata alam, kuliner, religi, kerajinan dll.

Pengembangan pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha terkait pariwisata seperti akomodasi, restoran, taxi, usaha kerajinan seni souvenir dan lain lainnya.

Pada tahun 2018 pencapaian sasaran Pengembangan pariwisata daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal, dimana rata-rata capaian indikator menunjukkan nilai negative (-238%). Hal ini disebabkan capaian indikator peningkatan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar -401,37%

Capaian sasaran mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu : 1) Peningkatan wisatawan lokal dan 2) Peningkatan wisatawan mancanegara.

Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 67. Realisasi dan Capaian Sasaran Mengembangkan Kepariwisataan Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Peningkatan wisatawan lokal		2027415	105.63	1.920.415	7.105.288	369,99%	1922415	369.6
2	Peningkatan wisatawan mancanegara		-11.89	-237.8	5	-6.37	-127.4%	5%	-327.40

a. Peningkatan wisatawan lokal

Peningkatan wisatawan lokal yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan. Formulasi perhitungan yaitu jumlah seluruh wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun bersangkutan dikurang jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dikali 100% (apabila target menggunakan satuan persen, apabila satuan target orang maka dihitung : jumlah seluruh wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun bersangkutan dikurang jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya).

Lokasi wisata yang menjadi dasar perhitungan adalah :

- ✓ Cahaya Bumi Selamat (CBS)
- ✓ Wisata Religi Makam Datu Kalampayan
- ✓ Pulau Pinus I, Pulau Pinus II dan Riam Kanan
- ✓ Wisata kuliner Bincau
- ✓ Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
- ✓ Pasar Terapung Lok Baintan
- ✓ Obyek Wisata Alam Sungai Kembang
- ✓ Wisata religi Makam Guru Sekumpul Martapura
- ✓ Objek wisata Water Boom Pesona Modern

Capaian peningkatan wisatawan lokal pada tahun 2018 adalah 369,99% didapat dari realisasi 7.105.288 orang dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1.920.145 orang dikali 100 %.

Realisasi yang lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan disebabkan karena :

- Pada tahun 2015 wisatawan lokal yang berasal dari provinsi Kalimantan Selatan, khususnya yang berkunjung ke obyek wisata religi makam Guru Sekumpul tidak dicatat/didata sebagai wisatawan dan angka hasil pendataan jumlah wisatawan lokal pada tahun 2015 dijadikan sebagai dasar penentuan target (data dasar).
- Sesuai dengan definisi wisatawan lokal yaitu "sekelompok orang yang berasal dari dalam negeri yang melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjar untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara" maka mulai tahun 2016, pengunjung obyek wisata yang berasal dari provinsi Kalimantan Selatan dicatat/didata sebagai wisatawan lokal.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2017, pada tahun 2018 terjadi peningkatan capaian sebesar 721.608 orang (7.105.288 orang - 6.383.682 orang). Dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir periode Renstra, capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 telah mencapai 369,60%. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program pengembangan destinasi pariwisata.
Program dilaksanakan dalam mencapai Outcome Meningkatnya kunjungan wisata

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :

- Persentase Destinasi Pariwisata yang telah dikembangkan
Destinasi Pariwisata yang telah dikembangkan adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang telah dikembangkan melalui intervensi program dan kegiatan.

a. Peningkatan wisatawan mancanegara

Peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan. Formulasi perhitungan yaitu jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun bersangkutan dikurangi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya dikali 100 %.

Lokasi wisata yang menjadi dasar perhitungan adalah :

- ✓ Cahaya Bumi Selamat (CBS)
- ✓ Wisata Religi Makam Datu Kalampayan
- ✓ Pulau Pinus I, Pulau Pinus II dan Riam Kanan
- ✓ Wisata kuliner Bincau
- ✓ Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam
- ✓ Pasar Terapung Lok Baintan
- ✓ Obyek Wisata Alam Sungai Kembang
- ✓ Wisata religi Makam Guru Sekumpul Martapura
- ✓ Objek wisata Water Boom Pesona Modern

Prosentase peningkatan wisatawan mancanegara mencapai - 6,37% (lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 5%). Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah wisatawan mancanegara tahun ini sebanyak 1367 orang dikurangi jumlah

wisatawan mancanegara tahun sebelumnya sebanyak 1460 orang = - 93 orang dibagi jumlah wisatawan mancanegara tahun sebelumnya dikalikan 100.

Dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 terjadi kenaikan capaian sebesar 5,52% (-11,89% - (-6,37%)).

Dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir periode Renstra, capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 telah mencapai -25,48%. Dengan demikian untuk mencapai target jangka menengah masih diperlukan pencapaian target sebesar 50,48%

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap pencapaian 2 Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Banjar dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome : Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata.

Indikator outcome	:	Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan
Target kinerja outcome	:	63,46 %
Realisasi kinerja outcome	:	63,46 %
Capaian	:	100%

Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan

- Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan output :
 - Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - Indikator output : jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan
 - Target Kinerja output : 15 unit
 - Realisasi kinerja output : 15 unit
 - Capaian : 100%

Gambar 3. 84. Pemasangan Baliho Promosi Wisata



- o Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi dengan output :
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
 - Indikator output : Jumlah sosialisasi sadar wisata yang dilaksanakan
 - Target Kinerja output : 13 kali
 - Realisasi kinerja output : 13 kali
 - Capaian : 100%

Gambar 3. 85. Sosialisasi Sadar Wisata Kepada Masyarakat



- Program Pengembangan kemitraan. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome : meningkatnya pengembangan destinasi wisata.
 - ✓ Indikator outcome : Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan
 - ✓ Target kinerja outcome : 63,46%
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 63,46%
 - ✓ Capaian : 100%
 Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database dan Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, dengan output :
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
 - Indikator output : Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir, Jumlah pelaku usaha pariwisata yangn dibina
 - Target Kinerja output : 192 orang bulan
 - Realisasi kinerja output : 192 orang bulan
 - Capaian : 100%

Gambar 3. 86. Pendataan Pariwisata di Kabupaten Banjar



- Program Pengembangan pemasaran pariwisata. Program tersebut dilaksanakan untuk mencapai outcome :
 - Meningkatnya pemasaran pariwisata,
 - ✓ Indikator outcome :Jumlah jenis pemasaran pariwisata yang dikembangkan
 - ✓ Target kinerja outcome : 2 jenis
 - ✓ Realisasi kinerja outcome : 2 jenis
 - ✓ Capaian : 100%Untuk mencapai target outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
 - Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, dengan output :
 - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - Indikator output : Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan
 - Target Kinerja output : 3 jenis
 - Realisasi kinerja output : 3 jenis
 - Capaian : 100%
 - Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri, dengan output :
 - Meningkatnya promosi wisata
 - Indikator output : Jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan
 - Target Kinerja output : 2 kali
 - Realisasi kinerja output : 4 kali
 - Capaian : 200%

Gambar 3. 87. Pameran Batam Investment, Tourism and Trade Expo 2017



Gambar 3. 88. Pameran Festival Budaya pasar Terapung



- Kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, dengan output : Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan ekonomi kreatif (kali)
 - Target Kinerja output : 2 kali
 - Realisasi kinerja output : 2 kali
 - Capaian : 100%

Permasalahan

- Belum semua destinasi wisata yang potensial memiliki infrastruktur yang memadai terutama jalan menuju ke lokasi wisata. Selain itu destinasi wisata potensial yang berada di lokasi tahura (terutama di Kecamatan Aranio) terkendala oleh ketentuan peruntukan lahan dan tata ruang.
- Akses wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan dan khususnya Kabupaten Banjar masih

terkendala status bandara Syamsudin Noor yang belum bertaraf internasional sehingga belum ada penerbangan langsung dari luar negeri (perlu transit dari bandara lain)

- pada tahun 2018 even pariwisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara sebagaimana tahun 2016 (Festival pasar terapung Lokbaintan) diselenggarakan pada bulan Desember 2018 setelah APBD perubahan disahkan sehingga minimnya waktu perencanaan dan promosi kegiatan.

Solusi

- Mengembangkan destinasi wisata berdasarkan skala prioritas dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok sadar wisata.
- Menyelenggarakan even wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara sesuai dengan daya tarik dan potensi lokal yang berbeda dengan daerah lain. Penyelenggaraan even pariwisata tersebut direncanakan secara lebih awal agar dapat diketahui dan diminati wisatawan lokal dan mancanegara.
- Meningkatkan promosi even pariwisata yang memiliki daya tarik besar bagi kedatangan wisatawan mancanegara seperti festival pasar terapung Lokbaintan dan Haul Guru Sekumpul, bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata (hotel, biro perjalanan wisata, dll).

3.2.25. Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Perencanaan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pemanfaatan ruang tanpa adanya pengendalian sesuai perencanaan akan berdampak negatif, antara lain kekacauan, kekumuhan, tidak tertatanya bangunan, tidak ada estetika dan kesemrawutan serta dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan upaya meningkatkan perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah

satu sasaran dalam RPJMD guna mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Capaian sasaran meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat berhasil dengan capaian sebesar 100 % dan masuk dalam klasifikasi capaian tinggi.

Formulasi perhitungan diperoleh dari luas lahan sesuai peruntukannya dibagi dengan luas lahan di Kabupaten Banjar dikali 100 %.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 68. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		91,11	167,47	92,12	92,12	100	147,38	99,36

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang maksudnya membandingkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032.

Formulasi perhitungan diperoleh dari luas lahan sesuai peruntukannya dibagi dengan luas lahan di Kabupaten Banjar dikali 100 %.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2018 adalah 100% % didapat dari realisasi sebesar 92,12 % dengan target yang ditetapkan sebesar 92,12 %. Realisasi perhitungan diperoleh dari :

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang :

$$= \frac{\text{Luas Lahan Sesuai Peruntukannya}}{\text{Luas Lahan Kabupaten Banjar}} \times 100\%$$

$$= \frac{430.062 \text{ Ha}}{466.850 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 92,12\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mengalami peningkatan sebesar 0,1 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 92.11 % menjadi 92,12 % pada tahun 2018.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 sebesar 147,39 % dari target 62.5% pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 160.21 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
Kegiatan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang.
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kegiatan berupa Pelatihan Penataan Ruang, Sosialisasi Tata Ruang, Masterplan RTH Kota Hijau Perkotaan Kab. Banjar, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 1, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 2, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 3, Evaluasi Pemanfaatan Ruang Zona 4, Perencanaan Kawasan untuk Permukiman, Identifikasi Kawasan Perencanaan, Review RDTR Kota Martapura, Operasional Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Banjar, Pembuatan Papan Informasi Penataan Ruang Zona 1, Pembuatan Papan Informasi Penataan Ruang Zona 2.
 - Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang.

- Program Pemanfaatan Ruang
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait pemberian Rekomendasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan realisasi kegiatan berupa Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Talk Show melalui Media, Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan ruang, Pelatihan Teknis Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang I- III, Penyusunan Inventaris Bangunan Komersil Kawasan I, - III, Pengawasan Bangunan Komersil Zona I, - VI.

Permasalahan

- Permasalahan secara khusus tidak ada yang berarti. Hanya saja karena peta digital/peta citra yang ada tidak up to date sehingga data sumber pengambilan kebijakan tata ruang dikhawatirkan tidak terlalu tepat dan harus survey ke lokasi secara lebih intensif.

Solusi

- Melakukan pengadaan peta digital/peta citra yang up to date dengan melakukan kerjasama ke instansi yang terkait. Setelah petanya up date, maka penyusunan perencanaan dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

3.2.26. Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas Dan Terintegrasi

Pentingnya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas pengembangan wilayah dan kelancaran/akses transportasi, kelancaran distribusi barang dan jasa dan aktivitas masyarakat lainnya yang pada akhirnya akan menunjang pada peningkatan/pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk itu meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi menjadi salah satu prioritas sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sasaran ini menunjang salah satu sasaran RPJMD pada misi IV yakni “Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan

infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah”. Indikator kinerja sasaran ini adalah :

- Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap
- Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten

Dimana dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut berhasil mencapai 100%. Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 69. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap		68.85 (537.98km)	100,23	70	71,97	102.81	72.83	98.82
2.	Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten		89.08 (261 unit)	100,80	90.32	98,73	109.31	94.43	104.55

a. Persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda empat dengan kecepatan normal dan aman. Formulasi perhitungan adalah Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi Panjang jalan seluruhnya dikali 100 %.

Capaian persentase Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2018 adalah 102.81 % didapat dari realisasi sebesar 71,97 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\frac{\text{(Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap)}}{\text{Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Keseluruhan}} = \frac{1.366,06\text{Km}}{1.898,08\text{Km}} = \text{X } 100\% = 71,97\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sebesar 3.12 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 68,85 % menjadi 71.97 % pada tahun 2018.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 98.82 % dari target 72,83 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 102.81 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memfokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Banjar. Pada tahun 2018 , kegiatan ini terdiri dari 3 Dokumen Perencanaan yakni Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Poros Desa Guntung Ujung – Makmur (Lanjutan) dan Pembangunan Jalan Poros Desa Jalur Utara Kecamatan Aluh-Aluh Batas kota Banjarmasin (Lanjutan), Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Manuju Mako Ditpolair Polda Kalsel, Feasibility Study Pembangunan Jalan Menuju Mako Ditpolair Polda Kalsel.
 - Kegiatan Pembangunan Jalan
Kegiatan ini meliputi kegiatan Pembebasan lahan akses menuju bandara, Pembangunan Jalan Poros Desa Guntung Ujung Makmur (Lanjutan), Pembangunan Jalan Poros Desa Jalur Utara Kecamatan Aluh-Aluh Batas Kota Banjarmasin (Lanjutan), Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Paket 1 : Pembangunan Jalan Poros Desa Guntung Ujung - Makmur (Lanjutan), Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Paket 1 : Pembangunan Jalan Poros Desa Jalur Utara Kecamatan Aluh-Aluh, Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Guntung Ujung – Makmur (Lanjutan) TA.2017.
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan terdiri dari Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 1 : Peningkatan Ruas Jalan Sei. Tabuk – Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk (R.051), Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 2,

- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 3, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 4, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 5, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Selat Makmur – Muara Halayung (R.69), Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 2 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Angsana (R.493) dan Sukaramai (R.406) dan Tatah Jaruju – Tatah Pemangkih (R.012), Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 3 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Veteran (R.437) dan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Keramat – Tungkaran (R.009), Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 4, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 5, dan Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 (TA. 2019)
- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan terdiri dari Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 1 : Peningkatan Ruas Jalan Sei. Tabuk – Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk (R.051), Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 2, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 3, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 4, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 5, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Selat Makmur – Muara Halayung (R.69), Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 2 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Angsana (R.493) dan Sukaramai (R.406) dan Tatah Jaruju – Tatah Pemangkih (R.012), Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 3 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Veteran (R.437) dan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Keramat – Tungkaran (R.009), Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 4, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 5, dan Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 1 (TA. 2019)
 - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan terdiri dari Operasional Unit Pemeliharaan Jalan, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Paket 1 : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan : Tungkap – Simpang Paku (R.082), Simpang Paku – Paku (R.085), dan Pematang Danau Selan (R.028), Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Paket 2 : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan : Sei. Sipai – Tungkaran (R.012), Martapura – Pingaran (R.013) dan Bincau – Karang Intan (R.017), Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan : Tungkap – Simpang Paku (R.082), Simpang Paku – Paku (R.085), Pematang Danau – Selan (R.028), Sei. Sipai –

- Tungkaran (R.012), Martapura – Pingaran (R.013), Bincau – Karang Intan (R.017), Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Selat Makmur – Muara Halayung (R.69), Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 2 : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Angsana (R.403) dan Suka Ramai (R.406) dan tatah Jaruju – Tatah Pemangkih (R.012), Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Selat Makmur – Muara Halayung (R.69), Angsana (R.403) dan Suka ramai (R.406), Tatah Jaruju – Tatah Pemangkih (R.012). Pemeliharaan prasarana transportasi dimaksudkan untuk mempertahankan agar umur rencana prasarana transportasi yang bersangkutan dapat tercapai, dengan menghindari penurunan kondisi yang drastis.
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan terdiri dari pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Veteran (R.437), Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan : Keramat – Tungkaran (R.009), dan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan : Veteran (R.437) dan Keramat – Tungkaran (R.009).
 - Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Kegiatan rehabilitasi jalan yang digunakan untuk cadangan dana tanggap darurat meliputi Cadangan Dana Tanggap Darurat : Penanganan Darurat Jalan Desa Balau Kecamatan Karang Intan, Penanganan Darurat Jalan Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar, Penanganan Darurat Pengaman Badan Jalan Pekauman Kecamatan Martapura Timur, dan Penanganan Darurat Jalan Desa Karya Makmur Menuju Desa Simpang Lima Kec. Cintapuri Darussalam, dan Penanganan Darurat Pengaman Badan Jalan Desa Layap Baru.
 - Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
Kegiatan ini merupakan Pemutakhiran Sistem Informasi/Data Base Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Banjar
 - Program Peningkatan Jalan dan Rekonstruksi Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Peningkatan Jalan
Kegiatan ini terdiri dari pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Sei. Tabuk – Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk (R.051) dan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

- o Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Reguler)
 - o Kegiatan ini terdiri dari pekerjaan Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Danau Salak – Pematang Danau (R.014)(Pelebaran), Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Keliling Benteng – Antasan Sutun (R.047)(Pelebaran), Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Martapura – Bincau)(R.016)(Pelebaran), Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Karang Intan – Sei. Alang (R.019)(Pelebaran), Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Keliling Benteng – Lok Buntar (R.092) (Pelebaran), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 1 : Danau Salak – Pematang Danau (R.014), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 2 : Keliling Benteng – Antasan Sutun (R.047), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 3 : Martapura – Bincau (R.016), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 4 : Karang Intan – Sei. Alang (R.019), Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Paket 5 : Keliling Benteng – Lok Buntar (R.092), dan Pengendalian Infrastruktur Jalan.

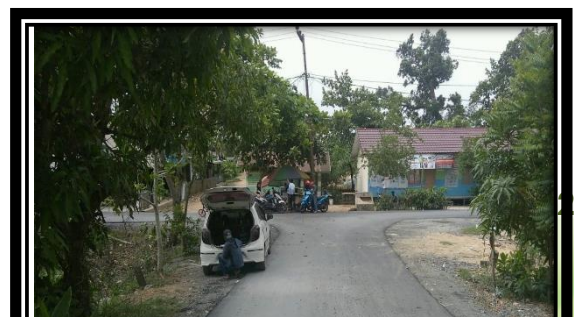


Sebelum



Sesudah

Gambar 3. 89. Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Danau Salak – Pematang Danau (R.014)



Sebelum

Sesudah

Gambar 3. 90. Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Keliling Benteng – Antasan Sutun (R.047)



Sebelum

Sesudah

Gambar 3. 91. Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan : Keliling Benteng – Lok Buntar (R.092)

- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Kegiatan ini berupa Perbaikan Jalan Desa Balimau Kec. Aluh-Aluh, Perbaikan Jalan Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Perbaikan Jalan Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan, Perbaikan Jalan Desa Pasar Lama Kec. Karang Intan, Perbaikan Jalan Desa Handil Kelua Kec. Gambut, Perbaikan Jalan Desa Dalam Pagar Kec. Martapura Timur, Perbaikan Jalan Desa Kitano Kec. Martapura Timur, Perbaikan Jalan Desa Takuti Kec. Mataraman, Perbaikan Jalan Padang Anyar Desa Tungkaran Kec. Martapura, Perbaikan Jalan Desa Paku Kec. Simpang Empat, Perbaikan Jalan Samping Kantor Kecamatan Kec.

Simpang Empat, Perbaikan Jalan Tambela Desa Aranio Kec. Aranio, Perbaikan Jalan Desa Benua Anyar Kec. Kertak Hanyar, Perbaikan Jalan Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat, Perbaikan Jalan Desa Pematang Hambawang menuju Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Perbaikan Jalan Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul, Perbaikan Jalan Dari Dusun Inpres Desa Paramasan Atas s/d Dusun Danau Huling Desa Paramasan Bawah (TMMMD), Perbaikan Jalan Desa Gunung Batu Kec. Sambung Makmur, Perbaikan Jalan Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Perbaikan Jalan Desa Rantau Nangka – Desa Sumber Harapan Kec. Sungai Pinang, Perbaikan Jalan Desa Telaga Baru Kec. Telaga Bauntung, Perbaikan Jalan Desa Kertak Empat menuju pasar Kec. Pengaron, Perbaikan Akses Jalan Menuju Kantor Camat Sungai Tabuk Kecamatan Sungai Tabuk (800 m), Perbaikan Jalan Desa Panyiuran menuju Desa Antaraku Kecamatan Pengaron (TMMMD), Perbaikan Jalan Desa Lobang Baru dan Jalan Kasturi Kecamatan Pengaron, Operasional Unit Pemeliharaan Jalan Desa, Sisa pembayaran Pekerjaan Perbaikan Jalan Desa Handil Parit Dua Sungai Kupang Kecamatan Gambut TA.2017.

Pengawasan Teknis Jalan Desa Paket 1, Pengawasan Teknis Jalan Desa Paket 2, Pengawasan Teknis Jalan Desa Paket 3, Pengawasan Teknis Jalan Desa Paket 4, Pengawasan Teknis Jalan Desa Paket 5

b. Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten

Definisi Operasional Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten adalah jumlah panjang jalan penghubung pusat dikurang pusat kegiatan dan pusat produksi dibagi panjang jalan penghubung pusat dikurang pusat kegiatan produksi dikalikan 100%.

Capaian Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten pada tahun 2018 adalah 100 % didapat dari realisasi sebesar 98,73 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90.32 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \Sigma \text{Panj. jalan penghubung pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi} \\
 & \quad \text{(akhir thn pencapaian SPM)} \\
 = & \frac{\Sigma \text{Panj. jalan penghubung pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi}}{\Sigma \text{Panj. jalan penghubung pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi}} \times 100\% \\
 & \quad \text{(target keseluruhan)} \\
 = & \frac{1.873,97 \text{ Km}}{1.898,08 \text{ Km}} \times 100\% = 98,73\%.
 \end{aligned}$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik belum mengalami peningkatan yaitu sebesar 89.08 % berubah menjadi 98,73 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 104.55 % dari target 94.43 % pada tahun 2021

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100,80 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memfokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan di Kabupaten Banjar yakni sebanyak 2 Paket meliputi Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 1 : Penyelidikan tanah Jembatan Salam Desa Barau Bawah Seberang – Pasar Panas dan Jembatan Kuin Kecil Batas Kota Banjarmasin, Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 : Jembatan Kuin Kecil Batas Kota Banjarmasin.
 - Kegiatan Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan dan pengawasan pembangunan jembatan yang terdiri dari Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tajau Landung – Antasan Sutun (30 M), Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 1 : Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tajau Landung – Antasan Sutun (30 M).
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Terdiri dari kegiatan Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jembatan : Jembatan Salim Desa Baru Bawah Seberang – Pasar Panas, dan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen.
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Terdiri dari pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Sungai Jati Kecamatan Mataraman, Pengaman Oprit Jembatan Murung Kenanga Kecamatan Martapura, Rehabilitasi Jembatan Ulin

Menjadi Permanen Jembatan Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Tambak Padi RT.03 Kec. Beruntung Baru, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Lok Tamu RT.03 (No.3) Kecamatan Mataraman, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Kuin Kecil Rt.05 Kecamatan Aluh-Aluh, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Aluh-Aluh Besar Rt.01 Kecamatan Aluh-Aluh, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Simpang Warga Rt.02 Kecamatan Aluh-Aluh, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Lok Tamu Rt.03 (No.1) Kecamatan Mataraman, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Kuin Kecil Rt.04 Kecamatan Aluh-Aluh, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Batas Desa Pengaron – Desa Lobang Baru Kec. Pengaron, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Gudang Hirang Rt.08 (No.4) Kec. Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Gunung Ulin Kecamatan Mataraman, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Gudang Hirang Rt.08 (No.3) Kec. Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Gudang Hirang Rt.08 (No.2) Kec. Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Pembantanan Rt.10 (No.5) Kec. Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Gudang Hirang Rt.08 (No.1) Kec. Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Tandipah Rt.02 Kecamatan Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Panyiuran Rt.02 Kecamatan Pengaron, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Pembantanan Rt.10 (No.6) Kec. Sungai Tabuk, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Aluh-Aluh Besar Rt.3 Aluh-Aluh, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Simpang Warga Rt.3 Kec. Aluh-Aluh, Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Jembatan Desa Banua Anyar Ds Kecamatan Astambul, Pengawasan Teknis Jembatan Sungai

Jati Kecamatan Mataraman, Perencanaan Teknis Pengaman Oprit Jembatan Murung Kenanga Kecamatan Martapura, Pengawasan Pengaman Oprit Jembatan Murung Kenanga Kecamatan Martapura, Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Paket 1, Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ulin Menjadi Permanen Paket 2, dan Operasional Unit Pemeliharaan Jembatan.



Gambar 3. 92. Rekonstruksi Jembatan Sungai Jati Kecamatan Mataraman

- Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, yang meliputi kegiatan:
 - Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Kegiatan rehabilitasi jembatan yang digunakan untuk cadangan dana tanggap darurat meliputi Cadangan Dana Tanggap Darurat : Penanganan Darurat Jembatan Desa Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh, Penanganan Darurat Jembatan Desa Simpang Warga Rt.3 Kecamatan Aluh-Aluh, Penanganan Darurat Jembatan Desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul, dan Penanganan Darurat Jembatan Desa Abirau Kec. Karang Intan.
- Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
 - Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
Kegiatan ini merupakan Pemutakhiran Sistem Informasi/ Data Base Jembatan di Kabupaten Banjar.

Permasalahan

- Capaian indikator 'Panjang Jalan yang Dibangun' sesuai target tetapi penyelesaian paket pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa Jalur Utara Kecamatan Aluh-aluh Batas Kota Banjarmasin (Lanjutan) agak terlambat karena terdapat kesulitan dalam mendistribusikan material pekerjaan ke lokasi pekerjaan terkait kendala bentang alam. Selain itu juga disebabkan karena pekerjaan timbunan baru yang sulit dilakukan ketika musim hujan sehingga penyelesaian keseluruhan pekerjaan agak terlambat. Oleh karena itu ketika akan berakhir masa kontraknya maka penyedia meminta perpanjangan masa kontrak selama 50 hari kalender sehingga dapat menyelesaikan target pekerjaan sesuai kontrak.

Solusi

1. Harus lebih selektif dalam memilih penyedia atau kontraktor yang melaksanakan pekerjaan. Apabila terpilih penyedia atau kontraktor yang terkesan memperlambat pelaksanaan, harus dilakukan pendampingan secara lebih intensif.
2. Apabila ada paket pekerjaan yang lokasinya berada di daerah yang bentang alamnya sulit ditempuh, maka agar pelaksanaan pekerjaannya dilakukan lebih awal sehingga masa pelaksanaan kontrak bisa lebih lama.

3.2.27. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika

Persentase pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pengujian terhadap kelayakan angkutan umum sesuai dengan standar. Formulasi perhitungan adalah jumlah angkutan umum yang diuji dibagi jumlah seluruh angkutan umum dikali 100 %.

Pada tahun 2018 target pengujian kendaraan bermotor sebesar 85 % (6800) dan telah realisasi sebesar 93,70 % (6372 unit). Realisasi telah mencapai sasaran yang ingin dicapai. Capaian kinerja pada tahun 2018 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Capaian keberhasilan kinerja diperoleh atas dukungan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan SDM penguji kendaraan bermotor.

Capaian persentase pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2018 adalah 110,24 % didapat dari realisasi sebesar 93,70 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 85 %. Realisasi perhitungan diperoleh dari :

$$\frac{6372 \text{ unit}}{6800 \text{ unit}} \times 100\% = 93,70\%$$

Dibandingkan tahun 2017 persentase pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 32.76 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 77.48 % menjadi 110,24 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 93.70 % dari target 100 % pada tahun 2020

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 110,24 % berarti masuk dalam capaian kategori tinggi . Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dengan Indikator kinerja jumlah kendaraan bermotor yang diuji. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 jumlah pengujian kendaraan bermotor tahun 2018 mengalami kenaikan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah 6800 unit kendaraan bermotor yang diuji sedangkan capaiannya sebesar 6372 sehingga capaian realisasi sebesar 93,70 persen. Target pada Tahun 2018 dapat dicapai.
UPT PKB berhasil mencapai target diantaranya disebabkan karena :
 1. kebijakan numpang uji, sehingga setiap kendaraan wajib uji boleh melakukan pengujian di setiap daerah di Kalimantan Selatan
 2. Beberapa UPT PKB di Kalimantan Selatan dilarang melakukan pengujian karena belum memenuhi standar pengujian sehingga beralih ke UPT PKB yang masih melakukan pengujian.
 3. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten Banjar semakin lengkap.
 - Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Kinerja Jumlah unit alat pengujian kendaraan bermotor Alat pengujian yang telah tersedia sampai tahun 2018 adalah sebanyak 10 unit, yaitu:
 - Alat Uji kebisingan suara Klakson
 - Alat uji head light tester

- Alat uji Timbangan mobil
- Emisi gas buang untuk bahan bakar bensin
- Emisi gas buang untuk bahan bakar solar
- Alat uji rem
- Kedalaman alur ban
- Alat uji kaca
- Side Slip Tester
- Alat Uji Emisi Gas Buang CO/HC

Ketersediaan alat pengujian ini memenuhi target yang ingin dicapai yaitu sebanyak 10 jenis.

Permasalahan

- Kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraannya.
- Belum tersedianya bengkel yang sesuai dengan standar yang berlaku

Solusi

- Melengkapi peralatan pengujian kendaraan bermotor secara bertahap
- Melakukan pembinaan terhadap bengkel sehingga memenuhi standar yang berlaku.

3.2.28. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan

Infrastruktur perhubungan meliputi transportasi darat dan sungai sangat berperan dalam mendukung kelancaran/keberhasilan pembangunan.

Sasaran meningkatnya infrastruktur perhubungan menjadi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya infrastruktur perhubungan cukup berhasil, capaian sasaran diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik 2) Persentase pengujian kendaraan bermotor dimana 2 (dua) indikator tersebut berhasil mencapai 100%.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 70. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2018

No		Tahun 2017	Tahun 2018		
----	--	------------	------------	--	--

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
1.	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik		100	100	100	100	100	100	100
2.	Cakupan Layanan internet dan telepon seluler		80.34	113.15	76,54%	92	120,20	100	92

a. Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik

Berfungsinya terminal dan dermaga yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar. Berfungsi dengan baik dimaksudkan yaitu terminal dan dermaga dapat dimanfaatkan untuk memuat dan menurunkan orang dan barang serta sebagai tempat istirahat. Formulasi perhitungan Jumlah terminal dan dermaga yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh terminal dan dermaga dikali 100 %

Capaian persentase terminal dan dermaga pada tahun 2018 adalah 100 % didapat dari realisasi sebesar 100 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\frac{2 \text{ terminal} + 11 \text{ dermaga}}{13 \text{ buah}} \times 100\% = 100\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik mengalami peningkatan sebesar 100 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 100 % menjadi 100 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2017 sudah mencapai 100 % dari target 100 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perhubungan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai

dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Realisasi kegiatan pada tahun 2018 berupa kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi terminal yang ada serta dilakukan pemeliharaan terminal Martapura yang berlokasi di Jalan A. Yani Pasar Martapura berupa Pengecatan, pembuatan taman/pemeliharaan taman, pembuatan nama terminal dan pemasangan pagar ramah lingkungan/taman. Terminal yang ada di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ada 2 yaitu :
 - Terminal Martapura
 - Sub Terminal Kelampayan
 Keduanya masih berfungsi dengan baik dan melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan fungsinya. Kondisi terminal yang ada masih perlu perbaikan/peningkatan fasilitas. Terminal Martapura adalah tempat menaik turunkan penumpang angkutan pedesaan yang terdiri dari 14 trayek dalam wilayah Kabupaten Banjar dan beroperasi dari jam 06.00 pagi sampai 06.00 sore.
Terminal Martapura masih perlu penataan dan perbaikan karena didalam lokasi terminal terdapat warung yang cukup menyita tempat sehingga mengurangi ruang terminal dan perlu peningkatan fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Terminal Martapura dilengkapi dengan fasilitas yang memadai diantaranya tempat istirahat sopir, tempat pemungutan retribusi, tempat antrian mobil yang disertai papan nama jurusan/trayek, lahan parkir untuk angkutan pedesaan dan fasilitas WC/Toilet.
 - Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Realisasi kegiatan pada tahun 2018 berupa kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi dermaga yang ada. Dermaga yang ada berjumlah 11 (sebelas) buah, yaitu :

Tabel 3. 71. Realisasi Kegiatan Pengawasan Dan Pemantauan Terhadap Kondisi Dermaga Tahun 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Nama Dermaga	Alamat
1	Kelampayan	
2	Sei Tabuk	Ds. Sei Tabuk Kota RT.2
3	Sei Tabuk Lama/Keramat	Jl. Gerilya RT.1 Sei. Tabuk Keramat
4	Dermaga Pasar Aluh-Aluh Besar	Jl. Inpres Kec. Aluh-Aluh
5	Dermaga Simpang Warga Aluh-Aluh	Ds.Simpang Warga, Aluh-Aluh
6	Dermaga Kantor Camat Aluh-Aluh	Jl. Inpres Kec. Aluh-Aluh
7	Dermaga Astambul	Pasar Kec. Astambul
8	Dermaga Keliling Benteng	Ds. Kell Benteng Ulu Rt.4 RW 3
9	Dermaga Riam Kanan	Kec. Aranio
10	Dermaga Belangian	Ds. Belangian, Kec. Aranio
11	Dermaga di Lok Baintan	Lok Baintan (bawah jembatan sungai Pinang)

Dermaga tersebut masih berfungsi baik dan digunakan masyarakat sekitar untuk bongkar muat barang. Tetapi masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi untuk kenyamanan dan semakin lancarannya operasional dermaga. di Dermaga yang ada di kabupaten Banjar adalah berupa tempat tambat kapal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang. Dermaga yang ada melayani perahu motor dengan tonase kurang dari 7 GT atau perahu kecil tidak bermotor dalam wilayah perairan sungai tidak dalam trayek di Kabupaten Banjar. Dermaga yang ada belum dilengkapi fasilitas yang memadai seperti tempat tunggu penumpang maupun fasilitas WC/Toilet sehingga masih perlu peningkatan fasilitas.

Pada tahun 2018 dilakukan pemeliharaan dermaga beserta kelengkapannya yaitu pada dermaga pasar Sei Tabuk dan Dermaga Lok Baintan Sei Tabuk. Dan untuk menunjang kelancaran transportasi dilakukan pemeliharaan alur LLASD di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.



Gambar 3. 93. Tambat Kapal Kec. Aranio Desa Tiwingan Lama



Gambar 3. 94. Tambat Kapal Kecamatan Sungai Tabuk



Gambar 3. 95. Tambat Kapal Depan Kantor Camat Aluh-Aluh



Gambar 3. 96. Tangga pada Tambat Kapal Depan Kantor Camat Aluh-Aluh



Gambar 3. 97. Tambat Kapal Kecamatan Astambul



**Gambar 3. 98. Tambat Kapal Kecamatan Martapura Barat Desa
Keliling Benteng Ulu**

Permasalahan

Permasalahan dalam mencapai sasaran adalah kondisi dermaga yang masih sangat sederhana hanya berupa tempat tambat kapal yang sederhana dan belum dilengkapi fasilitas yang menunjang seperti tempat tunggu penumpang, gudang serta kurangnya SDM untuk pengembangan terminal dan dermaga. Di setiap dermaga juga tidak terdapat petugas jaga.

Solusi

- Melengkapi fasilitas dermaga
- Pemeliharaan rutin fasilitas terminal
- Meningkatkan wawasan tentang pengembangan dan pengelolaan terminal dan dermaga

b. Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler

Pembangunan infrastruktur non fisik sangat dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan komunikasi dan informatika khususnya internet dan telepon seluler.

Memasuki era digitalisasi saat ini, infrastruktur komunikasi dan informatika sangat diperlukan, mengingat juga kondisi geografis Kabupaten Banjar yang cukup luas dan beberapa wilayah yang cukup sulit ditempuh baik lewat darat maupun sungai.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan upaya meningkatkan cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika agar dapat diakses oleh seluruh kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Banjar guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Capaian sasaran meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Cakupan layanan internet dan telepon seluler dengan capaian 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 72. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Cakupan Layanan internet dan telepon seluler		80.34	113.15	76,54%	92	120,20	100	92

Tersedianya akses internet dan telepon di seluruh desa dan kelurahan. Formulasi perhitungan adalah jumlah desa dan kelurahan yang dapat mengakses internet dan telepon seluler dibagi jumlah seluruh desa dan kelurahan dikali 100 %.

Capaian layanan internet pada tahun 2018 adalah 120,20 % didapat dari realisasi sebesar 92 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 76,54%. Realisasi diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{276 \text{ desa/kelurahan}}{300 \text{ desa/kelurahan}} \times 100\% = 92\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 cakupan layanan internet dan telepon seluler mengalami peningkatan sebesar 11,66 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 80,34 % menjadi 92 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 92(%) dari target 100 % pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 92 % berarti masuk dalam capaian kategori tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta peran swasta yang bergerak dalam komunikasi dan informatika dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam urusan Komunikasi dan Informatika dalam menyajikan data terkini mengenai data dasar jasa layanan Pos dan Telekomunikasi dilaksanakan pelaporan analisa kajian Tranding Topik media sebanyak 4 dokumen.

Permasalahan

- Bentang geografis Kabupaten Banjar yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya menghambat pemerataan penyebaran informasi.

- Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blankspot teknologi informasi komunikasi (TIK)

Solusi

- Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date
- Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa Media Center

3.2.29. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Permukiman Dan Perumahan Yang Layak

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan PSU sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni.

Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman tergambar kemiskinan masyarakat.

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan layak huni merupakan salah satu sasaran yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan tempat tinggal, mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Capaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu cakupan rumah layak huni.

Pada tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak menunjukkan hasil yang positif dengan capaian sebesar 92.96 % dan diklasifikasikan dalam kategori sangat tinggi.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 73. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan yang layak Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Tahun 2017		Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Cakupan rumah layak huni	1.750.000 unit	98,60	102,16	97.06	92,96	95.78	97.87	94,99

a. Cakupan rumah layak huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar Kementerian PUPR yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Formulasi perhitungan adalah jumlah rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah dikali 100 %.

Capaian cakupan rumah layak huni pada tahun 2018 adalah 95.78 % didapat dari realisasi sebesar 92,96 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 97.06 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Cakupan ketersediaan rumah layak huni} &= \frac{\sum \text{Rumah layak huni}}{\sum \text{Rumah}} \times 100\% \\ &= \frac{142.070 \text{ unit}}{152.822 \text{ unit}} \times 100\% = 92,96\% \end{aligned}$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 cakupan rumah layak huni mengalami penurunan sebesar 6.38 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 102.16 % menjadi 95.78 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 sebesar 97.87 % sudah melampaui dari target 94,99 % pada tahun 2020.

Pada RPJMN 2015-2019 , Target pembangunan rumah swadaya (rumah layak huni) sampai dengan akhir RPJMN (2019) sebesar 1.750.000 unit, realisasi pada tahun 2017 sebesar 112.732 unit . Total rumah swadaya tingkat nasional dari tahun 2015 s/d 2017 sebesar 292.865 unit.

Pada tahun 2018 capaian realisasi melebihi target yang ditentukan. Dengan segala keterbatasan pendanaan yang ada serta penyesuaian SOTK Dinas Perumahan dan Permukiman yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten banjar maka cakupan penanganan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU tidak hanya meliputi pada penanganan kompleks perumahan namun juga pada penanganan kawasan permukiman. Oleh karena itu di tahun 2018 terdapat penambahan lokasi penanganan prioritas dari 40 Kelurahan yang difokuskan untuk dilakukan penindaklanjutan bantuan penanganan PSU menjadi 41 kelurahan (Kelurahan Pesayangan).

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 95.78% berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program Pengembangan Perumahan
 - Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Pada kegiatan ini, Dinas Perumahan dan Permukiman selaku SKPD Teknis melakukan dana sharing terhadap bantuan dari dana APBN dalam hal ini yaitu Bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebanyak 908 unit yang tersebar di Desa Balau, Desa Bi'ih, Desa Handil Bujur, Karang Intan, Desa Lihung, Desa Mandiangin Timur, Desa Pasar Lama dan Desa Pemurus. Adapun di tahun 2018, Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan penanganan penurunan angka backlog rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan kegiatan peningkatan kualitas huni. Program tersebut dinamakan Bedah Rumah Barokah dengan sumber pendanaan berasal dari dana APBD. Petunjuk teknis penanganan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (Program Bedah Rumah Barokha) untuk tahun 2018 dilakukan sebanyak 15 unit yang tersebar di Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan data Rumah Tidak Layak Huni yang dihasilkan dari overlay data RTLH dari sumber BDT (Basis Data Terpadu) / TNP2K, data RTLH dari indentifikasi KOTAKU serta data RTLH survey investigasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar sebanyak 9.225 unit rumah. Data penambahan RTLH tersebut menjadi bank data bagi unit SKPD teknis dalam penanganan rumah layak huni pada periode selanjutnya.

Untuk mendukung kegiatan Bantuan stimulan perumahan swadaya diperlukan anggaran untuk tim Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan tim Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Beberapa program yang mendapatkan bantuan dana APBN dari pemerintah pusat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Output : Terbayarnya honor tim fasilitasi dan tim verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Jumlah rumah yang mendapatkan fasilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 908 unit.

Jumlah rumah yang mendapatkan Bantuan Bedah Rumah Barokah sebanyak 15 unit.
 Outcome : Terlaksananya kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mendapatkan bantuan bedah rumah.

Gambar 3. 99. Realisasi Pekerjaan BSPS dengan Progress 0 %, 30 % dan 100 % Ta. 2018 di Kabupaten Banjar



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan (DAK) Sesuai dengan Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan pemerintah konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Perintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi dasar otonomi daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi Bidang Penyediaan Perumahan, dan Bidang Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Presiden no 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.701.679.000,-. Dimana pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan no 21 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dengan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Swadaya. Pada tahun 2018 ini Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan tidak bisa

berjalan dikarenakan penganggaran pada Daerah tidak sesuai dengan Juknis DAK pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 362 unit tidak dapat terlaksana di tahun 2018.

Output : Jumlah rumah layak huni yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 362 unit yang tersebar di Kecamatan Martapura namun tidak bisa terlaksana di tahun 2018

Outcome : Meningkatnya persentase cakupan rumah layak huni dengan target sebesar 92,69 %

Permasalahan

- Keterbatasan pembiayaan yang bersumber pada pendanaan APBD membuat beberapa kegiatan hanya memprioritaskan kegiatan yang sangat strategis untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. Oleh karena itu beberapa kegiatan lebih memprioritaskan pengawasan dan pendataan untuk kebutuhan data primer di tahun 2019.
- Untuk kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, serapan keuangan dan fisik kegiatan masih sekitar <50 % dikarenakan pada periode triwulan ke III ada penyesuaian kode rekening dari Belanja Hibah menjadi Belanja Sosial di APBD Perubahan yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 2018. Oleh karena itu proses lelang baru dilaksanakan pada minggu pertama di Bulan November 2018.
- Sebagai dampak dari tidak terlaksananya kegiatan Pembangunan prasarana sarana dan utilitas perumahan (DAK Reguler) di periode tahun 2018, hal ini berdampak pada tidak terbayarkannya honor Tenaga Fasilitator Lapangan yang telah melakukan identifikasi Calon Penerima Bantuan sehingga perlu dianggarkan melalui dana APBD mengingat progress yang telah dilaksanakan dari Tim Tenaga Fasilitator Lapangan telah berjalan selama 7 bulan. Menindaklanjuti permasalahan ini maka dilakukan penganggaran di APBD Perubahan 2018.
- Adanya perbedaan persepsi terhadap regulasi antara SKPD teknis dan badan pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan (DAK Reguler) di Kawasan kumuh perkotaan dengan sumber pendanaan APBN tahun 2018. Hal ini mengakibatkan, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan dikarenakan melewati batas waktu pencairan tahap I.

- Kegiatan Pengawasan dan pengendalian perumahan di tahun 2018 hanya dapat dilaksanakan pada beberapa perumahan karena tidak semua perumahan yang dusah disahkan dokumen teknisnya telah selesai proses perizinan untuk mendirikan bangunan.
- Minimnya tenaga teknisi di lapangan sehingga dalam penanganan pemeliharaan ketenagalistrikan belum optimal selain itu peralatan perlengkapan kerja yang masih minim membuat tingginya resiko kecelakaan dalam pekerjaan.
- Keterbatasan sarana masih menjadi permasalahan yang utama dalam kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, saat ini sarana yang tersedia berupa 1 sarana double cabin untuk mendukung kegiatan saat ini sedangkan cakupan layanan pemeliharaan sekitar 5 rayon yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar

Solusi

- Melakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan rumah layak huni. Selain itu perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan anggaran khususnya untuk bantuan hibah masyarakat agar pada saat perencanaan kegiatan dapat diprioritaskan bantuan sosial berupa uang.
- Segera mempercepat proses pengadaan pelelangan untuk beberapa kegiatan yang terkendala oleh penyesuaian anggaran di APBD Perubahan 2018
- Terkait dengan pelaksanaan DAK Reguler kegiatan Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan pada tahun 2018, pihak SKPD teknis melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PUPR terkait hambatan dan kendala yang terjadi. Hasil tanggapan dari Kementerian PUPR menyatakan bahwa SKPD Teknis selaku pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dapat melaksanakan dengan pola belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang ke rekening masyarakat untuk dibelanjakan bahan bangunan. Berdasarkan justifikasi kelangkaan barang untuk lokasi calon penerima bantuan tidak terpenuhi. Untuk pelaksanaan DAK Bidang Perumahan di tahun selanjutnya, diharapkan badan pengelola keuangan agar dapat mengakomodir hasil tanggapan dari Kementerian PUPR.
- Terbentuknya Peraturan Bupati terkait dengan adanya bantuan penanganan rumah layak huni dengan sumber pendanaan

APBD Kabupaten sebagai dasar kegiatan penanganan rumah tidak layak huni yang disahkan pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagai dasar penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banjar untuk mendukung Program Bantuan Rumah Barokah 2018

- Menjalin kerjasama serta koordinasi yang baik antara Masyarakat calon penerima manfaat dan penerima manfaat dengan pemerintah daerah dan tenaga fasilitator lapangan dalam rangka mendukung kelancaran program/kegiatan penanganan rumah tidak layak huni.
- Melakukan perencanaan dalam penganggaran program/kegiatan yang agar kegiatan konstruksi tidak terhambat
- Perlunya melakukan identifikasi prioritas lokasi yang harus segera ditangani dengan menggunakan meterisasi.
- Perlu adanya dukungan dana dari pemerintah daerah dan pusat untuk mendukung kegiatan pemeliharaan agar tercipta pola pengelolaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD)
- Perlu melakukan identifikasi kebutuhan tenaga teknis yang handal agar dapat mendukung kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum

3.2.30. Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal

Berdasarkan RPJMN periode 2015 - 2019, Pemerintah menargetkan cakupan akses air minum pada tahun 2019 mencapai 100%. Sejalan dengan hal itu Pemerintah daerah turut mendukung pencapaiannya dengan melakukan upaya meningkatkan pengelolaan air minum secara optimal. Keberhasilan pencapaian sasaran perlu dukungan dari badan usaha, masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan air minum diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu cakupan air minum.

Pada tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal menunjukkan hasil yang positif dengan capaian 112.3% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian dari indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 74. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Air Minum Secara Optimal Kabupaten Banjar Tahun 2018

No		Tahun 2017	Tahun 2018		
----	--	------------	------------	--	--

	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
1.	Cakupan air minum		67,19	110,09	65.18	73,20	112.3	74.34	98.47

a. Cakupan air minum

Cakupan air minum jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan air minum. Formulasi perhitungan adalah jumlah penduduk yang terlayani air minum dibagi jumlah penduduk dikali 100 %.

Capaian cakupan air minum pada tahun 2018 adalah 112.3 % didapat dari realisasi sebesar 73,20 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 65.18 %. Realisasi diperoleh dari perhitungan

$$\frac{430.464 \text{ jiwa}}{588.066 \text{ jiwa (proyeksi BPS Tahun 2019)}} \times 100\% = 73,20\%$$

Dibandingkan dengan tahun 2017 cakupan air minum mengalami peningkatan sebesar 6,1 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 67,19 % menjadi 73,20 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 98.47 % dari target 74.34 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 112.3 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Adapun realisasi kegiatan berupa Survey Investigasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR TA.2019, Inventarisasi Jaringan Pelayanan Air Minum Kab. Banjar, Perencanaan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR

DAK Ta.2018, Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan, Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Jl. Handil Kabuau Desa Makmur Kec. Gambut, Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Jl. Tatah Cina Desa Mekar Raya Kec. Gambut, Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Jl. Handil 3 Desa Manarap Baru Kec. Kertak Hanyar, Penyusunan Database Air Minum, Review RAD, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I Desa Rantau Bujur Kec. Aranio dan Desa Lok Cantung Kec. Simpang Empat, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I Desa Kelampaian Ilir dan Desa Lok Gabang Kec. Astambul, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I Desa Keliling Benteng Tengah dan Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I Desa Alimukim dan Desa Kertak Empat Kec. Pengaron, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I Desa Cintapuri dan Desa Sungkai Baru Kec. Simpang Empat, Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Simpang Lima Kec. Simpang Empat, Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Antaraku Kec. Pengaron, Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Apuai Kec. Aranio, Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Dalam Pagar Kec. Martapura Timur, Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Munggu Raya Kec. Astambul, Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Sungai Langsung Kec. Simpang Empat, Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I, Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR Wilayah I TA.2018, Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah I, Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR Wilayah I TA.2018.



Gambar 3. 100. Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Simpang Empat



Gambar 3. 101. Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Pengaron

- o Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Realisasi kegiatan berupa DED SPAM IKK, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah II Desa Tambak Padi dan Desa Handil Purai Kec.Beruntung Baru, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah II Desa Abirau dan Desa Balau Kec.Karang Intan, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah II Desa Padang Panjang dan Desa Mandiangin Timur Kec.Karang Intan, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah II Desa Mandikapau Barat dan Desa Mandikapau Timur Kec.Karang Intan, Pengad./Pemas.Pipa Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Pengad./Pemas.Pipa Desa Manarap Baru Kec.Kertak Hanyar, Pengad./Pemas.Pipa Desa Karang Intan Kec.Karang Intan, Pengad./Pemas.Pipa Handil Kalua Desa Banyu Hirang Kec.Gambut, Pengad./Pemas.Pipa Desa Layap Baru Kec. Tatah Makmur, Pengad./Pemas.Pipa Desa Bangkal Tengah Kec. Tatah Makmur, Pengembangan Jaringan SPAM Desa Pingaran Ulu Kec. Astambul, Pengad./Pemas.Pipa Kec.Martapura, Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah II, Perencanaan Teknis Bangunan Pembawa Air Bersih TA.2018, Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Wilayah II, Pengawasan Teknis Bangunan Pembawa Air Bersih TA.2018, Pengawasan Teknis Bangunan Pembawa Air Bersih Kec. Martapura.
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- o Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan)

Realisasi kegiatan berupa Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Simpang Empat, Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Pengaron, Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Sambung Makmur, Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Manarap Baru, Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Mataraman, Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kertak Hanyar, Pengembangan Jaringan Perpipaan Handil Kabua Kelurahan Gambut, Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Astambul, Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan, Peningkatan SPAM Desa Paku Kecamatan Simpang Empat, Peningkatan SPAM Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA 2018, Pengawasan Teknis Jaringan Perpipaan Kawasan Manarap Baru, Pengawasan Teknis Jaringan Perpipaan Kawasan Kertak Hanyar, Pengawasan Teknis Jaringan Perpipaan Handil Kabua Kelurahan Gambut, Pengawasan Teknis SPAM Perdesaan.



Gambar 3. 102. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Berbasis Masyarakat Desa Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan



Gambar 3. 103. Peningkatan SPAM Desa Paku Kecamatan Simpang Empat



Gambar 3. 104. Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan



Gambar 3. 105. Pengembangan Jaringan Perpipaan Handil Kabua Kelurahan Gambut

Permasalahan

Capaian indikator 'Jumlah Sarana Air Bersih yang Dibangun' sudah memenuhi target capaian. Meskipun demikian, terdapat 4 paket pekerjaan yang tidak optimal dilaksanakan yakni Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan Desa Dalam Pagar Kec. Martapura Timur, Peningkatan SPAM Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis Martapura Barat. Selain itu juga ada 1 Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis lainnya yang belum optimal dilaksanakan yakni baru mencapai 93,27%. Paket pekerjaan ini tidak dilanjutkan karena kondisi lapangan yang tidak stabil. Meskipun ada 2 paket pekerjaan yakni pembangunan sarana air bersih atau peningkatan SPAM terkendala, tetapi secara output tetap dapat melebihi target karena ditunjang oleh kegiatan PAMSIMAS. Begitu pun untuk 2 paket lainnya, meskipun ada 2 paket yang terkendala tetapi secara output sudah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

Solusi

Perencanaan kegiatan harus lebih peka terhadap kemungkinan perubahan kebutuhan dan pemilihan penyedia dilakukan dengan lebih selektif supaya kegiatan yang dilaksanakan bisa lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Apabila terpilih penyedia atau kontraktor yang terkesan memperlambat pelaksanaan, harus dilakukan pendampingan secara lebih intensif.

Untuk pelaksanaan pekerjaan yang mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi mestinya dilaksanakan mulai awal tahun atau pelaksanaannya dilakukan lebih awal.

3.2.31. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal

Sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan handal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan

perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dan handal dengan meningkatkan manajemen sumber daya aparatur. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang professional dan handal menunjukkan hasil cukup berhasil. Capaian sasaran diukur dengan 6 (enam) buah indikator yaitu ; Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD, Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin, Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi, Persentase kasus hukum PNS yang ditangani, Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan, Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3. 75. Rencana dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dan Handal Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realisasi)		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD	65,57%	65,57%	100%	71.83%	71.83%	100%	71.83%
2.	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0,13%	91,67%	0,10%	0,16%	40%	0,08%	0%
3.	Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	47,99%	47,99%	100%	94.3%	94.3%	100%	94.3%
4.	Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	100,00 %	100,00%	100%	0%	0%	0,1%	0,08

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realisasi)		
1	2		3	4	5	6	7	8
5.	Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan	30,28%	30,28%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	42,24%	100,00%	71,12% %	56,68%	79,70%	100%	56,68%

a. Persentase Rata - Rata Nilai Prestasi Kerja SKPD

Penilaian Prestasi Kerja SKPD adalah dengan melakukan penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu dengan membagikan kuesioner yang berisi data isian/kuisisioner sebagaimana telah dijabarkan dalam lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Realisasi kinerja persentase rata-rata nilai prestasi kerja SKPD Tahun 2018 adalah 71,83%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 100% maka didapatkan capaian sebesar 71,83. Capaian tersebut masuk dalam kategori sedang. Bila membandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2017, maka didapat peningkatan sebesar 6,16%. Realisasi kinerja pada tahun 2017 telah memberikan sumbangan capaian terhadap target RPJMD akhir tahun sebesar 71,83%.

Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan membagikan kuisisioner yang berisi data isian/kuisisioner. Dengan Jumlah Nilai dari 54 SKPD yang telah di bagikan kuisisioner Dinas = 2.387 dan Kecamatan 1.492 dengan Total = 3.879. Formulasi perhitungannya

adalah penjumlahan dari nilai rata-rata prestasi kerja dari setiap SKPD dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di Kab. Banjar.

$$\frac{3.879}{54 \text{ SKPD}} \times 100\% = 71.83\%$$

1. Proesedur Penilaian.

- a. Formulir penilaian disebarakan kemudian diisi oleh masing masing SKPD.
- b. Formulir kemudian dikumpulkan kepada Tim Sekretariat di BKDPSDM Kab. Banjar.
- c. Selanjutnya hasil penilaian diserahkan kepada SKPD yang ada kaitannya dengan tugas dan wewenangnya untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian SKPD.
- d. Hasil verifikasi kemudian dilakukan rekapitulasi dan klasifikasi.

2. Hasil penilaian

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu Januari sd Juni tahun 2018

- a. Pada perangkat daerah Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan/RSUD Ratu Zalecha Martapura berjumlah 34 SDPD dengan hasil :

- 1) Peringkat A : 0 SKPD (0%)
- 2) Peringkat B : 3 SKPD (8,8%)
- 3) Peringkat C : 17 SKPD (50%).
- 4) Peringkat D : 11 SKPD (32%)
- 5) Peringkat E : 3 SKPD (8,8%)

- b. Pada Kantor Pemerintah Kecamatan berjumlah 20 dengan hasil :

- 1) Peringkat A : 3 SKPD (15%)
- 2) Peringkat B : 2 SKPD (10%)
- 3) Peringkat C : 9 SKPD (45%)
- 4) Peringkat D : 5 SKPD (25%)
- 5) Peringkat E : 1 SKPD (5%)

3. Identifikasi kinerja terendah

- a. Kinerja kegiatan berdasarkan kelompok

Tabel 3. 76. Kinerja Kegiatan Berdasarkan Kelompok

No	SKPD	Rata-Rata Nilai			Rata-Rata Seluruhnya
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan	
1.	Sekretariat Daerah/ Set.DPRD/Dinas/Badan/ RSUD Raza	3,71	3,05	4,25	3,52
2.	Pemerintah Kecamatan	2,61	3,04	3,68	3,09

Berdasarkan data tersebut pada perangkat daerah Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/RSUD Raza unsur terendah terdapat pada kelompok kegiatan pelaksanaan. Sedangkan pada Kantor Pemerintah Kecamatan unsur terendah terdapat pada kelompok kegiatan perencanaan.

- b. Berdasarkan data, diketahui lima kinerja kegiatan terendah pada Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / Dinas/Badan/RSUD Raza, yaitu :

Tabel 3. 77. Lima Kinerja Kegiatan Terendah Pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/RSUD Ratu Zaleha

No	Kegiatan	Rata-Rata Nilai
1.	Realisasi rencana inovasi	1.06
2.	Rencana Inovasi yang mendukung pencapaian organisasi	1.59
3.	Proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	1.91
4.	Ketepatan waktu pengumuman RUP melalui SIRUP	2.29
5.	Ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung	2.38

- c. Berdasarkan data, diketahui lima kinerja terendah pada Kecamatan, yaitu :

Tabel 3. 78. Lima Kinerja Terendah Pada Kecamatan

No	Kegiatan	Rata-Rata Nilai
1	Realisasi rencana inovasi	0.3
2	Rencana Inovasi yang mendukung pencapaian organisasi	0.6
3	Proses pengadaan barang dan jasa konstruksi	1.7
4	Ketepatan waktu pengumuman RUP melalui SIRUP	2.7
5	Fasilitasi ketetapan pencairan ADD	2.8

b. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjar adalah meningkatkan disiplin pegawai dan apabila terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maka

akan diberikan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS berdasarkan kewenangan, apabila kewenangan pada SKPD maka hukuman disiplin diberikan oleh kepala SKPD. Hukuman disiplin sedang atau berat diproses pada Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang mengadakan rapat setiap tahun 4 (empat) kali dalam setahun. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin adalah jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah PNS seluruhnya dimana indikator menunjukkan semakin rendah realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja.

Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tahun 2018 adalah 11 Orang atau 0,16% dari jumlah seluruh PNS di Kabupaten Banjar. Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin diatas menunjukkan capaian kinerja untuk Indikator Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin adalah 40%. Jika membandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 0,13% maka realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,03% serta terjadi penurun capaian kinerja yang cukup besar dari angka 91,67% di Tahun 2017 dan 40% di Tahun 2018. Sementara jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun akhir maka realisasi pada tahun berjalan ini belum memberikan sumbangan capaian sebesar.

Berikut jumlah PNS yang mendapat hukuman berdasar kriteria yang dibahas melalui tim majelis pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin PNS adalah sbb:

Tabel 3. 79. Jenis Hukuman dan Jumlah Pns Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Tahun 2018

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah
1	Hukuman disiplin ringan	0 orang
2	Hukuman disiplin sedang	2 orang
3	Hukuman disiplin berat	9 orang
	Jumlah	11 orang

Prosentase jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2018 adalah

$$\frac{11 \text{ orang}}{6648 \text{ orang}} \times 100\% = 0.16$$

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut.

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Merupakan kegiatan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin pns dimana kegiatan berupa rapat tim majelis pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin pns dilaksanakan sebanyak 4 kali dan Telah terjadi koordinasi dengan SKPD yang mempunyai PNS bermasalah dengan kewajiban dan pelanggaran peraturan yang kewenangan penjatuhan hukuman sedang dan berat ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Gambar 3. 106. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS



b. Kegiatan Pembinaan Pegawai

Merupakan kegiatan Pembinaan Pegawai berupa pemeriksaan serta koordinasi dalam pembinaan PNS diantaranya adalah;

- Rapat Tim Pembinaan PNS dapat dilaksanakan sebanyak 4 kali
- Telah dilakukan koordinasi dengan SKPD tentang pembinaan disiplin sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir pelanggaran terhadap kewajiban PNS

- Dilakukan koordinasi tentang penggunaan absensi sidik jari/finger print pada SKPD walaupun belum semua SKPD menggunakan finger print pada tahun 2018.

c. Persentase penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi

Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan handal sangat dibutuhkan penempatan ASN yang berkesesuaian dengan kompetensi. Kinerja Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dihitung dengan jumlah pejabat yang memenuhi kompetensi dibandingkan jumlah pejabat x 100%. Berdasarkan data hingga akhir Tahun 2018 terdapat 6.275 Jabatan yang diisi dengan pejabat yang sesuai kompetensi masing-masing jabatan. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh jabatan yang ada di kabupaten banjar sebesar 6.650 maka realisasi kinerja untuk penempatan pejabat sesuai kompetensi adalah sebesar 94,3%, jika membandingkan dengan target 100% maka didapat capain sebesar 94,3% yaitu masuk dalam kategori sangat tinggi. Terlepas belum tercapainya sesuai target yang ditetapkan, realisasi pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal tersebut dapat dilihat ketika membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 47,99%, peningkatan realisasi dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah sebesar 46,31%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Akhir Tahun, maka realisasi Tahun 2018 sudah menyumbang sebesar 94,3%. Artinya untuk mencapai target akhir RPJMD, pemerintah kabupaten Banjar harus mempertahankan kinerja yang ada dengan perbaikan lanjutan untuk memenuhi persentase capaian yang tersisa 5,7%. Berikut adalah rincian penempatan Jabatan di Kabupaten Banjar Pada Tahun 2018;

Tabel 3. 80. Jumlah Jabatan berdasarkan kompetensi Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah Pejabat (Orang)	Jumlah Pejabat yang sesuai kompeten	%
1	Struktural	796	421	52,8
2	Fungsional Tertentu	4.436	4.436	100
3	Fungsional Umum	1.418	1.418	100
Total		6.650	6.275	94,3

Faktor keberhasilan peningkatan kinerja yang signifikan adalah, Kabupaten Banjar telah mengupayakan seluruh PNS (fungsional dan fungsional umum) telah menerima SK penempatan sesuai dengan

formasi dan kualifikasinya sehingga capaian kinerja adalah 100%, serta Proses penempatan melalui mekanisme mutasi dengan jumlah usulan sebanyak 167 orang dan yang disetujui hanya 100 orang atau sekitar 59,88%.

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut.

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Kegiatan Penempatan PNS

Merupakan kegiatan penempatan PNS dimana telah terlaksananya Penempatan PNS dengan target kegiatan Tahun 2018 adalah terbitnya 150 SK mutasi baik internal antar SKPD dalam Kabupaten maupun ternyata tidak tercapai dengan realisasi kegiatan : 96 SK hal ini karena ada kebijakan oleh tim mutasi untuk proses dan penerbitan SK penempatan internal tenaga medis dan tenaga pendidikan untuk dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sehingga beberapa usulan mutasi dan tenaga medis dan tenaga pendidikan ditunda sampai dengan terbitnya revisi perbup nomor 31 Tahun 2017. Akan tetapi secara proses mutasi dari kegiatannya telah tercapai 100% dengan pelaksanaan proses mutasi 4 kegiatan pertriwulan.

b. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS dengan beberapa jenis kegiatan sebagai berikut;

- ✓ Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat Administrator, pengawasdan Jabatan Fungsional melalui pertimbangan Beperjakat. Selama tahun 2018 target pelantikan adalah 6 kali, dan pelantikan yang telah dilaksanakan untuk mutasi dan promosi jabatan administrasi dan jabatan fungsional yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Mutasi dan promosi dilakukan agar terjadi sebaran pejabat yang mempunyai kompetensi secara merata, sehingga semua kegiatan di SKPD dapat berjalan lancar sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar. Pelantikan tidak hanya dilakukan untuk jabatan administrator dan pengawas saja tetapi juga untuk pengangkatan pertama kali jabatan fungsional serta pengangkatan jabatan fungsional melalui inspassing dan juga

pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selama tahun 2018 telah dilakukan pelantikan sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Februari, Juni, September dan Desember.

- ✓ Pelantikan Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional dan JPT. Tahun 2018 telah dilakukan pelantikan pejabat sebanyak 4 kali.
- ✓ Verifikasi Jabatan Fungsional termasuk didalamnya pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional. BKN telah mengambil kebijakan hanya memberikan kesempatan satu kali kenaikan pangkat bagi CPNS formasi jabatan fungsional dan untuk selanjutnya tidak dapat naik pangkat lagi sebelum diangkat sesuai formasi cpns nya.

Melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional melalui konsultasi kepada kementerian atau instansi Pembina jabatan fungsional masing-masing, sehingga PNS lebih paham tentang karir jabatan fungsional.

- ✓ Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer

Maksud dan Tujuan Kegiatan melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata komputer, agar karir jabatan fungsional pranata komputer dapat berkembang sesuai dengan peraturan tentang jabatan fungsional tersebut.

Penilaian akan dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banjar dan ditetapkan menjadi angka kredit atau yang disebut dengan PAK oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Jumlah Pranata Komputer yang telah diangkat sebanyak 27 orang dan yang mengusulkan penetapan angka kredit sebanyak 8 orang.

Secara fisik kegiatan telah terealisasi 96,37%, sedangkan realisasi keuangan 87,10% hal ini karena adanya pengembalian honorarium akibat tidak tercapainya target pelantikan yang direncanakan 6 kali pelantikan, namun hanya terealisasi sebanyak 4 kali. Kegiatan pelantikan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan JPT Pratama adalah sepenuhnya kewenangan dari Pejabat Pembina

Kepegawaian, sehingga prosesnya dapat dilakukan setelah mendapatkan arahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu Bupati. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat kekosongan Jabatan Administrasi sebanyak 114 orang dan 1 orang JPT Pratama.

2) Program Pembangunan, Pengembangan dan Kualifikasi Aparatur

a. Kegiatan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan

Merupakan Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan adalah 1 tahun dengan realisasi kinerja 1 tahun dengan capaian 100%. Telah dilaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Maksud dan Tujuan Kegiatan adalah untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Seleksi terbuka dilakukan untuk pengisian 7 jabatan kosong yaitu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindag, Kepala Bappelitbang, Kepala Badan Kesbangpol, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Dinas BP3KB. Untuk seleksi assessment kompetensi Pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan lembaga assessment yang independent sesuai dengan arahan Bupati, yaitu Unit Layanan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, hal ini dalam rangka penghematan anggaran belanja daerah.

Selain kegiatan seleksi terbuka, juga telah dilakukan proses seleksi mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, untuk mutasi JPT Pratama sebanyak 7 Jabatan yang akan dimutasi/rotasi.

d. Persentase kasus hukum PNS yang ditangani

Kinerja penanganan kasus hukum PNS yang ditangani merupakan kewajiban daerah untuk melakukan penanganan terhadap kasus hukum yang terjadi dengan target 100%. Pada Tahun 2018 terdapat 2 (Dua) Buah kasus pidana yang menjadi, akan tetapi tidak dapat tertangani di sebabkan karena perjanjian kerjasama LKBH KORPRI Kabupaten Banjar antara Dewan Pengurus KORPRI Kab. Banjar

dengan DP. Cabang PERADI Banjarmasin tidak ada dikarenakan kevakuman organisasi KORPRI Kab. Banjar.

e. Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur guna mendukung percepatan pembangunan dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan untuk diikuti. Terdapat sebanyak 411 kali diklat yang sesuai kebutuhan yang telah diikuti. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh diklat yang diikuti sebanyak 411 kali, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar telah memenuhi target dimana mentargetkan 100%.

Jika membandingkan dengan kinerja tahun lalu sebesar 30,28% maka realisasi dan capaian Tahun 2018 telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, Kabupaten Banjar telah melakukan filterisasi yang sangat baik terhadap diklat-diklat yang diikuti melalui sistem yang telah ditetapkan oleh daerah dalam pemilihan berupa seleksi kepegawaian dan pengikutsertaan pendidikan dan pelatihan aparatur dalam peningkatan kapasitas. Realisasi pada Tahun 2018 telah menyumbang capain sebesar 100% untuk target RPJMD Akhir Tahun.

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja yang didapat merupakan hasil dari dukungan program dan kegiatan yang ditetapkan. Berikut adalah program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian kinerja;

1) Program Pendidikan Kedinasan

a. Kegiatan Pelatihan teknis

Kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis telah dilaksanakan kegiatan sesuai time schedule yang telah disusun, yaitu 23-27 April 2018. Pelatihan yang dilaksanakan merupakan pengembangan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh fungsional Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam penyusunan DUPAK, sehingga target peserta 30 orang bisa terpenuhi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerja sama dengan BPSDM Provinsi sebagai mitra dalam pelaksanaan pelatihan dapat memfasilitasi kegiatan sesuai jadwal.

Gambar 3. 107. Kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis



b. Pengembangan Kompetensi

Kegiatan pengembangan kompetensi berupa Diklat Teknis Camat Pola 300 JP sebanyak 1 orang. Diklat ini dikhususkan bagi Camat yang belum/tidak berlatar belakang Pendidikan Ilmu Pemerintahan. Diklat Teknis Camat Pola 300 JP dilaksanakan di Pussenif Bandung pada tanggal 01 April sampai dengan 30 April 2018, diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri Jakarta. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi dengan baik. Ada pun kegiatan yang lain yaitu Diklat Wawasan Kebangsaan (Aparatur Pelopor Revolusi Mental) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Target peserta Diklat ini ditujukan bagi Pejabat Eselon IV yang ada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar dan masih banyak yang belum mengikuti kegiatan diklat tersebut. Kegiatan Diklat ini akan dilaksanakan secara bertahap. Diklat Wawasan Kebangsaan (Aparatur Pelopor Revolusi Mental) dilaksanakan di Wisma Sultan Sulaiman, Kantor BKDPSDM Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2018, diselenggarakan oleh BKDPSDM Kabupaten Banjar dan bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pola Kemitraan.

Gambar 3. 108. Kegiatan Pengembangan Kompetensi



c. Penyertaan diklat teknis dan fungsional

Kegiatan Penyertaan Diklat Teknis Dan Fungsional yang di laksanakan sebagai berikut :

1. Diklat Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Terampil tanggal 15-20 Januari 2018 sebanyak 30 orang.
2. Diklat Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli tanggal 29 Januari s.d 7 Februari 2018 sebanyak 5 orang.
3. Bimtek Analisa Standar Biaya (ASB) dan Penggunaan Aplikasi dalam rangka Penyusunan RKA di Yogyakarta tanggal 5-8 Maret 2018.
4. Pelatihan Pembuatan Company Profile menggunakan 3DsMax tanggal 5-9 Maret 2019 sebanyak 2 orang.
5. Bimtek Pengelolaan Barang Milik daerah tanggal 7-10 Mei 2018 sebanyak 2 orang.
6. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 1 tanggal 31 Juli s.d 22 Agustus 2018 sebanyak 2 orang.
7. Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian tanggal 1-13 Agustus 2018 sebanyak 3 orang.
8. Pelatihan Kepemimpinan Being an Impactful leader @work tanggal 29-30 Agustus 2018 sebanyak 30 orang.
9. Diklat Penjenjangan Bidan Terampil tanggal 27 Agustus s.d 5 September 2018 sebanyak 11 orang.
10. Diklat Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 3-8 September 2018 sebanyak 1 orang.

11. Pelatihan Manajemen Kinerja ASN tanggal 9-11 Oktober 2018 sebanyak 2 orang.
12. Diklat Pengenalan Perpustakaan tanggal 20-31 Oktober 2018 sebanyak 1 orang.
13. Workshop Pengembangan Kompetensi PNS tanggal 29 Oktober s.d 1 November 2018 sebanyak 2 orang.
14. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I tanggal 12-29 November 2018 sebanyak 1 orang.
15. Diklat Penjenjangan Fungsional Bidan Ahli tanggal 15-24 November 2018 sebanyak 20 orang.
16. Pelatihan Kompetensi Excellent Team Member tanggal 27-30 November 2018 sebanyak 30 orang.
17. Bimtek Sistem Administrasi Keuangan dan Strategi Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK, dan Bendahara sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Pemerintah dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tanggal 5-8 November 2018 sebanyak 3 orang.
18. Diklat Penjenjangan Fungsional Bidan Ahli tanggal 15-24 November 2018 sebanyak 1 orang.

Pelatihan fungsional menjadi prioritas, seperti Bidan, Penguji Kendaraan Bermotor, Analis Kepegawaian, dan Pustakawan. Pengembangan kompetensi tersebut dibutuhkan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan fungsional dan persyaratan kenaikan pangkat.

Gambar 3. 109. Kegiatan Penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional





f. Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi

Aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah aparatur desa yang mampu menjalankan dan menerapkan tugas dan fungsinya sehari - hari dalam pelayanan kepada masyarakat, Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan perbandingan antara jumlah desa yang aparatur desanya mampu menjalankan tugas dan fungsinya dibagi jumlah seluruh desa. Realisasi adalah 56,68 % dengan target dalam rpjmd 71.12% pada Tahun 2018 ini. DPMD Kab. Banjar untuk capaian kinerja tahun 2018 meningkat sebesar 14,44 % dari realisasi tahun 2017 yaitu 42,24 %. Untuk tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 56,68 % dengan capaian kinerja (% realisasi) sebesar 79.70 % yaitu tinggi

Pencapaian kinerja pada indikator ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
 - Target kinerja pada kegiatan Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa adalah terlaksananya pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa (7 kali pelaksanaan dengan peserta sebanyak 1385 orang)

dengan realisasi kinerja Terlaksananya pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa (7 kali sebanyak 1385 orang) dengan capaian 100 %.

Permasalahan :

- Kurangnya kompetensi ASN dan kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
- Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin karena tidak mentaati ketentuan jam kerja, Penyalahgunaan wewenang, dan juga melakukan pelanggaran pidana lainnya (penggunaan obat-obatan terlarang, penguntan liar)
- Data hasil pengukuran kompetensi belum maksimal dalam penerapannya.
- Vakumnya Organisasi KORPRI Kabupaten Banjar
- Masih ada pemenuhan kegiatan diklat yang terkendala karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat dengan sebab tidak dianggarkan atau belum terpenuhi quota jumlah peserta untuk satu kelas
- Masih minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dari Aparat Desa mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, terutama dalam mempergunakan teknologi akutansi (Aplikasi Akutansi), ada Aparat yang cepat beradaptasi dan sebagian lagi ada aparat yang sangat sulit untuk beradaptasi dalam menjalankan aplikasi dalam menjalankan Keuangan Desa dimaksud.

Solusi

1. Sosialisasi kepada seluruh SKPD dan juga peraturan yang wajib dilakukan/dilaksanakan PNS dan SKPD sehingga penilaian meningkat
2. Adanya sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS, peraturan tentang penyalahgunaan obat2an terlarang, ijin perkawinan dan perceraian dan penyalahgunaan wewenang.
3. Adanya komitmen dari pimpinan terhadap penegakkan disiplin
4. Meningkatnya kesejahteraan walaupun tidak terlalu signifikan
5. Untuk kegiatan selanjutnya perlu dilakukan pendataan yang lebih akurat dan SKPD hanya melakukan verifikasi data PNS yang akan diukur kompetensinya

6. Melaksanakan sosialisasi yang fungsinya untuk memberikan informasi kepada seluruh PNS Kabupaten Banjar mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum apabila terjadi permasalahan
7. Seluruh Aparatur Desa setiap Tahun diadakan Pelatihan Aparatur Dalam Bidang Manajemen

3.2.32. Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas

Sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas diantaranya melalui beberapa hal, yaitu dengan mengembangkan tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas, meningkatkan pengawasan dan monev penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten, mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran hukum, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas proses politik dan pemerintahan serta menguatkan kerjasama dan kemitraan antar pelaku politik. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas menunjukkan hasil positif, dimana terdapat peningkatan capaian disetiap indikator kinerja sasaran. Capaian sasaran diukur dengan 24 (dua puluh empat) buah indicator, adapun sejumlah indicator dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3. 81. Realisasi dan Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) jika ada	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		91,68%	122,24%	75.5%	95,96%	127.10%	82,5%	116,32%
2.	Kesesuaian antar dokumen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) jika ada	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD								
3.	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD		30 %	75%	45%	38,15%	84,78%	55%	69,36%
4.	Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi		54,55%	136,36%	60%	88%	146,67%	100%	88%
5.	Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD		88,23%	121,31%	80%	100%	125%	100%	100%
6.	Persentase Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran		52,39%	84,5%	63%	57,64%	91,49	65%	88,68%
7.	Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	90%	95,14%	100,15%	96%	82,01%	85,43%	98%	83,68%
8.	Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	100%	30,19%	70,43%	57,14 %	59,72%	104,52%	85,71%	69,68%
9.	Tingkat Maturitas SPIP		3	100%	2	3	150%	3	100%
10.	Tingkat Kapabilitas APIP		3	100%	3	3	100%	3	100%
11.	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti		81,40%	101,75%	80%	81,69%	102,11%	80%	102,11%
12.	Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan		79%	130,34%	75,76 %	87,97%	116,12%	100%	87,97%
13.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) jika ada	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	masyarakat yang terintegrasi								
14.	Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
15.	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah		95,51%	97,46%	99%	103.52%	104.57%	100%	103.52%
16.	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa		45,13%	113,68%	79.40%	100%	125.94%	100%	100%
17.	Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah		90.73%	103%	85%	84.38%	99.27%	100%	84.38%
18.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani		95,81%	98,51%	85%	98.67%	116.08%	100%	98.67%
19.	Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejolak masyarakat)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan		70%	70%	100%	61%	61%	100%	61%
21.	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Persentase peraturan yang dibuat		99,34%	142%	75%	72,22%	96,29%	80%	90,28%
23.	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan		92,76%	105,49%	85%	64.48%	75.86%	100%	64.48%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) jika ada	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
					Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan		25,68%	77,46%	44,48 %	27,04%	60,79%	64,66%	41,82%

a. Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pada program perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sebesar 95,96% dengan target sebesar 75.5%, sehingga didapat capaian sebesar 127.10%. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya maka ada didapat peningkatan dari sisi realisasi dan capaian dimana masuk dalam kategori sangat tinggi. Bila melihat target pada RPJMD akhir tahun maka realiasi pada tahun 2018 telah menyumbang capaian melebihi dari target yaitu sebesar 116,32%.

Angka realisasi tahun 2018 diperoleh dari jumlah realisasi anggaran seluruh SKPD sampai dengan triwulan IV senilai Rp 710.389.663.569,00 dari target pagu anggaran sebesar Rp 790.572.317.214,00 dan terealisasinya 15 laporan pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai target 2018. Pencapaian kinerja tahun 2018 menunjukkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar sudah memenuhi kesesuaian dengan perencanaan yang ditetapkan. Secara rinci realisasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3. 82. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (Fisik dan Keuangan) SKPD Kab. Banjar Tahun 2018

NO	SKPD	DPA	KEUANGAN (Rp)			FISIK (%)		KET	CATATAN
			RENCANA	REALISASI DESEMBER	(%)	RENCA NA	REALISASI DESEMBER		
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.883.815.000	5.883.815.000	5.650.218.083	96,03	100,00	169,04	s/d desember	ST
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.235.957.000	6.235.957.000	5.706.346.802	91,51	100,00	100,00	s/d desember	ST
3	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	1.773.128.000	1.773.128.000	1.716.708.726	96,82	100,00	100,00	s/d desember	ST
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	15.802.540.000	15.802.540.000	14. 181.080.979	89,74	100,00	100,00	s/d desember	ST
5	Kecamatan Paramasan	664.000.000	664.000.000	663.920.200	99,99	100,00	99,99	s/d desember	ST
6	Dinas Perikanan	3.174.612.000	3.174.612.000	2.903.879.712	91,47	100,00	99,88	s/d desember	ST
7	Kecamatan Sungai Pinang	680.000.000	680.000.000	669.119.900	98,40	100,00	99,87	s/d desember	ST
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	12.399.359.000	12.358.465.480	10.682.043.410	86,15	100,00	99,83	s/d desember	ST
9	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	7.597.211.546	6. 132.303.536	6.956.254.245	91,56	80,72	99,52	s/d desember	ST
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	140.422.042.154	134.192.764.748	133.188.007.434	94,85	99,58	99,48	s/d desember	ST
11	Sekretariat DPRD	36.482.050.000	36.482.050.000	34.971.151.059	95,86	100,00	99,47	s/d desember	ST

NO	SKPD	DPA	KEUANGAN (Rp)			FISIK (%)		KET	CATATAN
			RENCANA	REALISASI DESEMBER	(%)	RENCA NA	REALISASI DESEMBER		
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.774.745.000	12.774.745.000	11.212.550.046	87,77	100,00	99,16	s/d desember	ST
13	Dinas Lingkungan Hidup	21.634.965.000	21.634.114.250	20.022.368.484	92,55	99,13	99,09	s/d desember	ST
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.459.372.160	2.459.372.160	1.956.015.832	79,53	100,00	98,72	s/d desember	ST
15	Kecamatan Beruntung Baru	776.000.000	776.000.000	765.420.979	98,64	100,00	98,64	s/d desember	ST
16	Rumah sakit umum Ratu Zalecha	64.255.161.000	64.249.161.000	60.045.806.780	93,45	98,36	98,37	s/d desember	ST
17	Inspektorat Daerah	5.602.961.920	5.602.961.920	5.187.757.758	92,59	100,00	98,35	s/d desember	ST
18	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.481.819.000	3.481.819.000	3.369.878.080	96,78	100,00	98,31	s/d desember	ST
19	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.695.747.000	11.695.747.000	10.345.455.577	88,45	100,00	97,97	s/d desember	ST
20	Kecamatan Karang Intan	1.048.200.000	1.048.200.000	1.026.343.163	97,91	100,00	97,91	s/d desember	ST
21	Badan Pendapatan Daerah	6.853.658.000	6.853.658.000	6.274.882.619	91,56	100,00	97,81	s/d desember	ST
22	Kecamatan Astambul	729.386.000	729.386.000	706.775.614	96,90	100,00	97,34	s/d desember	ST
23	Dinas Pendidikan	114.008.061.580	114.008.061.580	89.064.996.893	78,12	100,00	97,02	s/d desember	ST

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018



NO	SKPD	DPA	KEUANGAN (Rp)			FISIK (%)		KET	CATATAN
			RENCANA	REALISASI DESEMBER	(%)	RENCA NA	REALISASI DESEMBER		
24	Blud Rsud Ratu Zalecha	80.000.000.000	80.000.000.000	79.340.041.880	99,18	96,65	96,97	s/d desember	ST
25	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	4.298.832.000	4.298.832.000	4.072.422.095	94,73	100,00	96,89	s/d desember	ST
26	Dinas Perhubungan	5.732.985.000	5.732.985.000	5.533.959.172	96,53	100,00	96,53	s/d desember	ST
27	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	9.492.967.000	9.492.967.000	8.718.061.477	91,84	100,00	96,33	s/d desember	ST
28	Dinas Sosial	5.346.575.000	5.346.575.000	5.122.501.294	95,81	100,00	95,81	s/d desember	ST
29	Kecamatan Simpang Empat	800.000.000	800.000.000	764.357.274	95,54	100,00	95,54	s/d desember	ST
30	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian	14.030.290.900	14.030.290.900	13.393.612.800	95,46	100,00	95,46	s/d desember	ST
31	Kecamatan Martapura	3.489.731.000	3.489.731.000	3.329.742.356	95,42	100,00	95,42	s/d desember	ST
32	Kecamatan Kertak Hanyar	1.700.314.000	1.700.314.000	1.614.945.256	94,98	100,00	94,98	s/d desember	ST
33	Kecamatan Gambut	1.395.000.000	1.357.585.000	1.321.819.595	94,75	97,32	94,75	s/d desember	ST
34	Kecamatan Telaga Bauntung	680.000.000	680.000.000	643.567.181	94,64	100,00	94,64	s/d desember	ST
35	Dinas Pemuda Dan Olahraga	4.910.720.000	4.910.720.000	4.628.046.407	94,24	100,00	94,24	s/d desember	ST

NO	SKPD	DPA	KEUANGAN (Rp)			FISIK (%)		KET	CATATAN
			RENCANA	REALISASI DESEMBER	(%)	RENCA NA	REALISASI DESEMBER		
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.544.930.647	11.544.930.647	10.118.346.047	87,64	100,00	94,00	s/d desember	ST
37	Kecamatan Mataraman	800.000.000	800.000.000	747.713.879	93,46	100,00	93,46	s/d desember	ST
38	Kecamatan Martapura Barat	750.000.000	750.000.000	698.669.714	93,16	100,00	93,16	s/d desember	ST
39	Kecamatan Pengaron	816.000.000	816.000.000	759.692.067	93,10	100,00	93,10	s/d desember	ST
40	Dinas Ketahanan Pangan	2.936.153.000	2.936.153.000	2.343.418.825	79,81	96,51	92,62	s/d desember	ST
41	Sekretariat Daerah	26.033.817.000	26.033.817.000	23.925.387.954	91,90	100,00	91,90	s/d desember	ST
42	Kecamatan Sambung Makmur	776.000.000	776.000.000	750.550.939	96,72	100,00	91,71	s/d desember	ST
43	Kecamatan Aranio	776.000.000	776.000.000	710.475.507	91,56	99,91	91,56	s/d desember	ST
44	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	9.447.935.319	9.447.935.319	8.532.581.655	90,31	100,00	91,52	s/d desember	ST
45	Kecamatan Aluh-Aluh	912.000.000	912.000.000	834.424.060	91,49	100,00	91,49	s/d desember	ST
46	Kecamatan Martapura Timur	760.000.000	760.000.000	729.552.342	95,99	100,00	91,45	s/d desember	ST
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.146.958.000	4.146.958.000	3.125.797.252	75,38	100,00	91,27	s/d desember	ST

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**



NO	SKPD	DPA	KEUANGAN (Rp)			FISIK (%)		KET	CATATAN
			RENCANA	REALISASI DESEMBER	(%)	RENCA NA	REALISASI DESEMBER		
48	Satuan Polisi Pamong Praja	8.001.106.000	8.001.106.000	7.247.844.867	90,59	100,00	90,59	s/d desember	ST
49	Kecamatan Tatah Makmur	753.676.000	682.787.250	666.927.556	88,49	90,59	88,49	s/d desember	T
50	Kecamatan Cinta puri Darussalam	1.865.236.000	1.865.236.000	1.629.363.650	87,35	100,00	87,35	s/d desember	T
51	Dinas Pertanahan	3.144.400.000	3.144.400.000	2.393.290.812	76,11	100,00	85,29	s/d desember	T
52	Dinas Kesehatan	81.116.652.988	81.116.652.988	69.579.697.303	85,78	99,06	84,64	s/d desember	T
53	Kecamatan Sungai Tabuk	1.197.891.000	1.197.891.000	1.018.065.852	84,99	100,00	83,94	s/d desember	T
54	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.807.758.000	2.462.708.215	2.164.727.329	77,10	88,91	82,84	s/d desember	T
55	Dinas Perumahan Dan Permukiman	23.673.597.000	16.844.032.139	16.663.076.797	70,39	75,92	75,86	s/d desember	T
Total		790.572.317.214	775.547.469.132	710.389.663.569	91,11		95,96		ST

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini merupakan wujud dari kerja Bappelitbang dalam pengendalian perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar berupa monitoring dan evaluasi dimana evaluasi dilakukan setiap triwulan, dengan

melengkapi laporan per bulan berupa RFK, Tepra, evaluasi RKPD, TP dan DAK per triwulan sehingga kinerja program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun agar pengendalian dan monev dapat menghasilkan pencapaian target yang telah ditetapkan; Memberikan pendampingan dalam penyusunan format laporan evaluasi kinerja terhadap SKPD. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja diatas adalah program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan monitoring evaluasi dan pelaporan, juga didukung program perencanaan pembangunan sosial dan budaya dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian antara lain sebagai berikut :

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan rapat-rapat koordinasi pada 12 SKPD dalam rangka mensinergiskan program kegiatan lintas sektor bidang perekonomian. Sedangkan untuk kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dilakukan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap kegiatan - kegiatan pada SKPD lingkup bidang perekonomian, rapat-rapat dalam rangka mengevaluasi program kegiatan SKPD lingkup bidang perekonomian yang berjumlah 12 SKPD.
2. Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud dan monitoring, evaluasi dan pelaporan; kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, terlaksananya 4 kali rapat koordinasi perencanaan sosial budaya, terlaksananya 4 kali rapat koordinasi program keluarga harapan, tersusunnya revitalisasi Kawasan Santri Darussalam dan Sekumpul, tersusunnya Masterplan Kebudayaan Kab. Banjar 2018 – 2022 dan tersusunnya Masterplan Serambi Mekah; kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, terlaksananya 4 kali rapat koordinasi monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya, tersusunnya dokumen laporan monitoring dan evaluasi

perencanaan sosial budaya dan tersusunnya dokumen capaian SDGs.

3. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan, koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban; Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, tersusunnya 15 laporan; Kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, tersusunnya 1 buah dokumen LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar.

b. Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten dan SKPD

Sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 indikator diatas memastikan bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen baik tingkat kabupaten maupun SKPD. Perencanaan program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan. Indikator kinerja tersebut di formulasikan persentase jumlah total program-program yang ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah total program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Program-program yang disusun oleh SKPD berkesesuaian/selaras dengan dokumen RPJMD sehingga realisasi dari indikator ini adalah 100%.

Capaian persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD pada tahun 2018 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD dapat dipertahankan dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka realisasi tahun 2018 telah menyumbang 100% dari target 100 % pada tahun 2020. Realisasi kinerja tahun 2018 didukung dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJMD dan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu tersusunnya Revisi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2019-2021.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang

dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 83. Capaian Program dan Kegiatan Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten dan SKPD

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2		6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	80%	80%	100%	80%	100%
a.	Penyusunan Rancangan RPJMD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100%	1 Dok.	100%
b.	Penetapan RPJMD*)	-	1 Dok.	1 Dok.	100%	1 Dok.	100%

Keterangan : Penetapan RPJMD) tidak dilaksanakan di tahun 2017*

Realisasi Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya 1 dokumen rancangan RPJMD;
- Terselenggaranya musrenbang RPJMD dengan keluaran Draf hasil kesepakatan; dan
- Ditetapkannya 1 dokumen RPJMD.

Faktor pendukung atas pencapaian indikator tersebut adalah penggunaan aplikasi SIMDA Perencanaan yang mengharuskan RPJMD dan Renstra diinput ke dalam sistem dapat menjamin program dalam RPJMD selaras dengan program dalam Renstra demikian pula pada RKPD dan Renja SKPD.

c. Persentase Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang Diakomodir dalam RKPD

Perencanaan bottom-up merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bappelitbang sebagai lembaga perencana. Oleh karenanya, dokumen perencanaan dan penganggaran harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD adalah jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dibandingkan dengan total usulan masyarakat. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dibandingkan dengan total usulan masyarakat. Semakin tinggi usulan yang terakomodir dalam RKPD maka semakin baik kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan, dengan kata lain

pembangunan Kab. Banjar merupakan pembangunan yang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tabel di atas menunjukkan realisasi kinerja dengan indikator kinerja persentase hasil musrenbang desa/ kelurahan, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam RKPD sebesar 38,15% dengan target yang akan dicapai tahun 2018 sebesar 45%, sehingga capaian kinerja sebesar 84,78%. Realisasi kinerja persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD adalah sebesar 38,15% yang didapat dari jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 282 usulan dibandingkan dengan total usulan masyarakat sebanyak 975. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian kinerja karena mekanisme pelaksanaan musrenbang di kecamatan masih perlu penyempurnaan dimana hasil musrenbang kecamatan menyusun usulan kegiatan masuk masih belum berdasarkan usulan prioritas, sehingga jumlah usulan menjadi sangat besar, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya, kinerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi sebesar 8,15% dan capaian sebesar 9,78%. Dan jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD sebesar 55% maka kinerja tahun 2018 menyumbang capaian sebesar 69,36% . Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 84. Capaian program dan kegiatan Persentase Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang Diakomodir dalam RKPD

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2		6	7	8	9	10
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	80%	80%	100%	80%	100%
	Penyusunan Rancangan RKPD	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	10 dok.	20%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2		6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 BA. Kesepakatan	1 BA. Kesepakatan	1 BA. Kesepakatan	100%	5 BA. Kesepakatan	20%
	Penetapan RKPD	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	10 dok.	20%
	Penyusunan KUA dan PPAS	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	10 dok.	20%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	75%	80%	77,53%	96,91%	90%	86,14%
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	54 org	54 org	49 org	90,74%	270 org	18,15%
	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	150 org	108 org	108 org	100%	540 org	20%
	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	54 org	54 org	54 org	100%	270 org	20%

Indikator kinerja persentase hasil musrenbang desa/ kelurahan, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam RKPD didukung 2 program yaitu :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yaitu penyusunan rancangan RKPD, penyelenggaraan musrenbang RKPD, penetapan RKPD dan penyusunan KUA dan PPAS; dan
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yaitu peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun realisasi output penting yang menjadi pendukung kinerja persentase hasil musrenbang desa/ kelurahan, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam RKPD sebagai berikut :

- Tersusunnya rancangan RKPD tahun 2019 dan RKPD Perubahan tahun 2018, sehingga tercapai 2 dokumen;
- Terselenggaranya musrenbang RKPD, dengan keluaran berupa Draf hasil kesepakatan;
- Tersusunnya KUA dan PPAS 2019 dan KUA PPAS-P 2018, sehingga tercapai 2 dokumen;
- Ditetapkannya dokumen RKPD tahun 2019 dan RKPD Perubahan tahun 2018, sehingga tercapai 2 dokumen;
- Jumlah aparat perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan sebanyak 49 orang;
- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 108 orang; dan
- Jumlah peserta bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah sebanyak 54 orang.

Jumlah aparatatur perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan sebanyak 49 orang dikarenakan pada tahun 2018 peserta yang mengikuti Bimtek perencanaan lebih difokuskan kepada ASN lingkup Bappelitbang, pada kegiatan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah seharusnya ada 2 kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada tahun 2018 hanya kegiatan keikutsertaan dalam Banjar Expo yg dilaksanakan sedangkan kegiatan sosialisasi RPJMD tidak dilaksanakan dikarenakan Perda RPJMD ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Faktor pendukung atas pencapaian indikator antara lain :

- Penggunaan aplikasi e-planning dalam proses penyusunan RKPD, sehingga lebih memudahkan penghimpunan usulan SKPD dan hasil musrenbang kecamatan;
- Peran aktif dari SKPD termasuk kecamatan dalam pembahasan pada saat musrenbang kecamatan maupun kabupaten; dan
- Dukungan SKPD pada saat pembahasan di Badan Anggaran.

d. Persentase SKPD yang Memiliki Bank Data yang Terintegrasi

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data statistik yang terbaru merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi adalah SKPD yang memiliki

bank data terintegrasi dibandingkan dengan jumlah SKPD. Capaian indikator ini ditunjukkan dari data yang ada pada SIPD. SIPD merupakan aplikasi yang mengumpulkan dan mengintegrasikan data secara terpadu dalam skala nasional, data bersumber dari kabupaten/ kota dan provinsi se Indonesia. Data dan informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang lebih menekankan pemanfaatan SIPD. SKPD yang menyampaikan data sesuai dengan format data yang terintegrasi pada SIPD adalah 29 SKPD dari 33 SKPD sehingga diperoleh realisasi sebesar 88%. Realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 60% dengan capaian 146,67%. Capaian Tahun 2018 merupakan wujud konsistensi capaian dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian 100%, sementara jika dibandingkan dengan target akhir Tahun RPJMD kinerja Tahun 2018 telah menyumbang 88% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020. Keberhasilan Capaian kinerja merupakan wujud sistem yang berjalan sesuai ketentuan, dimana adanya kerjasama yang baik antara Bappelitbang dengan SKPD Kabupaten Banjar dengan berupa pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kewajiban pengumpulan oleh SKPD.

e. Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD

Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD, tahun 2018 realisasi indikator mencapai 100 % dari target 80 % sehingga capaian realisasi di tahun 2018 menjadi 125,00 % .

Tabel 3. 85. Capaian Program dan kegiatan Persentase pengguna Website Domain dan Sub Domain SKPD

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2		6	7	8	9	10
	Persentase Pengguna Website domain dan Sub domain SKPD	88,23%	80%	100%	125%	100%	100%

Capaian ini telah menyumbang 100 % terhadap target akhir Renstra 2021, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat

tinggi. Pencapaian kinerja pada tahun 2017 tergolong dalam capaian kategori sangat tinggi dengan didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini di fokuskan pada sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dan sosialisasi lapor sebanyak 1 kali di tahun 2018.
 - Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Kegiatan ini di fokuskan pada pembelian peralatan studio sebanyak 30 unit di tahun 2018
 - Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kegiatan ini di fokuskan pada sosialisasi PPID yang dilaksanakan sebanyak 1 kali di tahun 2018

f. Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran

Indikator Kinerja untuk Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yang prima, Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran merupakan jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki dokumen akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun keseluruhan. Adapun rumusan untuk memperoleh Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (X) adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah Penduduk 0 – 18 th yang memiliki akta kelahiran}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$X = \frac{95.274}{165.279} \times 100\%$$

$$X = 57,64 \%$$

(data sesuai hasil konsolidasi dan koordinasi dg Ditjen Dukcapil Kemendagri pada Semester II Tahun 2018)

Realisasi sampai bulan Desember 2018 perhitungan indikator kinerja persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran adalah 57,64% dari target RPJMD sebesar 63% dan didapat angka capaian sebesar 91,50%. Jika membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan kinerja dari sisi realisasi sebesar 1,95% dan capaian sebesar 7%. Pada Tahun 2018 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar hanya menargetkan untuk cakupan

kepemilikan akta 0-18 tahun sebesar 63%, masih jauh dibawah target nasional (85%). Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh dinas maka capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu 91,50%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD akhir periode sebesar 65% maka realisasi tahun 2018 telah menyumbang capaian sebesar 88,68%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja di atas adalah:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

Berupa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan pada pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Target pada tahun 2018 berjumlah 15.000 akta dengan realisasi sebesar 19.311 akta, jadi persentase realisasi kinerja sebesar 128.74%. Besarnya realisasi pelayanan pencatatan sipil juga didukung dengan kegiatan pelayanan akta kelahiran keliling selain pelayanan rutin di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil

Merupakan pengelolaan arsip dokumen pencatatan sipil. Target pada tahun 2018 berjumlah 15.000 dokumen dengan realisasi sebesar 19.311 dokumen jadi persentase kinerja sebesar 128.74%. Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan arsip dokumen pencatatan sipil yang diselenggarakan bidang pelayanan pencatatan sipil melampaui target. Kegiatan yang dilakukan berupa melakukan jilid berkas dan jilid buku register.

Gambar 3. 110. Jilid Permohonan Akta Kelahiran dan Jilid Permohonan Akta Kematian Tahun 2018



Pencatatan sipil lebih difokuskan pada peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebagai upaya memenuhi target nasional yang tertuang pada Nawacita pertama RPJMN tahun 2015-2019, adapun cara yang dilakukan dalam

melaksanakan kegiatan ini ada 2 (dua) cara yaitu : pelayanan di Kantor dan Pelayanan keliling/jemput bola. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak dapat berjalan maksimal, disebabkan karena beberapa faktor seperti:

- a. masih rendahnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya,
- a. tingkat pendidikan penduduk yang rendah,
- b. faktor ekonomi,
- c. faktor geografis yaitu karena wilayah Kabupaten Banjar ini yang kondisi topografi di wilayah beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan di bagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa,
- d. terbatasnya sarana dan prasarana transportasi,
- e. terbatasnya SDM,
- f. terbatasnya sarana dan prasana dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran,
- g. belum terinputnya akta kelahiran offline ke dalam sistem,
- h. mahalnya biaya transportasi untuk menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi wilayah yang terletak jauh dari Kabupaten.



Gambar 3. 111. Salah Satu Pelayanan Akta Kelahiran Keliling di Desa Pemangkih Darat



**Gambar 3. 112. Salah satu pelayanan akta kelahiran keliling di
Desa Pemangkih Darat**

g. Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA

Persentase kepemilikan KTP-el dan atau KIA Merupakan jumlah penerbitan KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP Realisasi kinerja kepemilikan KTP atau KIA pada tahun 2018 adalah sebesar 82,01%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka diperoleh capaian sebesar 85,43%, Jika membandingkan kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan kinerja yang cukup signifikan, terdapat penurunan realisasi hingga 13,13% dan capaian sebesar 14,72%. Kinerja hingga tahun 2018 telah menyumbang capaian terhadap Target akhir RPJMD sebesar 83,69. Sementara itu Kabupaten Banjar butuh kerja keras untuk mengejar Target nasional yaitu 100% dimana masih tertinggal hingga 17,99%.

Adapun rumusan untuk memperoleh Persentase Kepemilikan KTP (Y) adalah :

$$Y = \frac{\text{jumlah penerbitan KTP}}{\text{jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

$$Y = \frac{328.936}{401.703} \times 100\%$$

$$Y = 82,01 \%$$

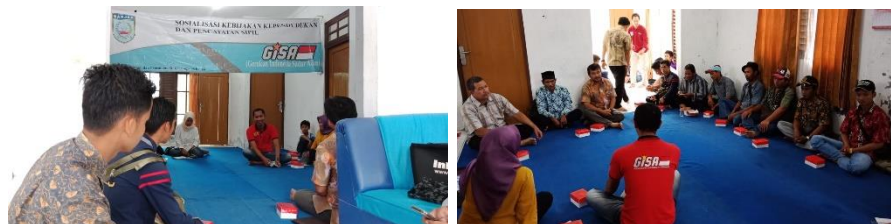
(data sesuai hasil konsolidasi dan koordinasi dg Ditjen Dukcapil Kemendagri pada Semester II Tahun 2018)

Belum terpenuhinya target kinerja dikarenakan Kabupaten Banjar yang memiliki topografi dengan luas wilayah ± 4.668.5 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan. Dimana ada beberapa Kecamatan yang letaknya cukup jauh dengan pusat Pemerintahan Kabupaten seperti halnya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang paling jauh jarak tempuhnya ± 4 jam. Kabupaten Banjar dalam hal ini sudah melaksanakan strategi pelayanan perekaman keliling KTP-el dengan jemput bola. Pada tahun 2018 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan perekaman langsung ke beberapa Kecamatan di Kabupaten Banjar dan sekolah-sekolah setingkat SMA/ sederajat di wilayah Kabupaten Banjar serta penduduk di daerah yang tingkat kepemilikan KTP-el nya masih rendah.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung kinerja kepemilikan KTP adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 1.1 Kegiatan Penerapan KTP Berbasis NIK

Indikator sasaran dari kegiatan ini berupa jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) yang diterbitkan. Target pada tahun 2018 yaitu 363.428 jiwa dengan realisasi sebesar 412.085 jiwa sehingga persentasi kinerja sebesar 113.39%. keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, salah satunya perekaman langsung ke beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar, rumah sakit dan sekolah-sekolah setingkat SMA/ sederajat di wilayah Kabupaten Banjar serta penduduk yang daerah tingkat kepemilikan KTP-el masih rendah. Selain itu kesadaran penduduk/masyarakat akan kepemilikan KTP semakin baik. Hal ini juga dipicu adanya persyaratan setiap akses pelayanan, baik pemerintah maupun swasta yang mensyaratkan adanya KTP-el.



Gambar 3. 113. Sosialisasi Mengenai Penerbitan Kartu Keluarga Format Baru di Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan tgl 19-20 Oktober 2018





Gambar 3. 114. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengembangan Wawasan tentang Pelaksanaan Pelayanan KIA ke Disdukcapil Kab. Kapuas, Prov. Kalteng tgl 16 Nop 2018

1.2 Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Indikator sasaran dari kegiatan ini berupa jumlah jilid buku yang menyajikan data penduduk hasil konsolidasi yang disusun selama tahun 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Target jumlah buku yang disusun selama tahun 2018 adalah sebanyak 91 dokumen. Pada kegiatan ini juga terdapat rapat koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan serta untuk mendukung kegiatan tersebut juga diadakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah.

1.3 Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Indikator kegiatan dari sasaran ini berupa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Kegiatan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Cetak baliho sebanyak 5 buah yang ditempatkan di Kecamatan Martapura, Sei Pinang, Mataraman, Kertak Hanyar, dan Gambut.
2. Materi spanduk sebanyak 20 buah untuk dibagikan ke Kecamatan.
3. Materi Banner sebanyak 290 buah untuk diberikan ke Desa dan Kelurahan.
4. Pembuatan stiker data
5. Cetak brosur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebanyak 1.934 lembar
6. Materi iklan audio sebanyak 300 kali Siar berisi himbauan Bupati atau Kepala Dinas melalui Radio Suara Banjar,

Radio M dan Radio Al Karomah, serta iklan layanan masyarakat sebanyak 100 kali siar.

7. Selain itu untuk mendukung penyebaran informasi dan sosialisasi juga dilaksanakan penggandaan materi kebijakan administrasi kependudukan.



Gambar 3. 115. Salah Satu Baliho yang Dibuat Untuk Menggantikan Baliho yang Ada di Kecamatan

- 1.4 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Indikator kegiatan pada sasaran ini adalah jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Banjar, target di tahun 2018 adalah 90 buku dengan realisasi 90 buku. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari pemanfaatan hubungan dan koordinasi kerja dengan dinas-dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas BP3KB, Dinas Sosial, Kementerian Agama dan kecamatan-kecamatan yang menjadi obyek pada kegiatan ini. Adapun kecamatan tersebut adalah Kecamatan Martapura, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, dan Kecamatan Beruntung Baru.



Gambar 3. 116. Cover Profil Perkembangan Kependudukan Kecamatan

- 1.5 Kegiatan Pelayanan Perpindahan Penduduk
Output dari kegiatan ini berupa jumlah penduduk pindah dating dengan realisasi yaitu 42.567 orang. Pelayanan

perpindahan penduduk tersebut berupa pindah datang antar desa/kelurahan, antar kota/kabupaten, antar kecamatan, antar provinsi, ataupun dalam satu desa/kelurahan dan jenis kedatangan antar desa/kelurahan, antar kota/kabupaten, antar kecamatan, antar provinsi, ataupun dalam satu

h. Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata

Pendataan dan penataan dokumen/arsip dapat memudahkan temu balik arsip dan arsip-arsip penting tersebut menjadi data dukung dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Arsip daerah adalah sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan tata laksana pemerintahan yang berkualitas. Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata adalah jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata dibandingkan dengan jumlah seluruh SPKD Kabupaten Banjar. Saat ini, di tahun 2018 sudah ada 27 dari 53 SKPD yang arsipnya sudah ditata sehingga realisasi dari indikator ini adalah 52,83%. Capaian persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata pada tahun 2018 adalah 92,46% didapat dari realisasi sebesar 52,83% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 57,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka kinerja capaian tahun 2018 telah mengalami peningkatan kinerja dari sisi realisasi sebesar 22,64% dan peningkatan capaian sebesar 22,03%. Pencapaian indikator persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata ini telah berkontribusi sebesar 61,64% terhadap target akhir tahun 2020.

Pencapaian kinerja ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam merealisasikan target yang ditetapkan sehingga dapat tercapai meskipun masih dalam kategori sedang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Upaya penyelamatan dokumen/arsip daerah yang telah dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah oleh tim pendataan dan penataan kearsipan, pada tahun 2017 sudah dilaksanakan sebanyak 13 Unit Kearsipan. Sedangkan pada tahun 2018 untuk kegiatan pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dapat dilaksanakan terhadap 15 Unit Kearsipan, secara kuantitatif melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 12 Unit

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Kearsipan. Dari hasil pendataan dan penataan terhadap 15 unit Kearsipan tersebut menghasilkan jumlah arsip sebanyak 3756 arsip/berkas dengan jumlah 1.6750 berkas / 406 boks dalam satu tahun.

SKPD yang telah diberikan pendampingan pendataan dan penataan arsip pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 86. Daftar SKPD yang arsipnya sudah didata dan ditata tahun 2018

No	Unit Kearsipan	Jumlah Arsip	Jumlah Berkas	Jumlah Boks
1	Bagian Organisasi Setda (03)	578	738	42
2	Bagian Tata Pemerintahan	56	77	16
3	Kecamatan Karang Intan	24	26	9
4	Kecamatan Gambut	252	287	31
5	Martapura Timur	165	358	15
6	Dinas Peternakan dan Perkebunan	60	64	29
7	Bagian EkonoI Setda	312	363	27
8	Dpk. Bid. Kearsipan	99	154	3
	Dpk. Bid. Sekretariat	110	111	11
	Dpk. Bid. Perpustakaan	24	26	3
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	69	71	3
10	Dinas Pertanian	22	22	7
11	Dinas Lingkungan Hidup	452	514	38
12	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	151	185	64
13	Kecamatan Astambul	399	430	16
14	Badan Pendatan Daerah (05)	38	38	16
15	Dukcapil (02)	945	13.256	76
	Total	3.756	16.750	406

Pengukuran terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar persentase unit Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pendataan dan penataan dokumen/arsipnya dalam menerapkan pengelolaan arsip yang sesuai kaidah kearsipan yang berlaku.

Gambar 3. 117. Foto-foto kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah tahun 2018

Foto Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Pendataan Dan Penataan Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
1. Tim arsip melaksanakan pendataan dokumen/arsip, kemudian Arsip diklasifikasi dan dikelompokkan sesuai masalah



2. Arsip yang sudah di data di beri nomor urut definitif dan di masukkan dalam boks arsip, Sebagai sarana temu balik , tim arsip membuat daftar arsip berupa print out



Pemerintah Kabupaten Banjar DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jl. Pening L. Giran No. 1, Telp. 0511-4251100 Fax. 0511-4250000 Kode Pos. 70111 - Banjarmasin	
METASIS	- RUMAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
JUMLAH ARSIP	- 180
JUMLAH BERKAS	- 180
JUMLAH BOKS	- 36
SIKES	- SAPERMA - 1
TAGILIN	- 2011

Permasalahan

- Implementasi SAKIP oleh SKPD masih kurang diantaranya karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
- Program kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak menjawab sasaran kinerja Kabupaten Banjar;

- Masih terbatasnya SDM/petugas kearsipan/Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banjar sehingga disetiap kegiatan pendampingan Pendataan dan Penataan Arsip terkendala dalam penyelesaian tugas pendataan dan penataan arsip di setiap SKPD yang didampingi.

Solusi

- Melakukan evaluasi terhadap pengendalian intern dalam setiap kegiatan pengawasan
- Mendorong SKPD untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik berupa pendampingan terkait dengan perbaikan SAKIP SKPD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
- Melakukan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dalam acara musrenbang;
- Mempersiapkan usulan program dan kegiatan SKPD dengan lebih cermat
- Mengusulkan formasi CPNS sebagai tenaga Pengelola Perpustakaan/Pustakawan, Arsiparis dan tenaga Arsip untuk dijadikan pengelola arsip/Arsiparis.

i. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP merupakan ukuran kualitas dari Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Tingkat Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang diukur dan dinilai oleh BPKP. Penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan meliputi penilaian terhadap unsur-unsur SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Quality Assurance dari Tim BPKP Pusat, Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh nilai maturitas SPIP 3,01 (terdefinisi). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Faktor pendorong yang memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar mencapai Maturitas SPIP dengan level 3

(terdefinisi) diantaranya karena Inspektorat Kabupaten Banjar dalam kegiatan pengawasannya menjadikan implementasi SPIP sebagai salah satu aspek yang menjadi salah satu fokus dalam kegiatan pengawasan, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan saran yang diperlukan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih rinci capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 87. Capaian indikator Tingkat Muturitas SPIP

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Tingkat Maturitas SPIP	100%	Level 2	Level 3	150%	Level 3	100%

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 150 % diperoleh dari target yang ditetapkan pada level 2 dan dapat direalisasikan pada level 3 berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian antara lain sebagai berikut

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari 4 kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif. Kinerja ini indikator program tersebut sebagai berikut :

- Target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengawas Internal Secara Berkala adalah dilaksanakannya kegiatan pengawasan sebanyak 225 kali dan terealisasi sebanyak 258 kali. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama yaitu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Pengawasan dilakukan terhadap seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kelurahan, Puskesmas dan Pemerintah Desa. Pengawasan

juga dilakukan terhadap permintaan pemeriksaan dari SKPD, Audit Kinerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Reviu LKPD, Reviu LKJIP, reviu RKA dan Evaluasi SAKIP serta Evaluasi Perizinan.

- Target kinerja kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan adalah terlaksanakannya kegiatan inventarisasi temuan pengawasan selama 1 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan inventarisasi hasil-hasil temuan pemeriksaan baik dari eksternal (BPK/BPKP/Itprov) maupun internal APIP.
- Target kinerja kegiatan Koordinasi Pengawasan Lebih Komprehensif adalah terlaksananya koordinasi pengawasan selama 1 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan adalah koordinasi Inspektorat Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalsel dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka sinergitas pelaksanaan pengawasan untuk mencapai good governance dan clean governance.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan. Target kinerja pada kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan adalah Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan sebanyak 1 dokumen berupa Sistem dan Prosedur Pengawasan.

j. Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas APIP Sesuai dengan target Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode IA-CM yang sudah disahkan oleh The Institute of Internal Auditor. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area (KPA)

Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banjar telah

mencapai level 3 dengan catatan. Hal tersebut didapat berdasarkan hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Quality Assurance (QA) oleh Tim BPKP Pusat. Kapabilitas APIP dengan Level 3 (integrated) menggambarkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam oleh APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu level 3 dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga 100%, maka tingkat capaian ini dapat dipertahankan dan telah menyumbang 100% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020. Faktor pendorong yang memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar mencapai Kapabilitas APIP dengan level 3 (integrated) diantaranya karena Inspektorat Kabupaten Banjar telah menerapkan sistem dan prosedur pengawasan yang terstandar, memiliki kompetensi aparat pengawasan yang memadai, memiliki pola pembinaan dan pengembangan profesionalisme aparat pengawasan yang berkesinambungan serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Capaian indikator ini lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel :

Tabel 3. 88. Capaian Indikator Tingkat Kapabilitas APIP

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut : Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriks dan Aparatur Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Target kinerja pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan adalah 30 orang dan terealisasi 30 orang (100%). Kegiatan Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan dengan pengiriman APIP baik pejabat fungsional, pejabat struktural dan fungsional umum/staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan untuk peningkatan karier dan diklat/bimbingan teknis (bimtek) sesuai kebutuhan yang diselenggarakan di daerah maupun diluar daerah

k. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

Target prosentasi temuan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan sebesar 80% telah tercapai 81,69%. Tindaklanjut atas rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan merupakan umpan balik (feedback) dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang didapatkan pada saat pelaksanaan pengawasan. Capaian tersebut mengalami peningkatan di banding capaian tahun 2017 dimana prosentasi temuan yang ditindaklanjuti tercapai 81,40%.

Tabel 3. 89. Capaian Indikator Prosentasi Temuan yang Ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti	101,75%	80%	81,69%	102,1%	80%	102,11%

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 102,11 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik

Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan diwajibkan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa. Segala rekomendasi yang termuat dalam LHP tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah yang diperiksa. Selain itu juga, Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi koordinator untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Banjar. TLHP Inspektorat Kabupaten Banjar berbobot 40%

dalam pencapaian indikator tersebut, sedangkan TLHP BPK RI berbobot 60%.

Untuk tahun 2018, Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar menghasilkan 474 rekomendasi temuan. Rekomendasi temuan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 336 buah (70,89%) dan 136 buah (29,11%) rekomendasi temuan belum selesai ditindaklanjuti. Sedangkan berdasarkan hasil pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Banjar, jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 776 buah (88,89%) dari 873 buah temuan. Berdasarkan data-data tersebut, Prosentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah $(70,89\% \times 40\%) + (88,89\% \times 60\%) = 81,69\%$.

Faktor pendorong yang memungkinkan tercapainya target prosentase temuan yang ditindaklanjuti diantaranya karena Inspektorat Kabupaten Banjar selalu mendorong dan memfasilitasi SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pemeriksaan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian ,antara lain sebagai berikut : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Target kinerja kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 80% dari seluruh total temuan pemeriksaan dengan realisasi sebesar 81,69% sehingga capaian kinerjanya adalah 102,11%. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut atas inventarisasi temuan hasil pemeriksaan baik dari aparat pengawas eksternal maupun temuan aparat pengawas internal yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut kepada SKPD terperiksa. Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender hasil temuan harus terselesaikan.

I. Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan

Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan rata-rata antara indikator persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP B (Baik) dan persentase SKPD yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi SAKIP dilakukan terhadap 5 (lima)

komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP SKPD Tahun 2016, dari 54 SKPD yang dievaluasi, sebanyak 41 SKPD (75,93%) telah mendapatkan nilai SAKIP ≥ 60 dan 13 SKPD (24,07%) mendapatkan nilai SAKIP < 60 . Capaian tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya hanya 58% SKPD mendapat nilai SAKIP ≥ 60 . Capaian tersebut belum mencapai 80% sebagaimana target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya implementasi SAKIP pada seluruh Pemerintah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Sedangkan terkait target SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP telah tercapai 100% mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pemeriksaan (WTP). Hal tersebut menggambarkan bahwa seluruh SKPD telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP. Capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya dimana Pemerintah Kabupaten Banjar juga mendapatkan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016. Inspektorat Kabupaten Banjar dalam kegiatan pengawasan menjadikan pengelolaan keuangan sebagai salah satu fokus pengawasan. Pengawasan atas pengelolaan keuangan difokuskan pada aspek kepatuhan atas peraturan perundang-undangan bidang keuangan serta pengendalian internalnya.

Berdasarkan data-data di atas, didapatkan prosentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah $(75,93\%+100\%)/2 = 87,97\%$. Realisasi indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 75,76% dengan capaian 116,12%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2017 yang memperoleh capaian 130,34%, maka tingkat capaian ini mengalami penurunan 14,22% dan telah menyumbang 79% pada capaian akhir RPJMD tahun 2020.

Tabel 3. 90. Capaian indikator Persentase Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

1.	Persentase Kepatuhan SKPD/entitas terhadap peraturan perundang-undangan (Rata-rata SAKIP dan SAP)	79	130,34	75,76	87,97	116,12	100%	87,97%
	SKPD yang mendapat nilai SAKIP \geq 60		82,86 %	80%	75,93 %	94,91%	100%	75,93
	SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 116,12 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan baik. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian tersebut adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawas Internal Secara Berkala. yakni dengan dilaksanakannya kegiatan pengawasan sebanyak 225 kali dan terealisasi sebanyak 258 kali. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama yaitu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Pengawasan dilakukan terhadap seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kelurahan, Puskesmas dan Pemerintah Desa. Pengawasan juga dilakukan terhadap permintaan pemeriksaan dari SKPD, Audit Kinerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Reviu LKPD, Reviu LKJIP, reviu RKA dan Evaluasi SAKIP serta Evaluasi Perizinan. Kegiatan dan Program ini juga mendukung indikator Tingkat Maturitas SPIP.

Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat dalam pencapaian indikator Jumlah SKPD yang mendapat nilai SAKIP \geq 60 diantaranya adalah :

1. Implementasi SAKIP oleh SKPD masih kurang diantaranya karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan pun tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

2. Tindaklanjut atas hasil evaluasi SAKIP belum dilakukan sepenuhnya, sehingga permasalahan yang menjadi hasil evaluasi terulang kembali.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar menempuh langkah-langkah antisipatif, diantaranya adalah :

1. Mendorong SKPD untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik;
2. Melakukan pendampingan terkait dengan perbaikan SAKIP SKPD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.

m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi

Pengaduan masyarakat yang terintegrasi merupakan unit pengaduan masyarakat yang dilaporkan melalui aplikasi LAPOR!. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi adalah jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan keseluruhan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2018 ini laporan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ke instansi terkait sehingga realisasi dari indikator ini adalah 100%. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan semua laporan dapat ditindaklanjuti 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100% dan termasuk dalam kategori pencapaian sangat tinggi. Pencapaian ini dapat berhasil karena sudah ada unit pengaduan yang terintegrasi yang berada di bawah Diskominfo. Pada tahun 2018 ini, indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi telah berkontribusi sebesar 100% terhadap capaian akhir RPJMD di tahun 2020.

Pencapaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 tergolong berhasil dengan didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - Kegiatan ini berupa Penyebar luasan informasi / berita kegiatan pemerintah daerah melalui baleho dengan total 3.000 m², spanduk dengan total 480 m², brosur sebanyak 600 lembar dan pameran / expo yang diikuti sebanyak 1 kali

- o Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyebarluasan informasi melalui media yang bekerjasama sebanyak 30 media, penyelenggaraan konferensi pers sebanyak 12 kali dan penyebaran surat kabar harian ke seluruh SKPD sebanyak 1.080 eksemplar.
- o Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penayangan berita pembangunan daerah yang ditayangkan lewat media TV milik daerah sebanyak 1.027 berita dan lewat media radio milik daerah sebanyak 1.050 berita.

n. Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan

Capaian kinerja pengelola keuangan diukur dan dinilai oleh BPK berdasarkan tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah. Ada beberapa jenis opini yang diberikan oleh BPK antara lain Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), Tidak wajar (adversed opinion) dan Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Pada tahun 2018 BPK-RI memberikan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pemeriksana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Capaian tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian 100% atau masuk pada kategori Sangat Tinggi. Lebih rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 91. Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kab. Banjar Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan	WTP	100	WTP	WTP	100 %	WTP	100

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target WTP diakhir periode maka capaian tahun ini telah dapat terpenuhi,

sehingga upaya yang dilakukan adalah mempertahankan prestasi yang telah diraih dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Kabupaten Banjar berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah memenuhi indikator keberhasilan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI, Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undnagan, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset

Opini WTP yang diterima Kabupaten Banjar ini merupakan kali ke lima, pertama kali diterima pada tahun 2013 dan dapat dipertahankan hingga tahun 2018, hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Banjar telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance dan terus mengalami perbaikan. untuk memperoleh opini WTP tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan memiliki informasi atau berkecukupan pengungkapan namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem Pengendalian internal yang memadai.

Gambar 3. 118. Bupati Banjar H Khalilurrahman Menerima Penghargaan Dari Bpk RI



Prestasi penilaian pengelolaan keuangan di kabupaten banjar seirama dengan capaian yang diterima oleh provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ada 12 LKPD yang diberikan opini WTP dari 13 kabupaten dan kota seluruh Kalsel, namun masih ada satu kabupaten yakni Hulu Sungai Tengah (HST) diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Keberhasilan pencapaian opini WTP dari BPK RI tidak lepas dari dukungan pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 92. Indikator Pendukung Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kab. Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Realiasi (%)
1.	Tersusunnya Raperda dan Raperbub Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Maret 2018	Maret 2018	100 %
2.	Tersusunnya Raperda dan Raperbub Tentang APBD Tepat Waktu tahun 2019	Oktober 2018	September 2018	100 %
3.	Terwujudnya Raperda dan Raperda tentang R-APBD Tepat Waktu tahun 2018	Agustus 2018	Agustus 2018	100 %
4.	Tersajinya Data Barang Milik Daerah Hasil Rekonsiliasi Per Triwulan	54 SKPD	51 SKPD	94 %
5.	Terselenggaranya Penyaluran Belanja Daerah Sesuai Anggaran Kas	93%	91,54 %	98 %

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa tingkat capaian kinerja

terhadap tersusunnya tentang APBD Tepat waktu yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan ditunjukkan dengan indikator lamanya waktu penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD yang dapat mencapai 100%, pencapaian angka 100% tersebut diperoleh karena lamanya waktu penyusunan Raperda APBD Kabupaten Banjar dari target yang ditetapkan selama 60 hari dapat tercapai, sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA/PPAS sampai dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Banjar kepada DPRD. Untuk indikator kinerja terhadap penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD dapat tercapai 100% dari target yang ditentukan, hal tersebut ditunjukkan dengan tersusunnya Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018 sesuai dengan yang diagendakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 dapat terlaksana pada bulan September 2018, hal tersebut dapat dilaksanakan melampaui dengan target yang telah ditentukan yaitu pada bulan Oktober 2018.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung dari indikator tersebut adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- o Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berupa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar, serta Rancangan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjar.
- o Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2019 Berupa penyusunan APBD 2019 dengan pengesahan melalui Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor : 11 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
- o Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 Berupa penyusunan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan disahkan dengan Peraturan KDH

- Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Berupa penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 8 Tahun 2018 Tanggal 19 Oktober 2018.
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Berupa penyusunan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disahkan dengan ditetapkannya 4 (empat) buah Peraturan KDH, yaitu : Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 Tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Banjar Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran ABPD 2018, Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Bupati Banjar Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disahkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Nomor 7 Tahun 2018.
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan terbitnya 1 dokumen Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2017 Nomor 38 Tahun 2018.
 - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah berupa Aplikasi SIMDA Keuangan yang tersambung jaringannya pada 34 SKPD.
 - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berupa tersajinya 1 (satu) dokumen Laporan Piutang Daerah, 1 (satu) dokumen Investasi Daerah, 1 (satu) dokumen TPTGR, 1 (satu) dokumen Buku Besar, 1 (satu) dokumen Laporan Konsolidasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan 1 (satu) dokumen Laporan Konsolidasi Realisasi Dana Pembantuan, kelima dokumen tersebut

- dibuat dalam setiap triwulan.
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berupa sosialisasi dan terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIMDA.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan, yaitu : Bimbingan Teknis tentang BLUD, Bimbingan Teknis tentang Dana BOS, Bimbingan Teknis tentang Planning Budgeting, Bimbingan Teknis tentang Analisis Standar Belaja (ASB), dan Sinkronisasi Usulan Anggaran Program dan Kegiatan SKPD.
 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah berupa pelatihan terhadap Pengurus Barang Milik Daerah yang ikuti sebanyak 105 dari 108 yang telah ditargetkan (97%), rekonsiliasi barang milik daerah sebanyak 4 kali selama tahun 2018 dari 54 SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi sebanyak 51 SKPD (94%) dari serta adanya inventarisa terhadap tanah dan bangunan sebanyak 33 objek dapat terlaksana secara keseluruhan (100%).
 - Peningkatan Manajemen Investasi Daerah berupa dokumentasi proses pengajuan pinjam pakai dari instansi pertikal sebanyak 6 pengajuan, meliputi 1 Daerah Operasional Manggala Aqni (DOAP) Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI, serta Lapas Narkotik, Lapas Perempuan Martapura, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar (sebanyak 3 surat pengajuan). Proses pinjam pakai dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu : Permohonan, telaahan kepada kepala daerah, persetujuan kepala daerah, perjanjian, penyerahan/Berita Acara Serah Terima (BAST). Sebanyak 4 (empat) pengajuan telah terselesaikan, yaitu dari DOAP dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar (100%), sementara untuk Lapas Narkotik telah sampai pada proses telaahan kepada Bapak Bupati (40%), sementara Proses untuk Lapas Perempuan Martapura sampai pada persetujuan Bapak Bupati Banjar (75%).
 - Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah berupa penilaian terhadap Tanah dan Bangunan oleh KPKNL Banjarmasin terhadap 21 objek Tanah dan Bangunan untuk dilakukan penilaian.
 - Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran dengan diterbitkannya dokumen Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana dan DPA/DPPA untuk 34 SKPD tahun 2018.

- o Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah dengan diterbitkannya 7.712 SP2D SKPD untuk Tahun Anggaran 2018.
- o Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah Pagu anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah sebesar Rp. 752.400.000,- dengan target kinerja terlaksananya penerbitan 6.437 dokumen belanja pegawai, realisasi keuangan sebesar Rp. 710.610.640,- (94%) dengan realisasi fisik sebesar 102%, yaitu dengan dapat diterbitkannya 6.581 dokumen belanja pegawai pada tahun 2018.
- o Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD berupa diterbitkannya 2.716 dokumen penyaluran dana hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan dana desa, alokasi dana desa dan pembiayaan untuk tahun 2018.
- o Peningkatan Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran berupa terbitnya 4 (empat) dokumen Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Analisis standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar.

o. Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator ke-15 untuk mengukur kinerja sasaran Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas adalah Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah, diperoleh dari jumlah realisasi penerimaan daerah terhadap target penerimaan daerah yang ditetapkan.

Tabel 3. 93. Indikator Kinerja Nilai Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Capaian	97.46	99	103,52	104.57	100	103.52

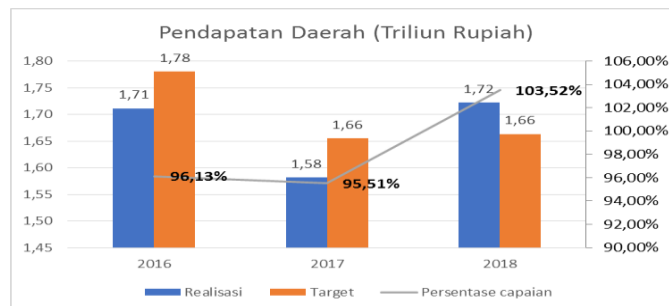
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

	Penerimaan Pendapatan Daerah						
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pada Tahun 2018 target yang ditetapkan adalah sebesar 99% dan teralisasi sebesar 103,52% dengan kata lain berhasil menaikkan capaian sebesar 4,52% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Adapun besaran target pendapatan daerah yang harus dicapai sebesar Rp. 1.663.325.926.645,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.721.884.053.067,-. Hal ini tentu saja merupakan suatu keberhasilan mengingat capaian yang telah melampaui target sebesar 4,52% atau Rp. 58.558.126.422,-. Dibanding tahun tahun 2017 maka capain tahun ini lebih baik, dimana tahun 2017 target yang ditetapkan adalah sebesar 98% dan terealisasi sebesar 95,51%. Bila dibandingkan dengan akhir periode RPJMD dimana ditargetkan 100% maka capaian tahun 2018 ini sudah sangat baik.

Selama periode 2016 – 2017 realisasi pendapatan daerah belum pernah melampaui target atau selalu lebih rendah dari target yang ditetapkan, namun pada tahun 2018 realisasi pendapatan mampu memenuhi target bahkan melampauinya sebagaimana tergambar pada gambar berikut.

Gambar 3. 119. Grafik Pendapatan Daerah Kab. Banjar Tahun 2016 - 2018



Target penerimaan pendapatan daerah tidak lepas dari ketetapan pemerintah daerah bersama unsur legislatif yang dituangkan melalui Peraturan Daerah berupa angka nominal berdasarkan ketetapan dan kesepakatan bersama. Target tersebut pada dasarnya setiap tahun mengalami perubahan sesuai kebutuhan daerah, namun perubahan hanya merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan dan keuangan daerah serta permasalahan pendapatan lainnya dan cenderung hanya 2 kali dalam setahun yaitu pada akhir tahun untuk menetapkan target

murni tahun berikutnya dan tahun berjalan untuk menetapkan target perubahan pada triwulan IV.

Pendapatan daerah secara aturan sudah ditegaskan bagian mana saja yang boleh dikenakan pungutan dan bagian mana yang tidak boleh, sehingga daerah ada keterbatasan terhadap jumlah pungutan yang bisa dilakukannya. Batasan tersebut tentunya membatasi gerak daerah untuk mengembangkan potensinya terhadap pungutan lain yang lebih potensial, akan tetapi selama aturannya belum berubah maka pungutan yang tidak ada diaturan dianggap ilegal dan melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi.

Berangkat dari hal tersebut kami hanya mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada dalam artian memaksimalkan penerimaan dari sektor yang sesuai ketentuan tanpa bisa meningkatkan potensi lainnya yang diluar ketentuan pemerintah pusat. Begitu pula terhadap objek dan wajib pajak dikarenakan pajak merupakan kewajiban seseorang untuk melaporkan harta dan usaha yang dimilikinya, Bapenda hanya mampu melakukan pengawasan dan penyisiran jikalau ada objek pajak dan wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah dibatasi pada 11 item pajak daerah dan 3 retribusi daerah. Padahal item tersebut merupakan lahan potensial untuk menggali pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka daerah menyusun Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang pajak daerah yaitu menetapkan 11 pajak daerah antara lain :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Daerah nomor 6, 7 dan 8 tahun 2011 yang terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2011)
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Kebersihan
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Sipil
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2011)
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Pelayanan Pelabuhan
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

3. Retribusi Perijinan Tertentu (Perda No. 8 Tahun 2011)
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Izin Trayek
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan\

Untuk bagi hasil laba perusahaan daerah terdiri dari :

1. Perusahaan Daerah
 - PD. Baramarta
 - PD. PBB (Pasar Bauntung Batuah
 - PD. BIM (Barakat Intan Mandiri)

2. BUMD
 - Bank Kalsel
 - BPR (Bank Pembangunan Rakyat)

Sedangkan lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
2. Penerimaan Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga Deposito
4. Tuntutan Ganti Rugi
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan PK
6. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
7. Pendapatan Denda Pajak
8. Pendapatan dari Pengembalian
9. Pendapatan Denda Pelanggaran Perda
10. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
11. Pendapatan dari Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Rs. Raza)
12. Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
13. Pendapatan dari Kontribusi Investasi Pembangunan

Selain itu penerimaan dari sektor dana perimbangan seperti dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAK dan DAU serta lain-lain pendapatan daerah yang sah juga turut memberi andil yang besar terhadap pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi besaran penerimaan dari dana transfer tersebut secara perhitungannya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan target tersebut dengan melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan, dimana 4 dari 5 program merupakan program penunjang dengan 20 kegiatan, sedangkan 1 dari 5 program merupakan program utama dengan 3 kegiatan didalamnya yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan 3 kegiatannya yaitu penyusunan sistem informasi keuangan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB. Adapun tingkat capaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 94. Capaian Kinerja Pendukung Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun n		
		Target	Realisasi	Capaian

1.	Persentase capaian penerimaan DBH Pajak / Bukan Pajak	85,5	177,52	100
2.	Persentase capaian penerimaan PAD	100	107,26	100
3.	Persentase capaian penerimaan PBB P2 dan BPHTB	100	135,33	100

Sumber: Data Diolah Bapenda Kabupaten Banjar 2018

Indikator yang mendukung pencapaian realisasi pendapatan daerah adalah Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah dimaksud yaitu persentase capaian dari total penerimaan PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.

Program yang dilaksanakan adalah program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dengan Target: 85,5% atau sebesar Rp. 127.052.574.859, Realisasi: 177,52% atau sebesar Rp. 225.540.392.459,- Persentase: 100%
2. Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target: 100% atau sebesar Rp. 172.884.861.363,-, Realisasi: 107,26% atau sebesar Rp. 185.437.045.550,- Persentase: 100%
3. Persentase Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Target: 100% atau sebesar Rp. 25.678.000.000,-, Realisasi: 135,33% atau sebesar Rp. 34.750.013.506,-, Persentase: 100%

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian program tersebut meliputi :

1. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah, kegiatan ini bertumpu pada pencapaian indikator dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, dimana dana bagi hasil merupakan dana transfer yang tercantum dalam struktur dana perimbangan serta lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pemantauan dan pengkajian potensi pajak daerah, pembuatan buku laporan triwulanan realisasi pendapatan daerah, rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD pemungut, akurasi data dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak termasuk juga DAK, DAU, hibah, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, kegiatan ini bertumpu pada pencapaian indikator PAD, dimana kegiatan lebih bertumpu pada penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan dan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak PAD, penagihan, pengawasan, penyuluhan, evaluasi serta perhitungan realisasi anggaran tahun sebelumnya, target perubahan tahun berjalan dan target murni tahun yang akan datang.

3. Optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB, kegiatan ini bertumpu pada pencapaian indikator PAD, dimana kegiatan lebih bertumpu pada penerimaan sektor PBB P2 dan BPHTB.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pekan panutan pembayaran PBB P2, verifikasi data BPHTB, verifikasi data DHKP dan PBB P2, operasi sisir, rekon data PBB P2 dan P3, pendataan validasi.

Terdapat beberapa kendala seperti contoh dalam menjalankan program utama banyaknya kasus yang dihadapi karena kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak selain itu banyaknya piutang PBB P2 yang masih bersifat gelondongan dan transfer dana dari pemerintah pusat yang kadang mengalami penundaan atau bahkan pengurangan.

Solusi dari setiap permasalahan tentu saja beraneka ragam seperti tim pengawasan pajak dan evaluasi pajak dengan melakukan serangkaian sosialisasi, uji petik dan operasi sisir guna memaksimalkan capaian pajak. Selain itu juga melakukan studi komparasi kepada daerah-daerah yang telah melakukan penyesuaian NJOP tanpa adanya resistensi masyarakat sebagai wajib pajak. Adanya koordinasi yang intensif juga merupakan usaha yang telah dilakukan oleh Bapenda untuk menekan permasalahan yang dihadapi.

Faktor keberhasilan pada Bapenda dapat dilihat pada berhasilnya sosialisasi yang diadakan sehingga kesadaran wajib pajak semakin meningkat, seperti dapat dilihat dari tercapainya seluruh target yang ditetapkan bahkan semua realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Konsultasi yang dilakukan pada pemerintah pusat dan kementerian pun berbuah hasil yang baik dikarenakan penyaluran dana transfer dari kementerian yang bersangkutan tidak ada penundaan dan bisa berjalan dengan baik.

Adapun kendala atau permasalahan yang dialami selama pelaksanaan program dan kegiatan utama antara lain :

- 1) Pajak Air Tanah yang tidak mencapai target dikarenakan rendahnya tarif Nilai Perolehan Air (NPA), sedangkan kewenangan untuk menetapkan NPA sebagian besar pengenaannya berada pada pemerintah provinsi;

Tabel 3. 95. Data Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari Pajak Air Tanah

No	Sumber	Target Perubahan	Realisasi Tahun 2018	%
1	Pajak Air Tanah	100.000.000,-	10.198.766,-	10,20

- 2) Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat gelondongan (belum by name by address) sehingga memerlukan validasi kebenaran data dan piutang untuk kemudian dilakukan cleansing data
- 3) SDM yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak
- 4) Penyesuaian NJOP PBB masih menemui kendala karena PBB merupakan pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan kajian lebih mendalam secara akademis, politik dan sosial
- 5) Untuk BPHTB karena bersifat self assessment dimana WP melakukan penghitungan sendiri besaran pajak yang dibayarkan, nilainya bergantung dari kondisi perekonomian suatu daerah

- 6) Belum optimalnya penilaian individual untuk objek pajak PBB yang potensial sementara perkembangan wilayah berjalan dengan cepat
- 7) Belum adanya zona nilai tanah yang lebih mencerminkan kondisi mendekati harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam pembayaran BPHTB
- 8) Penerimaan DAK dengan total target Rp. 297.384.089.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 272.331.969.107,- atau 91,58% masih mengalami kekurangan sebesar 25M dikarenakan laporan dari SKPD teknis yang belum selesai sehingga penyaluran dari Pemerintah Pusat terhambat.
- 9) Penerimaan Hibah dari Pemerintah ditargetkan Rp. 53.669.000.000,- dan baru terealisasi sebesar Rp. 20.647.326.994,- atau 38,47% masih mengalami kekurangan sebesar 33M dikarenakan akan dibayar susulan ke kas daerah.

Adapun solusi dan saran yang harus segera dilakukan untuk menghadapi beberapa permasalahan di atas antara lain:

- 1) Menaikkan tarif Nilai Perolehan Air (NPA) serta berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalsel untuk membuat Keputusan Gubernur.
- 2) Pendataan PBB P2 pada tahun 2018 diarahkan pada verifikasi dan difokuskan pada kecamatan yang menjadi prioritas serta melakukan studi komparasi ke daerah yang telah menghapuskan denda piutang PBB P2
- 3) Bekerjasama dengan BKDPSDM terkait penerimaan CPNS yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan serta memfasilitasi pelaksanaan Diklat bagi PNS tentang penilaian, juru sita dan pemeriksa pajak
- 4) Melakukan studi komparasi kepada daerah yang telah melakukan penyesuaian NJOP tanpa adanya resistensi masyarakat sebagai wajib pajak
- 5) Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada notaris/PPAT dan BPN agar nilai transaksi BPHTB mendekati harga pasar serta melakukan kajian untuk penerapan e-BPHTB

- 6) Melakukan inovasi berupa jemput bola terhadap pelayanan PBB P2 sekaligus memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar melaporkan objek pajak apabila mengalami perubahan serta melakukan pengawasan terhadap penilaian individual
- 7) Melakukan koordinasi dengan BPN terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) serta studi komparasi ke daerah yang sudah menerapkan ZNT dalam penentuan NJOP PBB P2 dan BPHTB
- 8) SKPD teknis segera menyelesaikan laporan administrasi DAK agar penyaluran dari Pemerintah Pusat lancar.
- 9) Hibah sudah disalurkan ke Kas Daerah sehingga sudah terealisasi 20 M untuk sisa ± 33M akan dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kal-Sel.

Adapun faktor keberhasilan dari Badan Pendapatan Kabupaten Banjar dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3. 96. Data Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari Pajak Hotel, restoran, Hiburan, Reklame, dll

No	Sumber	Target Perubahan	Realisasi Tahun 2018	%
1	Pajak Hotel	3.425.000.000,-	3.623.349.977,-	105,79
2	Pajak Restoran	5.163.000.000,-	6.647.122.430,-	128,75
3	Pajak Hiburan / Keramaian	195.000.000,-	237.484.100,-	121,79
4	Pajak Reklame	720.000.000,-	922.891.620,-	128,18
5	Pajak Penerangan Jalan	19.850.000.000,-	22.162.220.533,-	111,65
6	Pajak Parkir	660.000.000,-	718.580.573,-	108,88
7	Pajak Sarang Burung Walet	32.000.000,-	45.110.000,-	140,97
8	Pajak MBLB	1.850.795.690,-	2.689.642.855,-	145,32
9	Pajak Bumi & Bangunan	5.360.000.000,-	6.956.050.795,-	129,78
10	Pajak BPHTB	20.318.000.000,-	27.793.962.711,-	136,79

Sumber: Data diolah Bapenda Kabupaten Banjar 2018

Hal ini dikarenakan adanya opsir dan sosialisasi yang dilakukan guna mengoptimalkan dan memaksimalkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

- 1) Realisasi pajak PPh 21 telah tercapai dengan target sebesar Rp. 4.781.089.509,- terealisasi sebesar Rp. 10.221.192.583,- atau 213,78% dikarenakan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke KP Pratama dan Kementerian terkait berjalan dengan baik. Pembahasan tersebut diusulkan pada saat Rakoreg PPh dibahas penetapan dan penyaluran PPh 21 berdasarkan realisasi penerimaan PPh 21.
- 2) Realisasi pajak PPH 25 telah tercapai dengan target sebesar Rp. 489.255.000,- terealisasi sebesar Rp. 640.794.742,- atau 130,97% dikarenakan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke KP Pratama dan Kementerian terkait berjalan dengan baik. Pembahasan tersebut diusulkan pada saat Rakoreg PPh dibahas penetapan dan penyaluran PPh 25 berdasarkan realisasi penerimaan PPh 25.
- 3) Realisasi PBB Pusat telah tercapai dengan target sebesar Rp. 4.424.338.250,- terealisasi sebesar Rp. 17.657.967.071,- atau 399,11% dikarenakan pembahasan tersebut diusulkan pada saat Rakoreg PBB Pusat dibahas penetapan dan penyaluran PBB Pusat berdasarkan realisasi penerimaan PBB Pusat.
- 4) Realisasi DBH Land – Rent dan Royalti telah tercapai dengan untuk Land – Rent sebesar Rp. 1.303.145.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.406.227.923,- atau 107,91% dan target untuk Royalti sebesar Rp. 115.240.099.400,- terealisasi sebesar Rp. 194.430.490.152,- atau 168,72%, hal ini dikarenakan penerimaan negara sektor PNBPNP minerba terjadi peningkatan dikarenakan besarnya produksi dan penjualan batubara baik impor maupun ekspor.
- 5) Realisasi DBH Pajak Provinsi telah tercapai dengan target sebesar Rp. 96.796.048.423,- terealisasi sebesar Rp. 102.387.965.957,- atau 105,78%, hal ini dikarenakan penerimaan DBH pajak provinsi dan pajak rokok meningkat karena adanya kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

- 6) Realisasi DBH Perikanan telah tercapai dengan target sebesar Rp. 660.118.900,- terealisasi sebesar Rp. 701.234.591,- atau 106,23% dikarenakan konsultasi yang dilakukan pada Kementerian Perikanan berjalan dengan baik sehingga penetapan dan penyaluran DBH Perikanan berjalan dengan lancar.
- 7) Realisasi DBH minyak bumi telah tercapai dengan target sebesar Rp. 93.429.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.037.107,- atau 259,06% dikarenakan konsultasi yang dilakukan pada Kementerian ESDM berjalan dengan baik sehingga penetapan dan penyaluran DBH minyak bumi berjalan dengan lancar.
 - o Realisasi DBH kehutanan telah tercapai dengan target sebesar Rp. 61.099.200,- terealisasi sebesar Rp. 240.448.290,- atau 393,54% dikarenakan konsultasi yang dilakukan pada Kementerian Kehutanan berjalan dengan baik sehingga penetapan dan penyaluran DBH Kehutanan berjalan dengan

p. Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa

Desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa adalah desa yang mampu mengelola keuangan dan aset desanya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa yaitu Desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa adalah desa yang mampu mengelola keuangan dan aset desanya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa, Persentase desa tertib pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan perbandingan antara jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dibagi jumlah seluruh desa.

Realisasi adalah 100% dengan target dalam rpjmd 79.40% pada Tahun 2018 ini. DPMD Kab. Banjar untuk capaian kinerja tahun 2018 meningkat sebesar 54,87 % dari realisasi tahun 2017 yaitu 45,13 %. Untuk tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja (% realisasi) sebesar 125.94 % yaitu sangat tinggi.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- o Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Target kinerja pada kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa adalah Terlaksananya pembinaan penyusunan Perdes tentang APBDesa (277 Desa)dengan realisasi kinerja Terlaksananya pembinaan penyusunan Perdes tentang APBDesa (277 Desa)dengan capaian 100 %. Realisasi kegiatan ini adalah kegiatan berupa pembinaan penyusunan Perdes tentang APBDesa yaitu dengan monev penyusunan APBDes di 20 Kecamatan di Kabupaten Banjar

- o Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Target kinerja pada kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa adalah 277 Desa, 1 Dok dengan realisasi kinerja 277 Desa, 1 Dok dengan capaian 100%. Target kinerja pada kegiatan Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa adalah Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa (277 desa) dengan realisasi kinerjaTerlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa (277 desa)dengan capaian 100 %

q. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati

Indikator lainnya untuk mengukur kinerja sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas adalah Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. maksud dari indikator ini adalah menciptakan pemahaman serta kepatuhan pada masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum daerah. Perhitungan indikator adalah dengan cara membandingkan jumlah Perda dan Perbup yang ditegakkan dengan jumlah peraturan yang harus ditegakkan.

Perda yang memiliki sangsi yang ada di Kabupaten Banjar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 97. Daftar Perda Yang Memiliki Sangsi di Kab. Banjar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

NO.	Perda Yang Memiliki Sangsi		Target	Realisasi
	NOMOR/ TAHUN	TENTANG		
1	02 th.1998	Pajak pengembalian dan pengolahan bahan galian golongan C	✓	x•
2	13 th.2001	Pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima	✓	✓
3	05 th.2004	Perubahan Atas Perda Kab.Banjar no. 10 th. 2001 ttg Membuka Restoran, Warung, Rombongan Dan Yang Sejenis Serta Makan Minum Dan Atau Merokok Ditempat Umum Pada Bulan Ramadan.	✓	✓
4	07 th.2005	Pengawasan Dan Perlindungan Sumber Daya Ikan.	✓	✓
5	8 th.2005	Jum'at Khusyu'	✓	✓
6	06 th.2013	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Dan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan	✓	x•
7	08 th.2006	Izin usaha distribusi BBM, Non BBM dan penunjang minyak dan gas	✓	x•
8	09 th.2007	Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjar		
9	10 th.2007	Ketertiban Sosial	✓	✓
10	19 th.2007	Kebersihan Lingkungan	✓	✓
11	14 th.2009	Pajak Reklame	✓	✓
12	2 th.2011	Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	✓	✓
13	3 th.2011	Pajak Daerah	✓	✓
14	6 th.2011	Retribusi Jasa Umum		
15	7 th.2011	Retribusi Jasa Usaha		
16	8 th.2011	Retribusi Perizinan Tertentu	✓	✓
17	12 th.2011	Penyelenggaraan Perizinan	✓	✓
18	1 th.2012	Pengelolaan Air Limbah	✓	✓
19	2 th.2012	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	✓	✓
20	4 th.2012	Bangunan Gedung	✓	✓
21	9 th.2012	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
22	10th.2012	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Di Kabupaten Banjar		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

NO.	Perda Yang Memiliki Sangsi		Target	Realisasi
	NOMOR/ TAHUN	TENTANG		
23	11 th.2012	Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Banjar	✓	x*
24	12 th.2012	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		
25	1 th.2013	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	✓	✓
26	3 th.2013	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032		
27	6 th.2013	Perubahan Atas Perda Kab. Banjar No.13 Th.2005 Ttg Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Dan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan	✓	✓
28	1 th.2014	Bangunan Panggung		
29	2 th.2014	Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.	✓	✓
30	5 th.2014	Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Banjar No. 19 Th. 2007 ttg Kebersihan Lingkungan.	✓	x*
31	14 th.2014	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	✓	✓
32	15 th.2014	Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya.	✓	✓
33	18 th.2014	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar		
34	1 th.2015	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Penerangan Jalan Lingkungan		
35	2 th.2015	Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan		

Dari sejumlah perda tersebut, pada periode RPJMD ini ditargetkan sebanyak 23 perda yang akan ditegakkan. Dari tabel tersebut perda yang akan ditegakkan adalah pada kolom target yang diberi tanda centang (✓). Pada tahun 2018 di targetkan sebesar 85% dari jumlah perda yang akan ditegakkan atau sebanyak 21 perda. Dari jumlah tersebut yang dapat direalisasikan sebanyak 19 perda, pada tabel diatas terdapat pada kolom realisasi yang diberi centang (✓). Dengan kata lain dapat direalisasikan sebesar 82,61%. Dari hasil tersebut diperoleh capaian indikator ini sebesar 97,19% atau masuk

pada kategori sangat tinggi, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

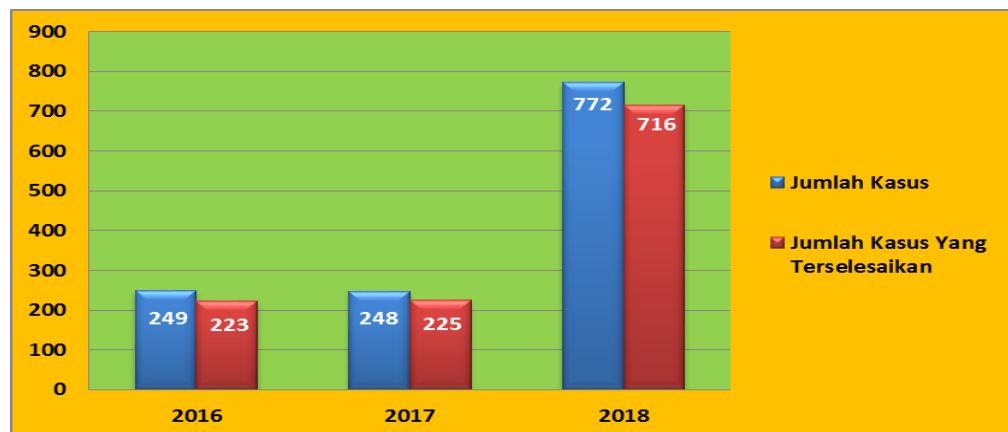
Tabel 3. 98. Realisasi dan capaian Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) <i> jika ada</i>	Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati	Tahun 2015 100%	90.73	85%	84.38%	99.27%	100%	84,38%

Capaian tahun 2018 ini lebih baik dari capaian tahun 2017, dimana tahun 2017 jumlah perda yang ditegakkan ada sebanyak 12 perda atau mengalami peningkatan 7 perda yang dapat tegakkan. Dibanding dengan target akhir RPJMD yang menetapkan target sebesar 100%, capaian tahun ini memberi sumbangan sebesar 84.38%

Dengan bertambahnya jumlah perda yang ditegakkan maka jumlah pelanggaran juga makin meningkat, namun dari jumlah tersebut banyak yang dapat diselesaikan, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3. 120. Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Penanganannya di Kab. Banjar Tahun 2016 -2018



Capaian indikator ini didukung oleh Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, pada tahun 2018 ini telah merencanakan

beberapa rencana aksi yaitu pelaksanaan operasi gabungan penegakan Perda, pelaksanaan pemantauan dan pengidentifikasian terhadap pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan operasi yustisi dan non Yustisi, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, dari pelaksanaan kegiatan tersebut didapat hasil temuan kasus pelanggaran perda sebanyak 722 kasus pelanggaran dapat dapat selesaikan sebanyak 716 kasus pelanggaran Perda, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 99. Angka Pelanggaran Perda per Jenis Kasus Pelanggaran Tahun 2018

No.	JENIS KASUS PELANGGARAN	Jenis Perda	Satuan	Temuan Kasus	Realisasi Penyelesaian Kasus
1	PKL	No.13/2001, tentang Pengaturan dan pembinaan PKL	Kasus	122	122
2	KEARIFAN LOKAL	No. 05/2004, tentang Membuka Restoran, warung, rombongan dan sejenisnya serta makan minum atau merokok di TTU dalam bulan Ramadhan	Kasus	52	52
3	LINGKUNGAN	No. 07/2005, tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan	Kasus	11	11
		No. 1 / 2012, ttg Pengelolaan Air Limbah	Kasus	8	7
		No.06/2013, tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pembakaran Hutan dan atau Lahan	Kasus	3	3
		No.04/2016, tentang Pengelolaan Sampah	Kasus	10	10
4	ASUSILA	No.10/2007, tentang Ketertiban Sosial	Kasus	9	9

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	JENIS KASUS PELANGGARAN	Jenis Perda	Satuan	Temuan Kasus	Realisasi Penyelesaian Kasus
5	JAM SEKOLAH	No.10/2007, tentang Keterlibatan Sosial	Kasus	7	7
6	JALUR HIJAU	No.10/2007, tentang Keterlibatan Sosial	Kasus	48	48
7	GEPENG	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELADANGAN PENGEMIS (PMKS)	Kasus	29	29
8	ANJAL	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELADANGAN PENGEMIS (PMKS)	Kasus	15	15
9	PERIZINAN DAN TATA RUANG	No. 13/2005, ttg Pajak Reklame	Kasus	8	8
		No. 03/2011, tentang Pajak daerah	Kasus	10	10
		No. 8 /2011, ttg Retribusi Perizinan Tertentu	Kasus	18	18
		No. 02/2011, tentang Pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet	Kasus	47	47
		No.12/2011, tentang Penyelenggaraan Perizinan	Kasus	27	26
		No.04/2012, tentang Bangunan Gedung	Kasus	74	74
		No.14/2014, tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kasus	4	4
10	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	No. 15/2014, tentang Pengaturan MIHOL, Obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya	Kasus	22	22
11	PEREDARAN MIRAS ILEGAL	No. 15/2014, tentang Pengaturan MIHOL, Obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya	Kasus	2	2

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	JENIS KASUS PELANGGARAN	Jenis Perda	Satuan	Temuan Kasus	Realisasi Penyelesaian Kasus
12	MINUMAN OPLOSAN	No. 15/2014, tentang Pengaturan MIHOL, Obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya	Kasus	2	2
13	PENYELENGARA HIBURAN MALAM	No. 01/2013, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Kasus	28	24
18	KTP	No. 03/2016, tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Dokumen Kependudukan	Kasus	166	166
TOTAL				722	716

Dari semua rangkaian pelaksanaan yang ada di 2 (dua) kegiatan diatas yaitu kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dan kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan didapat capaian indikator program (outcome) dengan realisasinya adalah 99.02% dari target 85% dimana fomulasi yang digunakan untuk mendapatkan capaian indikator program (outcome) berupa nilai persentase tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda dan produk hukum daerah lainnya adalah jumlah penyelesaian kasus pelanggaran perda dan produk hukum daerah lainnya dibagi jumlah pelanggaran perda dan produk hukum daerah lainnya yang terjadi/ditangani dikali 100%, dengan rincian jumlah kasus pelanggaran perda dan produk hukum daerah lainnya yang ditangani oleh bidang PPHD didapat 722 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 712 kasus sedangkan pada bidang Trantibummas didapat angka kasus pelanggaran sebanyak 300 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 296 kasus pelanggaran, dari capaian indikator program (outcome) yang didapat kriteria penilaian realisasi kinerjanya adalah Sangat Tinggi.

Tabel 3. 100. Program dan Kegiatan Pendukung Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tahun 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Tahun (n-1)	Tahun n			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda dan produk hukum daerah lainnya	90.73%	85%	99.02%	116.50%	100%	116.50%
Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Jumlah pelaksanaan operasi gabungan penegakan Perda	80%	6 kali	6 kali	100%	50 kali	38%
	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengidentifikasian terhadap pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah	100%	250 kali	250 kali	100%	1.000 kali	60.8%
	Terbentuknya Tim Sekretariat PPNS Kabupaten Banjar	100%	12 bulan	12 bulan	100%	60 bulan	60%
	Jumlah pelaksanaan operasi yustisi non Yustisi	100%	40 kali	40 kali	100%	250 kali	56.4%
	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	103 kali	103 kali	100%	1208 kali	40.48%
	Jumlah pelaksanaan pemberian dan penyebaran informasi keberadaan Perda kemasyarakat	100%	16 kali	16 kali	100%	90 kali	44.44%

Faktor-faktor keberhasilan, kendala dan solusi dalam pelaksanaan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal diatas adalah :

1. Faktor keberhasilan pencapaian target, adanya pembenahan dalam sistem kerja terutama dalam hal penanganan kasus pelanggaran Perda lebih baik dan propesonal serta ditingkatkannya pemberdayaan PPNS yang dimiliki Satpol PP maupun yang ada Kabupaten Banjar.

2. kendala, walaupun target tahun ini terpenuhi namun kendala dalam pencapaian target bukanlah tidak ada, adapun kendala yang dihadapi :
 - a) Tidak sebandingnya petugas dalam hal ini PPNS (berkompetensi) yang dimiliki Satpol PP dengan jumlah kasus yang ditemukan/laporkan.
 - b) Penanganan kasus diakhir tahun anggaran.
 - c) Anggaran dan sapsas yang dimiliki sangat terbatas
 - d) Kurangnya kerjasama dengan SKPD teknis dalam penegakan Perda
 - e) Masih adanya intervensi
3. Solusi :
 - a) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD teknis dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait Perda-Perda yang bersangsi.
 - b) Mencari pola-pola yang cocok dengan karakteristik masyarakat agar penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait Perda-Perda yang ingin ditegakkan tepat sasaran efektif dan efisien.
 - c) Meningkatkan mutu SDM dan sapsas penunjang tugas Satpol PP

r. Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani

Indikator lainnya untuk mengukur kinerja sasaran Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas adalah indikator Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani. Realisasi indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban, dikali 100%.

Pada tahun 2018 kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban ada sebanyak 300 kasus, dari kasus tersebut dapat diselesaikan sebesar 296 kasus atau sebesar 98,67%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85% maka capaian indikator ini sebesar 116,04% atau masuk pada kategori tinggi. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 101. Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Yang Ditangani Tahun 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) <i>jika ada</i>	Realisasi 2017	Capaian Tahun (n-1)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Tahun 2015 100%	95.81%	98,51	85%	98.67%	116.08 %	100%	98.57%

Capaian 2018 ini lebih baik dari tahun sebelumnya baik dari pencapaian target maupun peningkatan kasus yang ditangani. Kasus yang ditangani meningkat menjadi 98,67% lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 95,81%. Terhadap target yang ditetapkan capaian tahun 2018 jauh melampaui target, sedangkan tahun sebelumnya masih dibawah target. Bila dibanding dengan target akhir RPJMD realisasi tahun ini telah memberikan sumbangan sebesar 98.87%, sangat optimis target ini dapat dipenuhi.

Lebih rinci kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 102. Jumlah kasus dan penyelesaian kejadian gangguan trantibum tahun 2018

PERATURAN	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS			KASUS YANG TERSELESAIKAN			% KASUS YANG TERSELESAIKAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PERDA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN	KEBERSIHAN	5	2	0	5	2	0	100%	100%	0
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	ASUSILA	11	4	26	11	4	25	100%	100%	96%
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELADANGAN PENGEMIS (PMKS)	ANJAL	9	3	13	9	3	13	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

PERATURAN	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS			KASUS YANG TERSELESAIKAN			% KASUS YANG TERSELESAIKAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MIHOL, OBAT- OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	PENYALAH GUNAAN OBAT ATAU ZAT ADIKTIF	0	0	45	0	0	45	0%	0%	100%
PERDA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA	PKL	133	125	45	76	120	45	57%	96%	100%
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELADANGAN PENGEMIS (PMKS)	GEPENG	12	16	24	12	16	24	100%	100%	100%
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	JALUR HIJAU	141	137	104	135	132	101	96%	96%	97%
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	EVENT MASYARAK AT/ PEMERINTAH	23	19	5	23	19	5	100%	100%	100%
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL	KEGIATAN MENGGAN GGU TERTIBAN UMUM	0	0	36	0	0	36	0%	0%	100%
PERDA NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGA N SUMBER DAYA IKAN	KELESTARIA N SUMBER DAYA IKAN	0	0	2	0	0	2	0%	0%	100%
TUPOKSI SATPOL PP	AKSI MASSA/DEM O	3	1	0	3	1	0	100%	100%	0%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

PERATURAN	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS			KASUS YANG TERSELESAIKAN			% KASUS YANG TERSELESAIKAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	JUMLAH	337	307	300	274	297	296	81.31 %	96.74 %	98.67 %

Program dan kegiatan yang mendukung pada indikator ini adalah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, pada tahun 2018 ini telah melaksanakan operasi penertiban, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang gangguan trantibum, pelaksanaan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembentukan tim sekretariat bersama tentang penanganan pelanggaran trantibum yang terdiri dari beberapa instansi, TNI/ Polri dan SKPD di Kabupaten yang terkait urusan trantibmas. Dari serangkaian kegiatan diatas didapat jumlah gangguan trantibum yang terjadi atau terdata pada tahun 2018 ada 300 kejadian gangguan trantibum dan yang dapat terealisasi penyelesaiannya ada 296 kejadian, dari 300 kasus pelanggaran perda tentang trantibum 15 kasus berasal dari aduan masyarakat.

Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani Tahun 2018

Tabel 3. 103. Persentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang Ditangani Tahun 2018

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Tahun (n-1)	Tahun n			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program pemeliharaan kantrantibmas dan	Persentase tingkat penyelesaian kasus pelanggaran perda	90.73%	85%	99.02%	116.50%	100%	116.50%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Tahun (n-1)	Tahun n			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
pengecahan tindak kriminal	dan produk hukum daerah lainnya						
Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah pelaksanaan operasi penertiban	85%	20 kali	20kali	100%	100kali	60%
	Jumlah pengaduan masyarakat tentang gangguan trantibum yang terakomudir	68.18%	15	13	86.67%	100%	86.67%
	Jumlah pelaksanaan penjagaan dan pengamanan	100%	6 lokasi	6 lokasi	100%	6 lokasi	100%
	Jumlah pelaksanaan rapat tim sekretariat bersama tentang penanganan pelanggaran trantibum	100%	8 kali	8 kali	100%	40 kali	60%

Kegiatan pendukung program tersebut adalah Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dengan output :

1. Jumlah pelaksanaan operasi penertiban, dilaksanakan sebanyak 20 kali dari 20 kali pelaksanaan yang direncanakan
2. Jumlah pengaduan masyarakat tentang gangguan trantibum yang terakomodir, sebanyak 13 pengaduan dari 15 pengaduan masyarakat yang diterima ditahun 2018
3. Jumlah pelaksanaan penjagaan dan pengamanan, ada 6 lokasi dimana setiap obvit dijaga atau diawasi selama 24 jam dengan melibatkan 3 regu jaga selama 1 tahun
4. Jumlah pelaksanaan rapat tim sekretariat bersama tentang penanganan pelanggaran trantibum. Tim terdiri dari beberapa instansi, TNI/Polri dan SKPD di Kabupaten yang terkait urusan trantibmas, dari 8 kali dalam setahun rencana rakor yang akan dilaksanakan terealisasi 8 kali pertemuan

Faktor-faktor keberhasilan, kendala dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dimana pada kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) indikator adalah :

1. Faktor keberhasilan, untuk penurunan angka kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban adalah dilakukannya pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban dan mengoptimalkan pengawasan dan kegiatan Patroli ketentraman dan ketertiban.
2. Faktor kendala, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pada sasaran ini yaitu :
 - a) Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil.
 - b) Minimnya sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi Satpol PP dilapangan terutama mengenai sarana berupa sarana mobilitas pendukung tugas pengawasan dan patroli.
 - c) Belum meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas yang masih menimbulkan pelanggaran yang berulang-ulang disatu kawasan.
 - d) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dan penegak hukum lainnya masalah titik-titik rawan yang minim rambu-rambu larangan atau papan informasi terkait dengan keberadaan Perda atau produk hukum daerah laiannya.
3. Solusi, ada beberapa solusi yang akan diusulkan :
 - a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki
 - b) Menjalin kerjasama dengan pihak kecamatan dalam hal ini kasi trantib kecamatan terutama pada kecamatan kecamatan yang tidak ada anggota Satpol PP yang perbantukan untuk bisa membantu dalam hal pengawasan pelanggaran perda dilevel wilayah kecamatan.
 - c) Mengajak pihak ketiga baik itu pembuatan sarana dan prasana pendukung terlaksananya ataupun tersosialisasinya Perda atau produk hukum daerah laiannya.
- s. **Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat paian penerimaan Pendapatan Daerah**

Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat merupakan jumlah kejadian mediasi atau fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat dibandingkan dengan jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat berupa unjuk rasa, demonstrasi atau julah gejala masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar selaku SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri.

Akumulasi perhitungannya (jumlah mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat/jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat x 100%). Realisasi 100%, target 100%, pencapaian kinerja sebanyak 100%. Pada tahun 2018 terjadi 1 (satu) Demo terkait hak angket, peran Bakesbangpol melalui kominda melakukan pemantauan, kemudian melaporkan situasi dan kondisi terkait demo tersebut kepada Bupati Banjar.

$$\frac{\text{Jumlah mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat}}{\text{Jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat}} \times 100\%$$

Program yang digunakan oleh Kesbangpol adalah :

- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. Tolak ukur dari sasaran ini adalah jumlah kegiatan dengan instansi terkait, target ditahun 2018 sebanyak 12 koordinasi/pertemuan, realisasi 12 kegiatan ini jadi persentase realisasi kinerja di kategorikan baik, tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpeliharanya stabilitas. Realisasi kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi/pertemuan kantrantibmas di wilayah Kab. Banjar melibatkan tim kominda dan tim terpadu (TIMDU) penanganan konflik sosial.
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Tolak ukur/indikator kegiatan dari sasaran ini adalah 1 dokumen laporan. Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Pemantauan dan Pendataan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Banjar.

Permasalahan

- Sarana dan prasarana tim terbatas
- Kualitas dan kuantitas personil/petugas terbatas
- Pihak perusahaan belum sepenuhnya terbuka dan selalu terlambat menyampaikan laporan menggunakan tenaga asing

solusi

1. Memaksimalkan Rapat rutin dan insidentil tidak harus formal tetapi juga non formal
2. Memaksimalkan sarana & prasarana yang ada dan mengusulkan penambahan Mobilisasi Tim Kominda.
3. Usul penambahan dan pelatihan intelijen personil/Petugas.
4. Meningkatkan koordinasi dan mensosialisasikan tugas tim dengan pihak perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan menghimbau laporan tepat waktu.
5. Memaksimalkan sarana & prasarana yang ada dan mengusulkan penambahan mobilisasi TIM.

t. Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan

Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan merupakan jumlah produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang diusulkan. Untuk menghitung persentase produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan adalah jumlah produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang diusulkan dikalikan 100 %.

Tabel 3. 104. Indikator Kinerja Persentase Produk Hukum yang Dibahas dan Mendapat Persetujuan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) <i>jika ada</i>	Realisasi tahun (n-1) 2017	Tahun n (2018)			Target Akhir Renstra	Capaian tahun n terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
				Target	Realisasi	Capaian Realiasi/Target) 8=7/6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	----	70	100	61	61%	100	61%

Realisasi persentase produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan sebesar 61 % di dapat dari Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan sebanyak 11 dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 18 dikalikan 100 %. Maka didapat Capaian sebesar 61 % didapat dari realisasi sebesar 61 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Dibandingkan dengan tahun 2017 Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan sebesar 70 % yaitu pada tahun 2018 sebesar 61 %. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 61 % dari target 100 % pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan dari 18 Raperda yang diusulkan hanya terealisasi 11 dan ada 7 usulan raperda yang diluncurkan tahun 2018 ke tahun 2019 adalah milik eksekutif dan raperda tersebut belum selesai pembahasannya pada tahun 2018 sehingga diluncurkan ke tahun 2019 untuk dilanjutkan dan diselesaikan.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini berupa fasilitasi penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD Kab.Banjar. Adapun realisasi kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah Perda dalam rangka pelaksanaan aktifitas dan TUPOKSI

- SKPD sehingga tercipta kelancaran dan efektifitas secara optimal.
- o Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Merupakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka pelaksanaan aktifitas dan TUPOKSI SKPD sehingga tercipta kelancaran dan efektifitas secara optimal.

Permasalahan

- Dalam pembahasan Raperda, baik Raperda yang berasal dari eksekutif maupun Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD, memang selalu ada kendala atau permasalahan yang ditemui seperti padatnya jadwal kegiatan Dewan, adanya perbedaan penafsiran atau pendapat dan perlunya penyesuaian-penyesuaian Raperda terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- belum seluruhnya usulan 18 raperda yang diusulkan pada tahun 2018, yang terealisasi ada 11 raperda yang diluncurkan pada tahun 2018, dan ada 7 raperda yang belum selesai, hal ini dikarenakan perda tersebut belum selesai pembahasannya pada tahun 2018, sehingga diluncurkan kembali ke tahun 2019 untuk dilanjutkan dan diselesaikan.

Solusi

- Namun demikian DPRD Kabupaten Banjar berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan Raperda yang belum terselesaikan di tahun 2018 akan diselesaikan di tahun 2019.
- menyusun agenda kerja yang lebih cermat dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan.

u. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu merupakan jumlah rapat-rapat dewan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah rapat-rapat dewan yang diusulkan. Formulasi perhitungan Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu adalah jumlah rapat-rapat dewan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah rapat-rapat dewan yang diusulkan dikalikan 100 %.

Realisasi persentase rapat-rapat dewan tepat waktu sebesar 100 % di dapat dari rapat-rapat dewan tepat waktu sebanyak 240 dibagi jumlah rapat-rapat dewan yang diusulkan sebanyak 240 dikalikan 100 %. Maka didapat Capaian sebesar 100 % didapat dari realisasi sebesar 100 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Tabel 3. 105. Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Rapat Dewan Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional (SPM / ...) <i> jika ada</i>	Realisasi tahun (n-1) 2017	Tahun n (2018)			Target Akhir Renstra	Capaian tahun n terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
				Target	Realisasi	Capaian (Realiasi/Target) 8=7/6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Fasilitas Rapat-rapat Dewan Tepat Waktu	----	100	100	100	100%	100	100%

Dibandingkan dengan tahun 2017 Persentase fasilitas rapat-rapat dewan tepat waktu sebesar 100 % yaitu pada tahun 2017 sebesar 100 % menjadi 100 % pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2018 menyumbang 100 % dari target 100 % pada tahun 2020.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % berarti masuk dalam capaian kategori sangat tinggi/berhasil

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Sekretariat DPRD dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan sehingga tercapai dengan sangat tinggi/berhasil, adapun Program dan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian, antara lain sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian program adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
 - Kegiatan ini berupa rapat-rapat dewan dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab.Banjar. Dalam dokumen rencana jangka menengah yang terdapat dalam Rencana strategis dengan sasaran terlaksananya

- o rapat-rapat dewan dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab.Banjar mencapai 100%.
- o Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna
Kegiatan ini berupa rapat-rapat paripurna dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab.Banjar.

v. Persentase peraturan yang dibuat

Persentase peraturan yang dibuat diperoleh dari membandingkan jumlah Perda yang telah ditetapkan dengan jumlah Prolegda yang telah dibuat. Capaian pada Tahun 2018 adalah sebesar 96,29% didapat dari realisasi sebesar 72,22% dibandingkan dibandingkan dengan target sebesar 75,00%. Bagian Hukum Kabupaten Banjar pada Tahun 2018 telah memfasilitasi dalam pembuatan Peraturan Daerah sebanyak 13 buah, dari 18 Rancangan Peraturan Daerah Hasil Program Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 yang terdiri dari 16 inisiatif daerah dan 2 Inisiatif Dewan. Sedangkan capaian untuk indikator kinerja sasaran persentase peraturan yang dibuat adalah jumlah perda insitaif daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 12 perda insitaif daerah dari target 16 yang masuk dalam prolegda Jadi Capaian Kinerja sebesar 75%.

Capaian kinerja ini didukung dari Program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program penataan peraturan perundang-undangan dilaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut :
- o Memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah yang diusulkan Pemerintah Daerah
- o Memfasilitasi pembentukan Peraturan Bupati
- o Memfasilitasi pembentukan Keputusan Bupati
- o Memfasilistasi pembuatan Naskah Pidato Bupati yang berkaitan dengan proses pembahasan terhadap Rancangan Perda di DPRD
- o Memfasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 dan terbentuknya Propemperda Tahun 2018
- o Mengevaluasi Pelaksanaan Propemperda Tahun 2018
- o Menginventarisasi Rancangan Produk Hukum Daerah
- o Memfasilitasi pembuatan NA/Keterangan/Penjelasan Rancangan Perda

Permasalahan

Dalam pembahasan Peraturan Daerah melibatkan Pihak terkait yaitu Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga tidak bisa maksimal mengejar target.

Solusi

Diperlukan pemahaman/persepsi yang sama dan penjadualan pembahasan yang matang di DPRD.

w. Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan

Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan social kemasyarakatan. Linmas berada di setiap desa/kelurahan. Perhitungan jumlah Linmas Desa/Kelurahan per jumlah desa/kelurahan tahun 2018 menggunakan rumus

$$= \frac{\text{jumlah linmas desa/kelurahan}}{\text{jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 jumlah desa yang memiliki linmas ada sebanyak 187 dan jumlah desa dan kelurahan ada sebanyak 290 maka diperoleh hasil realisasi sebesar 64,48%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 85% maka diperoleh capaian pada tahun 2018 sebesar 75,86%. Lebih rinci capaian indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 106. Indikator Kinerja Jumlah Linmas Desa/kelurahan Per Jumlah Desa/kelurahan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	92,76	105,49	85,00	64,48	75,86	100%	64.48%

Capaian tahun 2018 ini lebih jelek dari tahun sebelumnya,

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

mengalami penurunan sebesar 40.14%. Pada tahun 2017 jumlah desa yang memiliki Linmas ada sebanyak 267 desa atau sebesar 92,76%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian pada tahun 2018 ini telah menyumbang capaian sebesar 64,48% terhadap target yang ditetapkan pada periode RPJMD yakni sebesar 100%.

Adapun jumlah linmas desa/kelurahan berbanding jumlah desa/kelurahan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 107. Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Berbanding Jumlah Desa/Kelurahan Pada Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH RT PADA DESA/ KEL	CAPAIAN TARGET JUMLAH LINMAS 2017		CAPAIAN TARGET JUMLAH LINMAS 2018		BERKURANG/ BERTAMBAH PER DESA/ KEL
				PER DESA/ KEL	SE KEC.	PER DESA/ KEL	SE KEC.	
1	MARTAPURA KOTA	26	243	15	390	15	375	0
2	MARTAPURA TIMUR	20	85	15	300	10	197	-5
3	MARTAPURA BARAT	15	52	15	195	8	116	-7
4	ALUH-ALUH	19	101	13	247	8	151	-5
5	BERUNTUNG BARU	12	27	15	180	7	84	-8
6	KERTAK HANYAR	13	115	15	195	13	166	-2
7	GAMPUT	14	95	13	182	12	168	-1
8	SUNGAI TABUK	21	121	15	315	12	253	-3
9	KARANG INTAN	26	89	14	364	10	260	-4
10	ARANIO	12	47	10	120	6	72	-4
11	ASTAMBUL	22	104	10	220	10	219	0
12	MATERAMAN	15	74	13	195	10	150	-3
13	SIMPANG EMPAT	13	46	15	195	11	146	-4
14	PENGARON	12	50	10	120	7	86	-3
15	SAMBUNG MAKMUR	7	34	14	98	10	71	-4
16	SUNGAI PINANG	11	40	13	143	10	107	-3
17	PARAMASAN	4	15	14	56	7	28	-7
18	TALAGA BAUNTUNG	4	16	10	40	5	20	-5

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH RT PADA DESA/ KEL	CAPAIAN TARGET JUMLAH LINMAS 2017		CAPAIAN TARGET JUMLAH LINMAS 2018		BERKURANG/ BERTAMBAH
				PER DESA/ KEL	SE KEC.	PER DESA/ KEL	SE KEC.	PER DESA/ KEL
19	TATAH MAKMUR	13	64	15	195	8	109	-7
20	CINTAPURI DARUSSALAM	11	32	15	195	8	93	-7
	JUMLAH	290	1450	269	3945	187	2871	-82

Pencapaian indikator sasaran diatas didukung oleh program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan didalamnya yaitu kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, dilaksanakan oleh Bidang LINMAS dengan Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Adapun capaian program dan kegiatan indikator sasaran keempat dan kelima diatas pada sasaran secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 108. Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2018

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Tahun (n-1)	Tahun n			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase satlinmas desa/kelurahan yang terlatih	49.24%	60.99%	60.43%	99.08%	93.21%	64.83%
Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%

Dari semua rangkaian pelaksanaan pada kegiatan diatas yaitu kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan didapat capaian indikator program (outcome) dengan realisasinya adalah 60.43% dari target 60.99% dimana capaian yang hendak dicapai berupa nilai persentase satlinmas desa/kelurahan yang terlatih, untuk mendapatkan capaian indikator program (outcome) fomulasi yang digunakan adalah jumlah porsonil linmas yang terlatih sampai tahun-n dibagi jumlah satlinmas di tahun-n dikali 100%. Dari jumlah satlinmas yan terdata oleh Satpol PP oleh Bidang linmas terdata pada tahun 2018 berjumlah 2871 personil dan dari jumlah tersebut pada tahun ini ada 395 personil linmas desa atau kelurahan yang diberikan peningkatan kapasitas atau pengetahuan oleh bidang Linmas. Adapun pola yang digunakan dalam peningkatan kapasitas personil linmas desa atau kelurahan tersebut dengan cara mendatangi langsung personil linmas di desa maupun kelurahan dengan memberikan materi materi yang berhubungan dengan kelinmassan atau tugas dan fungsinya linmas secara langsung, pola ini diambil karena lebih efektif dan efesien daripada mengundang dan mengumpulkan mereka ke kecamatan lalu diberikan sosialisasi. dari target yang sudah ditetapkan didapat capaiannya 99.08% capaian indikator program (outcome) yang didapat kriteria penilaian realisasi kinerjanya adalah Sangat Tinggi.

Faktor-faktor keberhasilan, kendala dan solusi dalam pelaksanaan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan diatas adalah :

1. Faktor keberhasilan pencapaian target, mempergunakan pola pendekatan langsung dengan kegiatan yang bersifat lebih efektif dan efesien dalam arti dengan satu kegiatan bisa didapat banyak mamfaat baik dari Satpol PP maupun personil linmas dan desa atau kelurahan yang disambangi, dengan tidak mengundang dan mengumpulkan dikecamatan kecamatan seperti pola pola sosialisasi lama kini Satpol PP lebih bersifat sebagai penyuluh yang memberikan dan penyebaran informasi langsung kepada petugas satlinmas.
2. Faktor kendala, walaupun target tahun ini hamper terpenuhi namun kendala dalam pencapaian target bukanlah tidak ada, adapun kendala yang dihadapi :
 - a) Tidak sebandingnya petugas yang dimiliki Satpol PP dengan wilayah.

- b) Masih banyaknya anggota satlinmas yang berumur diatas 55 tahun.
- c) Kurang berperannya kepala desa atau lurah dalam pemberdayaan linmas.

3. Solusi :

- a) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD teknis dari tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait peran satlinmas dimasyarakat.
- b) Mencari pola-pola yang cocok dengan karakteristik masyarakat agar penyebarluasan informasi dan sosialisasi lebih tepat sasaran efektif dan efisien.
- c) Meningkatkan mutu SDM dan saptas penunjang tusi Satpol PP

Untuk kegiatan yang mendukung program diatas sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator kinerjanya tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, dalam kegiatan ini berisi pelaksanaan penyiapan dan pemenuhan tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan atau Satlintmas desa dan kelurahan sesuai dengan SPM sesuai permendagri nomor 62 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri dikabupaten/kota melalui kegiatan sambang desa yang mana dalam kegiatan ini berisikan pemberian informasi dan masukan dan mendorong kepada kepala desa atau lurah untuk meningkatkan peran serta masyarakatnya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Satpol PP Kabupaten Banjar dalam tugasnya membantu desa/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan linmas dalam pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan merangkul satlinmas desa dalam membantu kelancaran kegiatan keagamaan maupun lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal trantibum dan kenyamanan lingkungan. Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas ada juga dilaksanakan pemuktahiran data linmas yang aktif yang ada didesa ataupun kelurahan untuk mengetahui kesiapan dan jumlahnya. Dari 12 bulan yang ditargetkan untuk menyelesaikan pemuktahiran data satlinmas desa, realisasinya semua desa dan kelurahan yang ada di 20 kecamatan telah terdata tidak melebihi

target waktu pelaksanaan yang artinya capaian realisasinya 100% atau Sangat Baik.

Faktor keberhasilan, Faktor kendala dan Solusi

1. Faktor keberhasilan, untuk dalam pencapain target adalah adanya peran aktif dari aparat desa terutama kepala desa dan lurah dalam mendukung pengadaan dan pengerahan anggota linmas disetiap desa/kelurahan.
2. Faktor kendala, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pada sasaran ini yaitu :
 - a) Masih banyaknya kepala desa dan lurah kurang paham tentang fungsi dan tugas dari Satlinmas desa/kelurahan
 - b) Sulitnya merekrut anggota linmas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - c) Tidak ada ikatan kerja yang menyebabkan sulitnya pendataan anggota Satlinmas yang tetap dan yang akan dibina.
3. Solusi
 - a) Mengoptimalkan dengan kondisi linmas yang sudah ada
 - b) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan dalam hal merekrut anggota linmas dan regenerasi anggota linmas desa
 - c) Berupaya dalam pengrekrut anggota linmas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Permendagri nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, membuka peluang memasukan usulan kedesa/kelurahan agar penganggaran upah kepada anggota linmas yang sudah terlatih
 - d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat terutama anggota linmas dalam menjaga trantibmas dan kenyamanan lingkungannya setiap tahunnya. Memberikan kartu anggota yang sudah terlatih dan yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Permendagri nomor 84 tahun 2014

x. Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan

Indikator ke 24 pada sasaran ini adalah Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan. Diperoleh dari pada tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar 27,04%, target 44,48% dan capaian kinerja 60,79%. Pada tahun 2017 realisasi 18,1% dan pada 2018 meningkat menjadi 27,04%. Capaian kinerja masuk kategori rendah dikarenakan target yang ditentukan sesuai renstra tidak dapat terpenuhi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 109. Indikator Kinerja Persentase FKDM, FKUB, FK, dan PPWK tingkat Kab/Kec/Desa dan kelurahan yang Aktif

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Capaian Tahun (n-1)	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat Kab/Kec/desa dan kelurahan yang aktif	25,68%	77,46%	44,48%	27,04%	60,79%	64,66%	41,82%

Dalam pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami permasalahan/hambatan disebabkan beberapa hal :

1. BAKESBANGPOL tidak mempunyai anggaran operasional untuk FKDM/FKUB didesa, sehingga kurang maksimal untuk melihat kinerja FKDM/FKUB yang dibentuk.
2. Terbatasnya dana pembentukan dan pembinaan FKDM/FPK/FKUB
3. Banyaknya desa yang belum melaporkan aset desa (dari 277 desa baru 23 desa yang melaporkan aset desa). Dan Belum maksimalnya pelayanan pencairan dana desa

Langkah langkah/solusi yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Usul penambahan Dana Sosialisasi/pembentukan dan pembinaan FKDM/FPK/FKUB yang sudah dibentuk.

2. Saran untuk Kemendagri/Provinsi agar disediakan dana dekon/perbantuan untuk biaya sosialisasi/pembentukan FKDM dan Pembinaan FKDM yang sudah dibentuk
3. Disarankan untuk Desa/Kelurahan agar dianggarkan dana operasional FKDM dan FKUB sehingga BAKESBANGPOL dapat dengan mudah melihat keaktifan mereka.
4. Melakukan pembinaan dengan jemput bola ke desa agar desa dapat segera melaporkan asset desa serta Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pencairan dana desa lebih lancar

Untuk mencapai sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai program untuk tahun 2018 yaitu :

1. Sasaran Kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat dengan indikator persentase FKDM(14%) tingkat Desa/Kelurahan, FKUB (8,2%) tingkat Desa/Kelurahan dan FPK(40%) tingkat Kecamatan (akumulasi perhitungan Jumlah FKDM,FKUB,FPK/jumlah Kecamatan/Desa dan Kelurahan x 100%) untuk tahun 2018 realisasi total ketiganya ketika dijumlahkan 62,4% dengan rincian FKDM tingkat desa(12,75%), FKUB tingkat desa (9,65%) dan FPK Kecamatan (40%), target 82,2%, pencapaian kinerja sebanyak 75,91%. Program Kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat ini didukung kegiatan :
 - Kegiatan sosialisasi dan pembentukan FKDM. Tolak ukur dari sasaran ini adalah jumlah FKDM yang terbentuk. Untuk tahun 2018 ini jumlah Desa terbentuknya FKDM yaitu berjumlah 3. Sedangkan target yang ditentukan berjumlah 4 sesuai dengan anggaran yang ada namun 1 kegiatan tidak dapat terlaksana. Adapun nama-nama Desa Pembentukan FKDM adalah Desa Pandak Daun, Desa Pemangkih Baru dan Desa Tiwingan Baru. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang diikuti dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Aparat Desa, Polmas, Babinsa dan elemen masyarakat. Para peserta yang berjumlah 75 di setiap Desa diharapkan dapat memahami Permendagri No 12 Tahun 2006 dan mendeteksi, melihat dan mencermati perkembangan situasi dan kondisi kehidupan disegala bidang, khususnya permasalahan-permasalahan yang

berpengaruh terhadap situasi dan kondisi diwilayah serta dapat diantisipasi sedini mungkin akan menciptakan kondisi yang kondusif dan terbentuknya Penasehat FKDM dan Pengurus Forum FKDM

- Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKUB. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah FKUB yang dibentuk. Target yang ditentukan sebanyak 6 Desa, namun Badan Kesbangpol Kab banjar melaksanakan sebanyak 12 pembentukan dengan cara dalam 1 kegiatan melibatkan 2 Desa yang berdekatan. Adapun Desa/Kelurahan pembentukan FKUB untuk tahun 2018 ini yang telah dilaksanakan yaitu :
 - a) Pembentukan FKUB Desa Paku Alam dan Sungai Tanipah
 - b) Pembentukan FKUB Desa Tambak Sirang dan Desa Malintang
 - c) Pembentukan FKUB Desa Rangas Hambuku dan Sungai Rangas Ilir
 - d) Pembentukan FKUB Desa Sungai Tuan Ilir dan Desa Sungai Tuan

Forum Kerukunan Umat Beragama atau biasa disebut dengan FKUB melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam berperan serta membangun daerah masing-masing ditengah krisis multidimensional yang tengah terjadi.

- 2. Sosialisasi dan Pembentukan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan). Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah FPK yang dibentuk. Untuk tahun 2018 ini Badan Kesbangpol berhasil melaksanakan pembentukan FPK di 2 Kecamatan, sesuai dengan target dan anggaran yang ada dengan jumlah 2

Kecamatan, hal ini dikarenakan terjadinya pemangkasan anggaran. Tempat dan lokasi yaitu Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Pinang. Sebagai antisipasi terpeliharanya kerukunan antar suku bangsa. Badan Kesbangpol Kab.Banjar melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006. Sekaligus pembentukan FPK yang bertujuan untuk mencegah konflik antara suku bangsa yang dapat mengakibatkan kekacauan dan terganggunya ketentraman dan ketertiban di masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjar.

Hambatan/kendala yang dihadapi pada sasaran kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat adalah :

- Terbatasnya dana pembentukan dan pembinaan FKDM
- Terbatasnya dana pembentukan dan pembinaan FKUB

Langkah langkah/solusi yang akan dilaksanakan :

1. Usul penambahan Dana Sosialisasi/pembentukan dan pembinaan FKDM/FPK yang sudah dibentuk.
2. Saran untuk Kemendagri /Provinsi agar disediakan dana dekon/perbantuan untuk biaya sosialisasi/pembentukan FKDM/FPK dan Pembinaan FKDM/FPK yang sudah dibentuk
3. Disarankan untuk Desa/Kelurahan agar dianggarkan dana operasional FKDM Desa.

3.2.33. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efisien Dan Efektif

Sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efisien merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang efisien melalui pengoptimalan kelembagaan pemerintah. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efisien menunjukkan hasil positif, Pencapaian sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) buah indikator, adapun sejumlah indikator dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3. 110. Indikator dan Sasaran Terwujudnya kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase SPM yang terpenuhi	73.53%	86.50%	90%	93,1%	103,4%	95%	98%
2.	Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	50%	100%	75%	75%	100%	100%	75%
3.	Persentase Kelengkapan Administrasi Desa	42,24%	100%	71.12%	56.68%	79.70%	100%	56.68%

a. Persentase SPM yang terpenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Persentase SPM yang terpenuhi diukur dengan membandingkan antara jumlah SPM yang terpenuhi dibandingkan dengan keseluruhan jumlah SPM, Realisasi pada Tahun 2018 di dapat dari jumlah SPM yang terpenuhi 62 buah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah SPM 69 buah menunjukkan realisasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 93,1%.

Untuk mencapai target indikator kinerja Persentase SPM yang terpenuhi pada tahun 2018 dengan target 90% dan telah terealisasi sebesar 93,1% dengan capaian kinerja 103,4%. Jika membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat positif yaitu sebesar 19,57% dan capaian meningkat sebesar 16,9%. Keberhasilan capaian hingga tahun 2018 sudah mampu menyumbang capaian sebesar 98% untuk target akhir RPJMD sebesar 95%. Adapun hasil tersebut dihimpun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan pada pasal 3 yaitu Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ; dan
6. Sosial

Oleh sebab itu dari Urusan Pemerintahan Wajib tersebut Bagian Organisasi menghimpun laporan SPM Kabupaten dengan melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mengampu atau melaksanakan urusan standar pelayanan minimal di Kabupaten. Penerapan indikator SPM telah dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah pelaksana SPM, yang mana hasilnya masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan agar seluruh indikator SPM dapat terlaksana dan bermanfaat serta dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Adapun data SKPD yang melaksanakan dan melaporkan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 111. SKPD Yang Melaksanakan dan Melaporkan SPM Kab.Banjara Tahun 2018

NO	Bidang SPM	Nama Perangkat Daerah
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Bidang Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Bidang Sosial	Dinas Sosial

Tabel 3. 112. Indikator Laporan SPM Kabupaten Banjar Tahun 2018

NO	Jenis Bidang SPM	Jumlah Indikator SPM		Jumlah Indikator SPM	Batas Waktu	Prosentase
		Yang memenuhi target	Yang belum memenuhi			
1	Bidang Kesehatan	18	0	18	2015	88,9
2	Bidang Sosial	6	1	7	2015	85,7
3	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	3	0	3	2015	66,7
4	Bidang Perumahan Rakyat	2	0	2	2025	50,0
5	Bidang Pendidikan	22	5	27	2014	70,4
6	Bidang Pekerjaan Umum dan PR	11	1	12	2019	72,7
	JUMLAH	62	7	69		93.1%

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Tahun 2018 merupakan hasil daripada tuntasnya beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap 9 (Sembilan) Bagian di Sekretariat Daerah.

Penerapan Standar Operasional Prosedur pada tahun 2018 telah dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dalam penyusunan SOP perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar secara bertahap sehingga terbentuknya SOP untuk perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2018 sebanyak 10 (Sepuluh) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Bagi Perangkat Daerah yang masih belum memiliki Keputusan Bupati mengenai SOP akan segera dilakukan pendampingan kembali dalam hal penyusunan SOP pada tahun 2019. Sosialisasi SOP Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018

2. Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan SPM Tahun 2017. Hasilnya untuk menyusun laporan SPM 1 (satu) Tahun yang meliputi 6 (enam) bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan,

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

b. Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja

Persentase SKPD yang sesuai beban kerja diperoleh dengan cara membandingkan jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja dengan keseluruhan jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Banjar. Realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 75% dengan target Tahun 2018 sebesar 75% menunjukkan keterpenuhan target dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD 100% maka capaian hingga tahun 2018 telah menyumbang sebesar 75%.

Analisis beban kerja masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan analisis jabatan, untuk analisis beban kerja akan mendapatkan fasilitasi dari tim Kementerian PAN dan RB pada 2019 agar seragam seluruh Indonesia. Untuk itu, analisis beban kerja tahun ini masih berupa draft yang masih perlu dilakukan perbaikan kembali di 2019. Adapun Perangkat Daerah yang sesuai dengan beban kerja yaitu :

Tabel 3. 113. Perangkat Daerah berdasarkan Analisis Beban Kerja

No.	Nama Perangkat Daerah	Analisis Beban Kerja
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	68.353
2	Dinas Pendidikan	101
3	Dinas Kesehatan	111
4	Badan Pendapatan Daerah	87.32
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	66
6	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	188.6
7	Dinas Penanaman modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	43.33
8	Kecamatan Martapura	17.542
9	Kecamatan Martapura Barat	16.5
10	Kecamatan Martapura Timur	16.632
11	Kecamatan Karang Intan	18.194
12	Kecamatan Aranio	16.998
13	Kecamatan Gambut	18.382
14	Kecamatan Kertak Hanyar	16.7
15	Kecamatan Sei Tabuk	18.593
16	Kecamatan Aluh-Aluh	17.432
17	Kecamatan Beruntung Baru	18.538
18	Kecamatan Astambul	19.258
19	Kecamatan Mataraman	20.970

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018**

No.	Nama Perangkat Daerah	Analisis Beban Kerja
20	Kecamatan Simpang Empat	18.414
21	Kecamatan Pengaron	18.822
22	Kecamatan Sambung Makmur	16.635
23	Kecamatan Sei Pinang	20.360
24	Kecamatan Tatah Makmur	17.433
25	Kecamatan Telaga Bauntung	17.298
26	Kecamatan Paramasan	14.457
27	Kecamatan Cintapuri Darussalam	14.457
28	Kelurahan Keraton	9.175
29	Kelurahan Murung Keraton	9.479
30	Kelurahan Pesayangan	9.263
31	Kelurahan Jawa	9.538
32	Kelurahan Sei Paring	9.587
33	Kelurahan Sekumpul	7.369
34	Kelurahan Tanjung Rema	7.369
35	Kelurahan Gambut	10.743
36	Kelurahan Gambut Barat	9.738
37	Kelurahan Kertak Hanyar	9.738
38	Kelurahan Manarap Lama	9.425
39	Kelurahan Mandar Sari	6.239
40	Kelurahan Sei Lutut	14.725
41	Inspektorat	16.65
42	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	77.03
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.73
44	Dinas Perumahan dan Permukiman	61.28
45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.96
46	Dinas Perhubungan	99.81
47	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	79
48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.23
49	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	96.12
50	Dinas Pertanahan	30.43

Adapun dalam pencapaian kinerja diatas didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut;

1. Kegiatan Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur
 - ✓ Evaluasi Jabatan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyampaikan Dokumen Rekapitulasi Hasil

Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Kemudian sudah mendapatkan Surat Persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/803/M.SM.04.00/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

✓ Analisis Jabatan

Analisis jabatan masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini masih berupa fasilitasi dalam rangka penyusunan analisis jabatan. Karena merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi jabatan, maka nama jabatan pada uraian jabatan harus sesuai dengan penamaan hasil persetujuan kelas jabatan. Kemudian disampaikan tim Kementerian PAN dan RB bahwa untuk 2019, akan difasilitasi supaya analisis jabatan dan beban kerja seragam seluruh Indonesia. Untuk itu, analisis jabatan tahun ini masih berupa draft yang perlu perbaikan kembali di 2019.

✓ Analisis Beban Kerja

Analisis beban kerja masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan analisis jabatan, untuk analisis beban kerja akan mendapatkan fasilitasi dari tim Kementerian PAN dan RB pada 2019 agar seragam seluruh Indonesia. Untuk itu, analisis beban kerja tahun ini masih berupa draft yang perlu perbaikan kembali di 2019.

a. Permasalahan.

- Masih terdapat Indikator SPM yang memang tidak bisa dilaksanakan di daerah namun tetap menjadi pembagi / penyebut dalam capaian indikator SPM
- Kurang tanggapnya Perangkat Daerah dalam melaporkan capaian indikator SPM di Perangkat Daerah penyelenggara SPM

- Dalam menganalisa jabatan setidaknya dimiliki oleh Analis Kepegawaian Pertama. Sementara di Bagian Organisasi tidak memiliki Analis Kepegawaian, akan tetapi memasukan analis kepegawaian di BKD dan PSDM sebagai tim. Namun tidak bisa maksimal karena yang bersangkutan tugas pokok di BKD dan PSDM.
- Analis jabatan harus memiliki kemampuan menganalisa dan telah mengikuti bimbingan teknis penyusunan analisis beban kerja, akan tetapi tim sebagian besar belum mengikutinya.
- Pemegang jabatan kurang mampu menuliskan uraian jabatan masing-masing, sehingga tim perlu tingkat ketelitian dan analisa yang tinggi untuk uraian jabatan.

b. Solusi

- Hendaknya Indikator SPM tidak disamakan setiap daerah sehingga SPM bisa terpenuhi
- SKPD agar tepat waktu dalam pelaporan SPM persemester kepada Bagian Organisasi
- Perangkat Daerah penyelenggara SPM dapat menganggarkan biaya untuk kegiatan SPM di daerah
- Memberikan Pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi analis kepegawaian untuk sejumlah Tim Analis.
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam menghimpun informasi dan penyamaan persepsi

c. Persentase Kelengkapan Administrasi Desa

Desa yang lengkap administrasinya adalah desa yang sudah mampu menjalankan tugasnya dalam pemenuhan administrasi desa sesuai dengan buku 25 pedoman administrasi desa. Persentase kelengkapan administrasi desa adalah jumlah desa yang telah memenuhi 60% kelengkapan administrasi sesuai dengan perundang-undangan dibandingkan dengan jumlah seluruh desa.

Realisasi adalah 56,68 % dengan target dalam rpjmd 71.12% pada Tahun 2018 ini. DPMD Kab. Banjar untuk capaian kinerja tahun 2018 meningkat sebesar 14,44 % dari realisasi tahun 2017 yaitu 42,24 %. Untuk tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 56,68 % dengan capaian kinerja (% realisasi) sebesar 100 % yaitu sangat tinggi.

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / desa

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Desa
 - Target kinerja pada kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan / desa adalah Terlaksananya Rapat Kerja Pembakal, Lurah dan BPD (3 kali), Pembinaan desa kelurahan, Tata Batas Desa, pembinaan administrasi keuangan desa (20 kecamatan) Pembinaan desa kelurahan, Tata Batas Desa, pembinaan administrasi keuangan desa (20 kecamatan, Kegiatan TP4DD, Pembinaan LPPDes, Pemilihan dan Pelantikan Pambakal Tahun 2018, sosialisasi pemilihan dan pelantikan pambakal secara serentak Tahun 2018 dengan capaian 100%.

Permasalahan :

- Masih banyaknya desa yang tidak memiliki Peta Desa dimana Peta Desa sangat Menentukan Batas Desa.
- Aparat Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kurang tertibnya Dalam masalah Administrasi
- Dari beberapa Desa dalam Pembinaan Desa terdapat beberapa Desa yang kurang tertib buku-buku Administrasi yang diisi oleh Aparat Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kurang tertibnya Dalam masalah Administrasi;
- Masih Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparat desa mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan penata usahaan keuangan desa terutama dalam Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPDes);

Solusi

- Agar di setiap Desa membuat peta Desa guna mengetahui Batas Desa
- Dengan diadakan Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan diharapkan agar Aparat tertib Administrasi
- Diharapkan kedepannya Pelaporan Penyelenggara Penyaluran Pemerintah Desa (LPPDes) di Evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD) khususnya Bidang Pemerintahan Desa;

3.2.34. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Adapun upaya dari pemerintah untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan melalui pengembangan system pelayanan dibidang administrasi yang prima dan terpadu. Pada tahun 2018 pencapaian sasaran terwujudnya meningkatnya kualitas pelayanan menunjukkan hasil positif, Pencapaian sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian rata-rata 100 %. Capaian sasaran diukur dengan 3 (tiga) buah indicator, yaitu yaitu persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Tugas Umum Pemerintahan. Adapun sejumlah indicator dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3. 114. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kab. Banjar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2018 trhdp Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,27	81,9	82,58	100,83	82,1	100,58
3	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	100	30	20	100	50	60

a. Persentase Pengaduan Masyarakat tentang Layanan Publik yang telah Ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Banjar mampu mempertahankan realisasi persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti seperti Tahun 2017 dengan realisasi 100%. Pada tahun 2018, tercatat 2 (dua) aduan masyarakat, dan bisa di selesaikan oleh DPMPTSP dengan baik. Keberhasilan capaian ini merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan dengan membentuk tim pengaduan masyarakat melalui Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat serta peningkatan kualitas SDM dalam penanganan Pengaduan dan Pelayanan Perizinan menjadi salah satu penyebab tertanganinya pengaduan yang masuk untuk tahun 2018 ini.

Keberhasilan pencapaian persentase pengaduan masyarakat tentang layanan public yang telah ditindaklanjuti didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut;

- Program Mengintensifkasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Di dalam kegiatan ini dibentuk tim pelaksana penanganan pengaduan yang bertugas menyelesaikan semua bentuk pengaduan yang masuk di DPMPTSP Kab. Banjar beserta dengan semua peralatan pendukungnya. Pengaduan yang masuk Ke DPMPTSP berupa laporan melalui Pos Pengaduanyang telah tersedia. Berikut mekanisme penanganan pengaduan masyarakat :

- Pengguna jasa menyampaikan pengaduan
- Petugas mengentry data pengaduan, memberikan resi ke pengguna jasa
- Menerima penyebab
- Menetapkan tindakan
- Memberikan informasi kepada pengguna jasa
- Melakukan tindakan dan verifikasi
- Pengguna jasa menyampaikan pernyataan puas/tidak puas

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai IKM adalah Nilai dari IKM (Indeks Pelayanan Perizinan) Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP terhadap pemohon. Semakin tinggi nilai yang didapatkan maka semakin bagus pelayanan yang diberikan DPMPTSP, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat semakin buruk pula pelayanan yang diberikan.

Kegiatan IKM dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 1 tahun dengan menggunakan Aplikasi Penilaian IKM yang dibuat staf DPMPTSP Banjar, Nilai IKM yang diperoleh DPMPTSP Banjar Tahun 2018 ini adalah 82,58 atau dalam kategori sangat baik dengan nilai kategori mutu pelayanan A.

Keberhasilan capaian pada Tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

○ Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

DPMPTSP Kab. Banjar mengadakan pameran tingkat kabupaten dan nasional yang bertujuan untuk mengenalkan segala bentuk perizinan kepada masyarakat, selain itu pembuatan dokumen dan laporan optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi dalam bidang perizinan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa kuesioner yang diberikan dengan mengacu dari beberapa unsur pelayanan yang langsung diisi oleh para masyarakat. Berikut unsur pelayanan secara global :

- Kemudahan persyaratan pelayanan
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu pelayanan
- Kejelasan, kewajaran dan kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan
- Kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Kompetensi petugas pelayanan
- Perilaku petugas pelayanan
- Kesesuaian maklumat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

- Kesesuaian dan kemampuan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Salah satu upaya peningkatan pelayanan DPMPSTSP Kab. Banjar dengan memberikan berbagai inovasi terbaru dalam pelayanan salah satunya SMS Gateway yang memudahkan Pemohon untuk mengetahui keadaan berkas izin yang didaftarkan secara auto reply disetiap tahapan proses izin. Selain itu penyediaan sistem informasi pendukung pelayanan yang berbasis Teknik Informasi baik berupa aplikasi maupun website, dengan adanya website dan aplikasi perizinan ini dapat mempermudah dalam pemrosesan perizinan.

c. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan

Adapun sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas adalah Optimalisasi PATEN di Kecamatan. untuk mencapai sasaran tersebut adalah minimnya sarana, prasarana, dana yang kurang memadai dan kualitas SDM yang belum sesuai standar pelayanan.

Pada tahun 2018 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar telah melaksanakan PATEN dan terus mengoptimalkan pelayanan publik (masyarakat) yang di tandai dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PATEN di Kecamatan berada pada interval 62,51 – 81,25 dengan kategori **BAIK**.

Setiap tahunnya terjadi peningkatan nilai SKM di Kecamatan seiring dengan upaya yang terus dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu :

- Kegiatan monitoring ke 20 Kecamatan
- Melaksanakan Rapat Evaluasi tiap triwulan.
- Perbaiki Loker PATEN.
- Adanya persetujuan pembelian perangkat komputer di seluruh Kecamatan pada tahun 2019.
- Perbaiki sarana prasarana
- Penerapan aplikasi SIMPATEN.

- Masuknya jaringan internet di Kecamatan guna mempercepat proses pelayanan.

Penerapan SKM di Kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Target pada tahun ini sebesar 30%, namun kurang jelasnya definisi formulasi perhitungan indikator terhadap penilaian terhadap nilai target tersebut. Saat ini penilaian berdasarkan nilai rata-rata SKM kecamatan dibandingkan dengan target SKM di RPJMD, maka realisasi capaian kinerja terlaksana 100% berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut

Tabel 3. 115. Rekapitulasi Presentase Kenaikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 dan 2018

No	Kecamatan/Kelurahan	Nilai IKM 2017	Nilai IKM 2018	Keterangan
1	Kecamatan Aluh-Aluh	87,17	74,25	Turun
2	Kecamatan Aranio	75,97	82,39	Naik
3	Kecamatan Astambul	80,74	82,92	Naik
4	Kecamatan Beruntung Baru	87,82	89,11	Naik
5	Kecamatan Gambut	80,24	81,71	Naik
6	Kecamatan Karang Intan	75,25	77	Naik
7	Kecamatan Kertak Hanyar	81,68	82,57	Naik
8	Kecamatan Martapura	78,03	82,71	Naik
9	Kecamatan Martapura Barat	75	80,28	Naik
10	Kecamatan Martapura Timur	71,04	81,33	Naik
11	Kecamatan Mataraman	77,28	77,66	Naik
12	Kecamatan Paramasan	78,98	68,93	Turun
13	Kecamatan Pengaron	79,8	69,13	Turun
14	Kecamatan Sambung Makmur	77,03	80,94	Naik
15	Kecamatan Simpang Empat	78,64	80,94	Naik
16	Kecamatan Sungai Pinang	75,02	76,27	Naik
17	Kecamatan Sungai Tabuk	78,92	85,33	Naik
18	Kecamatan Tatah Makmur	77,85	82,96	Naik
19	Kecamatan Telaga Bauntung	80,25	82,31	Naik
20	Kecamatan Cintapuri Darussalam	82,5	84,81	Naik
21	Kelurahan Gambut	80,28	86,58	Naik
22	Kelurahan Gambut Barat	79,68	83,04	Naik
23	Kelurahan Jawa	80,38	82,36	Naik
24	Kelurahan Keraton	80,57	78,57	Turun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No	Kecamatan/Kelurahan	Nilai IKM 2017	Nilai IKM 2018	Keterangan
25	Kelurahan Kertak Hanyar	77,03	80,82	Naik
26	Kelurahan Manarap Lama	81,81	87,73	Naik
27	Kelurahan Mandar Sari	75,51	79,89	Naik
28	Kelurahan Murung Keraton	75,9	77,83	Naik
29	Kelurahan Pasayangan	83,98	85,51	Naik
30	Kelurahan Sekumpul	87,63	86,82	Turun
31	Kelurahan Sungai Lulut	81,19	82,47	Naik
32	Kelurahan Sungai Pering	83,03	87,89	Naik
33	Kelurahan Tanjung Rema Darat	77,06	78,31	Naik
Rata-rata		79,49	81,25	Naik

Dari 33 unit pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat, Sebanyak 28 Unit pelayanan (84.85%) Terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2017 dan 5 unit pelayanan (15.15%) mengalami penurunan.

Keberhasilan pencapaian sasaran adalah komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik dengan memfasilitasi pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi serta dukungan dari program dan kegiatan sebagai berikut ;

- Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
 - Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan terdiri dari ;
 - Melaksanakan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Banjar.
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Kabupaten Banjar.
 - Pembuatan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) Kabupaten Banjar tahun 2018 dan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018.
 - Melaksanakan Pembayaran Iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta Asosiasi Forum Sekda se-Indonesia (FORSESDASI).
 - terfasilitasinya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Banjar.

- Terfasilitasinya ijin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pegawai Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar.
- terfasilitasinya koordinasi kunjungan kerja dari daerah lain.
- Melaksanakan Kegiatan Fasilitas Kerjasama.
- Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk Tahun 2018.
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2018.
- Melaksanakan rapat koordinasi Camat 4 kali dan Rakor Lurah sebanyak 2 kali di Kabupaten Banjar

Permasalahan

- Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat tentang pengaduan masalah tentang layanan Perizinan dan Non Perizinan. Kebanyakan pola pikir masyarakat menganggap pengaduan yang ditangani adalah mencakup tentang semua aspek, dimana pengaduan yang ditangani adalah DPMPTSP adalah tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Kurangnya peran aktif dari masyarakat terkait pengisian survey kepuasan masyarakat sendiri, hal ini dimungkinkan karena kurangnya minat dari pemohon untuk mengisi survey tersebut.
- Tergabungnya kegiatan sub bagian lain yang masuk dalam program kegiatan pembinaan kecamatan tidak sesuai dengan output/keluaran kegiatannya, Sehingga capaian kinerja sulit untuk mengukurnya.
- Data yang sulit di dapatkan dan tidak lengkap.

Solusi

- Sosialisasi terkait pelayanan pengaduan masyarakat tersebut.
- Mengoptimalkan sosialisasi setiap kerjasama yang dilaksanakan Pemkab Banjar sehingga pelaksanaan kerjasama dapat dilaksanakan secara optimal.
- Perlunya melakukan sosialisasi pentingnya penegasan batas melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

- Diharapkan pada tahun berikutnya sub bagian lain mempunyai program dan kegiatan tersendiri sesuai dengan target RPJMD.
- Dilakukan kunjungan langsung ke Kecamatan, mencari sumber data valid di SKPD lainnya.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 92.98% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama (117.47%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak (32.97%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal, yang realisasi anggarannya mencapai 100% namun belum ada realisasi kinerjanya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji kembali indikator sasaran dan target sasaran berdasarkan kemampuan input daerah serta seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

Tabel 3. 116. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	30,00	44,44	148,13	-	-	-
		Penurunan Jumlah kasus kriminal	145,00	154	93,79	728.203.437	405.108.751	55,63
		Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	280.000.000,00	779.246.170	278,30	280.000.000	779.246.170	278,30
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	94,00	99,3	105,64	7.052.866.100	4.963.863.082	70,38
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	10,00	52	-320,00	130.300.000	130.300.000	100,00
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	APM SD / MI / SDLB	96,27	95,26	98,95	89.429.378.880	80.033.464.827	89,49
		APM SMP / MTs / SMPLB	65,66	64,74	98,60			
		APK SD / MI / SDLB	120,70	111,03	91,99			
		APK SMP / MTs / SMPLB	94,20	86,86	92,21			
		APtS SD / MI / SDLB	0,25	0,17	132,00			
		APtS SMP / MTs / SMPLB	0,84	0,36	157,14			
		Angka rata-rata lama sekolah	7,07	7,01	99,15			
Angka Partisipasi Kasar PAUD	68,12	67,86	99,62	4.562.350.000	4.200.143.400	92,06		
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	4,20	5,3	126,19	677.715.000	620.306.700	91,53
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	85,00	85,07	100,08	928.335.000	815.165.130	87,81
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	7,00	8	114,29	899.088.060	832.716.422	92,62
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	158,00	93,3	140,95	5.223.553.000	3.418.613.015	65,45
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	12,20	9,98	118,20	138.050.000	126.189.907	91,41
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	40,00	32	120,00	111.455.000	100.720.000	90,37
		Angka laju pertumbuhan penduduk	2,04	1,51	125,98	319.810.000	304.897.871	95,34
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	24,16	17,74	126,57	881.549.600	781.956.617	88,70
9	Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	30	87	290			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Persentase Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	630,00	647	102,70	80.944.415.000	80.046.458.605	98,89
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	75,99	94,99	80.000.000.000	79.340.041.880	99,18
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	2,53	3,03	80,24	1.058.981.360	958.120.392	90,48
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	73,00	50,79	69,58	5.346.575.000	5.122.501.294	95,81
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	74,00	100	135,14	165.340.000	159.377.675	96,39
		Persentase Kelurahan Layak anak	15,40	15,4	100,00	120.999.800	120.814.800	99,85
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	60,00	77,6	129,33	1.093.156.407	988.238.400	90,40
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100,00	100	100,00	1.078.510.000	951.031.100	88,18
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	0,80	0,7	87,50	1.550.000.000	1.405.705.912	90,69
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	60,34	57	94,46	1.500.000.000	1.453.027.125	96,87
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi karet	21.268,69	17.895	84,14	211.173.040	204.630.610	96,90
		Produksi komoditas prioritas padi sawah	248.015,00	200.026	80,65	4.298.250.860	3.915.687.449	91,10
		Produksi komoditas prioritas padi ladang	30.151,00	36.491	121,03			
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	45,76	34,73	75,90			
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	32,45	34,22	105,45	604.152.440	567.117.552	93,87
		Produktifitas karet	1.291,00	889	68,86			
		Persentase Kelompok tani madya	3,19	4,43	138,87	1.442.460.240	1.263.825.090	87,62
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	80,00	87,35	109,19	10.751.929.203	9.445.903.359	87,85
		Populasi sapi	17.200,00	18.021	104,77	1.383.504.080	1.297.401.768	93,78
		Jumlah produksi ikan budidaya	55.000,00	60.870	110,67	672.251.800	636.683.800	94,71
		Jumlah produksi ikan tangkap	11.492,00	9.470	82,41	1.162.224.000	1.004.742.500	86,45
		Jumlah konsumsi ikan	50,00	51	102,00	173.057.000	171.329.600	99,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	35,00	34,69	99,11	424.068.940	393.555.430	92,80
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	720,00	792,6	110,08	173.057.000	171.329.600	99,00
19	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	3.640,00	3.745	102,88	1.103.665.000	897.517.679	81,32
		Ketersediaan Protein	103,00	93,13	90,42			
		Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	90,50	89,40	98,78			
20	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	85,00	9016,14	10607,22	1.113.689.000	1.093.709.618	98,21
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	WTP	WTP	100	1.097.131.200	1.043.181.102	95,08
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase sampah yang terolah di TPA	100,00	100,00	100,00	12.444.377.470	11.378.379.291	91,43
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	1,60	1,59	99,38	3.626.502.280	3.594.120.318	99,11
		Kualitas air	Tidak Tercemar	Tercemar Ringan (33,33)	33,33	3.282.236.500	2.802.532.972	85,38
		Kualitas udara	Tidak Tercemar	Tidak Tercemar	100,00			
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif.	64,50	64,2	99,53	67.972.800	40.374.800	59,40
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0,25	0,42	168,00	-	-	-
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	20,00	32,9	164,50	71.307.500	48.360.804	67,82
		Jumlah nilai ekspor karet.	509.018.168,29	107.082.330	21,04	175.360.000	172.439.613	98,33
		Persentase Desa Berkembang	60,00	51,62	86,03	2.140.668.500	1.980.936.314	92,54
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan wisatawan lokal	1.920.415,00	7.105.288	369,99	3.228.710.250	3.045.947.764	94,34
		Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	5,00	-6,37	-127,40			
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	57,50	92,12	160,21	3.829.884.883	3.775.875.694	98,59
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,00	71,97	102,81	80.972.664.154	77.020.805.332	95,12
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	90,32	98,73	109,31			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	85,00	93,7	110,24	1.066.388.000	1.042.913.927	97,80
28	Meningkatnya infrastruktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	100,00	100	100,00	358.218.500	354.202.500	98,72
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	76,54	92	120,20	5.432.030.200	5.349.462.498	98,48
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	97,06	92,96	95,78	9.066.095.160	2.989.431.930	32,97
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	65,18	73,2	112,30	35.887.921.298	34.354.129.244	95,73
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	100,00	71,83	71,83	117.208.800	117.091.792	99,90
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0,10	0,16	40,00	94.299.100	86.758.328	92,00
		Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	100,00	94,3	94,30	457.319.800	446.763.253	97,69
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	100,000	0	0	-	-	-
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	100,00	100	100,00	255.572.800	254.785.508	99,69
		Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	71,12	56,68	79,70	328.660.000	303.107.440	92,23
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75,50	95,96	127,10	767.832.640	681.847.924	88,80
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	100,00	100	100,00	514.923.200	472.718.500	91,80
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	45,00	38,15	84,78	1.785.230.600	1.277.030.452	71,53
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	60,00	88	146,67	906.886.120	869.845.681	95,92
		Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	80,00	100	125,00	4.917.990.000	4.677.477.840	95,11

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
		Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	63,00	57,64	91,49	1.491.64 0.680	1.388.78 8.945	93,10
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	96,00	82,01	85,43	2.477.89 8.160	2.433.23 4.019	98,20
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	57,14	59,72	104,52	213.125. 000	197.319. 934	92,58
		Tingkat Maturitas SPIP	2,00	3	150,00	3.199.41 7.320	3.032.65 7.580	94,79
		Tingkat Kapabilitas APIP	3,00	3	100,00			
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	80,00	81,69	102,11			
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	75,76	87,97	116,12			
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	100,00	100	100,00	1.464.72 5.000	1.358.61 7.110	92,76
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	WTP	WTP	100,00	9.607.41 7.700	8.366.54 7.061	87,08
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	99,00	103,52	104,57	9.607.41 7.700	8.366.54 7.061	87,08
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	79,40	100	125,94	417.145. 000	385.788. 180	92,48
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	85,00	84,38	99,27	776.141. 000	652.178. 350	84,03
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	85,00	98,67	116,08	1.229.30 0.000	1.222.28 2.000	99,43
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat)	100,00	100,00	100,00	1.230.77 9.000	1.105.11 0.704	89,79
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	100,00	61	61,00	21.899.9 75.000	21.110.1 42.941	96,39
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100,00	100	100,00	550.000. 000	370.036. 000	67,28
		Persentase peraturan yang dibuat	75,00	72,22	96,29	438.897. 800	425.878. 666	97,03
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	85,00	64,48	75,86	363.820. 000	361.104. 822	99,25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	44,48	27,04	60,79	452.153.840	341.585.631	75,55
33	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	90,00	93,1	103,44	469.030.900	422.310.540	90,04
		Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	75,00	75	100,00	502.899.600	431.617.000	85,83
		Persentase kelengkapan administrasi desa	71,12	56,68	79,70	1.448.936.222	1.350.608.045	93,21
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	100,00	100	100,00	58.178.000	58.028.000	99,74
		Indeks Kepuasan masyarakat	81,90	82,58	100,83	326.302.320	319.316.666	97,86
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	30,00	30	100	814.081.160	806.081.160	99,02

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 34 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 16 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik, telah mencapai kinerja sebanyak 105.64% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 70.38% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatkan budaya baca pelajar dan masyarakat, dengan pencapaian kinerja sebanyak 126.19%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 91.53%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 117. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	105,64	70,38	29,62
2	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	126,19	91,53	8,47
3	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	100,08	87,81	12,19
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	114,29	92,62	7,38
4	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	140,95	65,45	34,55
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	118,20	91,41	8,59
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	120,00	90,37	9,63
		Angka laju pertumbuhan penduduk	125,98	95,34	4,66
5	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	126,57	88,70	11,30
6	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	290,00		100,00
7	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	135,14	96,39	3,61
		Persentase Kelurahan Layak anak	100,00	99,85	0,15
8	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	129,33	90,40	9,60
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100,00	88,18	11,82
9	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	10.607,22	98,21	1,79
10	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	100,00	95,08	4,92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
11	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	160,21	98,59	1,41
12	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	102,81	95,12	4,88
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	109,31	0,00	100,00
13	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	110,24	97,80	2,20
15	Meningkatnya infrastruktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	100,00	98,72	1,28
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	120,20	98,48	1,52
15	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	112,30	95,73	4,27
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	100,00	99,74	0,26
		Indeks Kepuasan masyarakat	100,83	97,86	2,14
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	100,00	99,02	0,98

BAB 4 PENUTUP

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Pemkab Banjar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi pemkab Banjar dan bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2018), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.

Berikut hasil pengukuran sasaran indicator kinerja dari setiap sasaran yang telah tercapai target kinerjanya :

- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya angka partisipasi sekolah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.

- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya mitigasi bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya investasi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan kinerja perusahaan daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.

- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya infrastuktur perhubungan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal; menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan trend pencapaiannya dari tahun 2016 ke tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil, namun juga melihat ada beberapa sasaran indikator kinerja yang trend pencapaiannya belum memenuhi target kerjanya, yaitu :

- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Tinggi**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sedang**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Rendah**.
- Hasil pencapaian kinerja sasaran Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Sangat Rendah**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab 3 dan, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemkab Banjar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2018, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya serta pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link webmonev untuk pelaporan kinerja triwulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemkab Banjar ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang. Peran Pemkab Banjar diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemkab Banjar dengan berbagai unsur baik instansi/organisasi pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Banjar, daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif dan iklim investasi yang kondusif, perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan dan terciptanya ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemkab Banjar sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKJIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemkab Banjar untuk



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Jend A.Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. 0511 4772500 Martapura
Kode Pos 70613 Kalimantan Selatan
www.inspektorat.banjarkab.go.id; E-mail : inspektoratbanjar@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banjar

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Martapura, 21 Maret 2019
Inspektur Kabupaten Banjar,



H.Muhammad Rusdi,ST,MT
NIP. 19680723 199503 1 002



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 359/KUM/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 603 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), mempertajam pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu adanya Perubahan Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 603 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 603 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI BANJAR,



H. KHALILURRAHMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	Persen	Jumlah kawasan yang diberdayakan agar lebih berkemajuan dan menjadi contoh dalam pengamalan nilai-nilai luhur dari sejumlah kampung/desa yang akan dinyatakan sebagai kawasan santri (9 kawasan)	$\frac{Jk}{TJk} \times 100\%$ Jk = Jumlah Kawasan Rencana, TJk = Total Jumlah Kawasan (9)	DPMD, Dinas Pendidikan, Disbudpar, Diskominfotisan serta SKPD terkait	Program Kawasan Santri Cerdas
	Penurunan Jumlah kasus kriminal	Kasus	Jumlah penurunan kasus kasus tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun berikut dan setelah tahun berikutnya.	600 kasus kriminal pada tahun awal menjadi 580 kasus pada tahun ke berikutnya dan berkurang setiap 20 kasus setelah tahun tahun berikutnya	Kesbangpol	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
	Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	Rp	Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dari Muzakki / masyarakat dan disalurkan kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat.	Rp.200.000.000 pada tahun awal dan meningkat dengan tambahan Rp. 100.000.000 di tahun berikutnya	Setda Bag. Kesra	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	Persen	Jumlah peserta didik lulus/tamat belajar pada jenjang SD/SMP yang dapat membaca Al Qur'an dengan benar sesuai kaidah Tajwid terhadap Jumlah Seluruh Peserta didik SD/SMP yang lulus /tamat belajar pada tahun bersangkutan	$\frac{JSQ}{TJSL} \times 100\%$ JSQ = Jumlah Siswa Bisa Baca Tulis Al Quran, TJSL = Total Jumlah Siswa Lulus pada tahun bersangkutan	Dinas Pendidikan	Program pendidikan Dasar
Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	Kasus	Jumlah penurunan kasus kasus pelanggaran perda bernuansa agama yang terjadi di masyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun setelahnya	Angka Jumlah Pelanggaran diturunkan dibawah 20 pelanggaran setiap tahun	Satpol PP	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)		Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.	$\frac{\text{Jumlah murid SD sederajat usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$	Urusan Pendidikan	Program wajib belajar 9 tahun
	APM SD / MI / SDLB	Persen				
	APM SMP / MTs / SMP LB	Persen		$\frac{\text{Jumlah murid SMP sederajat usia 13 - 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$	Urusan Pendidikan	Program pendidikan non formal
	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Proporsi anak sekolah aktif pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu.	$\frac{\text{Jumlah murid SD sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
	APK SD / MI / SDLB	Persen				
APK SMP / MTs / SMP LB	Persen		$\frac{\text{Jumlah murid SMP sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan	
Angka Putus Sekolah (APtS)		Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan	
APtS SD / MI / SDLB	Persen					
APtS SMP / MTs / SMP LB	Persen		$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100$	Dinas Pendidikan		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sudah dijalani	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas} \times \text{lama pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah sekolah atau telah berijazah}} \times 100$	Dinas Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	Proporsi anak mengikuti pendidikan usia dini aktif pada jenjang pendidikan usia dini terhadap penduduk pada kelompok usia pendidikan usia dini.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Program pendidikan anak usia dini
Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	Persen	Kunjungan ke Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling	$\frac{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah pengunjung tahun } n - 1} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen	Perbandingan antara kelompok seni budaya lokal yang dibina dengan jumlah seluruh kelompok seni dan budaya lokal	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina}}{\text{Jumlah kelompok seni dan budaya lokal}} \times 100\%$	Disbudpar	Program pengelolaan keragaman budaya
	Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	Keg	Jumlah kegiatan kebudayaan yang mengandung unsur penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama Religi adalah internalisasi dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini dalam bentuk ketaatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari	Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang Bernuansa Religi	Disbudpar	Program pengelolaan kekayaan budaya
						Program Pengembangan nilai budaya,
Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh	Jumlah kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 100.000 kelahiran hidup (sumber data dari fasilitas kesehatan yang dikonversi).	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu melahirkan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program obat dan perbekalan kesehatan
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 kh	Jumlah kematian bayi dalam kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan menggunakan konstanta per 1.000 kelahiran hidup (sumber data dari fasilitas kesehatan yang dikonversi).	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi disatu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program upaya pelayanan kesehatan di puskesmas Program pelayanan kontrasepsi
	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen	Penduduk wanita usia antara 15 - 19 tahun yang pernah melahirkan atau sedang mengalami hamil anak pertama.	$ASFR = \frac{B_i}{P_i} \times 1.000$ Keterangan: B _i = Jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke i P _i = Jumlah wanita kelompok usia i i = Kelompok usia 15-19 tahun	Dinas P2KBP3A	Program perbaikan gizi masyarakat Program pengendalian penyakit tidak menular

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen	Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya	$P_t = P_0 e^{rt} \text{ atau } r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_0} \right)$ <p>Keterangan: P_t = Jumlah penduduk pada tahun t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = jangka waktu r = laju pertumbuhan penduduk</p>	Dinas P2KBPA	Program kesehatan reproduksi remaja
Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Persen	Perbandingan berat badan dan umur. Gizi buruk dan kurang jika mempunyai nilai Z score kurang dari 2 SD.	<i>Jumlah balita gizi buruk dan kurang disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah seluruh balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100$	Dinas Kesehatan	
Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen	Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu) adalah pusat bimbingan pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera (Depkes RI 2002). Jumlah Posbindu ideal adalah 1 desa 1 Posbindu PTM	$\frac{\text{Jumlah Posbindu PTM Purnama dan Mandiri}}{\text{Jumlah Posbindu PTM aktif}} \times 100$	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Persentase pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan pelayanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan	$\frac{\text{Jumlah dokumen SOP yang sesuai dibuat}}{\text{Jumlah seluruh dokumen SOP yang harus dipenuhi}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (RSUD)	Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	$\frac{\text{Jumlah penerima pelayanan yang menyatakan memenuhi harapan pada pengukuran kuantitatif dan kualitatif}}{\text{Jumlah seluruh penerima pelayanan pada saat pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif}} \times 100$	Dinas Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan Program bina upaya kesehatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan}}{\text{Jumlah seluruh angkatan kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program pelayanan pelatihan kerja
Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar,) yang mendapatkan pelayanan.	$\frac{\text{Jumlah PMKS (Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar,) yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah (Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, Orang Terlantar,) yang terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program pembinaan anak terlantar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Penyandang Disabilitas/Cacat dan Eks Trauma

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	Penyelesaian kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.	$\frac{\text{Jumlah penanganan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tuntas dan ditutup kasusnya}}{\text{Jumlah pengaduan masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan dan ditangani.}} \times 100$	Dinas P2KBP3A	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	Persentase Kelurahan Layak anak	Persen	Kelurahan layak anak adalah kelurahan yang memenuhi 31 indikator	$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria layak anak}}{\text{Jumlah seluruh kelurahan}} \times 100$	Dinas P2KBP3A	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen	Pengurangan Resiko Bencana meliputi manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiap-siagaan bencana	Wilayah terdampak bencana / Luas Wilayah X 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pasca Bencana
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Tanggap Darurat
					Dinas PUPR	Program Pengendalian Banjir
	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Persen	Kemampuan Daerah untuk menanggulangi dampak bencana yang terjadi	Kejadian Bencana yang ditanggulangi / Seluruh Kejadian Bencana X 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pasca Bencana
Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen	Pemuda adalah penduduk dengan usia 16-30 tahun. Pembinaan kepemimpinan adalah pelatihan dan kegiatan sejenis nya yang berorientasi pada pembentukan karakter pemuda.	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh pemuda}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program peningkatan peran serta ke pemudaan
Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	Persen	Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga salah satu atau lebih yaitu Lapangan Sepak Bola, Lapangan Volley, Lapangan Futsal atau Lapangan Bulu Tangkis	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga}}{\text{Jumlah seluruh desa dan kelurahan}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah	Ton	Jumlah output atau hasil panen padi sawah dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam.	$\text{Produksi Padi Sawah (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Produksi komoditas prioritas padi ladang	Ton	Jumlah output atau hasil panen padi ladang dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam.	$\text{Produksi Padi Ladang (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	Produksi karet	ton	Jumlah output atau hasil panen karet dari luas lahan pekebun selama satu kali musim tanam.	$\text{Produksi Karet (Ton)} = \sum_{i=1}^n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	Produktivitas komoditas prioritas padi sawah	Kw/Ha	Produksi padi sawah per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusahatani padi sawah.	$\text{Produktivitas Padi Sawah} = \frac{\text{Produksi Padi Sawah (Kwintal)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Produktivitas komoditas prioritas padi ladang	Kw/ha	Produksi padi ladang per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha padi ladang.	$\text{Produktivitas Padi Ladang} = \frac{\text{Produksi Padi Ladang (Kwintal)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
	Produktivitas karet	Ton/Ha	Produksi karet per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha karet.	$\text{Produktivitas Karet} = \frac{\text{Produksi Karet (Kwintal)}}{\text{Luas Lahan (Ha)}}$	Dinas Peternakan dan Perkebunan	
	Persentase Kelompok tani madya	persen	Persentase Kelompok Tani Kelas Madya yang ada di Kabupaten Banjar selama kurun waktu 1 tahun	$\text{Kelompok Tabu Kelas Madya} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Madya (Kelompok)}}{\text{Total Kelas Kelompok Tabu (Kelompok)}}$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi	persen	Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun.	$\text{Persentase luasan pertanian yang terlayani air irigasi} = \frac{\text{Luas lahan pertanian terlayani air irigasi (Ha)}}{\text{Luas Lahan Pertanian Total (Ha)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Populasi sapi	(ekor)	Jumlah populasi sapi (ekor) yang ada di Kabupaten Banjar.	$\text{Produksi Sapi (Ekor)} = \sum_n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Jumlah produksi ikan budidaya	ton	Jumlah output atau hasil panen ikan budidaya.	$\text{Produksi Ikan Budidaya (Ton)} = \sum_n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	Jumlah output atau hasil panen ikan tangkap	$\text{Produksi Ikan Tangkap (Ton)} = \sum_n Q_i + Q_j + \dots + Q_n$	Dinas Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Jumlah konsumsi ikan	kg/kapita	Banyaknya konsumsi ikan per orang	Jumlah konsumsi ikan per orang = Jumlah konsumsi ikan (kg) / orang	Dinas Perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	persen	Persentase peningkatan jenis produk pengolahan hasil perkebunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	Jumlah produksi olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah produksi olahan hasil perikanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun	Dinas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/kapita/hr	Ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan kalori dan BDD (Bagian yang Dapat Dimakan).	$\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/ Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD} / 100$	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/hr	Ketersediaan pangan per kapita per hari berdasarkan kandungan protein x BDD (Bagian yang Dapat Dimakan).	$\text{Ketersediaan pangan/Kapita/ Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}$		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor	Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah.	a) Energi Pangan = total energi yang dikonsumsi dari masing-masing bahan pangan. b) % energi = nilai energi setiap golongan / energi total untuk semua golongan. c) %Angka Kecukupan Energi = % energi / angka kecukupan energy (2000 kkal) x 100. d) angka kecukupan energi (AKE) jumlah bobot untuk setiap golongan pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani). e) Skor aktual energi setiap golongan bahan pangan = %AKE setiap golongan bahan pangan X Bobot setiap golongan bahan pangan.		
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)	persen	Pertumbuhan tahunan dari investasi atau bisnis dalam suatu periode dengan menggunakan metode perhitungan CAGR (compound annual growth rate) atau Laju Pertumbuhan Investasi Majemuk Tahunan.	$CAGR = \left(\frac{\text{Nilai Akhir}^{\text{Jumlah Tahun}}}{\text{Nilai Awal}} \right)^{\frac{1}{\text{Jumlah Tahun}}} - 1$	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	Opini	Opini Audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.	Hasil Opini Audit: a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>). b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (<i>Modified Unqualified Opinion</i>). c) Opini Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>). d) Opini Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>). e) Opini Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer of opinion</i>).	Perusahaan dan usaha daerah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya kualitas lingkungan	Tersedianya system pengangkutan sampah	persen	Persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan Sampah}}{\text{Jumlah total Penduduk}} \times 100\%$ □	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Persentase Penyediaan RTH Publik	persen	Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang akhir tahun pencapatan SPN - Luasan RTH publik yang terwujud}}{\text{wilayah perkotaan - Luasan RTH Publik yang seharusnya 20% dari luas kabupaten}} \times 100\%$		Program Pengelolaan RTH
	Kualitas air	Tercemar /tidak tercemar	Persyaratan yang menggambarkan kualitas dari air baku (air bersih), meliputi syarat fisika, kimia, biologis dan radiologis.	Dianalisis berdasar syarat fisika, kimia, biologis dan radiologis.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Kualitas udara	Tercemar /tidak tercemar	Kualitas udara yang dihitung berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang ISPU: a. 0 - 50 = Baik; dimana tingkat kualitas udara tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika. b. 51 - 100 = Sedang; dimana tingkat kualitas udara tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. c. 101 - 109 = Tidak Sehat; dimana tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan bagi kesehatan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetika. d. 200 - 209 = Sangat Tidak Sehat; dimana tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi terpapar. e. 300 - Lebih = Berbahaya; dimana tingkat kualitas udara berbahaya dapat merugikan bagi kesehatan serius.	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang ISPU: a. 0 - 50 = Baik; b. 51 - 100 = Sedang; c. 101 - 109 = Tidak Sehat; d. 200 - 209 = Sangat Tidak Sehat; e. 300 - Lebih = Berbahaya.	Badan Lingkungan Hidup	
Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif.	persen	Koperasi aktif yaitu koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan RAT atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah Koperasi yang terdaftar}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	persen	batasan antara usaha mikro dan usaha kecil adalah ; usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Sedangkan usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil}}{\text{jumlah total usaha mikro}} \times 100 \%$		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	Persen	Pendapatan Perkapita pada kawasan transmigrasi tahun perhitungan dikurangi pendapatan perkapita dikawasan transmigrasi tahun sebelumnya	Pendapatan Perkapita Tahun Perhitungan - Pendapatan Perkapita Tahun Sebelumnya / Pendapatan Perkapita Tahun Sebelumnya x 100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	Jumlah nilai ekspor karet.	USD	Karet merupakan komoditas yang sangat potensial di Kab. Banjar, diharapkan dengan meningkatnya nilai ekspor karet dari Kab. Banjar dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat khususnya para petani karet	Nilai ekspor produksi karet secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun dengan mata uang dolar Amerika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Persentase Desa Berkembang	Persen	Status desa didasarkan pada klasifikasi dalam Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	$\frac{\text{Jumlah Desa Berkembang}}{\text{Jumlah Desa di Kab. Banjar}} \times 100 \%$	Dinas PMD	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	orang	peningkatan wisatawan lokal yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan	$\frac{\text{Jumlah seluruh wisatawan lokal yang berkunjung pada tahun bersangkutan (n) dikur ang jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100 \%$	Dinas Budpar	Program Pengembangan Pariwisata

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Peningkatan wisatawan mancanegara	orang	peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung pada sejumlah lokasi wisata yang ditentukan	$\frac{\text{Jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun bersangkutan (n) dikurangi jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$		
Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	persen	Membandingkan pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan pada tahun berjalan dengan rencana Tata Ruang Daerah yang sudah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah ijin yang diterbitkan yang sesuai dengan rencana pemanfaatan}}{\text{Jumlah seluruh ijin pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	persen	Jalan dengan kondisi mantap adalah jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 dengan kecepatan normal dan aman	$\frac{\text{Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	Jembatan dengan kondisi baik adalah jembatan yang dapat dilewati dengan aman oleh kendaraan maupun orang sesuai dengan kelas dan tipe jembatan	$\frac{\text{Jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Jembatan}} \times 100\%$		
Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	persen	terlaksananya pengujian terhadap kelayakan angkutan umum sesuai dengan standar	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang diuji}}{\text{Jumlah seluruh angkutan umum}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya infrastruktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	persen	Berfungsinya terminal dan dermaga yang menjadi kewenangan kabupaten.	$\frac{\text{Jumlah terminal dan dermaga yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh terminal dan dermaga}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
			Berfungsi dengan baik dimaksudkan yaitu terminal dan dermaga dapat dimanfaatkan untuk memuat dan menurunkan orang dan barang serta sebagai tempat istirahat			
	Cakupan layanan internet dan telepon seluler	persen	tersedianya akses internet dan telepon seluler di seluruh desa dan kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang dapat mengakses internet dan telepon seluler}}{\text{Jumlah seluruh desa dan kelurahan}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	persen	Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar Kementerian PUPR	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	persen	Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan air minum	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	persen	Penjumlahan dari nilai rata-rata prestasi kerja dari setiap SKPD dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD yang ada di kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah Nilai rata-rata prestasi kerja SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	BKPSDM	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	persen	Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin yang berakibat adanya sanksi bagi PNS dibandingkan Jumlah seluruh PNS di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$		
	Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	persen	Jumlah Pejabat yang memiliki kompetensi yaitu kemampuan sesuai dengan jenjang kepangkatan, pendidikan, pengalaman dan lainnya dalam menjalankan jabatan yang diembankan dibandingkan jumlah jabatan yang ada dalam seluruh SOTK perangkat daerah di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah kompetensi pejabat yang sesuai dengan jabatannya}}{\text{Jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	persen	Jumlah kasus hukum PNS yaitu bantuan dari LKBH terhadap PNS yang sedang menghadapi masalah hukum dibandingkan dengan keseluruhan jumlah PNS yang bermasalah hukum	$\frac{\text{Jumlah kasus hukum PNS yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus hukum PNS}} \times 100\%$		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan
	Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	persen	jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibandingkan dengan jenis diklat yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan diklat	$\frac{\text{Jenis diklat yang ada}}{\text{Jenis diklat yang dibutuhkan}} \times 100\%$		Program pendidikan kedinasan
	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	persen	jumlah aparatur desa yakni perangkat desa yang terdiri dari Pambakal, sekdes, kaur, ka RT yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan jumlah aparat desa se Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dengan kualitas baik}}{\text{Jumlah aparat desa se - Kab. Banjar}} \times 100\%$	Dinas PMD	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	persen	realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan maupun fisik yang dilaporkan setiap SKPD dibandingkan dengan rencana yang akan dicapai	$\frac{\text{Realisasi pelaksanaan kegiatan (fisik dan Keuangan)}}{\text{Perencanaan}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
	Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	persen	Sebagaimana Permendagri 54 Tahun 2010 : Harus ada sinkronisasi antar dokumen baik tingkat kabupaten maupun SKPD perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan	$\frac{\text{Jumlah total program - program yang ditetapkan dalam RRPD}}{\text{Jumlah total program - program yang telah ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program perencanaan pembangunan daerah
	Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RRPD	persen	Perencanaan topdown merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bappeda sebagai lembaga perencana. Oleh karenanya, dokumen perencanaan dan penganggaran harus mencerminkan aspirasi masyarakat	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RRPD}}{\text{Total Usulan Masy.}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program perencanaan pembangunan daerah
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	persen	Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan . Ketersediaan data statistik yang terbaru merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan	$\frac{\text{SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	BAPPELITBANG	Program perencanaan pembangunan daerah Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan ekonomi
	Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	persen	Jumlah pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD dibandingkan dengan Jumlah seluruh SKPD Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	DISKOMINFOTISAN	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dengan Media Massa.
	Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	persen	Jumlah bayi lahir yang berakte kelahiran di Kab. Banjar dibandingkan jumlah seluruh kelahiran yang ada di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran}} \times 100\%$	DISDUKCAPIL	Program keserasian kependudukan
	Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	persen	Jumlah penduduk yang memiliki KTP dan KIA dibandingkan keseluruhan Jumlah penduduk di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah Penduduk BerKTP + KIA}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$		Program penataan administrasi kependudukan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	persen	jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata dengan baik sesuai ketentuan pengarsipan dibandingkan dengan Jumlah seluruh SKPD Kab. Banjar	$\frac{\text{SKPD yang arsipnya sudah ditata}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infomasi
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Tingkat Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang diukur dan dinilai oleh BPKP	Level Tingkat Maturitas SPIP	INSPEKTORAT	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Tingkat Kapabilitas APIP diukur secara mandiri (self assessment) sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM), untuk selanjutnya diukur kembali oleh BPKP	Level Tingkat Kapabilitas APIP		
	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	persen	Jumlah temuan yang dilakukan oleh Inspektorat baik kegiatan rutin maupun insidental dan sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan keseluruhan temuan	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\%$		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
	Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	persen	Jumlah Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan Jumlah seluruh SKPD Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	INSPEKTORAT	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	persen	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan keseluruhan pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	DISKOMINFOTISAN SETDA (BAG. HUMAS)	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dengan Media Massa. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan diukur dan dinilai oleh BPK berdasarkan tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai opini BPK atas pengelolaan keuangan Kab. Banjar	BPKAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	persen	jumlah penerimaan asli daerah Kab. Banjar pada tahun berjalan dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penerimaan daerah Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Penerimaan APBD}}$	Badan Pendapatan Daerah DPMPPTSP	
	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	persen	Jumlah capaian pengelolaan keuangan desa dibandingkan dengan Jumlah seharusnya capaian kinerja pengelolaan keuangan desa	$\frac{\text{Jumlah capaian pengelolaan keuangan desa}}{\text{Jumlah seharusnya capaian kinerja pengelolaan keuangan desa}} \times 100\%$	Dinas PMD	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	persen	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang dilakukan oleh Satpol-PP Kab. Banjar dibandingkan dengan Jumlah peraturan yang harus ditegakan	$\frac{\text{Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati}}{\text{Jumlah Peraturan yang harus ditegakan}} \times 100\%$	SATPOL-PP	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	persen	Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani oleh Satpol-PP Kab. Banjar dibandingkan dengan Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban}} \times 100\%$		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demôntrasi/ jumlah gejolak masyarakat)	persen	Jumlah mediasi/Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat dibandingkan dengan Jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat berupa unjuk rasa/Demontrasi/jumlah gejolak masyarakat	$\frac{\text{Jumlah mediasi/Fasilitasi Penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat}}{\text{Jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat}} \times 100\%$	BAKESBANGPOL	
	Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	persen	Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kab. Banjar dibandingkan dengan Jumlah Produk hukum yang diusulkan.	$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan}}{\text{Jumlah Produk Hukum}} \times 100\%$	SET DPRD	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah
	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	persen	Jumlah rapat DPRD Kab. Banjar yang dilaksanakan tepat waktu dibandingkan dengan keseluruhan rapat DPRD Kab. Banjar yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah rapat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah rapat dewan}} \times 100\%$		
	Persentase peraturan yang dibuat	persen	Jumlah Perda yang telah ditetapkan dibandingkan dengan jumlah prolegda yang telah dibuat	$\frac{\text{Jumlah Perda ditetapkan}}{\text{Jumlah prolegda}} \times 100\%$	SETDA (BAG. HUKUM)	Program penataan peraturan perundang-undangan
	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	persen	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan dilihat dari ketentuan setiap desa/kelurahan harus memiliki linmas dibandingkan dengan jumlah seluruh Desa dan Kelurahan di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah Linmas Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$	SATPOL-PP	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	persen	Jumlah FKDM /FKUB tingkat kab/kec/desa dan kelurahan yang aktif dibandingkan dengan Jumlah kab/kec/desa dan kelurahan di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah FKDM/FKUB tingkat kab/kec/desa dan kelurahan yang aktif}}{\text{Jumlah Kab/ Kec /Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$	BAKESBANGPOL	Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi	persen	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib yang terpenuhi dibandingkan dengan Jumlah SPM	$\frac{\text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\text{Jumlah SPM}} \times 100\%$	SETDA (BAG. ORGANISASI)	Program peningkatan kapasitas dan penataan kelembagaan daerah
	Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	persen	Jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja dibandingkan dengan keseluruhan Jumlah SKPD di Kab. Banjar	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang sesuai dengan beban kerja}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$		
	Persentase kelengkapan administrasi desa	persen	Administrasi Desa dikatakan lengkap apabila telah memenuhi 60% kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah desa dengan Administrasi Desa Lengkap / Jumlah Seluruh Desa x 100	Dinas PMD	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	persen	Merupakan perbandingan antara pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang masuk yang ditindaklanjuti dengan seluruh pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang masuk	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan}} \times 100\%$	DPMPSTP	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
	Indeks Kepuasan masyarakat (Perijinan)	angka	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perijinan diukur melalui survey yang dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan perijinan	angka IKM pelayanan perijinan		Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM
			URAIAN/DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA/UNIT TERKAIT	
	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	persen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan yakni PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan)	Nilai SKM PATEN	SETDA (BAG. PEMERINTAHAN)	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

BUPATI BANJAR,

H. KHALILURRAHMAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KHALILURRAHMAN
Jabatan : BUPATI BANJAR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target yang menjadi bagian kinerja rencana jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Martapura, Januari 2018
Bupati Banjar,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Khalilurrahman', written in a cursive style.

H. KHALILURRAHMAN

INDIKATOR RPJMD KABUPATEN BANJAR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan	Persen	30
		Penurunan Jumlah kasus kriminal	Kasus	145
		Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	Rp	280.000.000
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al-Qur'an	Persen	94
3	Berkurangnya pelanggaran perda kearifan lokal	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal	Kasus	10
4	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	96,27
		• APM SD / MI / SDLB		65,66
		• APM SMP / MTs / SMPLB	Persen	120,7
		Angka Partisipasi Kasar (APK)		94,2
		• APK SD / MI / SDLB	Persen	0,25
		• APK SMP / MTs / SMPLB		0,84
		Angka Putus Sekolah (APtS)	Tahun	7,07
		• APtS SD / MI / SDLB	Persen	68,12
• APtS SMP / MTs / SMPLB	Persen	68,12		
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,07		
Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	68,12		
5	Meningkatnya budaya baca pelajar dan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah	Persen	4,2
6	Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Persen	85
		Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi	Keg	7
7	Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kh	158,0
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000 Kh	12,2
		Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Persen	40
		Angka laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,04
8	Menurunnya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang	Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang	Persen	24,16
9	Terkendalnya faktor risiko penyakit tidak menular	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri	Persen	≥ 30
10	Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	630
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
11	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	2,53
12	Meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani	Persen	73
13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	74
		Persentase Kelurahan Layak anak	Persen	15,4
14	Meningkatnya mitigasi bencana	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Persen	60
		Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	Persen	100
15	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan	Persen	0,8
16	Meningkatnya perilaku berolah raga di masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.	Persen	60,34
17	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	Produksi komoditas prioritas padi sawah	Ton	248,015
		Produksi komoditas prioritas padi ladang	Ton	30,151
		Produksi karet	Ton	21268,69
		Produktifitas komoditas prioritas padi sawah	Kw/Ha	45.76
		Produktifitas komoditas prioritas padi ladang	Kw/Ha	32.45
		Produktifitas karet	Kg/Ha	1,291
		Persentase Kelompok tani madya	Persen	3,19
		Persentase luasan pertanian yang terlayani air Irigasi	Persen	80,00
		Populasi sapi	(Ekor)	17200,00
		Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	55,000
		Jumlah produksi ikan tangkap	Ton	11,492
		Jumlah konsumsi ikan	Kg/Kapita	50,00
18	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan	Persen	35
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Ton	720,00
19	Meningkatnya ketersediaan dan	Ketersediaan Energi	K.Kal/Kap/Hr	3640
		Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hr	103,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
	pola konsumsi pangan masyarakat	Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	Skor	90,5
20	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN)	Persen	85,00
21	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Opini akuntan publik	Opini	WTP
22	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase sampah yang terolah di TPA	Persen	100,00
		Rasio luasan RTH Publik sebesar 20persen dari luas kawasan perkotaan	Persen	1,60
		Kualitas air	Tercemar/Tidak Tercemar	Tidak Tercemar
		Kualitas udara	Tercemar/Tidak Tercemar	Tidak Tercemar
23	Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	Persentase koperasi aktif.	Persen	64,5
		Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,25
		Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi	Persen	20
		Jumlah nilai ekspor karet.	USD	509.018.168,29
		Persentase Desa Berkembang	Persen	60
24	Mengembangkan kepariwisataan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan wisatawan lokal	Orang	1920415,00
		Peningkatan wisatawan mancanegara	Orang	5
25	Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persen	57,50
26	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	70,00persen (546,97 Km)
		Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	90,32persen (264 Unit)
27	Meningkatnya cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika;	Persentase pengujian kendaraan bermotor	Persen	85
28	Meningkatnya infrastuktur perhubungan	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik	Persen	100
		Cakupan layanan internet dan telepon seluler	Persen	76,54

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
29	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;	Cakupan rumah layak huni	Persen	97,06
30	Meningkatnya pengelolaan air minum secara optimal;	Cakupan air minum	Persen	65,18
31	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD	Persen	100,00
		Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen	0,10
		Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persen	100,00
		Persentase kasus hukum PNS yang ditangani	Persen	100
		Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan	Persen	100,00
		Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	Persen	71,12
32	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	Persen	75.50
		Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD	Persen	100,00
		Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	Persen	45
		Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi	Persen	60
		Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD	Persen	80,00
		Persentase cakupan Kepemilikan kutipan akta kelahiran	Persen	63
		Persentase Kepemilikan KTP dan atau KIA	Persen	96
		Persentase SKPD yang arsipnya sudah ditata	Persen	57.14
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	2
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	Persen	80,00
		Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	75,76

No.	Sasaran	Indikator Kinerja (Indikator Sasaran)	Satuan	Target Th. 2018
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi	Persen	100,00
		Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK	WTP
		Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah	Persen	99
		Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	Persen	79,40
		Prosentasi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	Persen	85,00
		Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	85,00
		Persentase Mediasi/ Fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat (jumlah unjuk rasa/ Demonstrasi/ jumlah gejala masyarakat)	Persen	100
		Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan	Persen	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Persen	100
		Persentase peraturan yang dibuat	Persen	75,00
		Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan	Persen	85,00
		Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan	Persen	44,48
		33	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Persentase SPM yang terpenuhi
Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	Persen			75
Persentase kelengkapan administrasi desa	Persen			71,12
34	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	Persen	100
		Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	81.90
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Persen	30

	Program		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	76.382.230.496,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	24.568.899.830,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	800.570.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	5.095.400.045,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	3.580.324.395,00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	4.046.649.076,00
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	34.319.936.150,00
8	Program Pendidikan Non Formal	Rp	13.377.018.600,00
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	5.174.672.100,00
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	1.522.883.900,00
11	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	370.130.000,00
12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	6.677.490.000,00
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	17.066.755.258,00
14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	1.108.235.850,00
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	1.211.737.000,00
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	1.377.188.000,00
17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	889.220.000,00
18	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp	18.115.000,00
19	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rp	2.385.000.000,00
20	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp	3.824.328.200,00
21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	114.160.000,00
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp	130.793.600,00
23	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp	4.885.314.000,00
24	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Rp	11.512.106.405,00
25	Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp	4.154.000.586,00
26	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp	770.700.000,00
27	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp	82.603.674.726,00
28	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp	13.714.288.810,00
29	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rp	9.721.300.000,00
30	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp	23.117.000.000,00
31	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	6.061.565.000,00
32	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rp	3.895.988.000,00
33	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	38.030.300.000,00
34	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rp	1.500.000.000,00
35	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Rp	106.800.000,00
36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	61.995.000,00

	Program		Anggaran
37	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	21.442.170.000,00
38	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	500.000.000,00
39	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	15.815.656.700,00
40	Program Pengendalian Banjir	Rp	750.000.000,00
41	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	9.359.426.320,00
42	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp	29.555.411.500,00
43	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp	1.190.760.000,00
44	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	2.645.111.540,00
45	Program Pemanfaatan Ruang	Rp	180.850.440,00
46	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	2.251.986.760,00
47	Program Pengembangan Perumahan	Rp	15.658.482.352,00
48	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp	1.457.195.850,00
49	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	4.111.678.000,00
50	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	236.229.157,00
51	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	304.500.000,00
52	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp	1.119.509.026,00
53	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	410.765.200,00
54	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Rp	397.215.000,00
55	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp	475.657.500,00
56	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	710.260.000,00
57	Program Pasca Bencana	Rp	555.740.000,00
58	Program Tanggap Darurat	Rp	773.535.000,00
59	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp	69.921.550,00
60	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	607.532.000,00
61	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	838.002.590,00
62	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp	88.172.700,00
63	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	272.841.000,00
64	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp	140.797.000,00
65	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	554.100.000,00
66	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	261.139.000,00
67	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	516.954.300,00
68	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	319.738.000,00
69	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	257.150.000,00
70	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Rp	507.285.000,00

	Program		Anggaran
	dan Anak		
71	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	66.885.000,00
72	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rp	693.690.000,00
73	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	13.423.219.690,00
74	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.295.550.000,00
75	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	49.736.000,00
76	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	1.137.872.800,00
77	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	173.010.000,00
78	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	4.607.513.480,00
79	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	4.983.550.220,00
80	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	742.278.500,00
81	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp	242.130.000,00
82	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	673.495.000,00
83	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	975.000.000,00
84	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Rp	50.000.000,00
85	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Rp	702.496.222,00
86	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	500.000.000,00
87	Program Keluarga Berencana	Rp	1.178.900.900,00
88	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	222.284.100,00
89	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	7.469.000,00
90	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp	478.248.900,00
91	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp	81.779.000,00
92	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp	1.225.749.700,00
93	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	991.220.100,00
94	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	493.276.400,00
95	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp	379.635.000,00
96	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp	443.033.700,00
97	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp	245.650.000,00
98	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rp	2.745.744.900,00
99	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	Rp	327.360.000,00
100	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	266.385.000,00
101	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha	Rp	306.683.500,00

	Program		Anggaran
	Mikro Kecil Menengah		
102	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	315.741.000,00
103	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	623.620.000,00
104	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	1.426.468.000,00
105	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp	300.000.000,00
106	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp	1.571.500.000,00
107	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp	115.827.945,00
108	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp	1.213.638.680,00
109	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp	432.855.000,00
110	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp	50.000.000,00
111	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	387.929.328,00
112	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	1.190.099.625,00
113	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	250.000.000,00
114	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp	33.468.000,00
115	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp	191.876.000,00
116	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Rp	15.805.000,00
117	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp	25.692.000,00
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Rp	42.752.000,00
119	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Rp	47.330.000,00
120	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Rp	33.763.000,00
121	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	463.142.191,00
122	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	92.855.000,00
123	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	214.915.000,00
124	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Rp	78.000.000,00
125	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	505.019.500,00
126	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	345.835.300,00
127	Program Pengembangan Kemitraan	Rp	868.960.100,00
128	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp	8.015.016.670,00
129	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	752.159.760,00
130	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	330.723.680,00
131	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	298.173.920,00
132	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	5.179.990.805,00
133	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	672.066.400,00
134	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	1.180.500.000,00

	Program		Anggaran
135	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp	626.116.080,00
136	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp	1.978.450.000,00
137	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp	12.975.400.000,00
138	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	595.050.000,00
139	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp	228.000.000,00
140	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	3.855.772.000,00
141	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Rp	50.904.000,00
142	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp	727.203.000,00
143	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	2.331.024.800,00
144	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	634.503.200,00
145	Program Penataan Struktur Industri	Rp	1.001.700.000,00
146	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp	415.310.500,00
147	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp	2.822.688.200,00
148	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	16.212.679.307,00
149	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	302.415.120,00
150	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	206.560.000,00
151	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Rp	21.369.434.000,00
152	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	25.250.650.000,00
153	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp	3.614.126.000,00
154	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	1.396.018.000,00
155	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan	Rp	1.801.061.500,00
156	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	416.850.000,00
157	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp	13.200.000,00
158	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp	541.532.000,00
159	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp	1.933.081.500,00
160	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	32.745.000,00
161	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp	447.486.960,00
162	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	890.316.600,00
163	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	2.889.331.900,00
164	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	1.436.991.760,00
165	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp	3.117.354.920,00
166	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya	Rp	622.575.000,00

	Program		Anggaran
	Alam		
167	Program Pendidikan Kedinasan	Rp	1.999.109.600,00
168	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	5.555.274.170,00
169	Pembangunan, Pengembangan dan Kualifikasi Aparatur	Rp	1.941.468.500,00

Martapura, Januari 2018
Bupati Banjar,



H. KHALILURRAHMAN